

BAHAN AJAR
MATA KULIAH

SISTEM **SEKOLAH ISLAM TERPADU** **SEMESTER V TAHUN 2024/2025**

Prof. Dr. H. Ahmad Rusdiana, Drs., MM.



JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2024

SISTEM SEKOLAH ISLAM TERPADU

SEMESTER V TAHUN 2024/2025

Perkembangan organisasi mengalami perubahan yang sangat drastis dalam anatomi perubahan kehidupan masyarakat dimana perubahan dilihat dari era peramu hingga era pengetahuan dimana dalam era ini terjadi begitu banyak perubahan dalam dunia bisnis. Dengan perubahan ini menuntut adanya perubahan dari sumber daya manusia yang berada dalam organisasi ataupun organisasi/perusahaan dimana Sumber daya Manusia berdasarkan teori barat yang menganggap manusia sebagai unsur produksi semata yang di rangkai dalam 5M yaitu Man, Money, Machine, Material dan Methode. Melihat hal ini perlu adanya perubahan yang lebih baik bagi sumber daya manusia menjadi lebih baik. Dalam bagian ini dibahas tentang apa itu manusia bersumber daya dimana dalam hal ini lebih mengedepankan kedudukan dan peran manusia yang berbeda dalam rangkaian produksi. Psikologi organisasi merupakan cabang ilmu psikologi yang fokus pada studi perilaku manusia dalam konteks organisasi dan tempat kerja. Dalam dunia yang terus berubah ini, pendekatan baru terhadap psikologi organisasi menjadi penting, terutama dalam konteks manajemen pendidikan abad 21. Organisasi pendidikan, baik itu sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pelatihan, menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Meningkatnya kebutuhan akan efisiensi, adaptabilitas terhadap teknologi baru, serta fokus pada kesejahteraan dan pengembangan profesional staf membuat psikologi organisasi menjadi lebih relevan. Sekolah Islam Terpadu (SIT) saat ini menjadi salah satu lembaga pendidikan yang mendapat tanggapan luas dari komunitas Muslim Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan semakin banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke berbagai jenjang SIT, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA. Saat ini ada ribuan Sekolah Islam Terpadu berkumpul di bawah naungan Islam Terpadu Jaringan Sekolah (JSIT) dan juga banyak sekolah swasta yang dikembangkan oleh lembaga sosial dan yayasan organisasi keagamaan di Indonesia yang disebut Sekolah IT dan mengikuti sistem. Sekolah Islam Terpadu pada hakikatnya adalah sekolah yang menerapkan konsep Islam pendidikan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. bagian ini, mencoba menjawab beberapa pertanyaan tersebut Sekolah Islam Terpadu melalui perspektif Sejarah, Sosial dan Politik dan sebagai apisau bedah dari Sekolah Islam Terpadu Perspektif Multidisiplin dan Sekolah Islam Terpadu Sebagai Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam



JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2024/2025

BAHAN AJAR MATA KULIAH

SISTEM SEKOLAH ISLAM TERPADU

ISBN: XXX – XXX – XXXX –XX – X

Cetakan Pertama, September 2024

16 cm x 24 cm (L) 238 hlm +(i – v)

Penulis:

Prof. Dr. H. Ahmad Rusdiana, Drs., MM

Editor:

Tresna Nurhayati, M.Pd.

Desain *Cover* dan Tata letak:

M. Zaky Nurzaman

Diterbitkan oleh:

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN SGD Bandung

Pustaka Tresna Bhakti Bandung 2024

Hak Cipta dilindungi UU RI No 19/Th. 2002

Dilarang memperbanyak dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa seizin penerbit.

KATA PENGANTAR

Bahan Ajar/*Hand-out* merupakan bagian penting dalam mendukung optimalisasi pembelajaran, terlebih dalam suasana pembelajaran masa Covid-19 ini menuntut media pendukung yang memadai untuk digunakan sesuai dengan porsi pembelajaran yang baik dan tepat. Regulasi menuntut dosen untuk menyiapkan *Hand-out*, pada setiap pembelajaran. Penggunaan *han-dout* dalam pembelajaran memiliki beberapa fungsi. Seperti yang disampaikan oleh Steffen dan Peter Ballstaedt dalam Prastowo (2013: 80), bahwa fungsi *handout* antara lain adalah: (1) membantu peserta didik agar tidak perlu mencatat; (2) sebagai pendamping penjelasan pendidik; (3) sebagai bahan rujukan pesertadidik (4) memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar; (5) pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan; (6) memberi umpan balik; dan (7) menilai hasil belajar.

Adapun, tujuan penyusunan *handout* ini, antara lain: (1) untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta didik; (2) untuk memperkaya pengetahuan peserta didik; dan (3) untuk mendukung bahan ajar lainnya atau penjelasan dari dosen (4) Sebagai materi dalam intruksi *Google class room* dan LMS berbasis *e-Knows* UIN SGD Bandung.

Atas dasar itu, maka *handout* ini, berisi point-point penting dari materi pelajaran yang akan dipelajari sesuai RPS, antara lain; Paradigma Baru Sekolah Islam Terpadu (SIT) dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Abad 21; Konsep Dasar Sekolah Islam Terpadu; Perencanaan Program Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu; Dasar dan Strategi Pengembangan Program Sekolah Islam Terpadu; Pengembangan Kurikulum Kholistik Terintegratif; Pengembangan Pembelajaran terpadu Kholistik Terintegratif; Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan; Pengelolaan Peserta Didik Sekolah Islam Terpadu; Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Islam Terpadu; Pengelolaan Biaya Pendidikan Sekolah Islam Terpadu; Pengembangan Humas Sekolah Islam Terpadu dan Masyarakat; Pengelolaan Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu; Kosep Dasar Pengelolaan Sistem Informasi Sekolah Islam Terpadu; Evaluasi dan Penjaminan mutu Sekolah Islam Terpadu.

Berdasarkan fungsi dan tujuan penggunaan *hand-out* dalam pembelajaran maka hendaknya peserta didik mampu menggunakan bahan ajar *handout* ini secara bijak.

Bandung, 3 September 2024
Penyusun,

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
1. Paradigma Baru Sekolah Islam Terpadu (SIT) dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Abad 21	01 - 14
2. Konsep Dasar Sekolah Islam Terpadu	15 - 32
3. Perencanaan Program Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu	33 - 66
4. Dasar dan Strategi Pengembangan Program Sekolah Islam Terpadu	67 - 89
5. Pengembangan Kurikulum Kholistik Terintegratif	91 - 121
6. Pengembangan Pembelajaran terpadu Kholistik Terintegratif	123- 145
7. Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan	147-166
8. Pengelolaan Peserta Didik Sekolah Islam Terpadu	167-209
9. Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Islam Terpadu	211-234
10. Pengelolaan Biaya Pendidikan Sekolah Islam Terpadu	235-271
11. Pengembangan Humas Sekolah Islam Terpadu dan Masyarakat	273-295
12. Pengelolaan Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu	297-322
13. Kosep Dasar Pengelolaan Sistem Informasi Sekolah Islam Terpadu	323-340
14. Evaluasi dan Penjaminan mutu Sekolah Islam Terpadu	341-357
15. Profil Penulis	359-360

Part: 1

Paradigma Baru Sekolah Islam Terpadu (SIT) dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Abad 21

KEMAMPUAN AKHIR PEMBELAJARAN

Setelah mendapat materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu: Mengetahui dan memahami Paradigma Baru Sekolah Islam Terpadu (SIT) dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Abad 21

POKOK BAHASAN

1. Fenomena Sekolah Islam Terpadu dalam Manajemen Pendidikan Abad 21
2. Asumsi atau Teori Sekolah Islam Terpadu (SIT) Relevan dengan Manajemen Pendidikan Abad 21
3. GAP atau Masalah Sekolah Islam Terpadu (SIT) Relevan dengan Manajemen Pendidikan Abad 21
4. Pentingnya Mata Kuliah Sekolah Islam Terpadu (SIT) dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Abad 21 Lingkup Kajian Materi Sekolah Islam Terpadu (SIT)

TOPIK BAHASAN

Perkembangan organisasi mengalami perubahan yang sangat drastis dalam anatomi perubahan kehidupan masyarakat dimana perubahan dilihat dari era peramu hingga era pengetahuan dimana dalam era ini terjadi begitu banyak perubahan dalam dunia bisnis. Dengan perubahan ini menuntut adanya perubahan dari sumber daya manusia yang berada dalam organisasi ataupun organisasi/perusahaan dimana Sumber daya Manusia berdasarkan teori barat yang menganggap manusia sebagai unsur produksi semata yang di rangkai dalam 5M yaitu Man, Money, Machine, Material dan Methode. Melihat hal ini perlu adanya perubahan yang lebih baik bagi sumber daya manusia menjadi lebih baik. Dalam bagian ini dibahas tentang apa itu manusia bersumber daya dimana dalam hal ini lebih mengedepankan kedudukan dan peran manusia yang berbeda dalam rangkaian produksi. Psikologi organisasi merupakan cabang ilmu psikologi yang fokus pada studi perilaku manusia dalam konteks organisasi dan tempat kerja. Dalam dunia yang terus berubah ini, pendekatan baru terhadap psikologi organisasi menjadi penting, terutama dalam konteks manajemen pendidikan abad 21. Organisasi pendidikan, baik itu sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pelatihan, menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Meningkatnya kebutuhan akan efisiensi, adaptabilitas terhadap teknologi baru, serta fokus pada kesejahteraan dan pengembangan profesional staf membuat psikologi organisasi menjadi lebih relevan.

Sekolah Islam Terpadu (SIT) saat ini menjadi salah satu lembaga pendidikan yang mendapat tanggapan luas dari komunitas Muslim Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan semakin banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke berbagai jenjang SIT, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA. Saat ini ada ribuan Sekolah Islam Terpadu berkumpul di bawah naungan Islam Terpadu Jaringan Sekolah (JSIT) dan juga banyak sekolah swasta yang dikembangkan oleh lembaga sosial dan yayasan organisasi keagamaan di Indonesia yang disebut Sekolah IT dan mengikuti sistem. Sekolah Islam Terpadu pada hakikatnya adalah sekolah yang menerapkan konsep Islam pendidikan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. bagian ini, mencoba menjawab beberapa pertanyaan tersebut Sekolah Islam Terpadu melalui perspektif Sejarah, Sosial dan Politik dan sebagai apisau bedah dari Sekolah Islam Terpadu Perspektif Multidisiplin dan Sekolah Islam Terpadu Sebagai Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam

A. Fenomena Sekolah Islam Terpadu dalam Manajemen Pendidikan Abad 21

Sekolah Islam Terpadu (SIT) telah menjadi pilihan populer di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia, dengan peningkatan signifikan dalam jumlah siswa yang mendaftar di sekolah-sekolah ini dari tingkat TK hingga SMA. Fenomena ini mencerminkan keinginan orang tua untuk memberikan pendidikan berbasis Islam yang menyeluruh, yang tidak hanya mengutamakan aspek akademis tetapi juga pembinaan karakter dan spiritual sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks manajemen pendidikan abad ke-21, SIT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama tetapi juga berusaha untuk mengintegrasikan teknologi modern, pendekatan pengajaran inovatif, dan kurikulum yang relevan dengan tuntutan zaman. Keberadaan ribuan SIT di seluruh Indonesia, yang berada di bawah naungan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), menunjukkan betapa kuatnya dukungan komunitas terhadap model pendidikan ini. SIT menonjol karena model pendidikan terpadu yang diterapkannya, yang mencakup pengembangan intelektual, emosional, dan spiritual siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk generasi Muslim yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi dan kemampuan untuk berkontribusi secara positif di masyarakat. Pendidikan karakter menjadi salah satu fokus utama SIT, di mana nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan diajarkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sekolah.

Dalam manajemen pendidikan abad ke-21, yang diwarnai oleh perkembangan teknologi dan globalisasi, SIT berusaha untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia modern. Kurikulum SIT sering kali mencakup mata pelajaran teknologi informasi, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan komunikasi yang efektif, yang semuanya esensial dalam era digital saat ini. Selain itu, SIT juga berfokus pada pengembangan keterampilan kolaborasi dan kepemimpinan, yang penting dalam masyarakat yang semakin saling terhubung. Namun, meskipun fenomena SIT berkembang pesat, tantangan tetap ada dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi. SIT perlu terus beradaptasi dengan perubahan tuntutan pendidikan global, sambil tetap menjaga nilai-nilai Islam yang menjadi landasan pendidikan mereka. Manajemen SIT harus kreatif dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat, sambil tetap berkomitmen pada tujuan utama mereka: membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

1. Kondisi pendidikan di Indonesia

Kondisi pendidikan di Indonesia saat sekarang ini masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan dan kekurangan-kekurangan misalnya rendahnya mutu dan kualitas pendidikan kita dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

- a. Kompetensi dan kelayakan guru di semua jenjang, jenis, dan satuan pendidikan masih relatif rendah. Prestasi belajar siswa masih rendah. Menurut hasil studi *The Third International Mathematics and Science Study (IEA, 1999)* menunjukkan bahwa di antara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2. Prestasi siswa Indonesia berada pada urutan ke 33 negara untuk mata pelajaran IPA dan urutan ke 34 untuk mata pelajaran matematika.¹
- b. Kemudian menurut hasil studi IEA (*International Association For Evaluation of Education Achievement*) menunjukkan bahwa keterampilan membaca kelas IV SD siswa Indonesia berada pada tingkat terendah. Sebagai gambaran perbandingan skor rata-rata untuk membaca siswa SD adalah 75,5 (Hongkong), 74.0 (Singapura), 65.1 (Thailand), 52.6 (Filipina), dan 51.7 (Indonesia). Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan. Anak-anak Indonesia sukar sekali menjawab soal-soal bacaan yang memerlukan pemahaman/penalaran..²
- c. Berdasarkan hasil survey Bank Dunia (1998) melaporkan adanya sembilan faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, yaitu: (1) struktur intensif guru yang tidak mendukung bagi penyelenggaraan pengajaran yang efektif, (2) sedikitnya waktu untuk belajar siswa khususnya tingkat Sekolah Dasar kelas 1 dan 2; (3) tidak tersedianya sumber belajar pada sekolah yang memadai, (4) sebahagian besar guru tidak memenuhi syarat untuk mengajar bidang studi dan kurang memahami metode pengajaran yang baik, (5) rendahnya mutu buku pelajaran, (6) kurikulum yang sarat dan tidak terpadu, (7) system penilaian yang tidak efisien, (8) system manajemen kelembagan pendidikan yang tidak efektif, dan (9) manajemen sekolah yang tidak efisien, terutama tugas dan fungsi kepala sekolah....³

¹ Noeng Muhadjir, "Sekolah Islam Yang Efektif dan Bermutu Gagasan dan Implementasi" (Makalah, tanggal, 30 Juli 2003), 1.

² Noeng Muhadjir, "Sekolah Islam Yang Efektif, 2.

³ Noeng Muhadjir, "Sekolah Islam Yang Efektif

2. Keadaan sekolah-sekolah yang berada dalam ruang lingkup pendidikan “ Islam”

Bagaimana dengan keadaan sekolah-sekolah yang berada dalam ruang lingkup pendidikan “ Islam” yang ada di Indonesia. Sumarna Surapranata, (dalam Afrizal), menyebutkan bahwa dari 100 sekolah swasta terbaik di Indonesia, berdasarkan hasil EBTANAS atau UAN, prosentase sekolah yang berada di bawah Yayasan “ Islam” ternyata hanya berkisar antara 7% sampai dengan 12% saja. Bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di bawah yayasan “ Kristen” dan yayasan “ Nasional”.⁴

Dunia pendidikan Islam tengah mengalami kegagalan, yaitu "gagal memanusiakan manusia (humanisasi), gagal membentuk manusia sesuai dengan visi dan misi penciptaanya. Kegagalan ini berimplikasi pada proses pendidikan materialistis, jauh dari nilai-nilai Islam dan berkarakter lemah"⁵ Sehingga dari berbagai tantangan tersebut di atas; "dunia pendidikan sering dikritik oleh banyak masyarakat yang disebabkan perilaku pelajar maupun lulusannya yang menunjukkan sikap kurang terpuji. Para pelajar terlibat tawuran, pencurian, kriminal, kurang bermoral, sedangkan para pengangguran pada umumnya adalah lulusan akademik." ⁶

3. Reintegrasi Keilmuan Pendidikan Islam

Dikotomi (baca:spesialisasi) antara ilmu agama dan ilmu non-agama sebenarnya bukan hal yang baru. Islam telah mempunyai tradisi dikotomi ini lebih dari seribu tahun silam. "Tetapi dikotomi tersebut tidak menimbulkan terlalu banyak problem dalam sistem pendidikan Islam, sehingga sistem pendidikan sekuler Barat diperkenalkan ke dunia Islam melalui imperialisme. Hal ini terjadi karena sekalipun dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu non-agama telah dikenal dalam karya-karya klasik seperti yang ditulis oleh al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, mereka tidak mengingkari tetapi mengakui validitas dan status ilmiah masing-masing kelompok keilmuan tersebut"⁷.

⁴ Afrizal, *Sistem Manajemen Sekolah Islam Terpadu Menuju Sekolah Standar Nasional Di Kota Dumai* (Rinkasan Tesis); (PPs Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011), 5

⁵ Yusanto, Ismail dkk. *Mengagas Pendidikan Islami*. (Bogor: Al Azhar Press, 2011), 11

⁶ Abuddin Nata. *Manajemen Pendidikan*. (Jakarta: Prenada Media, 2003), 45

⁷ Mulyadhi Kartanegara, *Integrasi Ilmu*, (Jakarta: Mizan, 2005), 19.

Berbeda dengan dikotomi yang dikenal oleh dunia Islam, sains modern Barat sering menganggap rendah status keilmuan ilmu-ilmu agama. Ketika berbicara tentang ilmu-ilmu goib, ilmu agama tidak bisa dipandang ilmiah karena sebuah ilmu bisa dipandang ilmiah apabila objek-objeknya bersifat empiris. Padahal ilmu-ilmu agama tentunya tidak bisa menghindar dari membicarakan hal-hal yang goib. "Ketika ilmu-ilmu sekuler *positivistik* tersebut diperkenalkan ke dunia Islam melalui *imperialisme* Barat, terjadilah dikotomi yang sangat ketat antara ilmu-ilmu agama, sebagaimana yang dipertahankan dan dikembangkan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional (pesantren) di satu pihak dan ilmu-ilmu sekuler sebagaimana diajarkan di sekolah-sekolah umum yang disponsori oleh pemerintah di pihak lain"⁸. Dikotomi ini menjadi sangat tajam karena telah terjadi pengingkaran terhadap validitas dan status ilmiah yang satu atas yang lain. Pihak kaum tradisional menganggap bahwa ilmu-ilmu umum itu bid'ah dan haram dipelajari karena berasal dari orang-orang kafir sementara pendukung ilmu-ilmu umum menganggap ilmu-ilmu umum sebagai pseudoilmiah atau hanya sebagai mitologi yang tidak akan sampai pada tingkat ilmiah karena tidak berbicara tentang fakta tetapi tentang makna yang tidak bersifat empiris. Pada saat ini justru dikotomi seperti inilah yang terjadi dan telah menimbulkan berbagai problem yang akut dalam sistem pendidikan Islam.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya dua model lembaga pendidikan formal di Indonesia. "Model yang pertama adalah sekolah-sekolah yang dikenal dengan sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMU. Model yang kedua yaitu sekolah-sekolah yang dikenal dengan sekolah agama seperti MI, MTs dan MA. Model yang kedua inilah yang dalam sistem pendidikan nasional merupakan wujud dari lembaga pendidikan Islam. Di sekolah agama memiliki komposisi kurikulum 30 persen mata pelajaran agama sedangkan selebihnya 70 persen mata pelajaran umum".⁹

Fenomena tersebut sekarang bukan hal yang asing, justru seakan sudah menjadi kebiasaan dan mesti terjadi kapanpun. Keadaan tersebut harus segera disikapi secepat mungkin, sehingga antara pendidikan Islam dan pendidikan Nasional perlu merumuskan beberapa

⁸ Suyanto, "Sekolah Islam Terpadu; Filsafat, Ideologi, dan Tren Baru Pendidikan Islam di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Islam* : 2:2 (Desember 2013), 359

⁹ Muhammad Kholid Fathoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 64.

konsep, maupun strategi yang bisa menyelesaikan beberapa tantangan dan masalah yang dihadapi dunia pendidikan, karena berbagai tantangan dan masalah di atas, dunia pendidikan mempunyai peran vital dan andil besar dalam memberikan solusi dan antisipasi.

B. Asumsi atau Teori Sekolah Islam Terpadu (SIT) Relevan dengan Manajemen Pendidikan Abad 21

Abuddin Nata, berpendapat, bahwa "dunia pendidikan kurang mampu menghasilkan lulusannya yang diharapkan karena dunia pendidikan selama ini hanya membina kecerdasan intelektual, wawasan dan ketrampilan semata, tanpa diimbangi dengan membina kecerdasan emosional atau karakter. Jika hal ini diabaikan dalam proses pendidikan, tentunya tujuan pendidikan tidak akan tercapai secara maksimal, meskipun sekolah tersebut bertaraf nasional, bahkan rintisan internasional, dilengkapi sarana, operasional yang memadai".¹⁰ Dari sinilah siswa atau lulusan hanya pintar secara intelektual saja, namun tidak memiliki karakter atau akhlak yang mulia. Padahal berkelakuan baik atau berkarakter termasuk kunci membangun sebuah peradaban bangsa, tentunya diimbangi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan lainnya. Bahkan Adian Husaini, berpendapat bahwa "pendidikan karakter atau akhlak saja tidak cukup, perlu dibarengi adab".¹¹

Dalam konteks manajemen pendidikan abad ke-21, Sekolah Islam Terpadu (SIT) beroperasi berdasarkan beberapa asumsi dan teori pendidikan yang relevan.

1. Konsep pendidikan holistik

Konsep pendidikan holistik menjadi dasar dari pendekatan SIT, yang menganggap bahwa pendidikan harus mencakup pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Hal ini sejalan dengan teori multiple intelligences yang diusulkan oleh Howard Gardner, yang menekankan bahwa setiap individu memiliki beragam jenis kecerdasan yang perlu dikembangkan.

2. Pendidikan berbasis nilai

Pendidikan berbasis nilai (values-based education) merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter siswa. SIT menanamkan nilai-nilai Islam sebagai bagian integral dari kurikulum dan kegiatan sehari-hari sekolah. Pendekatan ini sejalan dengan teori pendidikan

¹⁰ Abuddin Nata. *Manajemen Pendidikan*, 45.

¹¹ Adian Husaini, *Pendidikan Islam Membangun Manusia Berkarakter dan Beradab*, (Bogor, INSISTS, 2011), 54.

karakter yang dikembangkan oleh para pendidik seperti Thomas Lickona, yang menyatakan bahwa pengajaran nilai-nilai moral dan etika adalah komponen kunci dalam pendidikan yang efektif.

3. Teori pembelajaran kontekstual

SIT menerapkan teori pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran dikaitkan dengan situasi kehidupan nyata siswa. Pembelajaran kontekstual ini memungkinkan siswa untuk melihat relevansi dari apa yang mereka pelajari dengan kehidupan sehari-hari dan masalah sosial yang mereka hadapi. Pendekatan ini membantu mempersiapkan siswa untuk menjadi problem solver yang efektif, yang mampu menerapkan pengetahuan mereka untuk memecahkan masalah nyata.

4. Mengadopsi teori konstruktivisme

Selain itu, SIT juga mengadopsi teori konstruktivisme, di mana siswa didorong untuk aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses ini, memungkinkan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan personal bagi setiap siswa. Dengan pendekatan ini, SIT dapat mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas, yang sangat diperlukan dalam abad ke-21.

C. GAP atau Masalah Sekolah Islam Terpadu (SIT) Relevan dengan Manajemen Pendidikan Abad 21

Meskipun Sekolah Islam Terpadu (SIT) telah menunjukkan banyak keunggulan dalam mempersiapkan generasi muda untuk tantangan abad ke-21, ada beberapa gap atau masalah yang perlu diatasi agar SIT dapat terus relevan dan efektif, San Mikael Sinambela, dkk. mengidentifikasi 3 kesenjangan pendidikan diantaranya; "Kesenjangan Akses; Kesenjangan Keterampilan; dan Kesenjangan Kualitas"¹² Ketiganya di jelaskan sebagai berikut:

¹² San Mikael Sinambela, dkk. "Kesenjangan Digital dalam Dunia Pendidikan Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang (Studi Kasus di SMP N 35 Medan)" *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)* - 2: 3 (Agustus 2024), 17-18

1. Kesenjangan Akses

Kesenjangan akses dalam konteks kesenjangan digital dalam pendidikan mengacu pada perbedaan dalam akses dan penggunaan teknologi digital, termasuk infrastruktur internet, perangkat keras dan lunak, serta keterampilan digital, antara individu dan kelompok. Kesenjangan ini dapat terjadi di berbagai tingkat, mulai dari akses ke perangkat teknologi seperti komputer, laptop, atau tablet, hingga koneksi internet yang stabil dan terjangkau. Dalam konteks pendidikan, kesenjangan akses digital memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesempatan pendidikan dan peluang kerja. Individu yang tidak memiliki akses atau keterampilan digital yang cukup mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses informasi, layanan publik, peluang pendidikan, dan kesempatan kerja. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu dan kelompok yang memiliki akses dan yang tidak.

2. Kesenjangan Keterampilan

Kesenjangan keterampilan dalam konteks kesenjangan digital dalam pendidikan mengacu pada perbedaan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kesenjangan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti kemampuan menggunakan perangkat keras dan lunak, koneksi internet, serta keterampilan digital yang diperlukan untuk mengakses informasi dan layanan pendidikan yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan masa kini, kesenjangan keterampilan digital menjadi tantangan yang signifikan. Banyak siswa yang tidak memiliki akses yang setara terhadap perangkat teknologi, seperti komputer, laptop, atau tablet, serta koneksi internet yang stabil dan terjangkau. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk mengakses informasi dan layanan pendidikan yang lebih baik, serta mengikuti proses pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif.

3. Kesenjangan Kualitas Pembelajaran

Kesenjangan kualitas pembelajaran, dalam konteks kesenjangan digital dalam pendidikan, merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang diterima oleh siswa di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Kesenjangan ini tidak hanya terbatas pada akses ke teknologi digital, tetapi juga meliputi kualitas konten pendidikan yang tersedia, kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran, dan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil belajar. Kesenjangan kualitas pembelajaran ini dapat berdampak pada kesenjangan dalam kemampuan siswa untuk

mengakses informasi, layanan publik, peluang pendidikan, dan kesempatan kerja yang lebih baik. Siswa yang tidak memiliki akses ke teknologi digital yang berkualitas atau tidak memiliki kemampuan digital yang cukup mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan peluang pendidikan yang lebih baik, sehingga memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu dan kelompok yang memiliki akses dan yang tidak.

D. Pentingnya Mata Kuliah Sekolah Islam Terpadu (SIT) dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Abad 21 Lingkup Kajian Materi Sekolah Islam Terpadu (SIT)

Mata kuliah tentang Sekolah Islam Terpadu (SIT) memiliki peran penting dalam pengembangan manajemen pendidikan abad ke-21. Mata kuliah ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana SIT beroperasi, prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan, dan bagaimana pendekatan pendidikan Islam dapat disinergikan dengan tuntutan globalisasi dan teknologi modern.

1. Memberikan pemahaman tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan modern.

Mata kuliah SIT memberikan pemahaman tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan modern. Ini membantu calon pendidik dan manajer pendidikan memahami bagaimana nilai-nilai spiritual dan moral dapat diinternalisasi dalam kurikulum dan praktik pengajaran sehari-hari, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk pengembangan karakter siswa. Pendidikan Nilai, Rohmat Mulyana, mengungkapkan bahwa "pendidikan nilai mencakup seluruh aspek sebagai pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan, melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten. Tujuan pendidikan di sekolah ditentukan oleh kurikulum sekolah"¹³. Kurikulum pendidikan nilai di sekolah menurut Wahjudin harus terdiri atas nilai-nilai, norma-norma, kebudayaan dan kegiatan-kegiatan yang mampu membentuk anak didik menjadi manusia berkemampuan tinggi, sehingga dapat mencapai ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, mampu mandiri dan berkepribadian

¹³ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2004),. 119

2. Membantu mahasiswa mengenali tantangan dan peluang dalam mengelola sekolah berbasis agama dalam konteks yang terus berubah

Melalui studi kasus dan analisis kritis, mata kuliah ini membantu mahasiswa mengenali tantangan dan peluang dalam mengelola sekolah berbasis agama dalam konteks yang terus berubah. Dengan memahami tantangan yang dihadapi oleh SIT, seperti gap teknologi dan kebutuhan akan inovasi kurikulum, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan manajemen strategis yang diperlukan untuk beradaptasi dan memimpin perubahan. "Kehidupan beragama di Indonesia memberikan warna yang khas pada keberagaman budaya dan sosial masyarakat. Pendidikan Agama Islam tidak hanya tentang pemahaman doktrin keagamaan, tetapi juga mengajarkan toleransi, keadilan, dan kebhinekaan. Oleh karena itu, signifikansi Pendidikan Agama Islam dalam konteks Kurikulum Merdeka tidak hanya terletak pada aspek keagamaan, tetapi juga dalam membangun sikap saling menghargai dan kerjasama antar sesama"¹⁴

3. Membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang manajemen sumber daya Pendidikan Islam

Mata kuliah SIT juga membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang manajemen sumber daya, baik manusia maupun material, yang krusial dalam pengelolaan sekolah. Pengetahuan ini mencakup bagaimana merekrut dan mengembangkan guru berkualitas, mengelola dana dan sumber daya dengan efisien, serta membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung operasional dan pengembangan sekolah. Sumber daya manusia yang bermutu dalam arti sebenarnya adalah "kerja yang dikerjakannya akan menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki dari pekerja tersebut. Bermutu bukan hanya pandai tetapi memenuhi syarat kualitatif yang dituntut pekerjaan itu misalnya kemampuan, kecakapan, ketrampilan, sikap, dan perilaku"¹⁵

4. Membeikan Wawasan Regulasi dan Kebijakan Pendidikan

Pentingnya memahami regulasi dan kebijakan pendidikan yang mempengaruhi SIT juga menjadi fokus dalam mata kuliah ini. Mahasiswa belajar tentang kerangka kebijakan pemerintah, akreditasi, dan standar yang harus dipenuhi oleh SIT, yang sangat penting untuk

¹⁴ Syamsul Arifin, Moh Anas Kholis, and Nada Oktavia, "Agama Dan Perubahan Sosial Di Basis Multikulturalisme: Sebuah Upaya Menyemai Teologi Pedagogi Damai Di Tengah Keragaman Agama Dan Budaya Di Kabupaten Malang," *NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*. 8:2 (March 2022): 149,

¹⁵ Buchari Zainun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Ikrar Mandiri, 1995), 43.

memastikan bahwa sekolah-sekolah ini tidak hanya memenuhi ekspektasi akademik tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat. Risnawan, menegaskan bahwa; "Kebijakan merupakan aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi, lembaga maupun instansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan"¹⁶. Setiap aspek kehidupan terdapat kebijakan masing-masing yang dijadikan pedoman dan panduan dalam melakukan aktivitas dan membatasi perilaku sehingga lebih jelas dan terarah. Kebijakan ini pun berlaku pada sistem pendidikan yang disebut dengan kebijakan pendidikan.

Dengan demikian, mata kuliah SIT dalam pengembangan manajemen pendidikan abad ke-21 tidak hanya relevan tetapi juga esensial untuk mencetak manajer pendidikan yang mampu mengelola sekolah dengan efektif, inovatif, dan berorientasi pada nilai, mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan global dengan landasan iman dan ilmu yang kuat.

¹⁶ Elwijaya, F., et al. "Konsep dasar kebijakan pendidikan" *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6: 1, (April, 2021), 68

Tugas Mahasiswa

- Mengidentifikasi 4 poin penting dari kajian Paradigma Baru SIT dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Abad 21
 - Fenomena Sekolah Islam Terpadu dalam Manajemen Pendidikan Abad 21
 - Asumsi atau Teori Sekolah Islam Terpadu (SIT) Relevan dengan Manajemen Pendidikan Abad 21
 - GAP atau Masalah Sekolah Islam Terpadu (SIT) Relevan dengan Manajemen Pendidikan Abad 21
 - Pentingnya Mata Kuliah Sekolah Islam Terpadu (SIT) dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Abad 21 Lingkup Kajian Materi Sekolah Islam Terpadu (SIT)
- Temukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
- Batasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
Mata Kuliah :
Metode :
Oleh :

NIM :
JURUSAN :

Resensi/Rangkuman:

A Esensi/isi/Sub Materi

B Esensi/isi/Sub Materi

C Esensi/isi/Sub Materi

D Esensi/isi/Sub Materi

summary:
Temukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi

Ket:
Penulisan maksimal 500 Kata

Isi /Aplod Foto Resmi Mu

Isi Identitas MK & Individu

Isi /Aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:
Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

- Dari CK tersebut, Wajib dibuatkan Poster untuk Presentasi Harian

Part: 2

Konsep Dasar Sekolah Islam Terpadu (SIT) dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Abad 21

KEMAMPUAN AKHIR PEMBELAJARAN

Setelah mendapat materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu: Mengetahui dan memahami Konsep Dasar Sekolah Islam Terpadu

POKOK BAHASAN

1. Definisi Sekolah Islam Terpadu
2. Sekolah Islam Terpadu Perespektif Sejarah
3. Ideologi Pendidikan Sekolah Islam Terpadu
4. Ruang Lingkup Sistem Pengelolaan Sekolah Islam Terpadu

TOPIK BAHASAN

Munculnya berbagai lembaga pendidikan berlabel Islam di tanah air pada periode awal tahun 2000 memang cukup memberikan angin segar bagi para orang tua yang khawatir terhadap kondisi pergaulan putra-putrinya di bangku sekolah. Memang tidak kita pungkiri sebelumnya telah ada beberapa organisasi Islam yang juga menggarap ladang pendidikan ini secara kontinu. Namun kemunculan lembaga pendidikan berlabel Islam akhir-akhir ini yang semakin banyak dan tidak hanya dipegang oleh organisasi Islam tertentu agaknya memang hal tersebut berperan sebagai respon dari masyarakat yang membaik terhadap lembaga pendidikan berlabel Islam (sekolah Islam). Sekolah Islam sebelumnya sempat mendapatkan stigma negatif dari masyarakat secara umum. Masyarakat menilai bahwa sekolah Islam adalah kasta kelas dua, jika putra-putrinya tidak masuk ke sekolah umum barulah mereka mau memasukkan putra-putri mereka ke sekolah Islam. Alih-alih untuk membuat putra-putri mereka lebih baik dengan menuntut ilmu di sekolah Islam, beberapa dari orang tua siswa masih berpikir, daripada tidak bersekolah, lebih baik di sekolahkan di sekolah yang Islam saja. Jikalau niatnya saja sudah seperti itu maka output yang dihasilkan sudah bisa kita tebak seperti apa nantinya.

Output pendidikan Islam yang sebenarnya dapat kita baca dari pengertian Ibnu Qayyim Al Jauziyah, beliau mengartikan pendidikan yang seringkali disebut dengan tarbiyah. "Tarbiyah menurut beliau, mencakup *tarbiyah qalb* (pendidikan hati) dan *tarbiyah badan* secara sekaligus. Antara hati dan badan sama-sama membutuhkan tarbiyah. Keduanya harus ditumbuhkembangkan dan ditambah gizinya sehingga mampu tumbuh dengan sempurna dan lebih baik dari sebelumnya".¹ Dengan pendidikan yang seimbang (tawazun) antara hati dan akal maka akan didapatkan kualitas sumber daya manusia yang luar biasa sesuai dengan ciri seorang muslim yang sempurna. Sekolah Islam yang sekarang sudah mulai 'terasa' bedanya di masyarakat, penerimaan mereka terhadap sekolah Islam mulai meningkat, terutama pada sekolah Islam terpadu. Pengajaran di sekolah Islam terpadu yang cukup menarik membuat anak didik tidak jenuh dan lebih mengenal Islam dengan menyenangkan. Salah satu contohnya lewat berbagai permainan yang disisipi hikmah, mengajari hafalan dengan lagu anak-anak tidak lupa pula penyampaian cerita sejarah Islam dan para nabi dengan bermain peran dan lain sebagainya. Lebih menarik adalah pengajaran moral yang diterapkan dengan cara learning by doing dan juga diajarkan secara langsung oleh ustadz atau ustadzah mereka. Fokus utamanya adalah untuk membentuk akhlak yang Islami.²

¹ Al-Jauziyah, Ibnu Qayim. 2011. *Ighatsanu Lahfan min Mushahidis Syetan*, Juz I (Kairo: tp, 1320 H/2011M), 46.

² Fauziddin, Moh. *Pembelajaran Agama Islam Melalui Bermain Pada Anak Usia Dini* (Studi kasus di TKIT Nurul Islam Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur, 2009.), 62.

A. Definisi Sekolah Islam Terpadu

1. Makna dan Hakikat Pendidikan Islam

Pendidikan dalam pandangan Crow & Cow, seperti yang dikutip oleh Fuad Ihsan dalam bukunya “Dasar-Dasar Kependidikan”, menyatakan bahwa; "pendidikan adalah proses yang berisikan berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan social dari generasi ke generasi".³ Sedangkan dalam Undang-Undang SISDIKNAS tahun 2003, pendidikan diartikan "sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepirtual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara".⁴

Endang Saifuddin Anshori, memandan pendidikan Islam seperti yang dikutip oleh Azyumardi Azra, "adalah proses bimbingan (pimpinan, tuntutan, usulan) oleh subjek didik terhadap perkembangan jiwa (pikiran, perasaan, kemauan, intuisi dan sebagainya) dan raga objek didik dengan bahan-bahan tertentu pada jangka waktu tertentu dan dengan alat perlengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi sesuai dengan ajaran Islam".⁵

Muhammad S. A. Ibrahimy, sebagaimana yang di kutip oleh Syaiful dalam Laporan Penelitiannya, memberikan definisi bahwa pendidikan Islam adalah: "*Islamic education in the true sense of learn, is a system of education wich enables a man to lead his life according of the islamic ideology, so that he may easily mould his life accordance with tenets of Islam.*"⁶ Maksudnya, Pendidikan Islam dalam arti belajar yang sebenarnya, adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang mengarahkan hidupnya sesuai dengan ideologi Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam.

³Fuad Ihsan. Dasar-Dasar Kependidikan. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005), 4

⁴Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) 2003. (Jakarta: Sinar Grafika. 2003), 2

⁵Azyumardi Azra. Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2002), 6

⁶Saiful, *Tujuan Pendidikan Islam: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Muhammad 'Athiyah Al- Abrasyi* (Laporan Penelitian). (Jember: STAIN Jember. 1999), 10

Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang membimbing peserta didik pada perkembangan jiwa dan raganya yang berideologi pada ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan hadist. Sekolah Islam Terpadu pada hakekatnya adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan AlQur'an dan As-Sunnah.

2. Hakikat Sekolah Islam Terpadu

Sekolah Islam Terpadu pada hakikatnya adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep-konsep pendidikan berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah. Konsep operasional Sekolah Islam Terpadu (SIT) merupakan akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan, dan pengembangan ajaran agama Islam, budaya, dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. Istilah "Terpadu" dalam sekolah Islam Terpadu dimaksudkan sebagai penguat (taukid) dari Islam itu sendiri. Maksudnya adalah Islam yang utuh menyeluruh, integral, bukan parsial, syumuliah bukan *juz'iyah*. Hal ini menjadi semangat utama dalam gerak dakwah di bidang pendidikan ini sebagai "perlawanan" terhadap pemahaman sekuler, dikotomi, *juz'iyah*.⁷

Konsep operasional SIT merupakan akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan dan pengembangan ajaran agama Islam, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. Istilah "Terpadu" dalam SIT dimaksudkan sebagai penguat (taukid) dari Islam itu sendiri. Maksudnya adalah Islam yang utuh menyeluruh, Integral, bukan parsial, *syumuliah* bukan *juz'iyah*. Hal ini menjadi semangat utama dalam gerak da'wah dibidang pendidikan ini sebagai "perlawanan" terhadap pemahaman sekuler, dikotomi, *juz'iyah*. Rio Kurniawan , Mengidentifikasi Makna Sekolah Islam Teerpadu;⁸

- a. Dalam aplikasinya SIT diartikan sebagai sekolah yang menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum. Dengan pendekatan ini, semua mata pelajaran dan semua kegiatan sekolah tidak lepas dari bingkai ajaran dan pesan nilai Islam. Tidak ada dikotomi, tidak ada keterpisahan, tidak ada "sekularisasi" dimana pelajaran dan semua bahasan lepas dari nilai dan ajaran Islam, ataupun "sakralisasi" dimana Islam diajarkan terlepas dari konteks kemaslahatan

⁷ JSIT Indonesia, *Sekolah Islam Terpadu Konsep dan Aplikasi*, (Bandung, Syamil Cipta Media, 2006), 28.

⁸ Rio Kurniawan "Sekolah Islam Terpadu Prespektif Multidisipliner". *Jurnal Mamba'ul 'Ulum*, 16:1, (April 2020), 44

kehidupan masa kini dan masa deean. Pelajaran umum, seperti matematika, IPA,IPS, bahasa, jasmani/kesehatan, keterampilan dibingkai dengan pijakan, pedoman dan panduan Islam. Sementara dipelajari agama, kurikulum diperkaya dengan pendekatan konteks kekinian dan kemanfaatan, dan kemaslahatan.

- b. SIT juga menekankan keterpaduan dalam metode pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan ranah kognitif, afektif dan konotif. Implikasi dari keterpaduan ini menuntut pengembangan pendekatan proses pembelajaran yang kaya, variatif dan menggunakan media serta sumber belajar yang luas dan luwes. Metode pembelajaran menekankan penggunaan dan pendekatan yang memicu dan memacu optimalisasi pemberdayaan otak kiri dan otak kanan. Dengan pengertian ini, seharusnya pembelajaran di SIT dilaksanakan dengan pendekatan berbasis; (1) problem solving yang melatih peserta didik berfikir kritis, sistematis, logis dan solutif; (2) berbasis kreativitas yang melatih peserta didik untuk berfikir orsinal, luwes (fleksibel) dan *lancer fan imajinatif*. Keterampilan melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan penuh maslahat bagi diri dan lingkungannya.
- c. SIT juga memadukan pendidikan aqliyah, ruhiyah, dan jasadiyah. Artinya, SIT berupaya mendidik peserta didik menjadi anak yang berkembang kemampuan akal dan intelektualnya,meningkat kualitas keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT, terbina akhlak mulia, dan juga memiliki kesehatan, kebugaran dan keterampilan dalam kehidupannya sehari-hari.
- d. SIT memadukan keterlibatan dan partisipasi aktif lingkungan belajar yaitu: sekolah, rumah dan masyarakat. SIT berupaya untuk mengoptimalkan dan sinkronisasi peran guru, orang tua dan masyarakat dalam proses pengelolaan sekolah dan pembelajaran sehingga terjadi sinergi yang konstruktif dalam membangun kompetensi dan karakter peserta didik . orang tua dilibatkan secara aktif untuk memperkaya dan memberi perhatian yang memadai dalam proses pendidikan putra-putri mereka. Sementara itu, kegiatan kunjungan ataupun interaksi keluar sekolah merupakan upaya untuk mendekatkan peserta didik terhadap dunia nyata yang ada ditengah masyarakat.

Dengan sejumlah pengertian diatas, dapatlah ditarik suatu pengertian umum yang komprehensif bahwa SIT adalah Sekolah Islam yang diselenggarakan dengan memadukan secara Integratif nilai dan ajaran Islam dalam bangunan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran yang efektif dan pelibatan yang optimal dan koperatif antara guru dan orangtua, serta masyarakat untuk membina karakter dan kompetensi

peserta didik. Demikian pengertian Sekolah Islam Terpadu menurut Kebijakan Standar Konsep Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT). Dan Selanjutnya Sekolah Islam Terpadu dapat ditinjau beberapa Perespektif.

3. Karakteristik Sekolah Islam Terpadu

Dengan pengertian sebagaimana diuraikan di atas, maka Sekolah Islam Terpadu (SIT) memiliki karakteristik utama yang memberikan penegasan akan keberadaannya sebagai berikut:⁹

- a. Menjadikan Islam sebagai landasan filosofis maksudnya sekolah hendaknya menjadikan Al Qur'an dan As Sunnah sebagai rujukan bagi penyelenggaraan proses pendidikan.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا^ط

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. (QS. Al Ahzab [33]: 21).

- b. Menumbuhkan *biah solihah* dalam iklim dan lingkungan sekolah menumbuhkan kemaslahatan, meniadakan kemaksiatan dan kemungkarannya. Seluruh dimensi kegiatan sekolah senantiasa bernafaskan semangat nilai dan pesan-pesan Islam. Lingkungan sekolah harus marak dan ramai dengan segala kegiatan terpuji misalnya menebarkan salam, saling hormat menghormati. Di sisi lain lingkungan sekolah juga harus terbebas dari segala perilaku tercela seperti umpatan, caci maki, kata-kata kotor, kasar hati, hasad, dengki, konflik berkepanjangan, kotor dan berantakan, egois, dan *ghibah*.
- c. Melibatkan peran-serta orang tua dan masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Guru dan orang tua saling bahu membahu dalam memajukan kualitas sekolah. Orang tua harus ikut serta secara aktif memberikan dorongan dan bantuan baik secara individual kepada pura-puterinya maupun kesertaan mereka terlibat di dalam sekolah dalam serangkaian program yang sistematis. Sesungguhnya keterlibatan orang tua memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan *petformance* sekolah.

⁹ JSIT Indonesia, *Sekolah Islam Terpadu*, 58-61.

- d. Mengutamakan nilai-nilai ukhuwah dalam semua interaksi antar warga sekolah. Keekerabatan dan persaudaraan diantara para guru dan karyawan sekolah dibangun di atas prinsip nilai-nilai Islam. Saling mengenal satu sama yang lainnya (ta'ruf), saling memahami (tafahum).
- e. Membangun budaya rawat, resik, rapih, runut, ringkas, sehat dan asri.
- f. Menjamin seluruh proses kegiatan sekolah untuk selalu berorientasi pada mutu. Sistem dibangun berdasarkan standar mutu yang dikenal, diterima dan diakui oleh masyarakat.
- g. Menumbuhkan budaya profesionalisme yang tinggi di kalangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan..

4. Tujuan Pendidikan Sekolah Islam Terpadu.

Tujuan umum Pendidikan Sekolah Islam Terpadu adalah “membina peserta didik untuk menjadi insan *muttaqien* yang cerdas, berakhlak mulia, memiliki keterampilan yang memberi manfaat, dan maslahat bagi ummat manusia”.¹⁰.

B. Sekolah Islam Terpadu Perespektif Sejarah

Sejarah merupakan rekonstruksi masa lalu, yaitu merekonstruksi apa saja yang sudah dipikirkan, dikerjakan, dikatakan, dirasakan, dan dialami manusia. Namun, perlu ditegaskan bahwa "membangun kembali masa lalu bukan untuk kepentingan masa lalu itu sendiri"¹¹ Sejarah mempunyai kepentingan masa kini dan, bahkan, untuk masa yang akan datang. Oleh karenanya, orang tidak akan belajar sejarah karena tidak akan ada gunanya. Kenyataannya, sejarah terus di tulis, di semua peradaban dan di sepanjang waktu. Hal ini, sebenarnya cukup menjadi bukti bahwa sejarah itu sangat urgen.

Dalam hal ini, Kuntowijoyo menjelaskan bahwa sejarah mempunyai nilai guna intrinsik: "(a) sejarah sebagai ilmu, (b) sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, (c) sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan (c) sejarah sebagai profesi. Sedangkan nilai guna ekstrinsik, yakni sebagai pendidikan: (a) moral, (b) Penalaran, (c) politik, (d) kebijakan, (d) perubahan, (e) masa depan, (f) keindahan, dan (g) ilmu bantu, selain berfungsi sebagai (h) latar belakang (i) rujukan, dan (j) bukti".¹²

¹⁰ JSIT Indonesia, *Sekolah Islam Terpadu*, 63.

¹¹ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1995), 17

¹² Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*, 19

1. Trend Pendidikan Menjelang Abad 21

Menjelang abad ke 21, ada perubahan yang cukup menarik mengenai trend pendidikan (baca: pendidikan Islam) di Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahirnya Sekolah-sekolah Islam Terpadu. Pada masa sebelumnya, model lembaga pendidikan di Indonesia hanya mengenal tiga model lembaga pendidikan yakni pesantren, madrasah, dan sekolah (umum). Sekolah (umum) merupakan lembaga pendidikan di Indonesia warisan penjajah Belanda yang mengajarkan ilmu-ilmu umum yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional dengan ciri khas di dalamnya terdapat masjid, kyai, santri, dan pengajaran kitab kuning. Pesantren, pada awalnya, hanya mengajarkan 100% mata pelajaran agama dengan menggunakan referensi kitab kuning. Tujuan pendidikan di pesantren adalah untuk menghasilkan para ahli ilmu agama. Madrasah merupakan tindak lanjut dari pendidikan di pesantren, yang mengajarkan 30% mata pelajaran agama, selebihnya mata pelajaran umum. "Lebih dari 20 tahun terakhir, banyak pesantren telah mengadopsi sistem madrasah dan memasukkan mata pelajaran umum dalam sistem pendidikannya. Sistem madrasah diperkenalkan untuk menjembatani kesenjangan antara pesantren dan sekolah yang pada akhirnya melahirkan dualisme dalam sistem pendidikan nasional. Dengan memberikan penekanan pada mata pelajaran-mata pelajaran agama, pesantren seringkali dianggap tidak mampu merespons kemajuan dan tuntutan zaman".¹³

2. Munculnya Sekolah Islam Terpadu

Pada dekade akhir tahun 1980-an, Sekolah Islam Terpadu mulai bermunculan. Diawali oleh para aktivis dakwah kampus yang tergabung dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), dan beberapa universitas ternama lainnya yang tergabung dalam komunitas *Jamaah Tarbiyah* yang memiliki keprihatinan terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Mereka adalah para aktivis Islam kampus yang berperan penting dalam menyebarkan ideologi Islam kepada para mahasiswa. Kalangan pemuda menjadi target utama dari gerakan ini karena mereka percaya bahwa para pemuda menjadi agen perubahan sosial yang sangat penting dalam melakukan islamisasi seluruh masyarakat Indonesia.

¹³Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ES The Columbia Encyclopedia (1963) NY & London: Colombia University Press, 1986), 167-171.

Tugas untuk menyiapkan generasi muda Muslim yang punya komitmen dakwah diyakini akan lebih efisien jika melalui pendidikan. Dalam konteks ini, "mereka mendirikan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Nurul Fikri dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah menginspirasi berdirinya Sekolah-Sekolah Islam Terpadu di seluruh wilayah Indonesia. Hingga saat ini, ada sekitar 1.000 Sekolah Islam Terpadu yang tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) yang kepengurusannya telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan ada sekitar 10.000 Sekolah Islam Terpadu yang secara struktural tidak bergabung di bawah JSIT".¹⁴

Berdasarkan analisis data yang ditemukan di lapangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Sekolah Islam Terpadu merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Hal ini tampak pada penggunaan sekolah, kesediaan sekolah Islam terpadu untuk menerima sepenuhnya kurikulum yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pelaksanaan ujian yang menyesuaikan dengan ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan program sertifikasi oleh guru-guru di sekolah Islam terpadu. Meskipun munculnya sekolah Islam terpadu merupakan respon atas ketidakpuasan terhadap praktek pendidikan di Indonesia, hingga saat ini, Sekolah Islam Terpadu tetap menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, keberadaan Sekolah Islam Terpadu lebih tepat jika dikatakan sebagai upaya untuk melakukan islamisasi terhadap lembaga pendidikan formal di Indonesia. Islamisasi dilakukan terhadap semua komponen pendidikan, baik tujuan pendidikan, kurikulum, strategi, sumber belajar, hingga guru yang dianggap sebagai ujung tombak dalam pendidikan.

Jika dalam perkembangan sekolah ke depan tidak mampu memberi jawaban atas ketidakpuasan sebagian kalangan terhadap sistem pendidikan di Indonesia, bukankah berarti bahwa Sekolah Terpadu telah gagal mewujudkan cita-cita awal. Pesantren, madrasah, dan sekolah umum yang menjadi model lembaga pendidikan di Indonesia dianggap belum mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang diidealkan oleh umat Islam. Bahkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional pun masih jauh dari harapan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, "tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun demikian, Sekolah Islam Terpadu ternyata tidak mampu menjawab kritiknya sendiri. Alih-alih untuk

¹⁴ Suyatno, "Sekolah Islam Terpadu Dalam Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal Al-Qalam Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar*.3.1 (Januari 2015), 3.

melakukan perbaikan terhadap sistem pendidikan nasional, Sekolah Islam Terpadu justru masuk dalam satu habitat yang sama dengan lembaga pendidikan yang menjadi sasaran kritiknya".¹⁵

3. Sekolah Islam Terpadu Perespektif Politik

Sekolah Islam Terpadu menjadi sebuah fenomena dalam pendidikan di Indonesia, Rio Kurniawan dalam jurnalnya, mengistifikasi pada tiga persepektif, diantaranya:

- a. Secara historis memang bangsa Indonesia tidak akan pernah lepas dari nilai- nilai religius yang menjadi sumber dan daya kekuatan bangsa ini. Sesungguhnya yang memperjuangkan bangsa ini di garis depan adalah kaum santri yang siap berjuang dan berperang. Tapi, tidak semua ternyata memegang senjata, ada diplomat ulung seperti K.H. Agus Salim, Guru dari para Founding Fathers kita HOS. Cokroaminoto, dua pendidir Ormas besar yang bertujuan untuk kemerdekaan bangsa, K.H. Hasyim Asy'ari (pendiri NU) dan K.H. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), negarawan seperti M. Natsir atau seorang tokoh militer bintang lima seperti Jenderal Soedirman dan begitu banyak lagi. Mereka adalah para tokoh pesantren dan santri yang berjuang berdasarkan kemampuan dan kapasitas masing-masing.
- b. Pada dasarnya manusia selalu ingin kembali kepada fitrahnya. Allah SWT. telah menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik diantara makhluk- makhluknya yang lain yang mampu berfikir. Kecenderungan manusia mempengaruhi apa pilihannya. Setelah sekian lama manusia Indonesia dicekoki dengan sistem sekuler walau disamarkan membuat jiwa bangsa ini memberontak. Upaya-upaya untuk mencerabut bangsa ini dari akar budayanya ternyata tidak berhasil. Masyarakat bosan dengan Sistem Pendidikan Nasional dan model pendidikan umum yang terus memisahkan antara pendidikan agama (Islam) dengan pendidikan umum. Itulah fitrah manusia yang ingin memenuhi relung jiwanya dengan cahaya Allah.

¹⁵ Suyatno, "Sekolah Islam Terpadu , 7.

- c. Sekolah Islam Terpadu menawarkan hal yang lebih dibandingkan dengan pendidikan umum. Selain mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum, Sekolah Islam Terpadu juga memberikan siswanya skill sesuai dengan bakatnya masing-masing. Selain itu, pola pembelajarannya juga sedikit berbeda dan memang mengakomodir hak-hak siswa sebagai penuntut ilmu. Hal ini sebenarnya mencoba menjawab tantangan zaman yang ke depan akan masuk para era globalisasi dan perdagangan bebas. Anak-anak Indonesia harus sudah dibekali cara-cara manajerial, skill dan sebagainya yang menunjang dirinya untuk mampu bersaing. Tentunya membentuk karakter mereka bukan untuk menjadi tenaga kerja tetapi yang membuka lapangan kerja.

Ketiga hal di atas bisa menjadi dasar untuk mencoba menerapkan sistem pembelajaran yang dilakukan di sekolah Islam terpadu, sehingga tidak melulu nilai angka yang diprioritaskan. Tapi mulai mengarah kepada nilai akhlak yang dimiliki anak didik nantinya. Fakta di lapangan mengenai cara mendidik di sekolah umum sangat berbeda dengan sekolah Islam terpadu yaitu dalam ‘mengolah’ anak didik mereka menjadi sumber daya manusia yang juga pintar secara perilaku. Misalnya saja, tidak kita temukan semacam permainan berhikmah di sekolah umum, berdoa pun tidak bisa dilafalkan dan dibenarkan panjang pendek serta makhorijul hurufnya karena dalam 1 kelas mungkin ada siswa yang beragama lain. Selain itu, yang lebih penting adalah seluruh mata pelajaran mulai dari eksak sampai sosial disampaikan tanpa bisa terpadu dengan agama Islam, hanya sesuai dengan capaian tersampainya materi tersebut.

Suyatno memandang SIT, dalam Disertasinya Sekolah Islam Terpadu (Genealogi, Ideologi, dan Sistem Pendidikan), diantaranya:¹⁶

- a. Politisasi Pendidikan; Sulit mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara JSIT dengan PKS. Silahkan cek sendiri mulai dari para pengurus JSIT, pengurus Yayasan di tiap sekolah, hingga para guru dan karyawannya. Bila sudah begini jangan heran bila PKS punya hajat untuk mengerahkan massa maka sekolah-sekolah ini akan mengerahkan baladanya untuk ikut terjun ke lapangan walau di saat jam kerja sekalipun, Padahal isu yang diangkat banyak yang tidak berhubungan dengan dunia pendidikan, seperti pengerahan massa untuk pilkada, direct selling (istilah untuk menarik massa pemilih dengan cara door to door), Palestina, anti Amerika, dan lain-lain. Stiker, spanduk, baliho calon yang dukung dalam pilkadapun terkadang dapat ditemukan dengan mudah di dalam maupun di sekitar area sekolah.

¹⁶ Suyatno, *Sekolah Islam Terpadu (Genealogi, Ideologi, dan Sistem Pendidikan)*. Disertasi: (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 77.

Sampai-sampai ada sebuah SDIT yang taglinenya kelewat maksa dengan mengambil kepanjangan dari PKS menjadi Pintar, Kreatif, Soleh. Luar biasa.

- b. Mahal tapi tak sebanding dengan kesejahteraan karyawan; Mahal itu subjektif, tapi bila harus merogoh kocek di atas 10 hingga 25 juta untuk uang pangkal dan SPP mendekati 1 jutaan per bulannya maka bagi sebagian besar masyarakat Indonesia harga tersebut jelaslah mahal. PKS boleh menyatakan sebagai partai yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan. Tapi di lapangan, terutama di dunia pendidikan yang dikelola oleh para kader-kadernya hal tersebut jelaslah hanya sebuah ungkapan manis tanpa makna, alias sampah tak berguna. Sebab pada kenyataannya kerja keras guru dan karyawannya yang harus bekerja di atas 8 jam, bahkan harus ikut-ikutan pengerahan massa di arena pilkada segala tidak sebanding dengan gaji yang diterima. Dengan uang masuk dan SPP seperti di atas rata-rata gaji guru-guru SDIT hanya berkisar 1 hingga 2 juta an saja. Oleh karenanya tak heran bila di SDIT lalu lalang guru yang keluar masuk sangat tinggi. Dengan kondisi demikian bisa dibayangkan suasana belajar yang dirasakan oleh para siswa yang sering gonta ganti guru seperti.
- c. Jadi kendaraan politik; Banyak para pemilik/pengurus yayasan yang menaungi Sekolah Islam Terpadu ini menjadi politisi berkat limpahan uang dari penyelenggaraan pendidikan ala Sekolah Islam Terpadu ini. Tak semuanya memang. Namun ulah oknum-oknum seperti ini ibarat orang yang menari di atas bangkai saudaranya sendiri. Di saat karyawan dan guru sedang kesusahan mereka malah bergelimang kemewahan.

C. Ideologi Pendidikan Sekolah Islam Terpadu

Selain sebagai upaya reintegrasi keilmuan dalam pendidikan Islam, kurikulum Sekolah Islam Terpadu juga merupakan bagian dari ideologi pendidikan yang diadopsi dari Ikhwanul Muslimin. Hal ini tampak dalam sepuluh konsep muwasafat yang menjadi tujuan dalam

pendidikan yang diselenggarakan Sekolah Islam Terpadu. Secara spesifik, kurikulum Sekolah Islam Terpadu merupakan kurikulum yang berisi target yang harus dicapai secara berkala dalam beberapa jenjang yang meliputi jenjang muda, madya, dan dewasa.¹⁷

Ada sepuluh karakter dari kepribadian Muslim menurut tujuan pendidikan Sekolah Islam Terpadu. Sepuluh karakter kepribadian Muslim ini biasa disebut dengan sepuluh *muwa safat*. Penjenjangan ini sama dengan konsep muwa safat yang dimiliki oleh Ikhwanul Muslimin, yakni sebagai berikut:¹⁸

1. Memiliki Akidah yang lurus

Indikator dari karakter ini adalah; mengimani rukun Islam, mematuhi dan tunduk kepada Allah swt., mengikhlaskan amal untuk Allah swt., beriman kepada nikmat dan siksa kubur, mensyukuri nikmat Allah swt. Saat mendapatkannya, menjadikan setan sebagai musuh, tidak bersumpah selain atas nama Allah swt., tidak merasa sial mendengar dan melihat sesuatu, tidak menghadiri perdukunan dan paranormal, tidak meminta tolong kepada jin atau orang yang bekerja sama dengan jin, dan tidak meminta kepada orang yang meninggal.

2. Beribadah yang Benar

Karakter ini memiliki indikator sebagai berikut; *ihsan* dalam thoharoh, *ihsan* dalam shalat lima waktu, cinta membaca dan menghafal al-Quran, berpuasa fardhu pada bulan ramadhan, ada kecintaan terhadap shalat berjamaah, mendirikan qiyam al-lail minimal sekali dalam sepekan, berpuasa sunnah minimal sekali dalam sepekan, hafal satu juz al-Quran, menutup segala kegiatan dengan istighfar, berdoa pada waktu-waktu mustajab, dan berdzikir dalam segala keadaan.

3. Berakhlak Mulia

Karakter ini dicirikan dengan indikator sebagai berikut; memenuhi janji, jujur, berbuat baik kepada orang lain, menjaga kehormatan keluarga, menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, menjaga pandangan, menjaga rahasia, menutupi aib orang lain, menggunakan barang orang lain dengan seizin pemiliknya, menyebarluaskan salam, menjauhi hal-hal dan perbuatan haram, berteman

¹⁷Maksudin, *Pendidikan Islam Alternatif, Membangun Karakter Melalui Sistem Boarding School* (Yogyakarta: UNY Press, 2010), 72

¹⁸Suyatno "Sekolah Islam Terpadu; Filsafat, Ideologi, dan Tren Baru Pendidikan Islam di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Islam*: 2: 2, (Desember 2013), 364

dengan orang baik, rendah hati dan jauh dari sifat sombong, punya prinsip dan tidak ikut-ikutan, tidak mencaci maki, tidak mengadu domba, dan tidak ghibah dan ngrumpi.

4. Mandiri.

Karakter ini memiliki indikator sebagai berikut; menjauhi perbuatan tercela, memenuhi hak orang lain, belajar menabung, menjaga fasilitas umum, menjaga fasilitas dan barang pribadi, dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemampuan (mandi sendiri, tidur sendiri, dan aktifitas pribadi lainnya).

5. Berwawasan dan Berpengetahuan luas

Karakter ini memiliki indikator sebagai berikut; mempunyai kemampuan membaca dan menulis, mempunyai kemampuan mendengarkan dan mengutarakan pendapat, memperhatikan hukum-hukum tilawah, mengetahui sejarah Nabi saw., sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas, menghafal satu juz al-Quran dan Hadis pilihan, dan menyadari adanya *gazw al-fikri* (perang pemikiran) dengan orang kafir dan penentang Islam.

6. Berbadan sehat dan kuat.

Karakter ini memiliki indikator sebagai berikut; menjaga kebersihan dan ketertiban di rumah, sekolah maupun masyarakat, berolahraga secara teratur, bangun pagi sebelum fajar, hidup sehat, tidak mendekati orang yang merokok, menggunakan narkoba, makan dan minum mengikuti Rasulullah saw., dan menghindari penyakit menular.

7. Bersungguh-sungguh terhadap dirinya

Karakter ini memiliki indikator sebagai berikut; menjauhi segala yang haram, menjauhi tempat-tempat yang haram, dan menjaga keamanan diri.

8. Terampil mengelola segala urusannya

Karakter ini memiliki indikator sebagai berikut; terbiasa menyusun rencana kegiatan, tidak terburu-buru, dan mengisi buku harian.

9. Kesembilan, disiplin waktu.

Karakter ini memiliki indikator sebagai berikut; tepat waktu, dan menggunakan waktu untuk hal yang bermanfaat.

10. Kesepuluh, bermanfaat bagi orang lain

Karakter ini ditandai dengan indikator sebagai berikut; membantu kedua orang tua, senantiasa mendoakan kedua orang tua, membantu yang membutuhkan dengan tenaga, uang dan pikiran, mendiakan teman dan Muslim lainnya, dan menjalankan tugas di rumah, sekolah maupun di masyarakat.

Dengan sistem yang dikembangkan di Sekolah Islam Terpadu, sepuluh karakter ini terinternalisasi bukan hanya pada siswa tetapi kepada semua *stakeholder* mulai dari pengurus dan staf yayasan, kepala sekolah, guru, murid dan orang tua murid. Para pengurus dan staf, guru, kepala sekolah serta karyawan mendapatkan internalisasi 10 karakter melalui proses pembinaan komitmen dalam bentuk *halaqah ta'lim* rutin setiap pekan sekali, untuk para orang tua murid, pembinaan 10 karakter ini diberikan melalui kegiatan *parenting* yang dilaksanakan sekali dalam sebulan. Sedangkan para siswa diberikan dalam bentuk pembelajaran yang terintegrasi dalam semua bidang studi atau mata pelajaran. Dengan demikian, semua *stakeholder* mendapat layanan pendidikan/internalisasi nilai-nilai dari 10 karakter tersebut.¹⁹

Sepuluh *muwa.safat* ini menjadi cirikhas tujuan pendidikan Sekolah Islam Terpadu yang diadopsi dari sepuluh *muwa.safat* Ikhwanul Muslimin maupun Jamaah Tarbiyah. Dengan melihat sepuluh tujuan pendidikan ini menunjukkan bahwa Sekolah Islam Terpadu benar-benar memiliki tujuan pendidikan sebagaimana yang digariskan oleh Hasan al-Banna. Tujuan pendidikan ini merupakan implikasi dari dimensi akidah dari ideologi pendidikan Sekolah Islam Terpadu. Dimensi akidah ini menuntut setiap aktivitas pendidikan harus bermuara kepada terbentuknya tauhid kepada peserta didik. Konsep ini diintegrasikan dalam proses belajar mengajar yang berlangsung di kelas dan di luar kelas dengan

¹⁹ Noorhaidi Hasan, *Islamist Party, Electoral Politics and Da'wa Mobilization Among Youth: The Prosperous Justice (PKS) in Indonesia*, Artikel Online dalam S. Rajaratnam (School of International Studies Singapore, 2008), 22

berlandaskan pada kurikulum nasional. Selain itu, pelaksanaan kurikulum dalam proses belajar mengajar juga ditunjang dengan guru yang mampu menjadi teladan bagi siswa. Program ke-IT-an adalah suplemen dari kurikulum yang diterapkan di Sekolah Islam Terpadu.

D. Ruang Lingkup Sistem Pengelolaan Sekolah Islam Terpadu

1. Sistem Manajemen/Pengelolaan Sekolah

Untuk memahami hakikat sekolah dalam kehidupan masyarakat maka perlu dibahas terlebih dahulu aplikasi konsep sistem terhadap sekolah. Bagaimana kita memandang sekolah sebagai suatu sistem dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting dikemukakan mengingat cara pandang demikian akan mengantarkan kita pada pemahaman yang jelas dan mendalam (holistik) terhadap berbagai persoalan yang ada dan muncul dalam organisasi sekolah. Sistem dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Immagent dan Pilecki menjelaskan bahwa: *"There are two basic types of systems "open" and "Closed". Open systems are those which exchange matter and energy with the environment. Closed systems are self contained and are unaffected by other systems or their environment."*²⁰ Maksudnya "Ada dua tipe dasar sistem, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang melakukan pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Sistem tertutup berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh sistem lain atau lingkungannya." Suatu system terbuka adalah menukar material dan energy dengan lingkungan, sedangkan system tertutup adalah system yang tidak mempunyai relasi.

Untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah, peranan kepala sekolah dan pendidik dalam menjalankan manajemen pendidikan sangat menentukan pencapaian tujuan dengan dukungan sumber daya personal, materi, financial dan lingkungan masyarakat. Sistem manajemen sekolah mengolah berbagai input, kemudian diolah atau ditransformasi (proses) menjadi output (keluaran), yang selanjutnya keluaran ditransformasi kepada masyarakat. Input sekolah adalah segala masukan yang dibutuhkan sekolah untuk terjadinya pemrosesan guna mendapatkan output yang diharapkan. "Input sekolah dapat diidentifikasi mulai dari manusia (man), uang (money), material/bahan-bahan (materials), metode (methods), dan mesin-mesin (mechanes)".²¹

²⁰Syafaruddin Anzizhan, *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*, (Jakarta, Grasindo, 2004), 17.

²¹Aan Komariah, & Cepi Triatna, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5

2. Proses Penyelenggaraan Sekolah Islam Terpadu

Proses penyelenggaraan sekolah adalah kiat manajemen sekolah dalam mengelola masukan-masukan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan atau output sekolah. Slamet menyatakan bahwa “proses adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain Sesuatu yang dapat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input”.²²

3. Pengelolaan Program Sekolah Islam Terpadu

Konsep pendidikan holistik menjadi dasar dari pendekatan SIT, yang menganggap bahwa pendidikan harus mencakup pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Hal ini sejalan dengan teori *multiple intelligences* yang diusulkan oleh Howard Gardner, yang menekankan bahwa setiap individu memiliki beragam jenis kecerdasan yang perlu dikembangkan. Menurut Roe dan Norton (dalam Komariah, & Cipi Triatna), pengelolaan program sekolah secara holistik dan integratif meliputi: "1) Perencanaan program, 2) pengembangan, program; 2) Pengembangan kurikulum; 3) Pengembangan proses belajar mengajar; 4) Pengelolaan sumber daya manusia (guru, konselor, karyawan, dan sebagainya. 5) Pelayanan siswa; 6) Pengelolaan fasilitas; 7) Pengelolaan keuangan; 8) Pengelolaan hubungan sekolah-masyarakat; 9) evaluasi program; 10) Perbaikan program berkelanjutan"²³

Out put sekolah dari aktivitas sekolah adalah segala sesuatu yang kita pelajari di sekolah. Oup tut sekolah secara mudah dapat dikatakan sebagai siswa yang berhasil keluar sebagai pemenang dari ajang pergulatan ilmu yang diakhiri dengan ujian-ujian dan menghasilkan nilai penghargaan, berupa angka-angka nilai. Out put sekolah fokusnya pada siswa, tetapi siswa yang memiliki kompetensi nalar, dan juga kompetensi lainnya. Out put sekolah, tidak hanya diukur dari lulusan tetapi pada umumnya, diukur dari tingkat kinerjanya. Kinerja sekolah bukan semata-mata kinerja siswa yang belajar, tetapi kinerja seluruh komponen sistem, artinya kinerja sekolah dalam pencapaian atau prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses persekolahan. Menurut Slamet “kinerja sekolah diukur dari efektivitasnya, kualitasnya, produktivitasnya, efesiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, surplusnya, dan moral kerjanya”.²⁴

²²Afrizal, *Sistem Manajemen Sekolah Islam Terpadu Menuju Sekolah Standar Nasional Di Kota Dumai* (Rinkasan Tesis); (PPs Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011), 19

²³ Aan Komariah, & Cipi Triatna, *Visionary Leadershi*, 5

²⁴ Afrizal, *Sistem Manajemen Sekolah Islam Terpadu*, 20

Tugas Mahasiswa

- Mengabstraksikan 4 poin penting dari kajian Konsep Dasar Sekolah Islam Terpadu
 - Definisi Sekolah Islam Terpadu
 - Sekolah Islam Terpadu Perespektif Sejarah
 - Ideologi Pendidikan Sekolah Islam Terpadu
 - Ruang Lingkup Sistem Pengelolaan Sekolah Islam Terpadu
- Temukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
- Batasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
Mata Kuliah :
Metode :
Oleh :

NIM :
JURUSAN :

Resensi/Rangkuman:

A Esensi/isi/Sub Materi

B Esensi/isi/Sub Materi

C Esensi/isi/Sub Materi

D Esensi/isi/Sub Materi

summary:

Temukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi

Ket:
Penulisan maksimal 500 Kata

Isi /Aplod Foto Resmi Mu

Isi Identitas MK & Individu

Isi /aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:

Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

- Dari CK tersebut, Wajib dibuatkan Poster untuk Presentasi Harian

Part: 3

Perencanaan Program Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu

KEMAMPUAN AKHIR PEMBELAJARAN

Setelah mendapat materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami Perencanaan Program Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu
- Mengidentifikasi Perencanaan Program Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu
- Menjelaskan Perencanaan Program Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu
- Menjelaskan Perencanaan Program Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu

POKOK BAHASAN

- Makna dan Hakikat, Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu
- Karakteristik, Prinsip, dan Syarat Perencanaan Pendidikan
- Ruang lingkup Dimensi Jenis Perencanaan Pendidikan
- Prosedur, Langkah dan Tahapan Penyusunan Perencanaan Pendidikan

TOPIK BAHASAN

Perencanaan, dalam pendidikan merupakan sebuah proses dan langkah-langkah nyata untuk mempersiapkan kegiatan pendidikan hingga masa yang akan datang. Sebuah perencanaan sekaligus menjadi alat untuk menetapkan langkah-langkah dan usaha-usaha yang akan ditempuh dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Terlebih sebuah perencanaan pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk menata sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebuah perencanaan juga berfungsi untuk memprediksi dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat akan pendidikan di masa yang akan datang. Oleh karenanya sebuah sistem pendidikan harus memiliki kerja sama yang kuat antara pengelola, pendidik, peserta didik, orang tua dari peserta didik, serta semua elemen yang terkait dengan pelaksanaan dan proses pendidikan, terutama dukungan dari pemerintah terhadap keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Kerja sama antar semua elemen yang terkait dalam proses pendidikan dan dukungan pemerintah yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadis serta implementasi dari prinsip-prinsip pendidikan akan mempermudah perjalanan proses pendidikan hingga di masa yang akan datang, guna mencapai tujuan pendidikan yaitu menjadikan manusia Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Konsep pendidikan holistik menjadi dasar dari pendekatan SIT, yang menganggap bahwa pendidikan harus mencakup pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Hal ini sejalan dengan teori *multiple intelligences* yang diusulkan oleh Howard Gardner, yang menekankan bahwa setiap individu memiliki beragam jenis kecerdasan yang perlu dikembangkan. Menurut Roe dan Norton (dalam Komariah, & Cepi Triatna), pengelolaan program sekolah secara holistik dan integratif meliputi: "1) Perencanaan program, 2) pengembangan, program; 3) Pengembangan kurikulum; 4) Pengembangan proses belajar mengajar; 5) Pengelolaan sumber daya manusia (guru, konselor, karyawan, dan sebagainya. 6) Pelayanan siswa; 7) Pengelolaan fasilitas; 8) Pengelolaan keuangan; 9) Pengelolaan hubungan sekolah-masyarakat; 10) evaluasi program; 11) Perbaikan program berkelanjutan" Out put sekolah dari aktivitas sekolah adalah segala sesuatu yang kita pelajari di sekolah. Out put sekolah secara mudah dapat dikatakan sebagai siswa yang berhasil keluar sebagai pemenang dari ajang pergulatan ilmu yang diakhiri dengan ujian-ujian dan menghasilkan nilai penghargaan, berupa angka-angka nilai. Out put sekolah fokusnya pada siswa, tetapi siswa yang memiliki kompetensi nalar, dan juga kompetensi lainnya. Out put sekolah, tidak hanya diukur dari lulusan tetapi pada umumnya, diukur dari tingkat kinerjanya. Kinerja sekolah bukan semata-mata kinerja siswa yang belajar, tetapi kinerja seluruh komponen sistem, artinya kinerja sekolah dalam pencapaian atau prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses persekolahan. Kinerja sekolah diukur dari efektivitasnya, kualitasnya, produktivitasnya, efesiansinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, surplusnya, dan moral kerjanya". Kesemuanya dimulai dari Perencanaan, sebagaimana dikonsepsikan [Roe dan Norton, perencanaan menjadi kajian pertama dalam pengelolaan program sekolah secara holistik dan integratif](#). Pada Bagian ini disajikan konsep penting yang perlu dipahami, dalam mengawali kajian atau pembahasan tentang perencanaan pendidikan: Sekolah Islam Terpadu, antara lain: pengertian perencanaan pendidikan; tujuan perencanaan pendidikan; manfaat perencanaan pendidikan; karakteristik perencanaan pendidikan; prinsip-prinsip perencanaan pendidikan; dan proses atau tahapan penyusunan perencanaan pendidikan.

A. Makna dan Hakikat, Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu

Konsep penting yang perlu dipahami, dalam mengawali kajian atau pembahasan tentang konsep perencanaan pendidikan, antara lain:

1. Makna dan Hakikat Perencanaan Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu

Pada haketnya perencanaan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi, seperti (peristiwa, keadaan, suasana), dan sebagainya. Perencanaan bukanlah masalah kira-kira, manipulasi atau teoritis tanpa fakta atau data yang kongkrit. Dan persiapan perencanaan harus dinilai. Dalam bidang pendidikan misalnya, "perencanaan merupakan salah satu faktor kunci efektifitas keterlaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan bagi setiap jenjang dan jenis pendidikan pada tingkat nasional maupun lokal".¹ Sehingga perencanaan merupakan unsur terpenting yang harus dilakukan sebelum memulai suatu kegiatan pendidikan.

Suatu kegiatan pasti didasari dengan sebuah rencana. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Dengan adanya perencanaan, akan diketahui bagaimana proses pendidikan akan dilangsungkan, sehingga tujuan pendidikan akan tercapai. Dalam makalah ini, kami akan membahas tentang definisi perencanaan pendidikan dan sejarah berkembangnya perencanaan pendidikan.

Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin.²

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (Udin Syaefudin, dkk.), perencanaan program adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu, oleh siapa, dan bagaimana³.

Pada sumber yang lain disebutkan bahwa perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.⁴

¹Udin Syaefudin Saud dan Abin Syamsuddin Makmun., *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya., 2007). v.

²Kahar Ustman dan Nadhirin, *Perencanaan Pendidikan*. (Kudus: STAIN Kudus, 2008). 1.

³Udin Syaefudin dkk., *Perencanaan*, . 4.

⁴St. Rodliyah., *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan Di Sekolah*. (Jember: Pustaka Pelajar, 2013), 101.

Dengan memiliki pemahaman akan pengertian perencanaan, kita dapat merumuskan sendiri fungsi dan tujuan perencanaan. Fungsi perencanaan adalah: (a) sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, (b) menghindari pemborosan sumber daya, (c) alat bagi pengembangan *quality assurance* dan (d) upaya untuk memenuhi *accountability* kelembagaan.⁵

Sedangkan pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan padanya, karena hanya manusia yang dapat dididik dan mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental emosional, moral, serta keimanan dan ketakwaan manusia.

Guruge (dalam Udin Syaefudin, dkk., 2007), mendefinisikan perencanaan pendidikan sebagai proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidika. Definisi lain sebagaimana dikemukakan oleh Albert Waterston bahwa perencanaan pendidikan adalah investasi pendidikan yang dapat dijalankan dan kegiatan-kegiatan pembangunan lain yang didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial. Menurut Coombs bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan untuk lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakat. Dari beberapa definisi para ahli di atas unsur penting yang terkandung dalam perencanaan pendidikan itu: "(1) Penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis dalam perencanaan pendidikan, (2) Proses pembangunan dan pengembangan pendidikan, (3) Prinsip efektifitas dan efisiensi, (4) Kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat".⁶

Dengan demikian, yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu (sesuai dengan jangka waktu perencanaan) agar menyelenggarakan sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan lulusan yang lebih bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.⁷

Dari beberapa definisi tentang perencanaan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep yang ada dalam pengertian perencanaan pendidikan adalah: (1) suatu rumusan rancangan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi dan tujuan pendidikan; (2) memuat langkah

⁵ Udin Syaefudin dkk., *Perencanaan*, . 5.

⁶ Udin Syaefudin dkk., , *Perencanaan*, . 6-9.

⁷ Kahar Ustman dkk., *Perencanaan*, . 2.

atau prosedur dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan; (3) merupakan alat kontrol pengendalian perilaku warga satuan pendidikan (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, komite sekolah); (4) memuat rumusan hasil yang ingin dicapai dalam proses layanan pendidikan kepada peserta didik; dan (5) menyangkut masa depan proses pengembangan dan pembangunan pendidikan dalam waktu tertentu, yang lebih berkualitas.

2. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu

Ada beberapa tujuan perlunya penyusunan suatu perencanaan pendidikan dalam konteks Sekolah Islam Terpadu, antara lain:⁸

- a. Untuk standar pengawasan pola perilaku pelaksana pendidikan, yaitu untuk mencocokkan antara pelaksanaan atau tindakan pemimpin dan anggota organisasi pendidikan dengan program atau perencanaan yang telah disusun;
- b. Untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diberlakukan dan bagaimana proses penyelesaian suatu kegiatan layanan pendidikan;
- c. Untuk mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya) dalam pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan, baik aspek kualitas maupun kuantitasnya, dan baik menyangkut aspek akademik-nonakademik;
- d. Untuk mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan;
- e. Untuk meminimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien, baik dari segi biaya, tenaga dan waktu selama proses layanan pendidikan;
- f. Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh (*integral*) dan khusus (*spesifik*) tentang jenis kegiatan atau pekerjaan bidang pendidikan yang harus dilakukan;
- g. Untuk menyerasikan atau memadukan beberapa sub pekerjaan dalam suatu organisasi pendidikan sebagai ‘*suatu sistem*’;
- h. Untuk mengetahui beragam peluang, hambatan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi organisasi pendidikan; dan
- i. Untuk mengarahkan proses pencapaian tujuan pendidikan.

⁸Sagala, S. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan..* (Bandung: Alfabeta, 2009).. 21.

Adapun, manfaat dari suatu perencanaan pendidikan yang disusun dengan baik bagi kehidupan kelembagaan, antara lain:⁹

- a. Dapat digunakan sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan proses aktivitas atau pekerjaan pemimpin dan anggota dalam suatu lembaga pendidikan;
- b. Dapat dijadikan sebagai media pemilihan berbagai alternatif langkah pekerjaan atau strategi penyelesaian yang terbaik bagi upaya pencapaian tujuan pendidikan;
- c. Dapat bermanfaat dalam penyusunan skala prioritas kelembagaan baik yang menyangkut sasaran yang akan dicapai maupun proses kegiatan layanan pendidikan;
- d. Dapat mengefisiensikan dan mengefektifkan pemanfaatan beragam sumber daya organisasi atau lembaga pendidikan;
- e. Dapat membantu pimpinan dan para anggota (warga sekolah) dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan atau dinamika perubahan sosial-budaya;
- f. Dapat dijadikan sebagai media atau alat untuk memudahkan dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak atau lembaga pendidikan yang terkait, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan;
- g. Dapat dijadikan sebagai media untuk meminimalkan pekerjaan yang tidak efisien atau tidak pasti; dan
- h. Dapat dijadikan sebagai alat dalam mengevaluasi pencapaian tujuan proses layanan pendidikan.

3. Peran dan Fungsi Perencanaan Program Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu

Perencanaan pendidikan berada diantara dua bagian yaitu pada bagian satu perencana berperan untuk menyediakan berbagai hal yang dibutuhkan oleh sistem persekolahan pada satu sisi dan sisi yang lainnya, kita menemukan pembuat kebijakan, masyarakat umum dan semua pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan yang oleh perencana pendidikan harus dimasukkan dalam praktik. Pembuat kebijakan dan masyarakat sama-sama memiliki pengaruh yang sangat kuat pada perencana, bahkan sering memberikan berbagai instruksi.

⁹ Endang Soenarya.. *Pengantar Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem*. (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa 2000), 21.

Pembuat kebijakan menyediakan input kepada perencana yang berkaitan dengan pekerjaan mereka, dan pekerjaan perencana adalah menentukan hal-hal yang bersifat umum tentang cara sekolah akan terlihat dan beraktivitas. Dengan demikian, dapat dikatakan, bahwa di sini ada arus pengaruh dari pembuat kebijakan kepada perencana sistem persekolahan, tetapi kemudian ketika perilaku sekolah mempengaruhi banyak orang maka apa yang terjadi pada sekolah juga akan mempengaruhi masyarakat, yang didalamnya juga adalah para pembuat kebijakan kepada keputusan.

Jadi perencana pendidikan berada di tengah-tengah dari arus pengaruh yang mengarah pada sekolah (lembaga-lembaga social yang sensitif) itu. "Semua ini adalah alasan untuk mengaitkan peran perencana pendidikan dengan bidang pekerjaannya. Dengan demikian, suatu peran sentral berada ditengah-tengah dua bagian penting yaitu sekolah disatu sisi dan pembuat keputusan dan kebijakan disisi yang lainnya".¹⁰.

Banyak diantara para ahli yang mengemukakan pendapat tentang fungsi-fungsi perencanaan. Louis A Allen, (dalam Hasibuan 2016), mengkonsepsikan bahwa perencanaan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh seorang manajer untuk dijalankan pada saat ini dan masadepan. Kegiatannya, meliputi: *forecasting; establishing objective; polic; programming; prosedure; scheduling*"¹¹ Keenam kompon fungsi tersebut apa bila diterapkan dalam perencanaan pendidikan, antara lain sebagai berikut:

- a. Peramalan (*forecasting*), perencanaan harus dapat meramalkan, memperkirakan waktu yang akan datang tentang keadaan pasar, perkembangan situasi konsumen, kemajuan teknik, dan kebijaksanaan pemerintah. Ramalan-ramalan itu disusun secara sistematis dan berkesinambungan serta berusaha mendahului kondisi-kondisi pada waktu yang akan datang.
- b. Penetapan tujuan (*establishing objectives*), dalam rangka peramalan ini manajer harus menentukan dengan tegas hasil akhir yang diinginkan. Menetapkan tujuan ini merupakan tugas dari perencana (*planner*). Tujuan harus dikembangkan untuk menentukan semua kegiatan yang akan dilakukan.

¹⁰Matin, *Perencanaan Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013), 6.

¹¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*, (Jakarta : Bumi Aksara 2016), 113

- c. Pemrograman (programming), perencanaan harus menetapkan prosedur kegiatan-kegiatan dan biaya-biaya yang diperlukan untuk setiap kegiatan untuk tercapainya tujuan yang diinginkan. Manajer memperkuat langkah-langkah tindakan yang akan diambil berdasarkan prioritas pelaksanaannya.
- d. Penjadwalan (scheduling), manajer harus dapat menentukan waktu yang tepat karena ini merupakan suatu ciri dari tindakan yang baik. Manajer menentukan waktu dan kegiatan-kegiatannya melalui penyusunan jadwal, kapan harus dimulai dan berapa lama setiap aktivitas dikerjakan.
- e. Penganggaran (budgeting), penyusunan anggaran belanja harus dilakukan oleh perencanaan dalam mengalokasikan sumber-sumber dana yang ada serta penetapan besarnya anggaran untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. Dalam hal ini ditentukan alat-alat, tenaga kerja serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan melaksanakan acara-acara secara efektif dan efisien.
- f. Pengembangan prosedur (developing procedure, untuk penghematan, efektivitas, dan keseragaman diusahakan sebaik-baiknya, sehingga pekerjaan-pekerjaan tertentu harus dilakukan dengan cara yang tetap sama dimana pun pekerjaan itu diselenggarakan.
- g. Penetapan dan penafsiran kebijaksanaan (establishing and interpreting policies), untuk menjamin keseragaman dan keselarasan tindakan dalam menguasai masalah-masalah dan situasi pokok, seorang menetapkan, dan menafsirkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Suatu kebijaksanaan adalah keputusan yang senantiasa berlaku untuk masalah-masalah yang timbul berulang-ulang dalam perusahaan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan fungsi utama manajer. Pelaksanaan pekerjaan tergantung pada baik buruknya suatu rencana. Perencanaan harus diarahkan pada tercapainya tujuan, jika tujuan tidak tercapai mungkin disebabkan oleh kurang baiknya rencana. Perencanaan harus didasarkan atas kenyataan-kenyataan objektif dan rasional untuk mewujudkan adanya kerja sama yang efektif. Perencanaan juga harus memikirkan matang-matang tentang anggaran, kebijaksanaan, program, prosedur, metode, dan standar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta perencanaan harus memberikan dasar kerja dan latar belakang bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya.

4. Landasan Konseptual Perencanaan Sekolah Islam Terpadu

Konsep pendidikan holistik menjadi dasar dari pendekatan SIT, yang menganggap bahwa pendidikan harus mencakup pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Hal ini sejalan dengan teori *multiple intelligences* yang diusulkan oleh Howard Gardner, yang menekankan bahwa setiap individu memiliki beragam jenis kecerdasan yang perlu dikembangkan. SIT mengembangkan dirinya dengan pengelolaan program sekolah secara holistik dan integratif. Konsep pendidikan holistik merupakan suatu model pendidikan yang membangun manusia secara keseluruhan dan utuh dengan mengembangkan semua potensi manusia yang mencakup potensi sosial-emosi, potensi intelektual, potensi moral atau karakter, kreatifitas, dan spiritual. Jika dicermati, "istilah holistik sendiri berasal dari bahasa Inggris dari akar kata "whole" yang berarti keseluruhan. Berpandangan holistik artinya lebih memandang aspek keseluruhan daripada bagian-bagian, bercorak sistemik, terintegrasi, kompleks, dinamis, non-mekanik, dan non-linier"¹² Di samping itu, "istilah holistik juga diambil dari kata dasar *heal* (penyembuhan) dan *health* (kesehatan). Secara etimologis memiliki akar kata yang sama dengan istilah *whole* (keseluruhan)"¹³ Hal ini mengindikasikan bahwa berpikir holistik berarti berpikir sehat. Dalam al-Quran dijelaskan bahwa manusia diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Fiman Allah SWT, dalam Surah. Al-Tin: 4;

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: "sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (QS. Al-Tin [95]: 4).

Atas dasar itu, pendidikan di atas idealnya pendidikan Islam dikelola secara holistik dan integratif. Sebab tujuan utama pendidikan Islam itu sendiri adalah untuk membangun manusia yang kamil (sempurna). Maka tak ada pilihan lain bagi lembaga pendidikan Islam kecuali mengarahkan pada aspek pembentukan karakter dan kemampuan intelektual secara holistik sesuai dengan kadar dan kemampuan serta jenjang masing-masing. Istilah integrasi ilmu ini khususnya ilmu agama adalah Naquib Al-Attas dan Ismail Al-Faruqi dengan konsep islamisasi ilmunya. Dapat di desain mulai dari perencanaan, pelaksanaa, dan evaluasi secara terpadu dan berlelanjutan.

¹² Heriyanto, Husain, 2003, *Paradigma Holistik, Dialog Filsafat, Sains, dan kehidupan menurut Shadra dan Whitehead*, (Bandung: Teraju, 2003): 12

¹³ Webster, Noah. *Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language*. (Buenos Aires: William Collins Publisher Inc, 1980), 643.

a. Landasan Perencanaan Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu

Perencanaan pendidikan merupakan "sebuah langkah nyata untuk menuju ke masa depan dalam hal yang berkaitan dengan penentuan kebijakan, prioritas dan biaya-biaya selama proses pendidikan yang disesuaikan dengan keadaan pada bidang ekonomi, sosial, dan politik yang kesemuanya dipergunakan untuk menunjang pengembangan seluruh potensi dari semua unsur yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut, dimana semua rencana yang telah disusun harus dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan peserta didik dan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia"¹⁴

Di dalam pendidikan Islam antara ilmu sains dan ilmu agama adalah merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Bahkan penyatuan keduanya adalah merupakan tuntutan aqidah, artinya alam semesta adalah ciptaan Allah yang pengelolaan dan pelestariannya telah diatur hukum-hukumnya, sementara agama Islam adalah pedoman hidup yang keduanya merupakan ayat-ayat Allah SWT yang dinamakan ayat kauniyah dan ayat qauliyah yang berisi perkataan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-‘Alaq:1;

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling Pemurah. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya".(Qs. Al-‘Alaq [96]:1).

Ayat ini mengisyaratkan perintah kepada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan membaca, baik teks maupun konteks dan jika penerapannya digabungkan dengan ayat-ayat kauniyah, maka akan menghasilkan banyak ilmu. Diantaranya ilmu geografi, biologi, sosiologi, kedokteran dan lain-lain. Sementara ayat-ayat tanziliah akan menghasilkan ilmu al-Qur’an, ilmu tafsir, dan ilmu ekonomi. Oleh karenanya tidak ada dikotomi dalam ilmu pengetahuan. Semua Ilmu bersumber dari Allah SWT. Tugas pendidik adalah memberikan

¹⁴ Abdurrahman. "Pengembangan Desain Dan Pendekatan Perencanaan (Planning) Dalam Manajemen Pendidikan Islam". *Al-Tanzim-Jurnal Manajemen Pendidikan*. 1: 2 (April, 2017), 15

pemahaman kepada peserta didik bahwa agama Islam dengan hukum-hukum syariah dan adab-adabnya, telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. oleh karenanya ilmu agama dan ilmu sains berasal dari sumber yang satu yaitu Allah SWT.

Ayat-ayat di atas memberi arahan kepada manusia bahwa al-Qur'an adalah sumber pokok ilmu pengetahuan yang meliputi seluruh cabang-cabang ilmu yang dibutuhkan manusia. Nurmadiyah, dalam Nuraeni, dkk. menegaskan bahwa: "Membaca adalah latihan pengenalan, ingatan, pengamatan, penuturan, dan kreativitas serta yang paling mendasar adalah sekaligus merupakan bahan pengajaran. Sementara menulis merupakan satu-satunya cara untuk melanggengkan ilmu, sebagaimana al-Qur'an pertama kali dibukukan pada zaman khalifah Utsman bin Affan ra. Kemudian berkembang pada penulisan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang diikuti dengan penulisan ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu tajwid, qawaid ilmu, dan lain-lain".¹⁵ Demikian Allah SWT memuliakan manusia dengan ilmu, dan al-Qur'an merupakan bahan pokok pengajaran.

b. Konsep Perencanaan pendidikan: Sekolah Islam Terpadu

Sebuah perencanaan pendidikan tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak memiliki landasan yang kuat. Terlebih pendidikan Islam yang senantiasa berlandaskan pada landasan yang pokok dan utama yaitu al-Qur'an, dan bersyukur bahwa di Negara Republik Indonesia landasan pendidikan Nasional dan landasan pendidikan Islam adalah searah dan sesuai dengan syariat Islam. sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah:2

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Artinya "Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa". (QS. Al-Baqarah [2]:2).

Sayyid Quthb, menjelaskan dalam kitab *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an*, bahwa:

1) Hakikat al-Qur'an adalah sebagai petunjuk, baik dalam karakter, entitas, maupun esensinya. 2) Petunjuk yang dibawa oleh al-Qur'an hanya akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Sebab dengan takwa yang dimiliki oleh seorang manusia akan membawanya kepada percaya dan meyakini apa yang disampaikan oleh Allah SWT lewat al-Qur'an. 3) Seseorang yang bertakwa juga akan memiliki hati yang bersih dan lapang, sekaligus memiliki rasa takut,berani, dan waspada. Beliau mengibaratkan bahwa seorang yang bertakwa adalah seseorang yang berjalan di atas duri, yang pastinya akan berhati-hati, bersungguh-sungguh, serta waspada. Sebab pada dasarnya

¹⁵ Nuraeni dkk. "Landasan dan Prinsip-Prinsip Perencanaan Pendidikan Islam"*Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education* . 2:2, (Juli, 2021) 113,

kehidupan di dunia penuh dengan duri yang mengharuskan seseorang senantiasa waspada. Dengan semua yang dimiliki oleh orang yang bertakwa, maka al-Qur'an akan membukakan pintu-pintu rahasia kebahagiaan dunia dan akhirat"¹⁶

Oleh karena fungsi al-Qur'an sebagai petunjuk, maka dalam hal perencanaan al-Qur'an memberikan petunjuk pada surah Al-Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرَ نَفْسٌ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Hasyr [59]: 18).

Secara eksplisit ayat di atas menyampaikan betapa pentingnya sebuah perencanaan untuk hari esok, baik perencanaan untuk jangka panjang maupun perencanaan jangka pendek, baik untuk diri sendiri maupun untuk sebuah lembaga, terlebih sebuah lembaga pendidikan.

Sebuah perencanaan tidak terlepas dari masa lalu, oleh karenanya masa lalu dapat dijadikan pelajaran untuk menyusun rencana masa depan agar kegagalan masa lalu tidak terulang di masa yang akan datang. Sebuah perencanaan pendidikan harus memuat unsur-unsur analisis yang bersifat rasional dan sistemik yang terkait dengan pembangunan dilakukan dengan tujuan reformasi pendidikan yang berkesinambungan dan menyeluruh serta dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Adapun langkah-langkah yang sistemik yang dimaksud adalah; "Penyusunan tujuan-tujuan secara terperinci, mulai dari tujuan umum hingga tujuan khusus, menyelaraskan susunan perencanaan dengan tujuan yang ingin dicapai, melaksanakan semua rencana yang telah disusun, secara bertahap, efektif, dan efisien, dan mengadakan evaluasi dari semua perencanaan yang telah dibuat dan dilaksanakan"¹⁷

c. Dasar Kebijakan Perencanaan pendidikan: Sekolah Islam Terpadu

Implementasi atau perencanaan pendidikan, merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan publik lainnya. Fungsi dari setiap keputusan publik juga diintegrasikan dengan keputusan-keputusan lainnya. Proses perencanaan pendidikan di

¹⁶ Quthb, S. *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an* (Di Bawah Naungan Al-Qur'an. (Jakarta: Robbani Press. 2008), 133

¹⁷ Ridwan, A. "Implementasi Fungsi Planning di Sekolah Dalam Kerangka Manajemen Pendidikan Islam". *Indonesian Journal of Islamic Educational Management*, 2:2, (Oktober, 2020), 75

Indonesia diarahkan pada relevansi, efisiensi, dan efektivitas pendidikan, sehingga sasaran pendidikan akan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah digariskan. Ini pada awalnya adalah pendekatan perencanaan konvensional.

Hanya saja dalam tataran implementasi, apa yang telah digariskan seringkali berbeda dengan kenyataan di lapangan, sehingga optimalisasi kinerja manajemen pendidikan belum berjalan sesuai harapan. Dalam hal inilah, diperlukan perencanaan strategis yang tanggap terhadap tuntutan perubahan, tanpa melupakan misi, visi, mandat dan nilai-nilai yang telah ditetapkan.

- a. Paradigma Implementasi Perencanaan Pendidikan; Paradigma perencanaan lama yang bersifat sentralisasi juga telah bergeser dengan lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 jo No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Menurut Bryson dan John M, (2008), Undang-undang ini memberi kewenangan yang lebih luas pada provinsi, kabupaten dan kota untuk mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi yang dimilikinya. Dan, tentu juga, agar pemerintah daerah bisa bersikap adaptif dan kreatif terhadap perubahan lingkungan eksternal yang cepat dan dinamis. Dengan digariskannya kebijakan tentang Otonomi Daerah, termasuk di bidang penyelenggaraan pendidikan, maka implikasinya berdampak pada perubahan sistem perencanaan.¹⁸
- b. Logika dasar Implementasi Perencanaan Pendidikan; Logika dasar dari implementasi adalah bahwa dalam lingkungan dunia yang berubah secara pesat dan tak menentu, suatu organisasi memerlukan kemampuan untuk perubahan perencanaan dan manajemen secara cepat. Maka kemampuan untuk senantiasa melakukan penangkapan lingkungan eksternal dari organisasi, serta upaya terus-menerus untuk senantiasa melakukan penelaahan kemampuan dan kelemahan internal, menjadi prasyarat bagi organisasi untuk tetap strategis dan relevan. Pada perencanaan konvensional yang merupakan paradigma lama, perencanaan berangkat dari penetapan tujuan jangka panjang. Berdasarkan tujuan tersebut, segenap daya dikelola untuk mencapai tujuan tersebut. Sebaliknya, perencanaan strategis memiliki logika yang berbeda. Justru perencanaan strategis berangkat dari misi, mandat, dan nilai-nilai yang menjadi dasar suatu organisasi untuk berkembang, serta visi organisasi di masa mendatang.

¹⁸Bryson dan John M.. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 108.

Udin Syaefudin dkk., memandang; "analisis yang mengaitkan antara misi dan visi, serta perkembangan lingkungan eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal ini, akan membawa organisasi menemukan arah menuju yang paling strategik. Dengan begitu, organisasi akan tetap menjadi relevan. Di sisi lain, organisasi juga tidak mungkin menjadi pendukung yang efektif bagi kesejahteraan komunitasnya, kecuali organisasi tersebut meningkatkan kemampuannya untuk berpikir dan bertindak strategik".¹⁹

B. Karakteristik, Prinsip, dan Syarat Perencanaan Pendidikan

1. Karakteristik Perencanaan Pendidikan

Berdasarkan beberapa pengertian, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup perencanaan pendidikan tersebut di atas, maka ciri-ciri (karakteristik), suatu perencanaan pendidikan antara lain, perencanaan pendidikan harus, memenuhi ciri-ciri, sebagai berikut:²⁰

- a. Berorientasi pada visi, misi kelembagaan yang akan diwujudkan;
- b. Mempunyai tahapan program jangka waktu tertentu (jangka pendek, menengah dan panjang) yang akan dicapai secara berkesinambungan;
- c. Mengutamakan nilai-nilai manusiawi, kerana pendidikan itu membangun manusia yang berkualitas, yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakatnya;
- d. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan segala potensi peserta didik secara maksimal;
- e. Komprehensif dan sistematis dalam arti tidak praktikal atau segmentasi tetapi menyeluruh, terpadu (*integral*) dan disusun secara logis, rasional serta mencakup berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- f. Diorientasikan untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia (sdm) yang berkualitas, yang sanggup mengisi berbagai sektor pembangunan;
- g. Dikembangkan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan berbagai komponen pendidikan secara sistematis;
- h. Menggunakan sumber daya (*resources*) internal dan eksternal secermat mungkin;

¹⁹ Udin Syaefudin dkk., , *Perencanaan*, . 78-79;

²⁰Tilaar.H.A.R. *Manajemen Pendidikan Nasional (Kajian Pendidikan Masa Depan)*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya., 1998) 32.

- i. Berorientasi kepada masa datang, karena pendidikan adalah proses jangka panjang dan jauh untuk menghadapi berbagai persoalan di masa depan;
- j. Responsif terhadap kebutuhan yang berkembang di masyarakat dan bersifat dinamik; dan
- k. Merupakan sarana mengembangkan inovasi pendidikan, sehingga proses pembaharuan pendidikan terus berlangsung dengan baik.

2. Prinsip-prinsip Perencanaan Pendidikan

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pendidikan, antara lain:²¹

- a. Prinsip *interdisipliner*, yaitu menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. Hal ini penting karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik harus menyangkut berbagai jenis pengetahuan, beragam ketrampilan dan nilai-norma kehidupan yang berlaku di masyarakat.
- b. *Prinsip fleksibel*, yaitu bersifat lentur, dinamik dan responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Hal ini penting, karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik adalah menyiapkan siswa untuk mampu menghadapi perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan beragam tantangan kehidupan terkini.
- c. Prinsip *efektifitas-efisiensi*, artinya dalam penyusunan perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang, sehingga perencanaan itu ‘berhasil guna’ dan ‘bernilai guna’ dalam pencapaian tujuan pendidikan.
- d. Prinsip *progress of change*, yaitu terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk berkarya dan bergerak maju ke depan dengan beragam pembaharuan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, sesuai dengan peranan masing-masing.
- e. Prinsip objektif, rasional dan sistematis, artinya perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisa kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional (memungkinkan untuk diwujudkan secara nyata), dan mempunyai sistematika dan tahapan pencapaian program secara jelas dan berkesinambungan.

²¹Langgulung, H., *Asas-asas Pendidikan Islam*. (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1992). 33.

- f. Prinsip *kooperatif-komprehensif*, artinya perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai suatu tim (*team work*) yang baik. Disamping itu perencanaan yang disusun harus mencakup seluruh aspek esensial (mendasar) tentang layanan pendidikan akademik dan non akademik setiap peserta didik.
- g. Prinsip *human resources development*, artinya perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal dalam mensukseskan program pembangunan pendidikan. Layanan pendidikan pada peserta didik harus betul-betul mampu membangun individu yang unggul baik dari aspek *intelektual* (penguasaan *science and technology*), aspek *emosional* (kepribadian atau akhlak), dan aspek *spiritual* (keimanan dan ketakwaan), atau disebut IESQ yang unggul.

3. Syarat Syarat Perencanaan Pendidikan

Perencanaan membutuhkan pemikiran yang mendalam dengan pemikiran yang mendalam akan membantu proses perencanaan yang akan dibuat. Pemikiran tersebut dilandasi dengan keikhlasan dan keinginan untuk merencanakan suatu sebuah perencanaan bersama. Lebih dari dalam proses perencanaan hendaknya memperhatikan pendapat dan aspirasi bersama.

a. Unsur-unsur Syarat Perencanaan Pendidikan

Asnawir (2006), dalam bukunya Manajemen Pendidikan, *paling* tidak dalam menyusun perencanaan pendidikan perlu memperhatikan empat unsur: ²²

- 1) Tujuan hendaknya jelas, yang tercakup perumusan sasaran untuk mencari solusi dari problem yang ada.
- 2) Menetapkan teknik pengumpulan dan pengolahan data
- 3) Berorientasi ke masa depan yang bersifat prediksi.
- 4) Adanya kegiatan yang tersusun, terangkai untuk mencapai tujuan.

Keempat unsur tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi manajer sebelum menyusun perencanaan. Hal ini perlu karena berhubungan dengan kualitas, efektifitas dan efisiensi dalam isi kebijakan yang tersusun dalam perencanaan.

b. Unsur-unsur Syarat Perencanaan Pendidikan

²² Asnawir *Manajemen Pendidikan*, (Padang: IAIN IB Press), 2006. . 21.

Selanjutnya selain memperhatikan unsur-unsur tersebut perlu diperhatikan syarat-syarat dalam menyusun perencanaan, yaitu:

- 1) perencanaan dalam lembaga pendidikan hendaknya memperhatikan dan didasarkan kepada tujuan yang jelas.
- 2) Dalam perencanaan hendaknya mengutamakan aspek kesederhanaan, realistis dan praktis.
- 3) Terinci dan memuat segala uraian, klasifikasi kegiatan dan rangkaian kegiatan sehingga memudahkan pelaksanaan serta memedomaninya.
- 4) Memperhatikan fleksibilitas sehingga mudah beradaptasi dengan keadaan, kebutuhan dan kondisi dan situasi.
- 5) Menghindari duplikasi dalam pelaksanaannya.

Dari uraian tersebut tergambar bahwa perencanaan dilakukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan, di sisi lain, perencanaan di susun berdasarkan prioritas, efektif dan efisien.

Perencanaan. Intinya adalah kegiatan yang harus dilakukan pada tingkat permulaan, lebih dari itu perencanaan merupakan aktifitas pemikiran, pemilihan rangkaian tindakan yang mengarah kepada tercapainya tujuan yang ingin diraih.

Sejalan dengan itu, ditegaskan oleh Atmosudirdjo (1982), bahwa setiap rencana mengandung tiga ciri khas, yaitu: (1) selalu mengenai masa mendatang (future, teokomst), (2) selalu mengandung kegiatan tertentu dan bertujuan (action, doelstellige activiteiten) yang akan dilakukan, dan (3) mesti ada alasan sebab, motif atau landasan baik personal (pribadi, perorangan) organisasional maupun kedua-duanya.²³ Apa yang dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirdjo selain memuat unsur penting dalam perencanaan, juga menekankan pentingnya alasan yang mendasari pembuatan suatu perencanaan. Setiap perencanaan yang dibuat harus memiliki alasan yang kuat, baik alasan praktis maupun alasan ideal.

C. Ruang lingkup Dimensi Jenis Perencanaan Pendidikan

Ruang lingkup perencanaan dipengaruhi oleh dimensi waktu, spasial, dan tingkatan teknis perencanaan. Ketiga dimensi ini saling berinteraksi dan masing-masing dimensi tersebut sebagai berikut:²⁴

²³ Atmosudirdjo, Prajudi. *Administrasi dan Management Umum*. (Jakarta: Ghalia. Indonesia., 1982). 25

²⁴ Usman, H. *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2010), 81-85.

1. Perencanaan dari Dimensi Waktu

a. Perencanaan Jangka Panjang (Long Time Planning)

Perencanaan jangka panjang meliputi cakupan waktu di atas 10 tahun samapai dengan 25 tahun. Perencanaan ini memiliki jangka menengah, lebih-lebih lagi jika dibandingkan dengan perencanaan jangkla pendek. Dengan demikian perencanaan tahunan bukan hanya sekedar pembabakan dari rencana 5 tahun, tetapi merupakan penyempurnaan dari rencana itu sendiri.

Perencanaan ini meliputi jangka waktu 4 lebih sampai 8 tahun ke atas untuk lingkungan Kendikbud. Dalam perencanaan ini belum ditampilkan sasaran-sasaran yang bersifat kuantitatif, tetapi lebih kepada proyeksi atau perspektif atas keadaan ideal yang diinginkan dan pencapaian keadaan yang bersifat fundamental, seperti propenas.

b. Perencanaan Jangka Menengah (Medium Term Planning).

Perencanaan ini meliputi jangka waktu satu tahun lebih sampai dengan empat tahun untuk lingkungan Kemendikbud. Di Indonesia umumnya 5 tahun. Perencanaan jangka panjang ini merupakan penjabaran atau uraian perencanaan jangka panjang. Walaupun perencanaan jangka panjang ini masih bersifat umum, tetapi sudah ditampilkan sasaran-sasaran yang diproyeksikan secara kuantitatif, seperti propeda. Di sekolah disebut Rencana Kerja Sekolah (RKS)

Perencanaan jangka menengah mencangkup kurun waktu pelaksanaan 5-10 tahun. Perencanaan ini penjabaran dari jangka panjang, tetapi sudah lebih bersifat operasional.

c. Perencanaan Jangka Pendek

Jangka waktunya kurang maksimal satu tahun untuk Kemendikbud. Perencanaan jangka pendek tahunan (*annual plan*) disebut juga perencanaan operasional tahunan (*annual operational planning*), seperti proyek-proyek . Di lingkungan sekolah disebut Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 tahun, sering disebut sebagai rencana operasional.

Adapun, kegiatan-kegiatan apakah yang terdapat dalam penyusunan rencana tahunan? secara garis besar jenis kegiatan dan tahapannya meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan umum
- 2) Penyusunan kebijakan teknis
- 3) Penyusunan rancangan penyesuaian kebijaksanaan
- 4) Penyempurnaan program
- 5) Penyusunan uraian kegiatan operasional proyek-proyek (UKOP)
- 6) Identifikasi proyek
- 7) Penyusunan pra-DUP (Daftar Usulan Proyek)
- 8) Penyusunan DUP Depdikbud
- 9) Pembahasan DOP, antara Depdikbud, Bapenas dan Departemen Keuangan
- 10) Penyusunan UKOP
- 11) Penyusunan Pra-DIP (Daftar Isian Proyek)
- 12) Pembahasan Pra-DIP, antar Depdikbud, Bapenas, dan Dirjen Anggaran
- 13) Penyempurnaan UKOP
- 14) Penyelesaian DIP (dari konsep DIP yang telah disetujui).

2. Perencanaan dari Dimensi Spasial

Perencanaan dilihat dari dimensi spasial adalah perencanaan yang memiliki karakter yang terkait dengan ruang dan batasan wilayah.

a. Perencanaan Nasional

Perencanaan Nasional adalah suatu proses penyusunan perencanaan berskala nasional sebagai konsensus dan komitmen seluruh rakyat Indonesia yang **terarah**, terpadu, menyeluruh untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, memerhatikan dan memanfaatkan sumber daya nasional dan memerhatikan perkembangan internasional. Contoh Propenas dan perencanaan pendidikan di Indonesia.

b. Perencanaan Regional

Perencanaan Regional ialah pilihan antarsektor dan hubungan antarsektor dalam suatu wilayah (daerah) sehingga disebut sebagai perencanaan daerah atau wilayah. Misalnya, propeda dan perencanaan pendidikan di provinsi/ kabupaten/ kota.

c. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang ialah perencanaan yang mengupayakan pemanfaatan fungsi kawasan tertentu, mengembangkannya secara seimbang, baik secara ekologi, geografis, maupun demografis. Misalnya perencanaan tata kota, perencanaan permukiman, perencanaan kawasan, perencanaan daerah transmigrasi, dan proyek-proyek.

3. Perencanaan dari Tingkatannya

Kebutuhan akan perencanaan timbul karena semakin kompleksnya permasalahan yang muncul dalam masyarakat modern. Yang dimaksud dengan permasalahan pendidikan adalah, permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh dunia pendidikan. Permasalahan pendidikan tersebut menurut Burlian Somad, secara garis besar meliputi beberapa hal yaitu: Adanya ketidak jelasan tujuan pendidikan, ketidak serasian kurikulum, ketiadaan tenaga pendidik yang tepat dan cakap, adanya pengukuran yang salah ukur serta terjadi kekaburan terhadap landasan tingkat-tingkat pendidikan.²⁵

Permasalahan muncul karena adanya suatu aktifitas atau kejadian yang menyimpang dari yang seharusnya terjadi. Permasalahan seperti jumlah penduduk, kebutuhan akan tenaga kerja, ekologi, penurunan sumber daya, serta penggunaan perkembangan ilmu pengetahuan yang sembarangan, menempatkan institusi pendidikan untuk dapat menemukan solusinya. Jika institusi pendidikan diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut, maka kemampuan merencanakan menjadi suatu keharusan.

Selanjutnya Burlian Somad (1980), menjelaskan bahwa, dikarenakan manajemen pendidikan berkaitan dengan penataan pendidikan, maka permasalahan pendidikan di tinjau berdasar level manajemen pendidikan itu dapat dikategorikan menjadi tiga level permasalahan pendidikan yaitu: permasalahan makro, meso dan mikro.²⁶

Menurut Nanang Fattah (2008), ada beberapa jenis perencanaan pendidikan yang harus diperhatikan, yaitu:²⁷

²⁵ Burlian, Somad. *Beberapa Persoalan dalam Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1981) 107.

²⁶ Husaini Usman, 2010. *Manajemen:Teori,.....*, 108.

²⁷Nanang Fattah, 2008. *Landasan Menejemen Pendidikan*, (Bandung: PT. Bandung: Remaja Rosakarya, . 54-55.

a. Perencanaan Makro

Adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Rencana pembangunan nasional meliputi rencana pada bidang ekonomi dan sosial.

Dipandang dari sudut perencanaan makro, tujuan yang harus dicapai negara (khususnya dalam bidang peningkatan SDM) adalah pengembangan sistem pendidikan untuk menghasilkan tenaga pembangunan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Secara kuantitatif pendidikan harus menghasilkan tenaga yang cukup banyak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sedangkan secara kualitatif harus dapat menghasilkan tenaga pembangunan yang terampil sesuai dengan bidangnya dan memiliki jiwa Pancasila. Untuk melaksanakan fungsi perencanaan makro ini, strategi pendidikan hendaknya memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan dengan jelas. Tujuan ini dijabarkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik.
- 2) Pemerintah memegang peranan utama dalam pengambilan keputusan dan menciptakan mekanisme kerja yang efektif.
- 3) Sumber-sumber pembiayaan harus dimobilisasikan dari sektor yang ada.
- 4) Prioritas harus disusun, baik yang berkenaan dengan bentuk, tingkat dan jenis pendidikan.
- 5) Alokasi biaya harus disediakan menurut prioritas yang telah ditetapkan.
- 6) Penilaian yang berkesinambungan harus selalu dilaksanakan dan program direvisi berdasarkan penilaian itu.
- 7) Pelaksanaan pendidikan mendapat latihan sesuai dengan tugas yang akan dikerjakannya.

Perencanaan makro adalah perencanaan tentang ekonomi dan nonekonomi secara internal dan eksternal. Perencanaan ekonomi makro meliputi berapa pendapatan nasional yang akan ditingkatkan, berapa tingkat konsumsi, investasi pemerintah dan swasta, tingkat ekspor impor, pajak, bunga bank, dan sebagainya. Pada setiap perencanaan pembangunan pendidikan nasional, sebelum dirumuskan secara rinci dalam perencanaan sektoral dan regional maka diperlukan perencanaan makro yang menggambarkan kerangka makro pendidikan yang berinteraksi satu sama lainnya. Gunanya untuk melihat keseimbangan kedua faktor tersebut, baik secara internal maupun eksternal, seperti perencanaan pendidikan nasional.

Perencanaan ini, berkaitan dengan permasalahan pendidikan di tingkat Makro. Kendala peningkatan mutu pendidikan ini disebabkan karena pemberian peranan yang kurang proporsional terhadap sekolah, kurang memadainya perencanaan, pelaksanaan, dan ketidaksesuaian pengelolaan sistem kurikulum, lingkungan kerja yang tidak kondusif, tidak cukupnya jam pelajaran, kurangnya sumber daya, dan pengadaan staf, serta tidak merata secara nasional.

Adapun solusi yang ditawarkan untuk perencanaan Peningkatan Mutu Pendidikan, yaitu:²⁸

- 1) Pengembangan kurikulum termasuk cara penyajian pelajaran dan system study pada umumnya.
- 2) Pengadaan buku-buku pelajaran pokok untuk murid serta buku pedoman guru sekolah dasar dan sekolah-sekolah lanjutan, buku-buku pelajaran kejuruan dan tehnik untuk sekolah-sekolah yang memerlukannya dan buku-buku perpustakaan dalam berbagai bidang study pada pendidikan tinggi ;
- 3) Pengadaan alat-alat peraga dan alat-alat pendidikan lainnya pada sekolah dasar (SD), TK, dan SLB, laboratorium IPA dan SMP&SMA, fasilitas dan perlengkapan latihan dan praktik pada sekolah-sekolah kejuruan dan tehnik serta laboratorium untuk berbagai bidang ilmu pendidikan untuk Perguruan Tinggi ;
- 4) Pengadaan buku bacaan yang sehat dan bermutu melalui perpustakaan sekolah.

Perlu kiranya dilakukan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan mutu guru antara lain, dengan presensi kedisiplinan guru; pertemuan guru/rapat guru untuk memperbaiki situasi belajar mengajar di sekolah; penataran guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru; mengikuti kursus pendidikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan guru; mengadakan lokakarya untuk meningkatkan mutu hidup pada umumnya serta mutu dalam hal pekerjaan.

Perencanaan makro pendidikan, berkaitan pula dengan solusi yang ditawarkan untuk Peningkatan, seperti halnya :

- 1) Perencanaan Kawasan; ialah perencanaan yang memerhatikan keadaan lingkungan dan kawasan tertentu sebagai pusat kegiatan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif tertentu. Contohnya perencanaan pendidikan kawasan Indonesia Timur.

²⁸Depdiknas. *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah*. Buku 1. (Jakarta: Depdiknas, 2002). 112.

- 2) Perencanaan Proyek; ialah perencanaan operasional yang menyangkut operasinalisasi kebijakan dan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran sektor dan tujuan pembangunan. Contohnya Perencanaan Proyek Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan.

b. Perencanaan Meso

Kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro, kemudian dijabarkan keddalam program-program yang berskala kecil. Pada tingkat ini perencanaan sudah lebih bersifat operasional disesuaikan dengan departemen atau unit-unit.

Pertanyaan yang perlu dijawab dalam perencanaan meso mempunyai kesamaan dengan pertanyaan untuk tingkat makro, tetapi lebih terperinci dan kebebasannya dibatasi oleh apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan tingkat makro.

Perencanaan sektoral adalah kumpulan program dan kegiatan pendidikan yang mempunyai persamaan ciri dan tujuan. Perencanaan sektoral memproyeksikan sasaran pembangunan sektor pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditentukan. Walaupun perencanaan sektoral menekankan pada sektor tertentu, namun berhubungan dengan sektor lain. Misalnya kaitannya dengan sektor ekonomi dengan nonekonomi, seperti perencanaan pendidikan lokal/provinsi/kabupaten/kota.

Perencanaan meso/sektoral, berperan dalam meningkatkan rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. buktinya dari survei FGII (Federasi Guru Independen Indonesia), saat pertengahan tahun 2005. Sekarang pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta. guru bantu Rp, 460 ribu, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan pendapatan seperti itu, pastilah belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga, wal hasil banyak guru melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/lks, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya.²⁹

Sejak adanya UU Guru dan Dosen Pasal 10, memeberikan jaminan kelayakan hidup. Guru dan Dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai. Tetapi, masalah lain yang muncul yaitu kesenjangan kesejahteraan Guru Swasta dan Negeri. Dapat dilihat di lingkungan pendidikan swasta, kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal. Implikasinya pada kinerja yang dilakukan pastinya dalam pelaksanaan proses pendidikan antara lain, guru belum memenuhi standarisasi mutu Pendidikan Nasional, bahkan guru yang mengajar bukan pada bidang keahlian mereka. Solusi perencanaan yang ditawarkan, antara lain:

²⁹ Republika, 13 Juli, 2005.

- 1) Guru sebagai tenaga kependidikan juga memiliki peran yang sentral dalam penyelenggaraan suatu sistem pendidikan. Sebagai sebuah pekerjaan, tentu dengan menjadi seorang guru juga diharapkan dapat memperoleh kompensasi yang layak untuk kebutuhan hidup. Dalam teori motivasi, pemberian reward dan punishment yang sesuai merupakan perkara yang dapat mempengaruhi kinerja dan mutu dalam bekerja, termasuk juga perlunya jaminan kesejahteraan bagi para pendidik agar dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang selama ini masih terpuruk.
- 2) Dalam hal tunjangan sudah selayaknya dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi lebih memperhatikan tunjangan guru yang manusiawi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya mengingat peranan dari seorang guru yang begitu besar dalam upaya mencerdaskan suatu generasi. Di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan.
- 3) Merekrut jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kebutuhan di lapangan disertai dengan adanya peningkatan kualitas dan kompetensi yang tinggi, jaminan kesejahteraan dan penghargaan untuk mereka. Pembangunan sarana dan prasarana yang layak dan berkualitas untuk menunjang proses belajar-mengajar.

c. Perencanaan Mikro

Perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Contoh perencanaan mikro, yaitu kegiatan belajar mengajar.

Perencanaan mikro pendidikan adalah perencanaan yang disusun dan disesuaikan dengan kondisi otonomi daerah di bidang pendidikan. Perencanaan mikro disebut juga pemetaan pendidikan.

Perencanaan mikro pendidikan, terkait dengan permasalahan pendidikan di tingkat Mikro, seperti halnya korupsi di tingkat sekolah bukanlah suatu masalah baru bagi kebanyakan sekolah negeri. Hal ini turut andil dalam menyebabkab rendahnya mutu pendidikan dan

menimbulkan semakin mahal biaya pendidikan. Korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan diri sendiri sekarang ini merupakan praktek yang lazim dilakukan. Oleh sebab itu korupsi bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan. Adapun solusi yang ditawarkan:³⁰

- 1) Memerlukan pembaharuan kebijakan pendidikan melalui konsensus antara birokrat dan komunitas sekolah ;
- 2) Melacak isu soal perpindahan dan mutasi dan mengembangkan pendekatan adalah bagian penting dari sebuah kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan ;
- 3) Kelas dan sekolah harus dijadikan cermin oleh birokrasi pendidikan, bagaimana sebenarnya sistem pendidikan kita dijalankan ;
- 4) Membangun kontrol sosial di semua level pendidikan yang memungkinkan sekolah terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik ;
- 5) Dalam pelaksanaan program belajar mengajar guru, kepala sekolah, siswa, dan masyarakat harus tercermin dalam program penguatan kapasitas guru sekaligus kapasitas peran serta masyarakat;
- 6) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus terus berupaya mengevaluasi seluruh tools yang berkaitan dengan perangkat perundang-undangan yang dianggap lemah dan perlu diubah, terus berupaya meningkatkan kapasitas manajemen sekolah secara berkesinambungan ;
- 7) Membuat sebuah program perencanaan manajemen keuangan sekolah, agar warga sekolah semakin peduli pada setiap rencana yang akan sekolah tetapkan ;
- 8) Komite sekolah harus dapat menciptakan kondisi sekolah yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Alasannya sederhana, yaitu komite sekolah juga memiliki fungsi sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), pendukung (supporting agency), pengontrol (controlling agency), dan mediator. Komite sekolah merupakan kekuatan nyata yang tak pernah diberdayakan sekaligus diikutsertakan dalam menyusun RAPBS.

4. Perencanaan Menurut Teknisnya

Perencanaan pendidikan menurut tingkatannya, terdiri atas:

³⁰ Lampung Post 21 Juni 2012,

a. Perencanaan Strategik (Renstra)

Perencanaan strategik disebut juga dengan perencanaan jangka panjang. Perencanaan strategik digunakan untuk mengatakan suatu lungkup perencanaan yang lebih “*general*” disamping adanya beberapa jenis perencanaan lain yang disebut Stainer sebagai *medium tange programming* dan *short term budget and detailed functional plan*. Dikaitkan dengan permasalahan da bidang pendidikan, konsep perencanaan strategik dapat diterapkan dalam perencanaan pendidikan. Dengan perencanaan strategik, ada kecenderungan diperoleh suatu perumusan program yang lebih oprasional. Berbagai faktor baik internal (organisasi) maupun eksternal (lingkungan) yang berpengaruh pertlu diperhitungkan dalam proses perencanaan ini. Diperlukan penerapan pendekatan sistem ke dalam perencanaan pendidikan yang strategik, bertujuan untuk mencari bentuk dan identitas pada masa yang akan datang dengan mempertimbangkan berbagai hubungan yang kompleks dalam suatu sistem. Pendekatan sistem dalam renstra memberi dasar-dasar konseptual dalam perencanaan pendidikan, diharapkan dapat membantu dalam memecahkan masalah kependidikan yang kompleks tersebut.

b. Perencanaan Koordinatif (managerial)

Perencanaan koordinatif ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perencanaan koordinatif biasanya sudah terperinci dan menggunakan data statistik. Namun demikian, kadang-kadang juga menggunakan pertimbangan akal sehat. Perencanaan ini mempunyai cakupan semua aspek operasi suatu sistem yang meminta ditaatinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pada ingkat perencanaan strategik.

c. Perencanaan Oprasional

Perencanaan ini bersifat spesifik dan berfungsi untuk memberikan petunjuk konkret tentang bagaimana suatu program atau proyek khusus dilaksanakan menurut aturan, prosedur, dan ketentuan lain yang ditetapkan secara jelas sebelumnya. Dengan demikian, rencana operasional mudah diukur, peranan keberhasilan unit-unit mudah dibandingkan dan sekaligus dapat dijadikan ukuran keberhasilan. Artinya, rencana oprasional berfungsi sebagai instrumen yang cukup halus dan tajam untuk mengenali keadaan waktu lampau dan bisa atau akan dijadikan alat atau teknik perencanaan berikutnya.

D. Prosedur, Langkah dan Tahapan Penyusunan Perencanaan Perencanaan Pendidikan

1. Prosedur Perencanaan Pendidikan

Setiap kegiatan mempunyai prosedur, yaitu suatu cara yang ditempuh dalam kegiatan itu untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Prosedur dalam perencanaan adalah cara yang ditempuh oleh perencana untuk merealisasi usahanya agar dapat terwujud suatu konsep perencanaan. Prosedur perencanaan adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam proses perencanaan. Prosedur yang ditempuh oleh setiap perencana pendidikan seringkali bervariasi, tetapi dalam garis besarnya adalah sama. Prosedur perencanaan pendidikan akan membahas tentang perencanaan partisipatori yaitu suatu perencanaan yang dikerjakan bersama oleh wakil-wakil peminat pendidikan baik dari kalangan lembaga pendidikan maupun dari kalangan masyarakat. Bagian lain yang dibahas adalah tentang ramalan dan pemrograman (*forecasting*) dan pengambilan keputusan. Ada tiga bagian itu merupakan langkah umum dalam membuat rencana tertentu dalam pendidikan.³¹

a. Perencanaan Partisipatori

Kata partisipatori berasal dari partisipasi yaitu pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Perencanaan partisipatori berarti perencanaan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu kegiatan. Perencanaan partisipatori berarti perencanaan yang melibatkan beberapa yang berkepentingan dalam merencanakan sesuatu yang dipertentangkan dengan merencanakan yang hanya dibuat oleh seseorang atau beberapa orang atas dasar wewenang kedudukan, seperti perencana di tingkat pusat kepala-kepala kantor pendidikan di daerah, dan para kepala sekolah. Perencanaan partisipatori banyak melibatkan orang-orang daerah yang memiliki kepentingan atas objek yang direncanakan.

b. Ramalan dan pembuatan program (*forecasting*)

Forecasting mempunyai arti ganda, arti yang pertama adalah ramalan yang terbatas, yaitu apa kira-kira yang akan terjadi di lingkungan organisasi pendidikan pada masa yang akan datang. Atau perubahan apa kira-kira yang akan terjadi dalam masyarakat di lingkungan lembaga pendidikan. Misalnya ramalan tentang peledakkan jumlah penduduk, ramalan tentang pengaruh computer yang pesat memasuki kehidupan manusia, ramalan tentang perubahan hubungan sosial di masyarakat dan sebagainya. Contoh-contoh seperti itu dikatakan *Forecasting* atau ramalan yang terbatas. Arti *Forecasting* yang lebih luas atau lebih lengkap adalah di samping meramalkan keadaan perubahan dalam

³¹Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Dengan Pendekatan Sistem*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005). 45-46.

lingkungan organisasi, ia juga meramalkan kegiatan atau program organisasinya yang cocok dengan hasil ramalan terhadap lingkungan. Ia berusaha mengimbangi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi dengan perubahan-perubahan pada organisasi. Agar organisasi pendidikan dan masyarakat sejajar, sejalan maju dalam derap yang sama.

Untuk dapat membuat atau meramalkan kegiatan/ program yang tepat dalam lembaga pendidikan dalam usaha menyongsong atau mengantisipasi perubahan lingkungan perlu mengidentifikasi kondisi organisasi yang sekarang. Artinya kekuatan, kemampuan, dan potensi apa saja yang sudah dimiliki oleh organisasi perlu diketahui secara jelas. Begitu pula kelemahan-kelemahan organisasi itu perlu diidentifikasi. Sesudah hasil identifikasi keadaan organisasi pendidikan ini dikaitkan dengan hasil ramalan tentang perubahan lingkungan barulah membuat ramalan tentang perubahan lingkungan barulah membuat ramalan tentang kegiatan/ program untuk mengantisipasi perubahan tersebut.

Jadi *forecasting* dalam artinya yang lengkap atau luas mempunyai tiga macam kegiatan:

- 1) Meramalkan kemungkinan yang akan terjadi pada lingkungan/ masyarakat baik yang dekat maupun yang jauh, yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan lembaga pendidikan.
- 2) Mengidentifikasi kemampuan, potensi, dan situasi lembaga pendidikan itu sendiri termasuk sumber-sumber pendidikan. Begitu pula kelemahan-kelemahan yang ada dalam organisasi diidentifikasi seluruhnya.
- 3) Meramalkan atau membuat program baru untuk menyongsong atau mengantisipasi perubahan lingkungan, agar lembaga pendidikan dan masyarakat/lingkungan berjalan berimbang sama-sama memberi keuntungan.

c. Pengambilan keputusan

Setiap kegiatan pendidikan selalu disertai dengan pengambilan keputusan, sebab sebelum diputuskan rencana kegiatan itu tidak boleh dilaksanakan. Yang mengambil keputusan pada umumnya adalah manajer tertinggi atau administrator tertinggi atau tim manajer. Tetapi kegiatan diluar rutin dapat diputuskan oleh pejabat/orang lain, sebab kegiatan ini biasanya dilakukan oleh suatu panitia.

Dalam hal ini ketua panitialah yang memutuskan atas kesepakatan bersama. Kemudian keputusan diserahkan kepada manajer/ para manajer atau administrator pendidikan. Administrator beserta staf atau badan tertentu kemudian mempertimbangkan apakah keputusan panitia ini dapat dilaksanakan dalam kegiatan rutin apa tidak.

2. Langkah Pokok Perencana pendidikan

James A.F. Stoner dan Charles Wankel (2003), mengaskan bahw, precanaan harus jelas dan dapat dirangkum kedalam empat langkah pokok, yaitu sebagai berikut: ³²

a. Melakukan analisis situasi

Analisis yang dilakukan dalam tahap ini adalah analisis SWOT (Streghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Analisis ini mencakup peluang dan masalah yang ditimbulkan oleh trend an situasi pembeli, pesaing, biaya dan regulasi. Selain itu, termasuk pula di dalammmnya adalah kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan.

b. Menetapkan tujuan/sasaran

Tujuan dirumuskan secara spesifilk dan mengidentifikasi tingkat kinerja yang diharapkan untuk dicapai organisasi pada waktu tertentu di masa datang, dengan mempertimbangkan realitas masalah dan peluang lingkungan serta kekuatan dan kelemahan perusahaan.

c. Menyusun strategi dan program kerja

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, pengambil keputusan kemudian merancang strategi (tindakan jangka panjang untuk mencapai tujuan) dan program (tindakan jangka pendek spesifik untuk mengimplementasikan strategi).

Hasil dari perencanaan yang berfokus pada konsumen dapat menghasilkan sebuah keunggulan bersaing melalui: (1) Harga yang lebih rendah di bandingkan dengan para pesaing untuk manfaat yang sama; (2) Keunikan manfaat yang dapat menutupi harga tinggi; (3) Analisis keunggulan bersaing menunjukkan perbedaan dan keunikannya di antara para pesaing; (4) Bagi perusahaan yang ingin menikmati keunggulan bersaing di pasar, antara produknya, dan produk pesaing harus dapat di rasakan di pasaran; dan (5) Keunggulan bersaing diperoleh dengan mencari aspek-aspek diferensiasi yang akan di nilai superior oleh konsumen sasaran dan yang tidak mudah diduplikasikan oleh pesaingnya.

Dikarenakan perencanaan merupakan siklus tertentu dan dan melalui siklus tersebut suatu perencanaan bias dievaluasi sejak awal persiapan sampai pelaksanaan dan penyelesaian perencanaan. Dan secara umum, ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan di dalam perencanaan yang baik, yaitu: (1) Perencanaan yang efektif dimulai dengan tujuan secara lengkap dan jelas; (2) Adanya rumusan

³²James A.F. Stoner dan Charles Wankel. *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003). 128.

kebijaksanaan, yaitu memperhatikan dan menyesuaikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dengan factor-faktor lingkungan apabila tujuan itu tercapai; (3) Analisis dan penetapan cara dan sarana untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijaksanaan yang telah dirumuskan; (4) 4. Penunjukan orang - orang yang akan menerima tanggung jawab pelaksanaan (pimpinan) termasuk juga orang yang akan mengadakan pengawasan; dan (5) Penentuan system pengendalian yang memungkinkan pengukuran dan perbandingan apa yang harus dicapai, dengan apa yang telah tercapai, berdasarkan criteria yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, berdasarkan unsure-unsur dan langkah-langkah dalam perencanaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perencanaan merupakan suatu proses yang diakui dan perlu dijalani secara sistematis dan berurutan karena keteraturan itu merupakan proses rasional sebagai salah satu property perencanaan pendidikan.

3. Proses Tahapan Penyusunan Perencanaan Pendidikan

Banghart and Trull dalam Sa'ud (2007), menjelaskan ada beberapa tahapan yang semestinya dilalui dalam penyusunan perencanaan pendidikan, antara lain:³³

a. Tahap *Need Assessment*

Pada tahap *need assessment*, yaitu melakukan kajian terhadap beragam kebutuhan atau taksiran yang diperlukan dalam proses pembangunan atau pelayanan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Kajian awal ini harus cermat, karena fungsi kajian akan memberikan masukan tentang: (1) pencapaian program sebelumnya; (2) sumber daya apa yang tersedia, dan (2) apa yang akan dilakukan dan bagaimana tantangan ke depan yang akan dihadapi.

b. Tahap *Formulation Of Goals And Objective*

Pada tahapan ini, yaitu perumusan tujuan dan sasaran perencanaan yang hendak dicapai. Perumusan tujuan perencanaan pendidikan harus berdasarkan pada visi, misi dan hasil kajian awal tentang beragam kebutuhan atau taksiran (*assessment*) layanan pendidikan yang diperlukan.

³³ Udin Syaefudin dkk., *Perencanaan*, .121-25.

c. Tahap *Policy And Priority Setting*

Pada tahap *policy and priority setting*, yaitu merancang tentang rumusan prioritas kebijakan apa yang akan dilaksanakan dalam layanan pendidikan. Rumusan prioritas kebijakan ini harus dijabarkan kedalam strategi dasar layanan pendidikan yang jelas, agar memudahkan dalam pencapaian tujuan.

d. Tahap *Program And Project Formulation*

Pada tahap *program and project formulation*, yaitu rumusan program dan proyek pelaksanaan kegiatan operasional perencanaan pendidikan, menyangkut layanan pendidikan pada aspek akademik dan non akademik.

e. Tahap *Feasibility Testing*

Pada tahap *feasibility testing*, yaitu dilakukan uji kelayakan tentang beragam sumber daya (sumber daya internal/ eksternal; atau sumber daya manusia/ material). Apabila perencanaan disusun berdasarkan sumber daya yang tersedia secara cermat dan akurat, akan menghasilkan tingkat kelayakan rencana pendidikan yang baik.

f. Tahap *Plan Implementation*

Pada tahap *plan implementation*, yaitu tahap pelaksanaan perencanaan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Keberhasilan tahap ini sangat ditentukan oleh: (1) kualitas sumber daya manusianya (kepala sekolah, guru, komite sekolah, karyawan, dan siswa); (2) iklim atau pola kerjasama antar unsur dalam satuan pendidikan sebagai suatu tim kerja (*team work*) yang handal; dan (2) kontrol atau pengawasan dan pengendalian kegiatan selama proses pelaksanaan atau implementasi program layanan pendidikan.

g. Tahap *Evaluation and Revision for Future Plan*

Pada tahap *evaluation and revision for future plan*, yaitu kegiatan untuk menilai (mengevaluasi) tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan, sebagai *feedback* (masukan atau umpan balik), selanjutnya dilakukan revisi program untuk rencana layanan pendidikan berikutnya yang lebih baik.

Ketujuh hal perlu mendapat perhatian dari para menejer yang akan menyusun perencanaan. Jika tidak diperhatikan, maka rencana yang disusun dianggap gagal. Kegagalan tersebut kemungkinan lebih besar jika dibandingkan dengan perencanaan yang memperhatikan ketujuh hal

tersebut. Dengan demikian ketujuh hal tersebut hendaknya menjadi perhatian para penyusun perencanaan agar tercapai tujuan. bersama. Hal lain yang perlu juga mendapat perhatian dalam menyusun perencanaan adalah jelasnya tujuan yang ingin dicapai, jelasnya tujuan yang kan dicapai, jelasnya potensi yang ada dan yang diharapkan, perlu keseimbangan, kesinambungan, koordinasi, keutuhan, data yang tepat dan menyeluruh serta adanya fleksibilitas.

Merujuk pada uraian dari pengertian perencanaan pendidikan sampai tahapan dalam penyusunan perencanaan pendidikan tersebut di atas, menunjukkan bahwa kedudukan perencanaan pendidikan dalam proses layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan adalah sangat penting, karena dengan adanya perencanaan pendidikan yang baik dapat:

- 1) Meningkatkan kualitas kegiatan atau aktivitas layanan pendidikan anak secara maksimal, baik menyangkut aspek akademik atau non akademik. Hal ini disebabkan seluruh aktivitas warga sekolah harus berdasarkan pada program yang telah disusun dengan baik dalam suatu perencanaan pendidikan secara sistematis dan integral.
- 2) Mengetahui beberapa sumber daya internal dan eksternal yang dimiliki untuk dimanfaatkan secara maksimal, dan juga mengetahui beberapa kendala, hambatan dan tantangan yang akan dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan. Hal ini disebabkan, suatu perencanaan pendidikan yang baik pasti akan memuat tentang beberapa peluang dalam mencapai tujuan dan prediksi tantangan atau hambatan yang akan muncul, serta strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.
- 3) Memberi peluang pada setiap warga sekolah dalam meningkatkan beragam kemampuan, keahlian atau ketrampilan secara maksimal, dalam rangka mewujudkan tujuan layanan pendidikan.
- 4) Memberikan kesempatan bagi pelaksana program untuk memilih beberapa alternatif pilihan tentang metode atau strategi atau pendekatan yang tepat dalam pelaksanaan perencanaan pendidikan, agar efektif dalam upaya mencapai tujuan pendidikan.
- 5) Memudahkan dalam pencapaian tujuan pendidikan, karena perencanaan pendidikan yang baik selalu dirancang dengan tahapan-tahapan pelaksanaan program layanan pendidikan (jangka pendek, menengah dan panjang), disamping itu telah disusun skala prioritas sasaran tujuan yang akan dicapai.

- 6) Memudahkan dalam melakukan evaluasi tentang seberapa besar pencapaian tujuan layanan pendidikan yang telah diraih, karena dalam perencanaan pendidikan yang baik selalu merumuskan indikator-indikator pencapaian tujuan dan instrumen apa yang dipakai dalam mengukur keberhasilan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan.
- 7) Memudahkan dalam melakukan revisi program layanan pendidikan dan proses penyusunan-perencanaan pendidikan berikutnya, sesuai dengan dinamika dan perkembangan kehidupan sosial-budaya.

Hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan perencanaan pendidikan, yaitu berikut: ³⁴

- 1) Perencanaan pendidikan hendaknya mengutamakan nilai- nilai manusiawi,
- 2) Perencanaan pendidikan hendaknya memberikan kesempatan untuk mengembangkan segala potensi peserta didik seoptimal mungkin.
- 3) Perencanaan pendidikan hendaknya memberikan kesempatan yang kepada peserta didik.
- 4) Perencanaan pendidikan hendaknya menyeluruh dan sistematis terpadu serta tersusun logis dan rasional.
- 5) Perencanaan pendidikan hendaknya bereorientasi kepada pembangunan sumber daya manusia.
- 6) Perencanaan pendidikan hendaknya dikembangkan dengan memperhatikan keterkaitan dengan berbagai komponen pendidikan secara sistematis.
- 7) Perencanaan pendidikan hendaknya menggunakan sumber daya secermat mungkin karena sumber daya yang tersedia langka.
- 8) Perencanaan pendidikan hendaknya beroreintasi kepada masa datang,
- 9) Perencanaan lembaga pendidikan hendaknya responsif terhadap kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat.
- 10) Perencanaan lembaga pendidikan hendaknya sarana untuk mengembangkan inovasi pendidikan hingga pembaharuan terus menerus.

Paling tidak dalam penyusunan perencanaan hendaknya memenuhi hal tersebut, jika hal tersebut tidak dilalui maka ada kemungkinan rencana yang telah dibuat akan sulit untuk di realisasikan. Dengan demikian untuk menghindarkan dari kegagalan dalam menyusun perencanaan, langkah terbaik adalah menggunakan langkah-langkah yang telah teruji kebenarannya dalam menyusun perencanaan.


³⁴ Asnawir *Manajemen Pendidikan*, (Padang: IAIN IB Press, 2006),. 21.


Tugas Mahasiswa

- Mengidentifikasi dan mengabstraksikan 4 poin penting dari kajian Perencanaan Program Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu:
 - Makna dan Hakikat, Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu
 - Karakteristik, Prinsip, dan Syarat Perencanaan Pendidikan
 - Ruang lingkup Dimensi Jenis Perencanaan Pendidikan
 - Prosedur, Langkah dan Tahapan Penyusunan Perencanaan Pendidikan
- Memukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
- Membatasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
Mata Kuliah :
Metode :
Oleh :
NIM :
JURUSAN :

 Isi /Aplod Foto Resmi Mu

 Isi Identitas MK & Individu

Resensi Rangkuman:

A Esensi/isi /Sub Materi

B Esensi/isi /Sub Materi

C Esensi/isi /Sub Materi

D Esensi/isi /Sub Materi

summary: Maksimal 10 kalimat

Temukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi

Ket:
Penulisan maksimal 500Kata

Isi /aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:

Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

- Mempresentasikan Hasil CK dalam bentuk Poster (untuk itu Membuat Poster menjadi wajib)

Part: 4

Dasar dan Strategi Pengembangan Program Sekolah Islam Terpadu

KEMAMPUAN AKHIR PEMBELAJARAN

Setelah mendapat materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

Memahami Dasar dan Strategi Pengembangan Program Sekolah Islam Terpadu

Mengidentifikasi Dasar dan Strategi Pengembangan Program Sekolah Islam Terpadu

Menjelaskan Dasar dan Strategi Pengembangan Program Sekolah Islam Terpadu

POKOK BAHASAN

1. Filosofi Pengembangan Program Sekolah Unggulan Islam Terpadu
2. Landasan Pengembangan Program Sekolah Unggulan Islam Terpadu
3. Konsep Strategi Pengembangan Program Pendidikan Islam Unggulan
4. Model Implementasi Strategi Pengembangan Program Pendidikan Islam

TOPIK BAHASAN

Pendidikan Islam memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk generasi yang siap menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Pendidikan Islam harus mampu menyelenggarakan proses pembekalan pengetahuan, penanaman nilai, pembentukan sikap dan karakter, pengembangan bakat, kemampuan dan keterampilan, menumbuhkembangkan potensi akal, jasmani dan rohani yang optimal, seimbang dan sesuai dengan tuntutan zaman. Namun pada kenyataannya, pendidikan Islam khususnya di Indonesia telah berjalan dalam lorong krisis yang panjang. Pendidikan Islam telah kehilangan pijakan filosofisnya yang hakiki, yang kemudian berdampak pada tidak jelasnya arah dan tujuan yang hendak dicapai. Untuk menjawab permasalahan tersebut, munculah gagasan Pendidikan Islam Terpadu; sebuah model pendidikan yang didesain dengan segala keterpaduan dari berbagai sisi dan aspek pendidikan yang meliputi visi, misi, kurikulum, pendidik, suasana pembelajaran dan lain sebagainya. Sekolah Islam Terpadu sebagai bentuk satuan pendidikan memiliki peran yang strategis dalam membentuk, membangun, membina dan mengarahkan siswa menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang berkarakter dan berkepribadian yang positif, memahami diri sendiri, terampil dan mampu berkerja sama dengan orang lain. Salah satunya diperankan Sekolah Islam Terpadu yang menerapkan konsep rabbaniyah, integratif, stimulatif, fasilitatif, inovatif, dan motivatif dalam kurikulumnya. Konsep pendidikan holistik menjadi dasar dari pendekatan SIT, yang menganggap bahwa pendidikan harus mencakup pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Hal ini sejalan dengan teori *multiple intelligences* yang diusulkan oleh Howard Gardner, yang menekankan bahwa setiap individu memiliki beragam jenis kecerdasan yang perlu dikembangkan. Roe dan Norton pengelolaan program terpadu secara holistik dan integratif meliputi: "1) Perencanaan program, 2) Daras Pengembangan, program; 3) Pengembangan kurikulum; 4) Pengembangan proses belajar mengajar; 5) Pengelolaan sumber daya manusia (guru, konselor, karyawan, dan sebagainya. 6) Pelayanan siswa; 7) Pengelolaan fasilitas; 8) Pengelolaan keuangan; 9) Pengelolaan hubungan sekolah-masyarakat; 10) evaluasi program; 11) Perbaikan program berkelanjutan" Out put sekolah dari aktivitas sekolah adalah segala sesuatu yang kita pelajari di sekolah. Oup tut sekolah secara mudah dapat dikatakan sebagai siswa yang berhasil keluar sebagai pemenang dari ajang pergulatan ilmu yang diakhiri dengan ujian-ujian dan menghasilkan nilai penghargaan, berupa angka-angka nilai. Out put sekolah fokusnya pada siswa, tetapi siswa yang memiliki kompetensi nalar, dan juga kompetensi lainnya. Out put sekolah, tidak hanya diukur dari lulusan tetapi pada umumnya, diukur dari tingkat kinerjanya. Kinerja sekolah bukan semata-mata kinerja siswa yang belajar, tetapi kinerja seluruh komponen sistem, artinya kinerja sekolah dalam pencapaian atau prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses persekolahan. Kkinerja sekolah diukur dari efektivitasnya, kualitasnya, produktivitasnya, efesiansinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, surplusnya, dan moral kerjanya". Pada Bagian ini disajikan konsep penting yang perlu dipahami, dalam mengawali kajian atau pembahasan Dasar-Dadar Pengembangan Program Pendidikan menjagi garapan kedua setelah perencanaan sebagaimana dikonsepsikan Roe dan Norton. Sekolah Islam Terpadu 1) Pengembangan Profesional Berkelanjutan: Mengembangkan program yang mencakup pelatihan berkelanjutan untuk guru dan staf. 2) Pembelajaran Kurikulu Berbasis Proyek: Implementasi program yang mendorong siswa untuk belajar melalui proyek nyata yang relevan. 3) Kepemimpinan Transformasional: Pemimpin sekolah bertindak sebagai agen perubahan yang mendorong inovasi dan peningkatan mutu. 4) Pengelolaan Mutu Terpadu (Total Quality Management): Memastikan bahwa semua aspek pengembangan program berfokus pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

A. Filosofi Pengembangan Program Sekolah Unggulan Islam Terpadu

Istilah pengembangan program pendidikan Islam dapat bermakna "kuantitatif; bagaimana menjadikan pendidikan Islam menjadi lebih banyak, merata, dan meluas pengaruhnya dalam konteks pendidikan, dan kualitatif; bagaimana menjadikan pendidikan Islam menjadi lebih baik, bermutu, dan lebih maju sejalan dengan nilai-nilai Islam".¹ Maka termasuk dalam pengertian kualitatif adalah bagaimana menjadikan pendidikan Islam sebagai suatu bangunan keilmuan yang kokoh dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional dan trans-nasional, serta pengembangan ipteks. Pengembangan pendidikan Islam dapat dilakukan dengan berpijak pada landasan/fondasi yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa landasan/fondasi pendidikan Islam dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: Landasan preskriptif (asumsi tentang kehidupan manusia yang ideal/diharapkan/dicita-citakan yang diharapkan menjadi titik tolak pada praktik pendidikan Islam), di antara landasan/fondasi yang termasuk dalam bagian ini adalah: Landasan/fondasi religius yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits; Manusia sebagai makhluk yang mulia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya, sehingga Allah memerintahkan para makhluk lainnya untuk memberi penghormatan kepada manusia. Hal ini seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam surat al-Hijr ayat 28-29. 9 Kemudian kemuliaan manusia dijelaskan oleh Allah dalam segi bentuk ciptaannya. Hal ini dijelaskan dalam surat at-Tiin ayat 4 bahwasannya Allah SWT telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya (ahsani taqwiim). (Al-Quran, QS. Al-Hijr [15]: 28-29). Dalam bahasa yang mudah dipahami bahwa manusia diberi bekal Jasad, Ruh, dan akal. Maka kemudian bagaimana potensi-potensi tersebut dapat tumbuh dan berkembang subur pada diri manusia adalah dengan dilakukannya pendidikan, sehingga dapat menjadi makhluk yang mulia dan sempurna.

1. Filofi Pengembangan Program Unggulan Sekolah Islam Terpadu

Hakikat sebuah pendidikan adalah "mendewasakan manusia"² penumbuhan personalitas dan rasa tanggung jawab. Ketika sebuah pendidikan dimaknai seperti hal tersebut, maka arti sebuah pendidikan adalah usaha yang harus dilaksanakan semaksimal mungkin dengan cara

¹ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 1.

² A.Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 3.

latihan baik berupa latihan fisik (*jasmaniah*), moral atau latihan mental sekaligus. Hal itu dilaksanakan demi tercapainya manusia yang berbudaya tinggi selaku hamba Allah yang selalu mengabdikan diri kepada-Nya, yakni "dengan mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya".³ Ibnu Qayyim *Rahimahullah*, memandang pendidikan adalah "*tarbiyah al-qalb* (pendidikan hati) dan *tarbiyah al-jism* (pendidikan badan). Beliau berkata "Antara hati dan badan kedua-duanya membutuhkan kepada pendidikan, oleh karena itu keduanya harus ditumbuhkembangkan dan ditambah gizinya sehingga mampu tumbuh secara sempurna dan lebih baik dari sebelumnya".⁴

Untuk dapat melakukan pengembangan pendidikan Islam diperlukan pemikiran pengembangan yang mengandung makna, yaitu: "1) bagaimana mengembangkan pendidikan Islam sehingga memiliki kontribusi yang signifikan bagi pembangunan masyarakat dan pengembangan ipteks; 2) bagaimana mengembangkan model-model pendidikan Islam yang lebih kreatif dan inovatif dengan tetap komitmen terhadap dimensi fondasional; 3) bagaimana menggali masalah-masalah operasional dan aktual pendidikan Islam untuk dibidik dari dimensi-dimensi fondasional dan strukturalnya; 4) bagaimana mengembangkan pemikiran pendidikan Islam seperti yang tertuang dan terkandung dalam literatur-literatur pendidikan Islam".⁵

Dengan demikian, pengembangan program pendidikan Islam dalam hal ini dapat diusahakan salah satunya dengan cara menerapkan program unggulan. Karena dengan adanya program unggulan akan memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan pendidikan yang akan dicapai, sehingga kemudian dapat ditemukan berbagai macam program unggulan dari berbagai lembaga pendidikan Islam, serta pada sisi kualitasnya juga akan perlahan-lahan mengalami peningkatan yang disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan.

2. Tantangan Pengembangan Program Unggulan: Sekolah Islam Terpadu

Adanya proses pendidikan ini sudah terjadi sejak lama, yakni sejak manusia itu diciptakan, karena memang manusia adalah makhluk berfikir (berlogika) bukan makhluk yang hanya berhayal belaka. Menurut para psikolog, "pandangan manusia terhadap dirinya sangat

³ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam (IPI)*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12.

⁴ Hasan bin Ali diterjemahkan oleh Muzaidi Hasbullah, *Manhaj Tarbiyah Ibnu Qoyyim*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 76-77.

⁵ Qomarudin, A. "Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam" *Jurnal Ta'limuna*, 9: 02, (September 2020), 137

dipengaruhi oleh pendidikannya, sedang dalam ajaran Islam telah dijelaskan secara eksplisit bahwa dengan pendidikan maka orang-orang yang beriman akan ditempatkan dan berada pada posisi yang terhormat".⁶

Tumbuh kembangnya lembaga pendidikan sebagai salah satu dari tempat proses mendidik khususnya lembaga pendidikan Islam di Indonesia adalah "dipusatkan oleh, dari dan untuk masyarakat Islam atau biasa dikenal dengan *community based education*. Lembaga pendidikan yang dibangun oleh mereka mempunyai sarana dan prasarana yang seadanya saja, hal itu bisa terjadi karena yang menjadi motivasi adalah semangat keagamaan yang menggebu-gebu demi tercapainya tujuan pendidikan yang diidam-idamkan dan hasilnya-pun tidak mengecewakan".⁷ Akan tetapi, masyarakat Indonesia sekarang ini sedang menghadapi tantangan besar, yang mau tidak mau pendidikan Islam harus ikut andil di dalamnya. Muhaimin dalam kajiannya, mengidentifikasi dua tantangan Pendidikan Islam, yaitu:⁸

- a. Desentralisasi atau yang telah kita kenal dengan istilah otonomi daerah (kewenangan dan pemberdayaan berada di tangan daerah) yang sudah berlangsung sejak tahun 2001. Kemudian direvisi dengan Undang-undang RI No 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah telah diberlakukan otonomi daerah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan". Adanya Rancangan Undang-Undang tersebut menuntut adanya perubahan sistem manajemen dari sentralisasi (berpusat pada pemerintah) ke desentralisasi (berpusat pada daerah). Ketika lembaga pendidikan diberi kewenangan dalam mengelola lembaga pendidikannya masing-masing, ternyata lembaga-lembaga yang ada menghadapi problem dari segi sumber daya manusianya untuk merealisasikan sebuah otonomi tersebut.
- b. Globalisasi di bidang budaya, etika dan moral, sebagai akibat dari kemajuan teknologi, transportasi dan informasi. Di zaman sekarang ini, segala sumber belajar mudah diakses. Baik sumber tersebut bersifat pedagogis terkontrol atau non pedagogis yang tidak terkontrol. Sumber belajar yang non terkontrol akan mudah mempengaruhi perubahan etika, moral maupun budaya pada diri siswa/masyarakat. Masyarakat yang semula tidak mengenal dunia mode, hiburan-hiburan atau film-film porno bahkan bacaan atau gambar yang berbau

⁶ Djoko Hartono dan Musthofa, *Mengembangkan Model Alternatif Pendidikan Islam Kritik atas sekolah Formal di Indonesia*, (Surabaya: Ponpes Jagad Ali mussirry, 2015) 1.

⁷ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 21.

⁸ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi*, 89-90.

porno yang dimuat di media masa, hal tersebut akhirnya menjadi hal biasa-biasa saja (*permissive*), bahkan ikut menjadi bagian dari itu. Akhirnya muncullah sikap kekerasan, pemerkosaan atau yang lain di kalangan masyarakat.

3. Solusi Pengembangan Program Unggulan Pendidikan Islam

Dari tantangan itu pendidikan Islam bersama dengan kekuatan yang lainnya yakni politik, ekonomi dan sosial mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hanya saja pendidikan Islam harus melakukan evaluasi terlebih dahulu kemudian melakukan reaktualisasi dengan jalan menyamakan kebijakan antara pendidikan Islam dengan pendidikan nasional untuk membebaskan dari belenggu-belenggu yang merusak tatanan bangsa Indonesia dan membebaskan masyarakat dari berbagai persoalan di atas. Bentuk perubahan pendidikan Islam, misinya adalah peningkatan mutu pendidikan dengan cara mengembangkan program unggulan di lembaga pendidikan yang nota bane-nya sebagai tolak ukur kemajuan dan kemunduran suatu bangsa dan negara, dan diharapkan mampu menyelesaikan krisis multidimensional di negara Indonesia. Dalam berbagai literatur pendidikan, istilah lembaga unggul biasa dikenal dengan lembaga berprestasi atau *good school* lawan dari *poor school*, atau *effective school* (sekolah efektif) lawan dari *ineffective school* (sekolah yang tidak efektif), atau *the moving school* lawan dari *the promedaning school* dan atau sekolah inti sebagai lawan dari sekolah imbas.⁹

B. Landasan Pengembangan Program Sekolah Unggulan Islam Terpadu

Istilah sekolah unggul pertama kali diperkenalkan Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Wardiman Djodjonegoro, tepatnya setelah satu tahun pengangkatannya, yakni pada tahun 1994. Sekolah unggul ini lahir dari sebuah visi ke depan yang berwawasan luas. Menurut pendapat Wardiman “Proses belajar mengajar selain sebagai ladang transfer *knowledge*, sumber daya manusia juga sebagai garapan untuk dikelola, yakni kehadiran sekolah unggul dipersiapkan untuk mencetak generasi yang mempunyai wawasan keunggulan dan kualitas yang tinggi dan bukan sebagai ajang diskriminasi”.¹⁰ Sedangkan kata “unggulan” secara umum berarti lebih tinggi dari pada yang lain; utama/tertinggi”.¹¹ Di Indonesia seringkali istilah ini disebut dengan istilah “model” atau “percontohan”. Selain itu juga ada yang

⁹ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan....*, 15-16.

¹⁰ Hani'Atul Khoiroh "Pengembangan Program Unggulan di Lembaga Pendidikan Islam", *JALIE Journal of Applied Linguistics and Islamic Education*; 4:1 (March, 2020), 157

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Diknas. 2008), 1246.

memakai istilah ”terpadu”, “laboratorium” atau “elite”. Dengan demikian, Madrasah Unggulan adalah sebuah lembaga pendidikan Islam dengan program unggulan yang lahir dari sebuah keinginan untuk memiliki tempat belajar yang mampu melahirkan prestasi-prestasi di tingkat nasional dan internasional dalam penguasaan akademik dan non-akademik dengan dilandasi oleh keimanan kepada Allah. Maka program unggulan adalah program yang dikembangkan bagi masukan (input) untuk dapat mencapai keunggulan keluaran (output) pendidikannya. Untuk mencapai keunggulan tersebut, maka masukan (input) harus dilakukan proses pendidikan yang berkualitas, guru dan tenaga kependidikan yang profesional, manajemen yang bermutu, serta sarana penunjang yang memadai.

Kemudian berkembang dengan adanya dua model lembaga pendidikan formal di Indonesia. "Model yang pertama adalah sekolah-sekolah yang dikenal dengan sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMU. Model yang kedua yaitu sekolah-sekolah yang dikenal dengan sekolah agama seperti MI, MTs dan MA. Model yang kedua inilah yang dalam sistem pendidikan nasional merupakan wujud dari lembaga pendidikan Islam. Di sekolah agama memiliki komposisi kurikulum 30 persen mata pelajaran agama sedangkan selebihnya 70 persen mata pelajaran umum".¹² Terakhir muncul Sekolah Islam Terpadu Sekolah Islam Terpadu pada hakikatnya adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep-konsep pendidikan berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah. Konsep operasional Sekolah Islam Terpadu (SIT) merupakan akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan, dan pengembangan ajaran agama Islam, budaya, dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. Istilah “Terpadu” dalam sekolah Islam Terpadu dimaksudkan sebagai penguat (taukid) dari Islam itu sendiri. Maksudnya adalah Islam yang utuh menyeluruh, integral, bukan parsial, syumuliah bukan *juz'iyah*. Hal ini menjadi semangat utama dalam gerak dakwah di bidang pendidikan ini sebagai “perlawanan” terhadap pemahaman sekuler, dikotomi, *juz'iyah*.”¹³

1. Landasan Sprirtual Pengembangan Program Pendiakaian

Landasan sekolah-sekolah Islam, secara prinsipial diletakkan pada dasar-dasar ajaran Islam dan seluruh perangkat kebudayaannya. Dasar-dasar pembentukkan dan pengembangan sekolah-sekolah Islam yang pertama dan utama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dari dasar-

¹² Muhammad Kholid Fathoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 64.

¹³ JSIT Indonesia, *Sekolah Islam Terpadu Konsep dan Aplikasi*, (Bandung, Syamil Cipta Media, 2006), 28.

dasar pendidikan Islam itulah kemudian dikembangkan suatu sistem pendidikan Islam yang mempunyai karakteristik sendiri yang berbeda dengan sistem pendidikan lainnya. Karakteristik pendidikan Islam adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Penekanan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan dan pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah SWT. yang sangat menekankan kepada nilai-nilai akhlak, maka dari itu kejujuran, sikap tawadhu^u, menghormati sumber pengetahuan dan sebagainya merupakan prinsip-prinsip penting yang perlu dipegangi setiap pencari ilmu.
- b. Pengakuan akan potensi dan kemampuan seseorang untuk berkembang dalam suatu kepribadian. Setiap pencari ilmu dipandang sebagai makhluk Tuhan yang perlu dihormati dan disantuni, agar potensi-potensi yang dimilikinya dapat teraktualisasi dengan sebaik-baiknya.
- c. Penekanan kepada pengamalan ilmu pengetahuan atas dasar tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat manusia

2. Landasan Pengembangan Program Pendidikan Terintegratif

Dalam hal ini sistem pendidikan Islam hendaknya memadukan pendekatan normatif- deduktif yang bersumber pada sistem nilai yang mutlak [Al-Qur^uan, Al-sunnah dan hukum Allah yang terdapat dalam alam semesta], dengan pendekatan normatif-induktif yang dapat melestarikan aspirasi umat dan peningkatan budaya bangsa sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dengan peranan program pendidikan yang didasarkan pada konsep variabelitas. Dengan demikian maka pendidikan Islam diproyeksikan pada hal-hal sebagai berikut ini:¹⁵

- a. Pembinaan ketakwaan dan akhlakul karimah yang dijabarkan dalam pembinaan enamkomponen keimanan, lima komponen keislaman dan multi aspek keikhlasan.
- b. Mempertinggi kecerdasan dan kemampuan anak didik
- c. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta manfaat dan aplikasinya. Meningkatkan kualitas hidup.
- d. Memelihara, mengembangkan dan meningkatkan kebudayaan dan lingkungan

¹⁴ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), 10.

¹⁵ Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1995), 118.

- e. Memperluas pandangan hidup sebagai manusia yang komunikatif terhadap keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, sesama manusia dan makhluk lainnya.

3. Landasan Regulasi Pengembangan Program Pendiain

Dasar pengembangan, program sekolah unggulan termaktub dalam GBHN 1993, yaitu yang berisi tentang "pemeratan kesempatan, relevansi, kualitas dan efesiensi", telah menjadi dasar pijakan dalam pengembangan sekolah unggulan, diantaranya: ¹⁶

a. Aspek Pemerataan Pendidikan

Aspek pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan mempunyai arti aksebelitas, ekualitas dan keadilan. Aksebelitas yang dimaksud adalah bahwa setiap anak memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkwalitas, tanpa memandang bahwa ia berkebutuhan khusus atau tidak. Ekualitas yakni setiap anak di manapun ia bertempat tinggal, mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sedangkan keadilan yang dimaksud adalah bahwa setiap anak mendapatkan perlakuan yang berbeda, menurut kondisi internal ataupun eksternal peserta didik tersebut yakni perbedaan dalam bakat, kemampuan dan minatnya.

b. Aspek Relevansi

Aspek relevansi pada hakekatnya terkandung makna "*link and match*" yang menekankan bahwa pembangunan pendidikan harus ditingkatkan, keterkaitannya dengan tuntutan pembangunan, baik kondisi saat ini maupun untuk masa datang. Kehadiran sekolah unggulan memberi peluang lebih besar terhadap upaya pengayaan kegiatan kurikuler dan ekstra kurukuler, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat memberikan sumbangan secara inovatif terhadap pusat-pusat keunggulan yang sesuai dengan ciri dan potensi masing-masing daerah.

c. Aspek Kualitas

Aspek kualitas pendidikan merujuk pada makna kualitas dari segi proses dan produk. Sebuah lembaga pendidikan dikatakan bermutu, manakala sebuah proses belajar mengajar atau KBM berjalan dengan efektif dan efisien dan peserta didik mengalami sebuah proses yang bermakna. Hal tersebut akan terwujud apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, dana yang mencukupi, dan sumber

¹⁶ Umiaraso & Imam Gojali, *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*, (Jogjakarta: Ircisod, 2011), 195

daya manusia yang mempunyai kualitas yang tinggi. Kehadiran sekolah unggulan ini merupakan intervensi sistematis yang diberikan terhadap KBM, sehingga memberikan jaminan kualitas proses yang meyakinkan.

d. Aspek Efektifitas

Efektifitas penggunaan sumber daya, keberadaan sekolah unggulan ini mempunyai nilai strategis dalam memacu keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha untuk berperan serta aktif dalam pembangunan pendidikan.

C. Konsep Strategi Pengembangan Program Pendidikan Islam Unggulan

1. Konsep Strategi Pengemngan Program Pendidikan Islam

Yang dimaksud dengan strategi adalah: "Suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Apabila dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru-murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan."¹⁷ Newman dan Logan, menegaskan bahwa strategi dasar arti setiap usaha meliputi empat masalah, yaitu:¹⁸

- a. Pengindentifikasian dan penepatan spesifikas, kualifikasi hasil yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang memerlukannya.
- b. Pertimbangan dan pemilihan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai sasaran.
- c. Pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak awal sampai akhir.
- d. Pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran baku yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan usaha yang dilakukan .

2. Strategi Pengemngan Program Pendidikan Islam

Apabila strategi tersebut diterapkan dalam konteks pengembangan program pendidikan, khususnya dalam pengembangan sekolah-sekolah Islam, keempat strategi dasar tersebut bisa diterjemahkan menjadi:

¹⁷ Abu Ahmadi, dkk, *Strategi Belajar Mengajar*, (Bandung, Pustaka Setia, 1997), 11

¹⁸ Kaelani "Strategi Pengembangan Pendidikan Islam" *Eduprof : Islamic Education Journal*, 3: 1, (Maret, 2021), 75

- a. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi serta kualifikasi perubahan kearah yang lebih baik dalam upaya pengembangan sekolah Islam.
- b. Memilih sistem pendekatan [kurikulum] dalam pengembangan sekolah Islam berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat.
- c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik pengembangan sekolah Islam yang dianggap paling tepat dan efektif.¹⁹
- d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria dan standar keberhasilan dalam pengembangan sekolah Islam.

Dari keempat strategi dasar tersebut dapat dijadikan pedoman oleh para manager /administrator / pengelola yayasan pendidikan dalam melakukan aktivitas penyempurnaan secara continuous, sistematis dan menyeluruh. Dari uraian di atas tergambar ada empat masalah pokok yang sangat penting untuk dapat dijadikan program dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pengembangan sekolah-sekolah Islam meliputi: kelembagaan, kurikulum, proses dan evaluasi.

3. Prinsip dan Strategi Pengembangan Program Unggulan

Pemetaan program unggulan dibutuhkan supaya tidak terjebak pada pengembangan program unggulan yang sama. Ibarat yang satu buka wartel (warung telepon), yang lain juga ikut buka wartel, atau yang satu jual roti yang lain juga ikut jual roti, sehingga karena banyaknya pesaing yang sama maka berakibat bangkrut. Pemetaan dimaksud agar lembaga pendidikan tersebut mampu menentukan, memilih dan memilih program unggulan dengan cara sebagai berikut:²⁰

- a. *Being different*: dalam mengembangkan program unggulan, menjadi yang berbeda adalah menjadi nilai plus. Dengan program yang berbeda lembaga pendidikan akan lebih di kenal dari pada lembaga yang mempunyai program yang sama, karena hal itu akan dipandang sebagai hal sudah biasa. Dikatakan program berbeda karena ada keunikan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain.

¹⁹ Kaelani "Strategi Pengembangan Pendidikan Islam" *Eduprof : Islamic Education Journal*, 3: 1, (Maret, 2021), 75

²⁰ Muhaimin, *Pemikiran*, 108-109.

- b. *Being the first*: menjadi yang pertama dalam mengembangkan program lembaga pendidikan menjadi kunci penting agar dapat bertahan serta tumbuh dan berkembang. Dengan menjadi yang pertama, maka akan dapat memenangkan persaingan di era kompetisi yang sangat ketat.
- c. *Being the best*: menjadi yang terbaik adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang mempunyai kualitas dibanding dengan lembaga yang lain berarti telah diakui oleh masyarakat sekitarnya.

Prinsip dalam mengembangkan program unggulan di atas menjadi pegangan bagi lembaga pendidikan untuk dapat selalu mengiringi kemajuan zaman (*up to date*) dan tidak ketinggalan zaman (*out of date*). Program-program unggulan dapat saja direkonstruksi akan tetapi muatan falsafah al-Qur'an dan nilai-nilai dasar pendidikan Islam harus tetap menjadi landasan strategis yang tidak bias dirubah maupun diganti. Adapun jalan menuju keunggulan yang dilaksanakan adalah

- a. *Taking bold action* (mengambil keputusan); adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih dari program yang dipilih.
- b. *Developing the strategy* (mengembangkan strategi); Menurut etimologi strategi yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *strategy* berarti ilmu siasat atau siasat akal. Adapun menurut terminologi strategi adalah sebuah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang khusus. Mengembangkan strategi berarti mengembangkan rencana program kegiatan untuk meningkatkan kualitas, memperbaiki sebuah program di masa sekarang ataupun yang akan datang.
- c. *Setting the goals* (mengatur tujuan); Mengatur tujuan merupakan upaya lembaga pendidikan untuk menentukan berbagai prioritas yang harus dikerjakan dalam mencapai program yang direncanakan dan mengidentifikasi apa yang harus dicapai.

D. Model Implementasi Strategi Pengembangan Program Pendidikan Islam

Strategi Pengembangan Pendidikan Islam Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner: Filosofis, Paedagogis, Psikologis dan Sosiologis. Untuk mengantisipasi hal tersebut masyarakat masih mempercayakan bahwa jalur pendidikan dianggap sangat dominan atau berkewajiban untuk membentuk manusia yang bermoral (mengintegrasikan imtaq dan iptek pada diri siswa), mendewasakan siswa atau sebut saja:

memanusiakan manusia sesuai dengan fitrah insaniah yang diberikan Allah SWT. Dalam mengemban tugas suci selaku khalifah fil ardh. Maka dari itu sudah seharusnya para pakar pendidikan Islam, pemerhati pendidikan dan tokoh masyarakat, membina dan mengembangkan atau bahkan membuat semacam lembaga pendidikan Islam yang dimenej dengan baik. Melihat urgensi yang demikian substantif dari eksistensi pendidikan bagi masyarakat sekarang dan masa depan, untuk itu penulis terketuk hatinya mengadakan penelitian Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner: Filosofis, Paedagogis, Psikologis dan Sosiologis yang bersumber pada Al-Qur‘an dan Al-Hadits, yang diintegrasikan dengan pendapat para ahli pendidikan, iptek dan evironment.

1. Strategi Induk Pengembangan Program Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menelaah, menganalisis, serta mengembangkan pemikiran, informasi, dan fakta-fakta yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini melibatkan perencanaan program dan kegiatan operasional yang mendukung pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) modern dalam kehidupan sosial dan keagamaan umat. Dalam menghadapi tantangan modernisasi, terutama dalam era kemajuan IPTEK, strategi pendidikan Islam mencakup empat pendekatan utama: "strategi substantif, strategi bottom-up, strategi deregulatory, dan strategi cooperative."²¹ Berikut adalah penjelasan rinci dari setiap strategi tersebut:

a. Strategi Substantif

Strategi substantif mengutamakan penyajian program-program pendidikan yang komprehensif dan integral, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang lebih luas. Pendekatan ini mencakup pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, yang mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam dengan pengetahuan ilmiah dan teknologi modern. Selain itu, strategi ini mendorong pembaruan metode pengajaran yang interaktif dan inovatif, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui pengembangan sumber daya manusia seperti guru dan tenaga pendidik yang memiliki kapasitas tinggi. Dalam era globalisasi, strategi substantif juga harus mencakup aspek spiritual dan intelektual peserta didik, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan kehidupan modern dengan landasan moral yang kokoh.

²¹ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi*,. 105-112.

b. Strategi *Bottom-Up*

Strategi *bottom-up* berarti pengembangan pendidikan Islam dimulai dari kebutuhan nyata yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pesantren, lembaga pendidikan Islam, dan institusi lokal lainnya dalam merancang program-program pendidikan yang relevan dengan konteks lokal. Proses *bottom-up* ini juga menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat bawah, sehingga pendidikan Islam tidak hanya menjadi alat transformasi sosial tetapi juga mencerminkan kebutuhan umat. Dengan cara ini, strategi *bottom-up* memungkinkan keberlanjutan pendidikan Islam yang relevan dan responsif terhadap perubahan sosial di era modernisasi, termasuk menghadapi perkembangan IPTEK.

c. Strategi *Deregulatory*

Strategi *deregulatory* bertujuan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam sistem pendidikan Islam dengan mengurangi ketergantungan pada aturan-aturan yang terlalu kaku dan sentralistik. Pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi, sehingga tidak terjebak dalam aturan yang membatasi inovasi dan kreativitas. Dalam konteks ini, institusi pendidikan Islam didorong untuk lebih mandiri dalam menentukan kurikulum, metode pembelajaran, dan pengelolaan institusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan perkembangan IPTEK. Dengan pendekatan *deregulatory*, pendidikan Islam dapat lebih luwes dalam merespons tantangan-tantangan baru tanpa terikat oleh ketentuan baku yang menghambat perkembangan.

d. Strategi *Cooperative*

Strategi *cooperative* berfokus pada pengembangan jaringan kerjasama antar lembaga pendidikan Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam era globalisasi, kolaborasi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan teknologi. Jaringan kerjasama dapat dilakukan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, pemerintah, dan sektor swasta untuk meningkatkan akses terhadap teknologi pendidikan, peluang riset, serta program pelatihan bagi tenaga pendidik. Selain itu, kerjasama ini juga memungkinkan pendidikan Islam untuk terus mengikuti perkembangan global, sehingga tetap relevan dalam menghadapi tantangan modernisasi dan kemajuan IPTEK.

2. Langkah Strategis Pengembangan Program Pendidikan Islam Unggulan

Selain itu, ada beberapa langkah strategi yang perlu diperhatikan dalam rangka mengembangkan program madrasah/sekolah Islam unggulan yaitu: ²²

a. Membangun berbagai kekuatan madrasah/sekolah Islam

Membangun kekuatan madrasah atau sekolah Islam memerlukan fondasi yang kokoh, dimulai dari peningkatan kualitas guru, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, hingga fasilitas yang mendukung. Madrasah atau sekolah Islam harus menjadi pusat keunggulan, di mana keilmuan agama dan ilmu pengetahuan umum berjalan seiring. Program pembinaan karakter, penguasaan teknologi, dan inovasi pendidikan juga harus diperkuat. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi dan komunitas lokal dapat memperkuat peran madrasah sebagai institusi yang berperan dalam mencetak generasi yang berkualitas, baik secara intelektual, moral, maupun spiritual.

b. Memperkuat kepemimpinan dan manajemen madrasah/sekolah Islam

Kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang efektif adalah kunci keberhasilan sekolah Islam unggulan. Kepala madrasah dan pengelola harus memiliki visi yang jelas tentang pengembangan pendidikan Islam, serta kemampuan untuk memotivasi dan membimbing para guru dan siswa. Peningkatan kompetensi manajerial melalui pelatihan, penerapan manajemen berbasis data, dan pengambilan keputusan yang berfokus pada pengembangan peserta didik sangat diperlukan. Kepemimpinan yang kolaboratif dan transformatif juga akan mampu menggerakkan seluruh elemen madrasah untuk mencapai tujuan bersama, sehingga madrasah mampu bersaing secara global.

c. Membangun pencitraan/image madrasah/sekolah Islam

Membangun citra positif madrasah atau sekolah Islam penting untuk menarik minat masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik. Citra yang baik dapat dibangun melalui pencapaian akademik, prestasi ekstrakurikuler, serta kontribusi nyata madrasah dalam kehidupan sosial. Pengelola madrasah juga perlu memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk memperkenalkan program unggulan mereka

²² Kaelani "Strategi Pengembangan , 77

secara luas. Mengikuti kompetisi pendidikan, kerja sama dengan lembaga internasional, serta menjaga hubungan baik dengan alumni juga akan memperkuat citra madrasah sebagai lembaga pendidikan yang progresif dan inovatif.

d. Pengembangan program-program unggulan

Madrasah atau sekolah Islam harus terus mengembangkan program-program unggulan yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Program unggulan bisa mencakup pendidikan berbasis sains dan teknologi, pengembangan keterampilan abad 21, hingga program kewirausahaan yang mendukung kemandirian peserta didik. Selain itu, pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan keterampilan sosial juga harus menjadi program utama. Melalui pengembangan program-program unggulan ini, madrasah akan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten dalam bidang agama, tetapi juga siap berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.

e. Mengubah mindset atau cara berpikir umat Islam

Mengubah mindset umat Islam tentang pendidikan sangat penting agar mereka memahami bahwa pendidikan modern tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Umat Islam perlu didorong untuk melihat pendidikan sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas hidup, baik secara spiritual maupun material. Pendekatan yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada masa depan perlu disosialisasikan, sehingga umat Islam siap menerima perubahan dan bersikap terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan mindset yang positif, umat Islam akan mendukung madrasah dan sekolah Islam untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman.

3. Ragam Bentuk Strategi Pengemnagan Program Pendidikan Islam Unggulan

Ragam bentuk program Unggulan Pendidikan Islam di Indonesia. Hani'Atul Khoiroh dalam jurnalna, mengidentifikasi Bentuk-bentuk Program Unggulan di Lembaga Pendidikan Islam, diantaranya: ²³

a. Sistem Full-Day-School

Sistem *full-day school* adalah sistem yang diperuntukkan untuk anak didik demi memperoleh lingkungan yang terdidik sehari-hari. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan pembentukan karakter yang penuh pada diri mereka. Sistem *full day school* merupakan ciri khas sekolah

²³ Hani'Atul Khoiroh "Pengembangan Program Unggulan , 161

terpadu yang pembelajaran dengan sistem *full day school* atau sistem pembelajaran dengan waktu sehari penuh dan hal tersebut mengharuskan lembaga pendidikan merancang perencanaan pembelajaran dari pagi hingga sore. Seluruh program dan kegiatan pembelajaran yang dirancang adalah program yang bernuansa islami dengan menambah materi keagamaan untuk diperdalam oleh siswa. *Full day school* merupakan model sekolah umum yang memadukan sistem pengajaran agama secara intensif yaitu dengan memberi tambahan waktu khusus untuk pendalaman keagamaan siswa. *Full day school* ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas anak baik dalam ranah kognitif, psikomotorik ataupun afektif, minat dan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler” Sebagaimana yang dikatakan oleh Sulistyaningsih.

b. Pembiasaan membaca al-Qur’an setiap hari

Pembiasaan membaca al-Qur’an ini dilaksanakan untuk mengatasi masalah masalah akan jarang nya sebuah proses pembelajaran al-Qur’an di kalangan masyarakat. Program ini diharapkan peserta didik mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai dengan ilmunya, bahkan mampu menghafalnya (minimal *tahfidzul Qur’an* Juz 30).

c. Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pendidikan agama Islam adalah sebuah program yang ditekankan pada pembiasaan atau habituasisai terhadap ajaran-ajaran Islam, yang gunanya untuk menjadikan manusia yang mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah (*maqaaman mahmuda*). Contoh dari program pendidikan agama Islam adalah sholat Dhuha berjamaah, pembiasaan membaca al-Qur’an, asmaul Husna, Istighasyah, sholat berjama’ah, pembacaan sholawat Nabi ataupun yang lainnya.

d. Program We can speak (kita dapat berbicara)

Program tersebut merupakan program pembelajaran dan pembiasaan yang dikembangkan guna membekali anak didik memiliki keterampilan berbahasa asing baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Arab dalam berkomunikasi sehari-hari. Program tersebut dilaksanakan dengan cara mendengar (*listening*), berbicara (*speaking*), membaca (*reading*), menulis (*writing*), tata bahasa (*grammar*) dan kosa kata (*vocabulary*) yang terangkum dalam tema-tema yang berhubungan dengan komunikasi sehari-hari di dalam kelas dan di luar kelas. Program

pembiasaan *we can speak* diselenggarakan misalnya dalam bentuk *drilling time*, *al-ibarah al-yaumiyah*, *English Days*, *Arabic Day*, *English on Stage* atau *English Camp*.

e. Pembelajaran Ekstrakurikuler

Pembelajaran ekstrakurikuler adalah sebuah program yang dilaksanakan di luar jam mata pelajaran, atau juga di waktu liburan. Program tersebut bertujuan untuk menyalurkan dan memperluas minat dan bakat anak didik, selain juga mengenalkan hubungan dari berbagai mata pelajaran yang ada. Pembelajaran ekstrakurikuler seperti: pencak silat, sepak bola, sepak takraw, banjari, nasyid (nyanyian islami), *English club*, *science*, *qira'ah*, ataupun yang lainnya. Adapun Prinsip yang harus digunakan dalam pembelajaran Ekstrakurikuler adalah sebagai berikut: a) Individual, yaitu dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler berdasarkan atas bakat dan minat yang sudah dimiliki oleh peserta didik; b) Pilihan, yaitu program yang diikuti menurut keinginan peserta didik, tanpa ada paksaan dari pihak manapun; c) Keterlibatan aktif, yaitu program yang diselenggarakan diikuti secara penuh oleh peserta didik; d) Menyenangkan, yaitu kegiatan yang diadakan membuat suasana yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik; e) Etos kerja, yaitu kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa semangat bekerja dengan baik dan sukses bagi peserta didik. dan f) Kemanfaatan sosial, yaitu program yang dilaksanakan demi kepentingan masyarakat.²⁸

f. Gerakan Sekolah bersih dan indah

Untuk membiasakan hidup bersih dan indah, sekolah mempunyai program yakni gerakan sekolah bersih dan indah. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama setiap sebulan sekali. Adanya gerakan ini dilatar belakangi akan kesadaran bahwa manusia dengan hidup bersih maka akan tumbuh sehat. Sebagaimana dalam Islam sudah menyebutkan sebuah hadits yang berbunyi *Atthahuuru syathrul Iman* (*Kebersihan itu separohnya dari iman*).²⁹

g. Kitab Kuning

Gerakan Kitab Kuning, yaitu sebuah program yang dilaksanakan dengan cara membaca kitab yang tidak yang tanpa berharakat dan tanpa makna gandum. Kitab kuning sendiri merupakan kitab keagamaan yang menggunakan bahasa Arab, yang dihasilkan oleh ulama'-ulama' dan pemikir Muslim lainnya. Selain istilah tersebut terdapat juga istilah akan kitab kuning yaitu "kitab klasik". Dikatakan seperti itu karena

kitab tersebut merujuk pada hasil karya ulama'ulama' tradisional yang *style*-nya ataupun bentuknya berbeda dengan kitan zaman sekarang. Adapun metode baca kitab kuning menurut Zamakhsyari Dhofier dan Nurcholish Madjid, yakni metode sorogan, dan bandongan.

h. Pendidikan Holistik-Integratif : Sekolah Islam Terpadu (SIT)

Sekolah Islam Terpadu pada hakikatnya adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep-konsep pendidikan berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah. Konsep operasional Sekolah Islam Terpadu (SIT) merupakan akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan, dan pengembangan ajaran agama Islam, budaya, dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. Istilah "Terpadu" dalam sekolah Islam Terpadu dimaksudkan sebagai penguat (taukid) dari Islam itu sendiri. Maksudnya adalah Islam yang utuh menyeluruh, integral, bukan parsial, syumuliah bukan *juz'iyah*. Hal ini menjadi semangat utama dalam gerak dakwah di bidang pendidikan ini sebagai "perlawanan" terhadap pemahaman sekuler, dikotomi, *juz'iyah*.²⁴ SIT juga berfokus pada pengembangan keterampilan kolaborasi dan kepemimpinan, yang penting dalam masyarakat yang semakin saling terhubung. Namun, meskipun fenomena SIT berkembang pesat, tantangan tetap ada dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi. SIT perlu terus beradaptasi dengan perubahan tuntutan pendidikan global, sambil tetap menjaga nilai-nilai Islam yang menjadi landasan pendidikan mereka. Manajemen SIT harus kreatif dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat, sambil tetap berkomitmen pada tujuan utama mereka: membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

4. Pengembangan Program Pendidikan Islam Unggulan

Untuk mencapai Sekolah atau Madrasah Unggul yang dapat menjadi model bagi lembaga pendidikan lainnya, diperlukan strategi khusus yang dapat memberdayakan dan memaksimalkan potensi sekolah/madrasah. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam mendesain model Sekolah/Madrasah unggulan:²⁵

a. Mendesain Model Sekolah/Madrasah yang Memiliki Keunggulan Sistem Pendidikan Islam

Sistem pendidikan Islam unggul harus mampu memadukan antara ilmu agama dan pengetahuan umum. Model sekolah/madrasah ini mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam setiap aspek pembelajaran dan aktivitas sehari-hari. Kurikulum yang diterapkan harus mendukung

²⁴ JSIT Indonesia, *Sekolah Islam Terpadu Konsep dan Aplikasi*, (Bandung, Syamil Cipta Media, 2006), 28.

²⁵ Mujamil Qomar, *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Emir, 2015), 297-305.

pembentukan karakter Islami yang kuat serta mendorong siswa untuk menjadi individu yang berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. Pengajaran Al-Qur'an, Hadits, serta penanaman etika dan moral menjadi inti dari sistem ini, ditambah dengan penguasaan sains dan teknologi modern yang relevan dengan kebutuhan zaman.

b. Mendesain Model Sekolah/Madrasah yang Memiliki Keunggulan Kepemimpinan

Keberhasilan sekolah/madrasah sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan yang ada. Pemimpin yang unggul harus memiliki visi yang jelas untuk membawa sekolah menuju kemajuan, serta kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola seluruh sumber daya yang ada. Kepemimpinan yang kuat ini juga harus mendorong kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua, serta mampu menginspirasi seluruh warga sekolah untuk terus berinovasi. Karakter pemimpin yang Islami juga harus menjadi teladan dalam mengedepankan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan.

c. Mendesain Model Sekolah/Madrasah yang Memiliki Keunggulan Sumber Daya Manusia

Guru dan tenaga pendidik merupakan elemen utama dalam menentukan kualitas pendidikan. Model sekolah/madrasah unggulan harus memiliki tenaga pendidik yang berkualitas, baik dari segi kompetensi akademik maupun pemahaman agama Islam yang mendalam. Peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga kualitas pengajaran. Selain itu, guru harus memiliki kemampuan untuk menjadi mentor dan role model yang mampu menginspirasi siswa untuk belajar dan berperilaku sesuai ajaran Islam.

d. Mendesain Model Sekolah/Madrasah yang Memiliki Keunggulan Potensi Spiritual, Intelektual, Amal, Keterampilan, dan Akhlak

Sekolah/madrasah unggulan harus mampu membina siswa secara holistik, meliputi aspek spiritual, intelektual, amal, keterampilan, dan akhlak. Pendidikan tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan potensi spiritual melalui pengajaran agama yang kuat, serta amal melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial. Keterampilan hidup seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kemandirian juga harus dikembangkan, sejalan dengan pembentukan karakter yang berakhlak mulia, cerdas, dan kompetitif.

e. Mendesain Model Sekolah/Madrasah yang Memiliki Keunggulan dalam Mengintegrasikan Ajaran Islam dan Sains

Pendidikan Islam yang unggul tidak hanya mempelajari ajaran agama, tetapi juga ilmu pengetahuan dan sains. Integrasi antara ajaran-ajaran agama Islam dan ilmu pengetahuan modern menciptakan harmoni antara spiritualitas dan intelektual. Sekolah/madrasah harus

merancang kurikulum yang mengajarkan sains dan teknologi melalui perspektif Islam, di mana ilmu pengetahuan dianggap sebagai sarana untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, siswa akan mampu memaknai ilmu yang mereka pelajari dalam konteks iman dan ketakwaan.

f. Mendesain Model Sekolah/Madrasah yang Memiliki Keunggulan Pembelajaran dengan Menggunakan Multimedia

Penggunaan teknologi dalam pendidikan telah menjadi kebutuhan penting di era digital ini. Model sekolah/madrasah unggulan harus mampu memanfaatkan berbagai media pembelajaran berbasis teknologi, seperti e-learning, video pembelajaran, simulasi, dan platform daring yang memudahkan siswa mengakses sumber belajar kapan pun. Multimedia memungkinkan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik bagi siswa, sehingga meningkatkan daya serap materi. Selain itu, penggunaan teknologi juga memperluas akses siswa ke pengetahuan global yang mendukung perkembangan mereka.

g. Mendesain Model Sekolah/Madrasah yang Memiliki Keunggulan Atmosfer Akademik

Atmosfer akademik yang kondusif merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Sekolah/madrasah harus didesain sedemikian rupa agar mampu membangun budaya belajar yang berorientasi pada prestasi dan kolaborasi. Lingkungan yang mendukung inovasi, riset, dan pengembangan diri akan membantu siswa mencapai potensi akademiknya secara maksimal. Ruang-ruang belajar harus dirancang dengan baik, dilengkapi dengan fasilitas modern, dan didukung oleh kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang pertumbuhan intelektual dan emosional siswa.

h. Mendesain Model Sekolah/Madrasah yang Memiliki Keunggulan Karakter

Pembentukan karakter yang kuat merupakan tujuan utama dari pendidikan Islam. Model sekolah/madrasah unggulan harus menekankan pendidikan karakter yang berlandaskan pada ajaran Islam, seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan empati. Karakter siswa yang baik akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas, yang nantinya siap memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Pendidikan karakter harus diimplementasikan secara konsisten dalam setiap aspek kehidupan sekolah/madrasah.

i. Mendesain Model Sekolah/Madrasah yang Memiliki Keunggulan Prestasi

Prestasi merupakan salah satu indikator keberhasilan sekolah/madrasah. Model unggulan harus memiliki program-program yang mendorong siswa untuk meraih prestasi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Prestasi ini tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga non-akademik seperti olahraga, seni, dan keterampilan lainnya. Program penghargaan bagi siswa berprestasi serta motivasi yang berkelanjutan akan memacu siswa untuk terus meningkatkan diri dan mencapai hasil terbaik.

j. Mendesain Model Sekolah/Madrasah yang Memiliki Keunggulan Pelayanan Prima

Pelayanan prima mencakup semua aspek yang menyangkut kenyamanan dan kemudahan bagi siswa, orang tua, dan guru. Sekolah/madrasah unggulan harus memberikan layanan pendidikan yang efisien, mulai dari administrasi, fasilitas, hingga komunikasi yang transparan dengan orang tua. Layanan prima ini mencakup kecepatan dalam pengurusan administrasi, kemudahan akses informasi, serta lingkungan yang mendukung pembelajaran yang efektif. Dengan pelayanan yang baik, siswa dan orang tua akan merasa dihargai dan termotivasi untuk terus terlibat dalam kegiatan sekolah.

k. Mendesain Model Sekolah/Madrasah yang Memiliki Keunggulan Jaringan Kerjasama, Baik di Dalam maupun Luar Negeri


Kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan baik di dalam maupun luar negeri merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan sekolah/madrasah unggulan. Melalui jaringan kerjasama ini, sekolah dapat berbagi pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman, serta membuka peluang bagi siswa untuk belajar dari berbagai perspektif global. Kemitraan internasional juga dapat membuka jalan bagi pertukaran pelajar, pengembangan kurikulum yang lebih komprehensif, dan peluang beasiswa, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah/madrasah.


Tugas Mahasiswa

- Mengidentifikasi dan mengabstraksikan 4 poin penting dari kajian Dasar dan Strategi Pengembangan Program Sekolah Islam Terpadu:
 - Filosofi Pengembangan Program Sekolah Unggulan Islam Terpadu
 - Landasan Pengembangan Program Sekolah Unggulan Islam Terpadu
 - Konsep Strategi Pengembangan Program Pendidikan Islam Unggulan
 - Model Implementasi Strategi Pengembangan Program Pendidikan Islam
- Memukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
- Membatasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
Mata Kuliah :
Metode :
Oleh :
NIM :
JURUSAN :

 Isi /Aplod Foto Resmi Mu

 Isi Identitas MK & Individu

Resensi Rangkuman:

A Esensi/isi /Sub Materi

B Esensi/isi /Sub Materi

C Esensi/isi /Sub Materi

D Esensi/isi /Sub Materi

summary: Maksimal 10 kalimat

Temukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi

Ket: Penulisan maksimal 500Kata

Isi /aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:
Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

- Mempresentasikan Hasil CK dalam bentuk Poster (untuk itu Membuat Poster menjadi wajib)

Part: 5

Pengembangan Kurikulum Sekolah Islam Terpadu: Kholistik terintegratif

KEMAMPUAN AKHIR PEMBELAJARAN

Setelah mendapat materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum Kholistik Terintegratif
- Mengidentifikasi Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum Kholistik Terintegratif
- Menjelaskan Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum Kholistik Terintegratif
- Menjelaskan Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum Kholistik Terintegratif

POKOK BAHASAN

1. Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum Kholistik Terintegratif
2. Desain Anatomi Pengembangan Kurikulum
3. Strategi Pengembangan Kurikulum Holistik Integratif
4. Manajemen, Prinsip dan Model Pengembangan Kurikulum Kholistik Terintegratif

TOPIK BAHASAN

Kurikulum holistic dan terintegratif merupakan kurikulum berbasis karakter yang mendorong peserta didik menemukan potensi diri, jati diri, kemampuan yang dimiliki sampai pada akhirnya membentuk kepribadian peserta didik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sehingga Lembaga Pendidikan harus mampu menyelenggarakan proses pembekalan pengetahuan, penanaman nilai, pembentukan sikap dan karakter, pengembangan bakat, kemampuan dan keterampilan, menumbuhkembangkan potensi akal, jasmani dan rohani yang optimal, seimbang dan sesuai dengan tuntutan zaman. Sebagaimana disebutkan oleh Elisabeth Sarinastitin bahwa pendidikan integratif dan terpadu merupakan pendidikan yang menyatakan keseluruhan yang menjadi dasar untuk pembentukan karakter. Pembentukan karakter integrative dan terpadu sangat ditentukan oleh keterlibatan banyak pihak. Pembentukan karakter memang merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para praktisi pendidikan saat ini. Banyak pihak sudah semestinya bersinergi untuk mewujudkan generasi berkarakter di era milenial ini. Pendidikan karakter merupakan hal yang penting untuk dicermati, ditindaklanjuti secara serius dan dikelola secara bertanggung jawab. Ketika semua pihak bersinergi tentunya akan memaksimalkan pencapaian. Generasi muda yang berkarakter akan mengantarkan bangsa ini ke masa depan yang lebih baik. Sebab negeri ini tidak kekurangan orang-orang yang pintar tetapi membutuhkan orang-orang berkarakter baik untuk membangun negeri dan memajukan bangsa ini. Dan semuanya ini haruslah dimulai sejak dini, sejak generasi bangsa ini masih kecil, dan masih lebih mudah dibentuk. Namun pada kenyataannya, pendidikan Islam khususnya di Indonesia telah berjalan dalam lorong krisis yang panjang. Pendidikan Islam telah kehilangan pijakan filosofisnya yang hakiki, yang kemudian berdampak pada tidak jelasnya arah dan tujuan yang hendak dicapai. Untuk menjawab permasalahan tersebut, munculah gagasan Pendidikan Islam Terpadu; sebuah model pendidikan yang didesain dengan segala keterpaduan dari berbagai sisi dan aspek pendidikan yang meliputi visi, misi, kurikulum, pendidik, suasana pembelajaran dan lain sebagainya. Salah satunya diperankan Sekolah Islam Terpadu yang menerapkan konsep rabbaniyah, integratif, stimulatif, fasilitatif, inovatif, dan motivatif dalam kurikulumnya. Konsep pendidikan holistik menjadi dasar dari pendekatan SIT, yang menganggap bahwa pendidikan harus mencakup pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Hal ini sejalan dengan teori *multiple intelligences* yang diusulkan oleh Howard Gardner, yang menekankan bahwa setiap individu memiliki beragam jenis kecerdasan yang perlu dikembangkan. Kurikulum dikembangkan sesuai konteks kebutuhan merupakan hal yang membuktikan bahwa *Compassion* masih tetap relevan hingga kini. Sebagaimana disebutkan oleh MacCullough bahwa tujuan Pendidikan adalah meningkatkan perkembangan manusia, yaitu menghidupi peran sebagai ciptaan Allah yang segambar dengan-Nya. Koherensi dan integrasi adalah penjelas (descriptor) kurikulum antara lain teori kurikulum, desain dan pengembangan kurikulum. Sebagaimana dikonsepsikan **Roe dan Norton menepatkan pengembangan kurikulum pada urutan ketiga setelah pengembangan program**. Pada Bagian ini disajikan konsep penting yang perlu dipahami, dalam mengawali kajian atau pembahasan Dasar-Dasar Pengembangan Pengembangan Kurikulum Sekolah Islam Terpadu: Kholistik terintegratif.

A. Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum Kholistik Terintegratif

1. Memahami Makna Pengembangan Kurikulum Kholistik terintegratif

Pengembangan program pendidikan dapat bermakna "kuantitatif; bagaimana menjadikan pendidikan menjadi lebih banyak, merata, dan meluas pengaruhnya dalam konteks pendidikan, dan kualitatif; bagaimana menjadikan pendidikan Islam menjadi lebih baik, bermutu, dan lebih maju sejalan dengan nilai-nilai Islam".¹ Maka termasuk dalam pengertian kualitatif adalah bagaimana menjadikan pendidikan Islam sebagai suatu bangunan keilmuan yang kokoh dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional dan trans-nasional, serta pengembangan ipteks. Pengembangan pendidikan Islam dapat dilakukan dengan berpijak pada landasan/fondasi yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengembangan kurikulum menurut Zais (1976) adalah sebagai "...the processes of constructing and implementing curricula", yaitu proses mengkonstruksi dan mengimplementasikan kurikulum. Print (1993) mengemukakan pengembangan kurikulum sebagai "...the process of planning, implementing, and evaluating learning opportunities intended to produce desired changes in learners".²

Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Ornstein & Hunkins, yang mengartikan "pengembangan kurikulum sebagai sesuatu yang mencakup berbagai proses (teknis, humanistik, artistik) dan memungkinkan sekolah dan pihak-pihak yang ada di dalam sekolah menyadari tujuan pendidikan".³ Sesuai dengan pengertian di atas, pengembangan kurikulum tidak hanya merupakan berbagai abstraksi yang seringkali mendominasi penulisan kurikulum, akan tetapi mempersiapkan berbagai contoh dan alternatif untuk tindakan yang merupakan inspirasi dari beberapa ide dan penyesuaian-penyesuaian lain yang lebih lanjut. Mulyani Sumantri (1988) mengartikan pengembangan kurikulum sebagai proses perencanaan menetapkan berbagai kebutuhan, mengadakan identifikasi tujuantujuan dan sasaran, menyusun persiapan instruksional, memenuhi segala persyaratan kebudayaan sosial dan pribadi yang dilayani kurikulum. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa pengembangan kurikulum adalah suatu rangkaian kegiatan dari menyusun/ melakukan perencanaan tentang pendidikan

¹ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 1.

² Salamah, *Pengembangan Model Kurikulum Holistik Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah Tsanawiyah: Teori dan Praktek Pengembangan Kurikulum Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa*. (Jakarta: Kemenag RI. Dirjen Pendis. Ditjen PTI, 2015), 25

³ Francis P.Hunkins, and Allan c. *Curriculum Foundations, Principles, and Issues*. (USA . Allyn and Bacon. (1998: 195):

dan pembelajaran, kegiatan mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi selanjutnya memperbaiki terhadap suatu kurikulum yang siap diberikan kepada peserta didik.

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curare* yang berarti tempat berpacu. Jadi, "istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi Kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis *start* sampai *finish*. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum yang biasa digunakan adalah *manhaj*, yang berarti jalan terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan".⁴ Adapun definisi menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh S. Nasution ialah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran.⁵ Sedangkan menurut Zaenal Arifin, kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan.⁶

Pengembangan atau penyusunan kurikulum holistik integratif ini, "disusun berdasarkan penentuan tema besar yang harus dicapai dalam kurikulum ini dan harus dikerjakan. Selain itu juga penentuan garis besar materi pembelajaran yang dikembangkan melalui penentuan garis besar yang sudah ditetapkan. Setelah adanya penentuan tema-tema besar dan garis besar, maka dilanjutkan dengan pembahasan secara terperinci. Kurikulum holistik integratif adalah kurikulum yang memiliki tujuan "berupa membawa perubahan pada anak-anak, perubahan yang diharapkan terjadi adalah perubahan pengetahuan, tingkah laku, karakter, kebiasaan dan sebagainya. Kurikulum Holistik integratif mengandung aspek fisik, spiritual, intelektual, sosio-emosional. Dalam pelaksanaannya, tujuan dari implementasi kurikulum ini adalah membantu dalam mengembangkan potensi setiap individu di dalam pembelajaran agar lebih menyenangkan, menggairahkan, demokratis, dan lebih humanis melalui pengalaman berinteraksi dengan lingkungannya".⁷

Pendidikan diharapkan mampu membangun dan mengembangkan setiap potensi yang ada pada peserta didik dan sebagaimana amanat dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional sehingga peserta didik diharapkan mampu untuk menghadapi setiap problem yang

⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1–2.

⁵ S. Nasution, *Kurikulum Dan Pengajaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), 5.

⁶ Zainal Arifin, *Konsep Dan Model Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 1.

⁷ Dewi Iswari Puspitawati, *Buku Panduan Untuk Mentor Kurikulum Holistik Integratif kelompok Umur 15-18*, (Bandung: Yayasan Compassion Indonesia, 2016), 6

dijumpainya. Untuk menggapai dan memaksimalkan potensi peserta didik maka diperlukan sebuah model pendidikan yang menyeluruh serta sistematis atau dalam hal ini disebut dengan holistik. Dengan demikian maka lembaga pendidikan mampu menjadi sarana optimal dalam pengembangan setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar mampu membentuk pribadi yang seutuhnya yang juga cakap dalam hal spiritual. Diantara berbagai cara dalam pengaplikasian pendidikan holistik adalah dengan diterapkannya pembelajaran yang terpadu atau terintegrasi yang dalam hal ini disebut (Integrated learning) dengan memadukan banyak mata pelajaran dalam satu sajian"⁸ Dimensi Pengembangan Kurikulum Kholistik Terintegratif

Istilah pengembangan kurikulum sebagaimana disebut di atas mencakup dimensi yang luas. "Pengembangan kurikulum merupakan istilah yang komprehensif, yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi".⁹ Ketiga dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perencanaan kurikulum yaitu langkah terdepan dalam membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan rencana yang akan dipakai oleh guru dan siswa.
- b. Implementasi/Penerapan kurikulum atau yang biasa disebut implementasi kurikulum berupaya memindahkan perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional.
- c. Evaluasi kurikulum adalah tahap akhir pengembangan kurikulum untuk melihat sejauh mana hasil pembelajaran, tingkat pencapaian program yang direncanakan, dan hasil dari kurikulum tersebut.

Pengembangan kurikulum bukan hanya melibatkan orang-orang yang berhubungan langsung dengan dunia pendidikan, tetapi juga melibatkan banyak individu, seperti politisi, wirausahawan, orang tua siswa, dan elemen masyarakat lainnya yang merasa tertarik dengan pendidikan. Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada intinya adalah aturan atau undang-undang yang akan menginspirasi kurikulum".

⁸ Strauss, Anselem, and Juliet Corbin, 2009

⁹Mustofa Kamal, "Model Pengembangan Kurikulum Dan Strategi Pembelajaran Berbasis Sosiologi Kritis, Kreativitas Dan Mentalitas," *Jurnal Madaniyah* 4:2 (2014): 230–31.

2. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum Kholistik Terintegratif

Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, "dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain, sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum".¹⁰ Hamalik, sebagaimana dikutip oleh Syafaruddin dan Amiruddin menyebutkan delapan prinsip dalam pengembangan kurikulum.

Prinsip holistik dalam pengembangan kurikulum, dimaknai "setiap aspek perkembangan yang dimiliki anak saling mempengaruhi satu dengan yang lain dan tidak dapat berdiri sendiri. Prinsip tersebut mengharuskan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran selalu menekankan pada ke seluruh aspek perkembangan anak. Sedangkan integratif, dimaknai sebagai menyatupadukan atau menggabungkan kemampuan (skill), tema (theme), konsep (concept), dan topik (topic) yang dapat dilihat dari berbagai disiplin ilmu".¹¹

Menggabungkan kemampuan dalam diri anak yang terdiri dari 6 aspek perkembangan bukan hal yang mudah ditambah harus dipadukan dengan tema, konsep dan topik. Diperlukan kemampuan kreativitas dan inovatif dalam diri seorang pendidik agar mampu mengembangkan kurikulum dengan prinsip holistik integratif. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat dari Sukmadinata (1997:3), bahwa kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah keseluruhan proses yang dilakukan peserta didik dan pendidik, sedangkan pengajaran lebih kepada metode yang digunakan oleh pendidik dalam membantu anak menemukan pengetahuannya. kurikulum dengan prinsip holistik integratif. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat dari Sukmadinata (1997:3), bahwa kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah keseluruhan proses yang dilakukan peserta didik dan pendidik, sedangkan pengajaran lebih kepada metode yang digunakan oleh pendidik dalam membantu anak menemukan pengetahuannya.

¹⁰ Fitroh, "Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan Strategi Pencapaian," *Studia Informatika: Jurnal Sistem Informasi* 4:2 (Juni, 2011): 1–7,

¹¹ Avanti Vera Risti Pramudyan, dkk. "Kurikulum Holistik Integratif Berbasis Permainan Tradisional Pada PAUD di Yogyakarta", *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 10: 2, (September 2017), 87

Prinsip-prinsip tersebut antara lain; "prinsip berorientasi pada tujuan, relevansi, efisiensi, fleksibilitas, kontinuitas, keseimbangan, keterpaduan, dan mutu".¹² Sukmadinata, membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi dua kelompok, yakni prinsip umum dan prinsip khusus".¹³ Prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Adapun penjabaran prinsip-prinsip umum ialah sebagai berikut:¹⁴

a. Prinsip Relevansi

Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi). Sedangkan "secara eksternal komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi (relevansi epistemologis), tuntutan dan potensi siswa (relevansi psikologis), serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat (relevansi sosiologis)".¹⁵ Oleh sebab itu, "dalam mengembangkan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja yang akan datang. Dalam realitanya prinsip di atas memang harus betul-betul diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan¹⁶. Dan yang tidak kalah penting harus sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga mereka selaras dalam upaya membangun negara."

b. Prinsip fleksibilitas

Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel, fleksibel, dan fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa, peran kurikulum disini sangat penting terhadap perkembangan siswa untuk itu prinsip fleksibel ini harus benar benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan.

¹²Syafaruddin and Amiruddin, *Manajemen Kurikulum* (Medan: Perdana Publishing, 2017), 135–36.

¹³ Sukmadinata, N. S. *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 86.

¹⁴ Arif Rahman Prasetyo & Tasman "Prinsip-Prinsip Dalam Pengembangan Kurikulum" *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* . 8: 1, (Mei 2020), 49

¹⁵ Hendyat Soetopo & Wasty Soemanto, *Pembinaan Dan Pengembangan Kurikulum: Substansi Problem Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 49.

¹⁶ Asmariani, "Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Dalam Perspektif Islam" *Al-Afkar: Jurnal Keislaman & Peradaban*, 1:3 (April 2020) 15,

Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa, kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Waktu dan kemampuan serta latar belakang anak. Kurikulum ini mempersiapkan anak-anak untuk saat ini dan masa depan. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. "Kurikulum harus menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran. Pendidik dalam hal ini memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat, kebutuhan siswa dan kebutuhan bidang lingkungan mereka".¹⁷

c. Prinsip Kontinuitas

Makna kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal, maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antarjenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Makna kontinuitas disini adalah "berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan baik yang mengajarkan (guru) maupun yang belajar (peserta didik). Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi, agar antara satu studi dapat melengkapi studi lainnya".¹⁸ Sedangkan fleksibilitas adalah kurikulum yang dikembangkan tidak kaku dan memberikan kebebasan kepada guru maupun peserta didik dalam memilih program atau bahan pembelajaran, sehingga tidak ada unsur paksaan dalam menempuh program pembelajaran.

d. Prinsip Efisiensi

Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran, ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Dewasa ini, dunia revolusi industri menawarkan berbagai macam

¹⁷ Rosichin Mansur, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Multikultural (Suatu Prinsip-Prinsip Pengembangan)," *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*. 1:2 (November, 2016), 18,

¹⁸ Soetopo, Hendyat, dan Wasty Soemanto. *Pembinaan Dan Pengembangan Kurikulum: Substansi Problem Administrasi Pendidikan*. (Jakarta: Bina Aksara, 1986) 52.

perkembangan kurikulum yang dilahirkan oleh para ahli dari dunia barat. Salah satu pengembangan kurikulum yang dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa yaitu mengoptimalkan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa untuk memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. "Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan satu bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan"¹⁹. Sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai.

e. Prinsip efektivitas

Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas, yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini "ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa".²⁰ Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran.

3. Prinsip Pembelajaran Pendidikan Holistik Integral,

Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu umumnya dikategorikan menjadi empat kategori, menurut Trianto, menurut Jejen Musfah (Musafah, Jejen, 2012):²¹

¹⁹ Hendyat, dan Soemanto, *Pembinaan Dan Pengembangan*, 53

²⁰ Hendyat, dan Soemanto, *Pembinaan Dan Pengembangan*, 54

²¹ Marta Jaya, "Kurikulum Pendidikan Holistik Integral (PPHI) Dalam Penguatan Kecakapan Spiritual Siswa Smp Islam Terpadu Lhi Yogyakarta" *RAUDHAH: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*. 7: 1 (Juni 2022), 113

a. Prinsip Penggalian Tema

Prinsip penggalian tema adalah prinsip utama pembelajaran integral, yang berarti bahwa tema-tema berhubungan satu sama lain dan terkait dengan tujuan pembelajaran utama.

b. Prinsip Pengelolaan Pembelajaran,

Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Yakni guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran.

c. Prinsip Evaluasi;

Setiap kegiatan melibatkan evaluasi, jadi bagaimana suatu pekerjaan dapat diketahui hasilnya tanpa evaluasi?

d. Prinsip Reaksi

Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar belum menyadari dampak pengiring (nurturant effect) yang penting bagi perilaku secara sadar. Karena itu, guru dituntut untuk memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai sepenuhnya. Dalam setiap situasi, guru harus bereaksi terhadap pemikiran siswa. Mereka tidak boleh menggabungkan aspek-aspek yang sederhana ke dalam kesatuan yang lengkap dan bermakna. Pembelajaran terpadu memungkinkan hal ini, dan guru harus menemukan strategi untuk menunjukkan apa yang dicapai melalui pengaruh pengiring.

B. Desain Anatomi Pengembangan Kurikulum

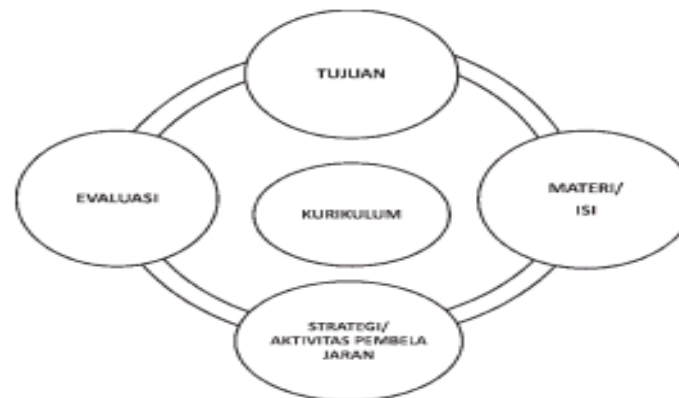
Desain anatomi dikemukakan para ahli secara berbeda. Meskipun demikian ada beberapa aspek mereka sepakat. Tyler (dalam Salamah, 2015), berpendapat bahwa sebuah dokumen kurikulum minimal berisi empat komponen. Empat komponen tersebut merujuk pada empat pertanyaan dasar dalam sebuah kegiatan pendidikan atau pembelajaran, yaitu: "(1) What educational purposes should the school seek to attain? (2) What educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes? (3) How can these educational experiences be effectively organized? (4) How can we determine whether these purposes are being attained? "²²

²²Salamah, *Pengembangan Model Kurikulum Holistik Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah Tsanawiyah: Teori dan Praktek Pengembangan Kurikulum Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa*. (Jakarta: Kemenag RI. Dirjen Pendis. Ditjen PTI, 2015), 17

Berdasarkan empat pertanyaan pokok di atas, maka komponen kurikulum minimal berisikan: (1) Perumusan tujuan yang ingin dicapai; (2) Pengamalan pendidikan yang dianggap dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai; (3) Pengorganisasian kegiatan (pelaksanaan) sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan; dan (4) Pengevaluasian atas tercapainya tujuan yang telah dirumuskan.

Pandangan lainnya Zais, yang mengemukakan anatomi kurikulum "(1) *aims, goals, and objective*; (2) *content*; (3) *learning activities*; and (4) *evaluation*."²³ Pandangan yang hampir sama dikemukakan Meller dan Siller, lebih terinci lagi mengemukakan komponen, yaitu: "(1) *aims and objectives*, (2) *content*, (3) *teaching strategies/learning experiences*, (4) *organization of content an teaching strategies*, and (5) *evaluation*".²⁴

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah kurikulum minimal berisikan empat komponen atau yang lebih terinci lima komponen, yaitu: (1). Tujuan; (2). Isi/materi; (3). Strategi pengajaran dan pengalaman belajar; (4) Organisasi isi/materi dan strategi pembelajaran, dan (5) Evaluasi". Kelima komponen tersebut, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:²⁵



Bagan: 5.1. Desain Anatomi Kurikulum

Sumber: diadaptasi dari (Salamah, 2015)

²³ Zais, Robert S. *Curriculum Principles and Foundations*. (New York: Harper & Row Publisher 1976): 295

²⁴ Miller, John P., Seller, Wayne. *Curriculum, Perspectives and Practice*. (New York & London: Longman. 1985), 175

²⁵ Salamah, *Pengembangan Model Kurikulum*, 17

Bagan: 5.1. Desain Anatomi Kurikulum, menunjukkan bahwa, komponen anatomi kurukulum tersebut, memiliki keterkaitan sesuai fungsinya masing-masing:

1. Tujuan Kurikulum

Tujuan merupakan komponen utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Zais (1976), menegaskan, bahwa "sebagai komponen utama dalam kurikulum tujuan merupakan bagian yang paling sensitif, sebab tujuan bukan hanya akan mempengaruhi bentuk kurikulum tetapi juga secara langsung merupakan fokus dari suatu program pendidikan"²⁶. Tujuan dalam kurikulum adalah arah yang hendak dicapai oleh proses penyelenggaraan pendidikan. Tujuan pendidikan menggambarkan hasil akhir dari suatu proses kegiatan pendidikan. Penetapan tujuan kurikulum tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan dikembangkan. Seperti pengembangan kurikulum yang didasari filsafat klasik (perennialisme, essentialisme, eksistensialisme) tujuan kurikulum adalah penguasaan materi pembelajaran sebanyak-banyaknya. Pendidikan yang didasarkan pada filsafat progresivisme tujuan pendidikannya beroriran pada kebutuhan, minat, dan kehidupan peserta didik. Selanjutnya pendidikan yang berlandaskan filsafat konstruktivisme, tujuan pendidikannya diarahkan pada kemampuan memecahkan masalah. Tujuan memegang peranan penting dan yang akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Sukmadinata (1997), menyatakan, bahwa "tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan dua hal yaitu: (a) Perkembangan tuntutan kebutuhan dan kondisi masyarakat; (b) Pemikiran-pemikiran yang terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara"²⁷. Adapun perumusan tujuan mengajar yang berbentuk tujuan khusus memberikan beberapa Mager dan Clark (Salamah, 2015), keuntungan yaitu:²⁸

- a. Tujuan khusus memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar-mengajar kepada siswa. Berdasarkan penelitian siswa yang mengetahui tujuan-tujuan khusus suatu pokok bahasan, diberikan referensi dan sumber yang memadai, dapat belajar sendiri dalam waktu setengah dari waktu belajar dalam kelas biasa.

²⁶ Zais, Robert S. *Curriculum Principles*, 297

²⁷ Syaodih Sukmadinata, Nana, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung : Remaja. Rosda Karya.1997), 103

²⁸ Salamah, *Pengembangan Model Kurikulum*, 18

- b. Tujuan khusus membantu memudahkan guru-guru memilih dan menyusun bahan ajar.
- c. Tujuan khusus memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media mengajar.
- d. Tujuan khusus memudahkan guru mengadakan penilaian, dengan tujuan khusus guru lebih mudah menentukan jenis penilaian, bentuk tes, lebih mudah merumuskan butir tes dan lebih mudah pula menentukan kriteria pencapaiannya.

2. Isi/Materi Kurikulum

Materi/isi kurikulum adalah ide-ide pokok yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi/isi kurikulum berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi tujuan/kompetensi yang ditetapkan. Penetapan materi/isi kurikulum juga tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan dikembangkan. Mislanya pengembangan kurikulum yang didasari filsafat klasik (perennialisme, essentialisme, eksistensialisme) penguasaan materi pembelajaran menjadi hal yang utama. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis, dalam bentuk:

- a. Teori; seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan pendapat sistematis tentang gejala dengan menspesifikasi hubungan – hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.
- b. Konsep; suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususankekhususan, merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala.
- c. Generalisasi; kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat atau pembuktian dalam penelitian.
- d. Prinsip; yaitu ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep.
- e. Prosedur; yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pelajaran yang harus dilakukan peserta didik.
- f. Fakta; sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting, terdiri dari terminologi, orang dan tempat serta kejadian.
- g. Istilah; kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi.
- h. Contoh/ilustrasi; yaitu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat.
- i. Definisi; yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal/kata dalam garis besarnya.
- j. Preposisi; yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum.

3. Strategi Penyusunan Sekuens bahan ajar berhubungan erat dengan strategi atau metode mengajar.

Pada waktu guru menyusun sekuen suatu bahan ajar, dia juga harus memikirkan strategi mengajar mana yang sesuai untuk menyajikan bahan ajar dengan urutan seperti itu. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mengajar. Rowntree (1974) membagi strategi mengajar itu atas *Exposition-Discovery learning* dan *Groups-Individual Learning*. Ausubel (1969) membaginya atas strategi "*Reception Learning-Discovery Learning* dan *Rote Learning-Meaningful Learning*."²⁹

a. *Reception/Exposition Learning-Discovery Learning*.

Reception dan *exposition* sesungguhnya memiliki makna yang sama, hanya berbeda dalam pelakunya. *Reception learning* dilihat dari sisi siswa sedangkan *exposition* dilihat dari sisi guru. Dalam *exposition* atau *reception learning* keseluruhan bahan ajar disampaikan kepada para siswa dalam bentuk akhir atau bentuk jadi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Siswa tidak dituntut untuk mengolah, atau melakukan aktivitas lain kecuali menguasainya. Dalam *discovery learning* bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, siswa dituntut untuk melakukan kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut siswa akan menguasainya, menerapkan, serta menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya.

b. *Rote learning-Meaningful Learning*.

Dalam *rote learning* bahan ajar disampaikan kepada siswa tanpa memperhatikan arti atau maknanya bagi siswa. Siswa menguasai bahan ajar dengan menghafalkannya. Dalam *meaningful learning* penyampaian bahan mengutamakan maknanya bagi siswa. Menurut Ausubel (1970) "sesuatu bahan ajar bermakna bila dihubungkan dengan struktur kognitif yang ada pada siswa. Struktur kognitif terdiri atas fakta-fakta, data, konsep, proposisi, dalil, hukum dan teori-teori yang telah dikuasai siswa sebelumnya, yang tersusun membentuk suatu struktur dalam pilihan anak. Lebih lanjut Ausubel menekankan bahwa *reception-discovery learning* dan *rotemeningful learning* dapat dikombinasikan satu

²⁹ Salamah, *Pengembangan Model Kurikulum*, 20

sama lain sehingga membentuk 4 kombinasi strategi belajar mengajar, yaitu: (1) *meaningful-reception learning*, (2) *rotoreception learning*, (3) *meaningful-discovery learning*, dan (4) *rote-discovery learning*.³⁰

c. **Group Learning-Individual Learning.**

Pelaksanaan *discovery learning* menuntut aktivitas belajar yang bersifat individual atau dalam kelompok-kelompok kecil. *Discovery learning* dalam bentuk kelas pelaksanaannya agak sukar dan mempunyai beberapa masalah. Masalah pertama, karena kemampuan dan kecepatan belajar siswa tidak sama. Maka kegiatan *discovery* hanya akan dilakukan oleh siswa-siswa yang pandai dan cepat, siswa yang kurang dan lambat, akan mengikuti saja kegiatan dan menerima temuan-temuan anak-anak cepat. Di pihak lain anak-anak lambat akan menderita kurang motif belajar, acuh tak acuh, dan kemungkinan menjadi pengganggu kelas. Masalah lain adalah kemungkinan untuk bekerja sama. Kerja sama hanya akan dilakukan oleh anak-anak yang aktif, yang lain mungkin hanya akan menanti atau menonton. Dengan demikian akan terjadi perbedaan yang semakin jauh antara anak pandai dengan yang kurang.

4. **Evaluasi**

Evaluasi bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Tiap kegiatan akan memberikan umpan balik, demikian juga dalam pencapaian tujuan-tujuan belajar dan proses mengajar. Umpan balik tersebut digunakan untuk mengadakan berbagai usaha penyempurnaan baik bagi penentuan dan perumusan tujuan mengajar, penentuan sekuen bahan ajar, strategi, dan media mengajar.

a. **Evaluasi hasil belajar mengajar**

Evaluasi hasil belajar mengajar adalah evaluasi untuk menilai keberhasilan penguasaan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan khusus yang telah ditentukan. Dalam evaluasi ini disusun butir-butir soal untuk mengukur pencapaian tiap tujuan khusus/indikator yang telah ditentukan. Untuk tiap tujuan khusus/ indikator minimal disusun satu butir soal. Menurut lingkup luas bahan dan jangka waktu belajar dibedakan antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.

³⁰ Ausubel DP. *Psikologi pembelajaran verbal yang Bermakna.* (New York: Grune & Stratton; 1970), 52.

- 1) Evaluasi formatif ditujukan untuk menilai penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan belajar dalam jangka waktu yang pendek. Tujuan utama dari evaluasi formatif sebenarnya lebih besar ditujukan untuk menilai proses pengajaran. Hasil evaluasi formatif ini digunakan untuk memperbaiki proses belajar–mengajar dan membantu mengatasi kesulitan-kesulitan belajar siswa.
- 2) Evaluasi sumatif ditujukan untuk menilai penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan yang lebih luas, sebagai hasil usaha belajar dalam jangka waktu yang cukup lama, satu semester, satu tahun atau selama jenjang pendidikan.
- 3) Evaluasi sumatif dimaksudkan untuk menilai kemajuan belajar siswa (kenaikan kelas, kelulusan ujian) serta menilai efektifitas program secara menyeluruh.

b. Evaluasi pelaksanaan mengajar

Komponen yang dievaluasi dalam pengajaran bukan hanya hasil belajar mengajar tetapi keseluruhan pelaksanaan pengajaran, yang meliputi evaluasi komponen tujuan mengajar, bahan pengajaran (yang menyangkut scope dan sekuens bahan ajar), strategi dan media pengajaran, serta komponen evaluasi mengajar sendiri. Stufflebeam, dkk, mengutip model evaluasi EPIC: (Emphaty, Persuation, Impact, and Communication-EPIC), atau Empati, Persuasi, Dampak, dan Komunikasi), bahwa dalam proses mengajar komponen-komponen yang dievaluasi meliputi: ³¹

- 1) Komponen tingkah laku yang mencakup aspek-aspek (sub-komponen): kognitif, afektif, dan psikomotor;
- 2) Komponen mengajar mencakup sub komponen: isi, metode, organisasi, fasilitas dan biaya;
- 3) Komponen populasi, yang mencakup: siswa, guru, administrator, spesialis pendidikan, keluarga dan masyarakat.

Untuk mengevaluasi komponen-komponen dan proses pelaksanaan mengajar bukan hanya digunakan tes tetapi juga digunakan bentuk-bentuk nontes, seperti observasi, studi dokumenter, analisis hasil pekerjaan, angket dan checklist. Evaluasi dapat dilakukan oleh guru atau oleh pihak-pihak lain yang berwenang atau diberi tugas, seperti kepala sekolah dan pengawas, tim evaluasi kanwil atau pusat. Sesuai dengan prinsip sistem evaluasi dan umpan balik diadakan secara terus menerus, walaupun tidak semua komponen mendapat evaluasi yang sama kedalaman dan kekuasaannya. Karena sifatnya dan terus menerus tersebut maka evaluasi pelaksanaan sistem mengajar dapat dipandang sebagai suatu monitoring.

³¹ Stufflebeam, Daniel L.&Shinkfield, Anthony J. *Evaluation, Theory, Models, and Application*, (San Fransisco: Jossey-Bass, 2007), 243)

C. Strategi Pengembangan Kurikulum Holistik Integratif

Penyusunan kurikulum yang sangat variatif demikian juga strategi pelaksanaannya yang sangat bervariasi, membuat pembelajaran itu disampaikan senyaman mungkin dan sejelas mungkin dan peserta didik yang mengikutinya tidak akan merasa kewalahan atau merasakan kebosanan yang berarti. Dibutuhkan kepiawaian dalam melakukan hal ini. Penyusunan kurikulum yang baik tidaklah cukup tanpa pelaksanaan yang maksimal.

Ketika kurikulum holistik sudah disusun dibutuhkan komitmen yang besar untuk melaksanakan hal-hal yang telah disusun tersebut. Keseimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan merupakan hal yang sama pentingnya dalam mewujudkan goal yang ingin dicapai. Ketika penyusunan kurikulum telah dilakukan, hal tersebut masih setengah dari perjalanan perjuangan pembentukan kepribadian anak. Dibutuhkan pelaksanaan yang sesuai dengan apa yang telah disusun. Strategi yang tepat dibutuhkan dalam pelaksanaan kurikulum holistik ini. Para tutor dan mentor juga merupakan orang kunci yang memegang peran yang penting dalam keberhasilan implementasi kurikulum holistik. Sebuah kurikulum yang baik perlu diimbangi dengan sumber daya manusia yang unggul juga untuk mampu mengimplementasikan kurikulum yang baik tersebut. Membentuk manusia secara utuh (holistik) yang berkarakter, yaitu mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual dan intelektual siswa secara optimal. Selain itu untuk membentuk manusia yang *lifelong learners* (pembelajar sejati) Rahmiatkin menjelaskan dengan menerapkan beberapa strategi, seperti:³²

1. Menerapkan metode belajar yang melibatkan partisipasi aktif murid

Menerapkan metode belajar yang melibatkan partisipasi aktif murid, yaitu metode yang dapat meningkatkan motivasi murid karena seluruh dimensi manusia terlibat secara aktif dengan diberikan materi pelajaran yang konkrit, bermakna, serta relevan dalam konteks kehidupannya (*student active learning, contextual learning, inquiry-based learning, integrated learning*).

2. Menciptakan lingkungan belajar yang Kondusif

Menciptakan lingkungan belajar yang Kondusif (*conducive learning community*) sehingga anak dapat belajar dengan efektif di dalam suasana yang memberikan rasa aman, penghargaan, tanpa ancaman, dan memberikan semangat.

³² Rahmiatkin, Pendidikan-holistik-berbasis-karakter.[http:// html](http://html), diakses 17 april 2017.

3. Memberikan pendidikan karakter

Memberikan pendidikan karakter secara eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan dengan melibatkan aspek *knowing the good, oving the good, and acting the good*.

4. Metode pengajaran yang memperhatikan keunikan masing-masing anak

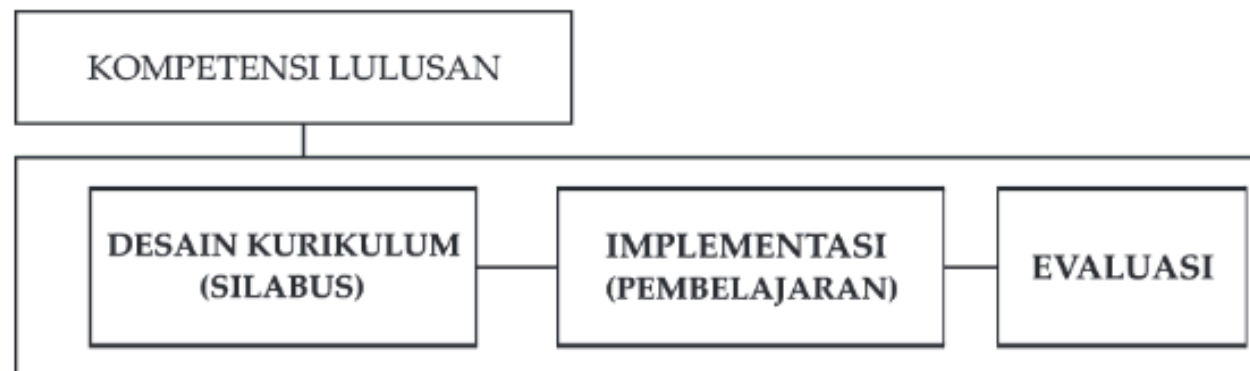
Metode pengajaran yang memperhatikan keunikan masing-masing anak, yaitu menerapkan kurikulum yang melibatkan juga 9 aspek kecerdasan manusia.

5. Menerapkan prinsip-prinsip *Developmentally Appropriate Practices*

Seluruh pendekatan di atas menerapkan prinsip-prinsip *Developmentally Appropriate Practices*.

D. Manajemen, Prinsip dan Model Pengembangan Kurikulum Kholistik Terintegratif

Mengacu pada pengertian pengembangan kurikulum tersebut, maka kegiatan pengembangan kurikulum dapat disimpulkan minimal memiliki tiga tahap, yaitu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Visualisasi dari kegiatan pengembangan kurikulum, pada bab 5.2 sebagai berikut:³³



Gambar; 5.2. Tahapan Manajemen Pengembangan Kurikulum

Sumber: diadaptasi dari Saylor, 1981 (Salmah 2015)

³³ Salamah, *Pengembangan Model Kurikulum*, 25

1. Manajemen Pengembangan Kurikulum Kholistik Terintegratif

Gambar: 5.2. Tahapan Manajemen Pengembangan Kurikulum menunjukkan bahwa, komponen anatomi kurikulum tersebut, memiliki keterkaitan sesuai fungsinya masing-masing:

a. Penentuan dan perumusan Kompetensi lulusan

Perumusan dan penentuan kompetensi lulusan merupakan tahap awal dalam pengembangan kurikulum. Pada tahap ini dapat dikatakan sebagai tahap penentu untuk melakukan tahap-tahap berikutnya. Artinya penentuan dan perumusan kompetensi lulusan merupakan titik tolak bagi kelancaran dan keberhasilan dalam mengembangkan tahap-tahap berikutnya dalam pengembangan kurikulum. Kegiatan pokok yang perlu dilakukan pada tahap selanjutnya adalah merancang dan mengembangkan silabus yang merupakan panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Oliva (1992) menyatakan bahwa “*a syllabus is an outline of topics to be covered in a single course or grade level*”.³⁴ Di sini, yang perlu dijabarkan dan dikembangkan adalah aspek-aspek yang tercakup di dalam silabus tersebut, yang akan direalisasikan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Silabus merupakan salah satu produk kurikulum sebagai pedoman tertulis, dengan aspek-aspek yang melingkupi; standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, pengalaman belajar, alokasi waktu, dan sumber bahan. Adapun formatnya terserah pada lembaga pendidikan masing-masing karena tidak ada format baku. Hal yang penting bahwa dalam “penyusunan format silabus perlu memperhatikan aspek-aspek; keterbacaan, keterkaitan antar komponen, dan kepraktisan penggunaannya”.³⁵

b. Implementasi Pembelajaran

Beauchamp, mengartikan implementasi kurikulum sebagai “*a process of putting the curriculum to work*”.³⁶ Fullan (Miller dan Seller), mengartikan implementasi kurikulum sebagai “*the putting into practice of an idea, program or set of activities which is new to the individual or organization using it*”.³⁷ Berdasarkan atas dua pendapat tersebut, sesungguhnya implementasi kurikulum merupakan suatu kegiatan yang

³⁴ Salamah, *Pengembangan Model Kurikulum*, 26

³⁵ Depdiknas. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. (Jakarta: Balitbang Puskur. Depdiknas, 2002). 55

³⁶ Beauchamp, G. *Curriculum Theory*. Wilmette, (Illinois: Kagg Press. 1975) 164

³⁷ Miller, John P., Seller, Wayne. *Curriculum, Perspectives and Practice*. (New York: Longman., 1985), 246

bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum (dalam arti rencana tertulis) ke dalam bentuk nyata di kelas, yaitu terjadinya proses transmisi dan transformasi segenap pengalaman belajar kepada peserta didik. Beberapa istilah yang bisa disepadankan dengan istilah implementasi kurikulum adalah pembelajaran atau pengajaran atau proses belajar mengajar.

Implementasi kurikulum memiliki posisi yang sangat menentukan bagi keberhasilan kurikulum sebagai rencana tertulis. Hasan (2000: 1) mengatakan "... jika kurikulum dalam bentuk rencana tertulis dilaksanakan maka kurikulum dalam bentuk proses adalah realisasi atau implementasi dari kurikulum sebagai rencana tertulis". Bisa jadi, dua orang guru yang sama-sama mengimplementasikan sebuah kurikulum (misalnya kurikulum mata pelajaran akidah akhlak) akan diterima atau dikuasai anak secara berbeda bukan karena isi atau aspek-aspek kurikulumnya yang berbeda, tetapi lebih disebabkan perbedaan dalam implementasi kurikulum yang diupayakan guru.

c. Evaluasi

Tyler, (1949), menjelaskan bahwa; "Evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam kegiatan pengembangan kurikulum. Diberlakukannya suatu model kurikulum baru pada suatu jenjang pendidikan akan mempengaruhi terhadap sistem evaluasinya. Hal ini sangat beralasan karena evaluasi merupakan salah satu komponen pokok kurikulum." ³⁸. Dengan demikian, jika suatu lembaga pendidikan menerapkan kurikulum baru, maka sistem evaluasinya pun akan berubah menyesuaikan dengan model kurikulumnya yang baru.

2. Prinsip Pengembangan Kurikulum Holistik Terintegratif

Kurikulum holistik dan terintegratif dikembangkan berdasarkan pandangan *holisme* yang bersumber pada filsafat perenial. Filsafat Perenial memandang bahwa segala sesuatu di alam ini merupakan bagian dari dan saling terkait dalam suatu kesatuan yang utuh. Adapun prinsip dasar dari pandangan holisme menurut Miller adalah sebagai berikut: " a) *There is an interconnectedness of reality and a fundamental unity in the universe;* b) *There is an intimate connection between the individual's inner or higher self and this unity.* c) *In order to see this unity we need to cultivate intuition through contemplation and meditation.* d) *Value is derived from seeing and realizing the interconnectedness of reality.*e) *The realization of this unity among human beings leads to social activity designed to conter injustice and*

³⁸ Salamah, *Pengembangan Model Kurikulum*, 28

human suffering".³⁹ Maksudnya, antaralain, sebagai berikut: a) Ada keterkaitan realitas dan kesatuan fundamental di alam semesta. b) Ada hubungan erat antara diri individu yang lebih dalam atau lebih tinggi dan kesatuan ini. c) Untuk melihat kesatuan ini, kita perlu menumbuhkan intuisi melalui kontemplasi dan meditasi. c) Nilai diperoleh dari melihat dan menyadari keterkaitan realitas. dan d) Realisasi kesatuan ini di antara manusia mengarah pada aktivitas sosial yang dirancang untuk melawan ketidakadilan dan penderitaan manusia.

3. Model Pengembangan Kurikulum Holistik Terintegratif: Sekolah Islam Terpadu

a. Landasan Pengembangan Kurikulum Sekolah Islam Terpadu Sekolah Islam Terpadu (SIT)

Sekolah Islam Terpadu Sekolah Islam Terpadu (SIT) pada hakikatnya adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah. Konsep operasional SIT merupakan akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan dan pengembangan ajaran agama Islam, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. Istilah terpadu dalam SIT dimaksudkan sebagai penguat (tauhid) dari Islam itu sendiri. Maksudnya adalah Islam yang utuh, menyeluruh, integral bukan parsial, *syumuliah* bukan *juz'iyah*. Dalam aplikasinya SIT diartikan sebagai sekolah yang menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum. "Dengan pendekatan ini semua mata pelajaran dan semua kegiatan sekolah tidak lepas dari bingkai ajaran dan pesan nilai Islam. Tidak ada dikotomi, tidak ada keterpisahan, tidak ada "sekularisasi" dimana pelajaran dan semua bahasan lepas dari nilai dan ajaran Islam, ataupun "sakralisasi" dimana Islam diajarkan terlepas dari konteks kemaslahatan kehidupan masa kini dan masa depan. Palajaran umum seperti: Matematika, IPA, IPS, bahasa, jasmani/kesehatan, keterampilan dibingkai dengan pijakan, panduan dan panduan Islam. Sementara dipelajaran agama kurikulum diperkaya dengan pendekatan konteks kekinian dan kemaslahatan."⁴⁰

Di dalam SIT juga ditekankan keterpaduan dalam metode pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan ranah kognitif, afektif dan konatif. Implikasi dari keterpaduan ini menuntut pengembangan pendekatan proses pembelajaran yang kaya, fariatif dan menggunakan media serta sumber belajar yang luas dan luwes. Metode pembelajaran menekankan penggunaan dan pendekatan yang memicu dan memacu optimalisasi pemberdayaan otak kiri dan otak kanan. Dengan pengertian ini, seharusnya pembelajaran di SIT dilaksanakan dengan pendekatan

³⁹ Miller, John P. *The Holistic Curriculum, Revised and Expanded Edition*. (Ontario: OISE Press.1996), 20

⁴⁰ JSIT Indonesia, *Standar Mutu Kekhasan Sekolah Islam Terpadu* (Jakarta: Tim Mutu JSIT Indonesia 2017), 5

berbasis "(a) *problem solving* yang melatih peserta didik berfikir kritis, sistematis, logis dan solitif, (b) berbasis kreatifitas yang melatih peserta didik untuk berfikir orisinal, luwes (fleksibel), lancar dan imajinatif. Keterampilan melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan penuh maslahat bagi diri dan lingkungannya"⁴¹

b. Penerapan Kurikulum Sekolah Islam Terpadu Sekolah Islam Terpadu (SIT)

Penerapan kurikulum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan kurikulum dan merupakan proses pelaksanaan kurikulum potensial menjadi kurikulum aktual yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Penerapan kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan kurikulum"⁴². Penerapan kurikulum Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) akan berjalan dengan baik jika didukung oleh berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal dan lembaga ini, kurikulum Jaringan Sekolah Islam Terpadu ini merupakan perpaduan antara kurikulum sekolah dengan kurikulum dari Diknas. Diantara faktor penghambat terlaksananya kurikulum tersebut adalah faktor sumber daya baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) nya, faktor sarana dan prasarana.

c. Model dan Desain Kurikulum Terpadu

Ada sepuluh model kurikulum yang bergerak dari kurikulum yang sangat berorientasi pada mata pelajaran yang terpotong-potong hingga model pembelajaran terpadu. Dalam buku yang ditulis oleh Robin Fogarty yang berjudul *How to Integrate the Curricula* ada 10 model kurikulum terpadu. Kesepuluh model tersebut adalah:⁴³

1) Model *Fragmen the fragmented model*

Pada model ini, kurikulum diatur secara tradisional yang memunculkan mata pelajaran yang berbeda dan terpisah. Pada umumnya meliputi empat bidang akademis besar yaitu: Matematika, Sains, Bahasa, Seni dan Ilmu Sosial. Pengelompokkan yang lain dari disiplin tersebut menggunakan kategori Ilmu Sastra, Sains, Seni Praktis, dan Seni Murni. Dalam kurikulum standar, bidang studi ini diajarkan secara sendiri-

⁴¹ Erwanto, "Penerapan Kurikulum Jaringan Sekolah Islam Terpadu (Jsit) Dalam Pembentukan Karakter Religius Siswa Smpit Khoiru Ummah Rejang Lebong" *Jurnal: al-Bahtsu*: 4:1, (Juni 2019), 73

⁴² Syafrudin Nurdin, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), 7

⁴³ Erwanto, "Penerapan Kurikulum Jaringan, 74

sendiri, tidak ada usaha untuk menghubungkan atau memadukannya. Setiap bidang studi tampak sebagai suatu kesatuan dalam bidang studi itu sendiri. Ketika mungkin terdapat tumpang tindih dalam ilmu fisika dan kimia, hubungan antara keduanya adalah implisit, tidak eksplisit, yang didekati melalui. Dengan demikian, dalam model ini, setiap mata pelajaran disampaikan secara terpisah-pisah dengan waktunya sendiri-sendiri. Misalnya, pada saat jam mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru menyampaikan materi bahasa Indonesia. Pada jam pelajaran Matematika, guru hanya menyampaikan materi Matematika.

2) Model Terhubung *the connected model*

Model kurikulum ini memfokuskan pada pembuatan hubungan yang eksplisit dalam setiap bidang subjek, menghubungkan satu topik dengan topik selanjutnya: menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, menghubungkan suatu keterampilan dengan keterampilan terkait, menghubungkan satu kegiatan dalam sehari dengan kegiatan hari berikutnya, atau bahkan ide-ide satu semester ke semester berikutnya. Kunci dari model ini ada usaha yang dengan sengaja untuk menghubungkan kurikulum dalam suatu disiplin, dan tidak mengasumsikan siswa akan memahami hubungan-hubungan tersebut secara otomatis. Model terkait atau keterhubungan ini masih berpusat pada masing-masing mata pelajaran, tetapi materi suatu pelajaran tersebut dihubungkan dengan topik ke topik, atau suatu konsep dengan konsep lainnya. Model terkait ini merupakan model yang cukup sederhana, sehingga dapat lebih mudah dilaksanakan di tingkat SMPIT. Misalnya, pada mata pelajaran PPKN, guru menghubungkan topik keimanan dan kesederhanaan

3) Model Tersarang *the nested model*

Model terintegrasi ini merupakan model yang kaya desain yang digunakan oleh guru yang terlatih. Mereka tahu bagaimana mengetahui jarak terjauh dari latihan-latihan apapun. Namun, dalam model nested ini, perencanaan yang hati-hati diperlukan untuk membentuk target ganda bagi kombinasi yang alami sehingga tugas-tugas tampak mudah dan menyenangkan. Dalam model ini, guru tetap memberikan materi dalam mata pelajarannya, tetapi sudah mempunyai target multi keterampilan sebagai tujuan pembelajaran yang harus dimiliki siswa. Misalnya, guru yang merancang memberikan suatu pokok bahasan tentang kegunaan panca indera, juga sudah menargetkan bagi siswa agar dapat mencapai beberapa keterampilan sekaligus dalam bidang keterampilan berbahasa seperti keterampilan mendengarkan, dalam bidang keterampilan berfikir seperti keterampilan mengurutkan, dan sebagainya.

4) Model Terurut *the sequenced model*

Dengan artikulasi yang terbatas lintas disiplin, guru dapat mengatur kembali urutan topik sehingga unit-unit yang mirip bersinggungan dengan yang lainnya. Dua disiplin terkait dapat diurutkan sehingga isi bidang studi dari keduanya dapat diajarkan secara paralel. Dengan melakukan pengurutan di mana topik-topik diajarkan, aktivitas yang satu meningkatkan yang lain. Beberapa topik diatur ulang serta diurutkan agar dapat serupa satu sama lain. Artinya, beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan, sementara salah satu konsep tersebut tetap diajarkan dalam mata pelajaran terpisah. Misalnya, seorang guru Bahasa Indonesia membahas tentang novel berlatar belakang sejarah perjuangan yang menggambarkan suatu masa di jaman lampau, sementara guru Sejarah mengajarkan juga masa perjuangan yang sama di jaman lampau yang dibahas guru Bahasa Indonesia. Dengan mengatur urutan topik, bab, dan unit, guru dapat membuat prioritas kurikulum, tidak sekedar mengikuti urutan yang sudah dibuat oleh buku teks. Dengan cara ini, guru-guru dapat membuat keputusan kritis mengenai isi. Dari sisi siswa, pengurutan yang sengaja dari topik-topik yang terkait dari disiplin-disiplin membantu mereka membuat pemahaman. Pengintegrasian ini membantu transfer belajar.

5) Model Terbagi *the shared model*

Disiplin tertentu yang luas memunculkan payung kurikulum yang meliputi: Matematika dan Sains berpasangan sebagai Sains: Kesusasteraan dan Sejarah di bawah label Ilmu Sastra: Seni, Musik, Tari, dan Drama digabungkan menjadi Seni Murni: Teknologi Komputer, Seni Rumah Tangga dan Industri sebagai Seni Praktis. Dalam disiplin yang komplementer tersebut, perencanaan partner dan atau pengajaran memfokuskan pada konsep, keterampilan, dan sikap, yang berbagi (*shared*). Dua mata pelajaran yang sama-sama diajarkan dengan menggunakan konsep-konsep atau keterampilan-keterampilan yang tumpang tindih. Misalnya, guru IPA dan Matematika bersama-sama secara tim, menggunakan suatu data yang sama bisa berupa grafik, gambar, atau tabel untuk membahas suatu konsep yang tumpang tindih.

6) Model Jaring Laba-Laba *the webbed model*

Kurikulum *model webbed* (*terjaring/teranyam*) menyajikan pendekatan tematik untuk memadukan mata pelajaran. Biasanya, pendekatan tematik pada pengembangan kurikulum ini mulai dengan sebuah tema misalnya “transportasi” atau “penemuan”. Suatu tim lintas disiplin membuat keputusan mengenai tema apa yang akan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pembelajaran berbagai mata

pelajaran. Misalnya, “penemuan” dapat digunakan untuk mempelajari mesin-mesin sederhana dalam mata pelajaran Sains: membaca dan menulis mengenai penemu dalam mata pelajaran Bahasa: perancangan model dalam Seni Industri, dan sebagainya. Dalam pembuatan jaringan kurikulum yang lebih canggih, beberapa unit pelajaran dapat dikembangkan untuk diintegrasikan dalam semua bidang yang relevan.

7) Model Pasang Benang the threaded model

Model threaded digunakan untuk mengintegrasikan kurikulum ketika metakurikulum menjadi fokusnya. Model ini cocok digunakan sebagai salah satu langkah alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Model tersebut merupakan model yang aktif untuk mendorong guru menjaga isi pelajaran tetap utuh, dan memasukkan keterampilan berfikir, bekerja sama, dan kecerdasan multiple dalam isi mata pelajarannya. Pada model ini, pendekatan metakurikulum digunakan untuk mencapai beberapa keterampilan dan tingkatan logika para siswa dengan berbagai mata pelajaran. Misalnya, guru mempunyai target untuk membuat prediksi dalam percobaan di laboratorium Matematika, IPA, Bahasa, yang pada saat bersamaan, guru IPS mempunyai target dalam peramalan kejadian-kejadian saat ini, di mana keseluruhan kegiatan tersebut membentuk suatu untaian keterampilan (membuat ramalan) yang bersumber dari lintas berbagai mata pelajaran.

8) Model Integrasi the integrated model

Model kurikulum terintegrasi (terpadu) menyajikan pendekatan lintas disiplin mirip dengan model shared. Model terpadu memadukan empat disiplin mayor dengan mengatur prioritas kurikulum dalam setiap disiplin, dan menentukan keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan sikap-sikap yang tumpang tindih dalam semua disiplin tersebut. Sebagaimana di dalam model shared, perpaduan merupakan hasil dari penyaringan ide-ide isi mata pelajaran, tidak berdasarkan pada suatu ide/tema sebagaimana seperti dalam model webbed. Keempat anggota tim menggali prioritas dan konsep-konsep yang tumpang tindih. Model ini sangat baik diterapkan dalam matematika, sains, seni bahasa, dan ilmu sosial. Keuntungan model terpadu ini adalah kemudahan dimana siswa dipandu menuju saling keterkaitan dan keterhubungan antar berbagai disiplin. Model terpadu membangun pemahaman lintas departemen dan mengembangkan apresiasi pengetahuan dan keahlian guru. Model terpadu, bila diterapkannya dengan baik, mendekati lingkungan belajar yang ideal untuk waktu-waktu yang terpadu secara internal dan untuk memfokuskan belajar terpadu siswa secara internal. Model ini juga membawa secara inheren faktor motivasional karena siswa dan ide-ide memperoleh momentum dari kelas ke kelas Model terpadu merupakan model yang sulit dan rumit, dan oleh sebab itu

memerlukan guru-guru yang sangat terampil, keyakinan dalam menentukan konsep-konsep, ketarampilan, dan sikap-sikap yang prioritas dari berbagai disiplin.

9) Model Terbenam the immersed model

Model ini berpusat untuk mengakomodasi kebutuhan para siswa/mahasiswa, di mana mereka akan melihat apa yang dipelajarinya dari minat dan pengalaman mereka sendiri. Keterpaduan secara internal dan intrinsik dicapai oleh pembelajar dengan sedikit atau tanpa intervensi dari luar atau ekstrinsik. Setiap individu memadukan semua data, dari tiap bidang dan disiplin, dengan menyalurkan ide-ide melalui bidang yang sangat diminatinya. Pendekatan ini umumnya dilakukan oleh mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2, maupun S3

10) Model Jaringan the networked model.

Seseorang yang menggunakan model ini akan membuat jaringan kerja dengan orang-orang yang memiliki keahlian untuk membantu bagian dari pekerjaannya yang lebih bersifat implementatif. Mereka akan bekerja secara terpadu sesuai dengan topik pekerjaan yang mengikat mereka. Dalam model integrasi ini, tidak seperti model-model sebelumnya, pembelajar mengarahkan proses integrasinya melalui self-selection dari jaringan yang diinginkan. Hanya pembelajar itu sendiri, yang memahami seluk-beluk dan dimensi bidang mereka, dan dapat memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkan.

4. Model Penerapan Kurikulum Kurikulum Holistik Terintegratif: Sekolah Islam Terpadu

Model Kurikulum SMPIT Al ishmah⁴⁴

Standar Kompetensi Lulusan SMPIT

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, bertujuan untuk digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Ruang Lingkup Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar Kompetensi Lulusan SMP meliputi :

⁴⁴ Kurikulum SMPIT Al Ishmah, tersedia di <https://smp.alishmah.sch.id/kurikulum> (dakses Senin, 30 September 2024; 10:57)

a. Dimensi Sikap

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.
- 2) Berkarakter, jujur, dan peduli,
- 3) Bertanggungjawab,
- 4) Pembelajar sejati sepanjang hayat, dan
- 5) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara.

b. Dimensi Pengetahuan

Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan:

- 1) Ilmu pengetahuan,
- 2) Teknologi,
- 3) Seni, dan
- 4) Budaya.

Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, Keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara.

1) Pengetahuan Faktual

Pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara.

2) Konseptual

Terminologi/istilah dan klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi dan teori, yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara.

3) Prosedural

Pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, algoritma, metode tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara.

4) Metakognitif

Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan teknis dan spesifik tingkat berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara.

c. Dimensi Keterampilan

Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak:

- 1) Kreatif,
- 2) Produktif,
- 3) Kritis,
- 4) Mandiri,
- 5) Kolaboratif, dan
- 6) Komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri

Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan

Struktur dan Muatan Kurikulum 2013 meliputi:

1. Daftar Mata Pelajaran dan Muatan Lokal sesuai dengan standar isi, visi dan misi sekolah

NO.	BIDANG STUDI	Kelas		
		VII	VIII	IX
Kelompok A				
1	Pendidikan Agama Islam	v	v	v
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	v	v	v
3	Bahasa Indonesia	v	v	v
4	Matematika	v	v	v
5	Ilmu Pengetahuan Alam	v	v	v
6	Bahasa Inggris	v	v	v
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	v	v	v
Kelompok B				
1	Seni Budaya	v	v	v
2	Pendidikan Jasmani, Olah raga dan Kesehatan	v	v	v
3	Prakarya / Teknologi Informasi dan Komunikasi	v	v	v
4	Muatan Lokal			
	a. Bahasa Sunda	v	v	v
	b. Al Qur'an	v	v	v
	c. Bahasa Arab	v	v	v
Jumlah		13	13	13
Ekstrakurikuler		v	v	v
Pengembangan Minat dan Bakat		v	v	v
Islamic Practices Learning		v	v	v

Sumber: diadaptasi dari Kurikulum SMPIT Al Ishmah

2. Pengaturan Alokasi Waktu

NO.	BIDANG STUDI	Kelas		
		VII	VIII	IX
Kelompok A				
1	Pendidikan Agama Islam	3	3	3
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3	Bahasa Indonesia	6	6	6
4	Matematika	5	5	5
5	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6	Bahasa Inggris	4	4	4
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	5	5	5
Kelompok B				
1	Seni Budaya	2	2	2
2	Pendidikan Jasmani, Olah raga dan Kesehatan	3	3	3
3	Prakarya / Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2
4	Muatan Lokal			
	a. Bahasa Sunda	1	1	1
	b. Al Qur`an	10	10	10
	c. Bahasa Arab	2	2	2
Jumlah		51	51	51
Ekstrakurikuler		2	2	2
Pengembangan Minat dan Bakat		2	2	2
Islamic Practices Learning		2	2	2

Sumber: diadaptasi dari Kurikulum SMPIT Al Ishmah

Tugas Mahasiswa

- Mengidentifikasi dan mengabstraksikan 4 poin penting dari kajian Pengembangan Kurikulum: Sekolah Islam Terpadu:
 - Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum Kholistik Terintegratif
 - Desain Anatomi Pengembangan Kurikulum
 - Strategi Pengembangan Kurikulum Holistik Integratif
 - Manajemen, Prinsip dan Model Pengembangan Kurikulum Kholistik Terintegratif
- Memukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
- Membatasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
Mata Kuliah :
Metode :
Oleh : NIM :
JURUSAN :

Resensi Rangkuman:

A Esensi/ Sub Materi

B Esensi/ Sub Materi

C Esensi/ Sub Materi

D Esensi/ Sub Materi

summary: Maksimal 10 kalimat

Temukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi

Ket: Penulisan maksimal 500Kata

Isi /Aplod Foto Resmi Mu

Isi Identitas MK & Individu

Isi/aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:
Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

- Mempresentasikan Hasil CK dalam bentuk Poster (untuk itu Membuat Poster menjadi wajib)

Part: 6

Pengembangan Pembelajaran Sekolah Islam Terpadu

KEMAMPUAN AKHIR PEMBELAJARAN

Setelah mendapat materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Terpadu
- Mengidentifikasi Konsep Pembelajaran Terpadu
- Menjelaskan Konsep Pembelajaran Terpadu
- Menjelaskan Pembelajaran Terpadu
-

POKOK BAHASAN

1. Konsep Dasar Pengembangan Pembelajaran terpadu
2. Konsep, Model dan Kegiatan Pengembangan Pembelajaran
3. Dimensi, Fokus dan Karakteristik Pengembangan Pembelajaran
4. Desain, Prinsip Langkah Pembelajaran

TOPIK BAHASAN

Pendidikan diharapkan mampu membangun dan mengembangkan setiap potensi yang ada pada peserta didik dan sebagaimana amanat dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional sehingga peserta didik diharapkan mampu untuk menghadapi setiap problem yang dijumpainya. Untuk menggapai dan memaksimalkan potensi peserta didik maka diperlukan sebuah model pendidikan yang menyeluruh serta sistematis atau dalam hal ini disebut dengan holistik. Dengan demikian maka lembaga pendidikan mampu menjadi sarana optimal dalam pengembangan setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar mampu membentuk pribadi yang seutuhnya yang juga cakap dalam hal spiritual. Diantara berbagai cara dalam pengaplikasian pendidikan holistik adalah dengan diterapkannya pembelajaran yang terpadu atau terintegrasi yang dalam hal ini disebut (Integrated learning) dengan memadukan banyak mata pelajaran dalam satu sajian. Pembelajaran terpadu adalah sebuah sistem yang mampu memberikan ruang kepada siswa agar mereka bisa secara individu atau kelompok untuk aktif mencari, menggali, mengembangkan bahkan menemukan suatu konsep dan prinsip keilmuan secara sistematis dan menyeluruh. Hal ini akan tercipta apabila topik/tema menjadi rambu dalam kegiatan belajar, sehingga peserta didik mampu belajar beberapa mata pelajaran secara bersamaan. Dalam tingkat perkembangan peserta didik, maka pembelajaran yang terpadu berupa pendekatan yang memfasilitasi konsep sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik itu sendiri, pendekatan seperti ini bermula dari pembelajaran yang menolak drill - system yang dijadikan sebagai dasar struktural intelektual anak. Pembelajaran yang terpadu dapat diartikan sebagai pembelajaran yang memusatkan pada sebuah tema yang digunakan untuk memahami konsep yang lain antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, saling menghubungkan pembelajaran yang berkaitan dengan dunia nyata sekitar peserta didik, sebagai suatu langkah dalam pengembangan keterampilan peserta didik, sebagai sarana penghubung sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang menarik serta bermakna.

Prinsip Pengelolaan Pembelajaran, Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Yakni guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran terintegratif merupakan kurikulum berbasis karakter yang mendorong peserta didik menemukan potensi diri, jati diri, kemampuan yang dimiliki sampai pada akhirnya membentuk kepribadian peserta didik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sehingga Lembaga Pendidikan harus mampu menyelenggarakan proses pembekalan pengetahuan, penanaman nilai, pembentukan sikap dan karakter, pengembangan bakat, kemampuan dan keterampilan, menumbuhkembangkan potensi akal, jasmani dan rohani yang optimal, seimbang dan sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam konteks [pengelolaan program sekolah secara holistik dan integratif, Roe dan Norton menempatkan pengembangan pembelajaran diempatkan pada urutan keempat setelah pengembangan program. Pada bagian ini disajikan](#); Konsep Dasar Pengembangan Pembelajaran terpadu; Konsep, Model dan Kegiatan Pengembangan Pembelajaran; Dimensi, Fokus dan Karakteristik Pengembangan Pembelajaran dan Desain, Prinsip Langkah Pembelajaran.

A. Konsep Dasar Pengembangan Pembelajaran terpadu

1. Memahami Makna Pengembangan Pembelajaran Terpadu

Pengembangan pendidikan menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan dari masa ke masa. Isu ini selalu juga muncul tatkala orang membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam pengembangan pendidikan, secara umum dapat diberikan dua buah model pengembangan yang baru yaitu: Pertama "*top-down model*" yaitu pengembangan pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan/atasan yang diterapkan kepada bawahan; seperti halnya pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional selama ini. Kedua "*bottom-up model*" yaitu model pengembangan yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan.

Abdul Majid mendefinisikan pengembangan pembelajaran adalah "suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi siswa".¹ Dari hal ini, pengembangan pembelajaran hadir didasarkan pada adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terdapat dua istilah yang secara teoritis memiliki hubungan yang saling terkait dan ketergantungan satu dan lainnya, yaitu *integrated curriculum* (kurikulum terpadu) dan *integrated learning* (pembelajaran terpadu). Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pepaduan isi, keterampilan, dan sikap."² Rasional pepaduan itu antara lain disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; 1) Kebanyakan masalah dan pengalaman (termasuk pengalaman belajar) bersifat interdisipliner, sehingga untuk memahami, mempelajari dan memecahkannya diperlukan multi-skill. 2) Adanya tuntutan interaksi kolaboratif yang tinggi dalam memecahkan berbagai masalah. 3) Memudahkan anak membuat hubungan antarskemata dan transfer pemahaman antarkonteks. 4) Demi efisiensi. 5) Adanya tuntutan keterlibatan anak yang tinggi dalam proses pembelajaran.

¹ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran (mengembangkan kompetensi guru)*, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), 24.

² Wolfinger, D. M. *Science and Mathematics in Early-Childhood Education*. (USA: Harper Collins College Publisher. 1994), 133.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, pembelajaran terpadu banyak dipengaruhi oleh eksplorasi topik yang ada di dalam kurikulum sehingga anak dapat belajar menghubungkan proses dan isi pembelajaran secara lintas disiplin dalam waktu yang bersamaan. Joni. T. R, memandang pembelajaran terpadu adalah "sebuah sistem yang mampu memberikan ruang kepada siswa agar mereka bisa secara individu atau kelompok untuk aktif mencari, menggali, mengembangkan bahkan menemukan suatu konsep dan prinsip keilmuan secara sistematis dan menyeluruh."³ Hal ini akan tercipta apabila topik/tema menjadi rambu dalam kegiatan belajar, sehingga peserta didik mampu belajar beberapa mata pelajaran secara bersamaan. Dalam tingkat perkembangan peserta didik, maka "pembelajaran yang terpadu berupa pendekatan yang memfasilitasi konsep sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik itu sendiri, pendekatan seperti ini bermula dari pembelajaran yang menolak *drill-system* yang dijadikan sebagai dasar struktural intelektual anak."⁴ .

Pembalajaran yang terpadu dapat diartikan sebagai pembelajaran yang memusatkan pada sebuah tema yang digunakan untuk memahami konsep yang lain antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, saling menghubungkan pembelajaran yang berkaitan dengan dunia nyata sekitar peserta didik, sebagai suatu langkah dalam pengembangan keterampilan peserta didik, sebagai sarana penghubung sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang menarik serta bermakna."⁵

Dasar Pembelajaran ‘TERPADU’ ini memberikan proses pembelajaran yang utuh, tidak hanya mengajarkan ilmu (kognitif) tetapi juga sangat memperhatikan sisi pembentukan sikap dan keterampilan, tidak hanya mengajarkan penerapan ilmu sebatas untuk kepentingan di dunia tetapi juga menjadikan akhirat sebagai sasaran utama hasil pembelajaran, tidak hanya menghasilkan peserta didik yang pandai berfikir tetapi juga pandai berdzikir, sebagaimana ciri seorang ulil albab yang termaktub dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 190-191.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

³ Marta Jaya, Karwad. "Kurikulum Pendidikan Holistik Integral (PHI) Dalam Penguatan Kecakapan Spiritual Siswa SMP Islam Terpadu Lhi Yogyakarta" *RAUDHAH: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*. 7:1 (Juni, 2022), 122

⁴ Rizkiyah, Tahtimatir. "Implementasi Pendidikan Holistik dalam Kurikulum Pendidikan Islam", *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 3:1 (Juni 2017), 103.

⁵ Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter; Konsepsi Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media Group. 2011), 53

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berakal, (190) (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.” (191)” (QS. Ali Imran [3]: 190-191)

Pembelajaran “TERPADU” juga sesuai dengan tujuan pendidikan di dalam Islam sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Quthb dalam Ahmad Tafsir, yang menyatakan bahwa; "tujuan umum pendidikan adalah manusia yang bertakwa, karena kemuliaan seorang manusia terletak pada ketakwaannya"⁶, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Sungguh yang paling mulia diantara kalian menurut pandangan Allah ialah yang paling tinggi tingkat ketakwaannya.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

2. Hakikat Pendekatan Pembelajaran Terpadu Versi JSIT

Sekolah Islam terpadu (SIT) dalam penekanannya terhadap pengoptimalan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik membawaimplikasi keterpaduan yang menuntut pengembangan pendekatan proses pembelajaran yang kaya, variatif, dan menggunakan media serta sumber belajar yang luas dan luwes. Metode pembelajaran menekankan penggunaan dan pendekatan yang memicu dan memacu optimalisasi pemberdayaan otak kiri dan otak kanan. Dengan pengertian tersebut, pembelajaran di SIT dilaksanakan dengan pendekatan berbasis (a) problem solving yang melatih siswa berfikir kritis, sistematis, logis, dan solutif; (b) berbasis kreativitas yang melatih siswa untuk berfikir orisinil, luwes (fleksibel), lancar, dan imajinatif. Keterampilan melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan yang bermanfaat dan penuh

⁶ Ahmad Tafsir. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 48

masalahat bagi diri, keluarga, dan lingkungannya".⁷ Pendekatan pembelajaran yang dianggap sesuai dan cocok digunakan dalam pembelajaran di kelas, dirumuskan dalam pendekatan yang memacu siswa untuk aktif dan kreatif.

Pendekatan tersebut dinamakan TERPADU, yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh seluruh SIT di Indonesia. dijelaskan dalam T. P. K. P. J. Indonesia, *Desain Pembelajaran Berbasis ADLX dengan Pendekatan TERPADU*. Jakarta: JSIT Indonesia, 2021. Pendekatan Pembelajaran TERPADU merupakan akronim dari "Terapkan, Eksplorasi, Rumuskan, Presentasikan, Aplikasikan, Duniawi dan Ukhrowi"⁸, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Telaah artinya mengkaji konsep-konsep dasar materi melalui aktivitas tadabur dan tafakur. Telaah menghantarkan siswa memasuki pokok bahasan atau materi yang akan dipelajari, berupa aktifitas mengamati dengan menggunakan indra: membaca, mendengar, melihat dan menyimak untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui dan melihat keterkaitan objek yang ditelaah dengan materi yang akan dibahas.
- b. Eksplorasi artinya melakukan aktivitas menggali pengetahuan melalui beragam metode dan pendekatan pembelajaran. Guru diharapkan dapat menerapkan pembelajaran yang efektif dengan memperkaya dan meluaskan sumber belajar, meningkatkan interaksi yang stimulatif melalui pendekatan dan metode yang menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah (problem based learning) dan dilakukan dalam pendekatan kolaboratif dan kooperatif (cooperative dan collaborative learning). Kemampuan siswa secara dinamis diimbangi dengan tingkat kesulitan dalam sistem untuk memberikan pengalaman belajar yang mengembirakan dan memuaskan. Alur cerita yang menarik secara visual dan intelektual dalam lingkungan menantang setiap siswa untuk memanfaatkan rasa ingin tahu dan hasrat mereka sendiri untuk menemukan dan mengumpulkan berbagai informasi data dan bukti untuk membentuk argumen dan mencapai kesimpulan. Tahap ini diposisikan untuk memberikan tingkat keterlibatan dan konsentrasi yang tinggi sambil mengurangi stres dan kebosanan bagi semua siswa.

⁷ V. dan V. S. Novianto, "Implementasi Pendidikan Karakter pada Pembelajaran IPS," (*PROSIDING, Format Pendidik. untu Meningkatkan. Daya Saing Bangsa*, 2019), 39–45,

⁸ Eni Triani Yuliana&Sunarti "Penerapan Pendekatan Pembelajaran TERPADU pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)" *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Volume 3 Proceedings of Social Studies Learning Challenges in the 21st Century* ISSN: 2808-103X, (June 1, 2022), 498-9

Melalui pengalaman ini, siswa membangun tingkat kepercayaan diri dan kreativitas mereka, menghasilkan peningkatan kinerja dan motivasi berkelanjutan untuk belajar.

- c. Rumuskan artinya menyimpulkan hasil eksplorasi dengan berbagai bentuk penyajian. Tahap „Rumuskan“ melatih siswa agar memiliki kemampuan berfikir analitis, logis dan sistematis atas data-data empiris yang ada untuk memperoleh simpulan dan merancang penyajian hasil simpulan tersebut dalam bentuk penyajian yang sesuai.
- d. Presentasikan artinya menjelaskan atau mendiskusikan rumusan hasil eksplorasi. Tahap dimana siswa menyampaikan hasil pengamatan dan simpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya, kemudian dilanjutkan diskusi dan tanggapan dari siswa dan guru untuk penyempurnaan rumusan. Melalui kegiatan presentasikan, siswa akan mendapatkan pengalaman untuk menghormati orang lain sambil mengakui dan mengapresiasi hasil rumusan orang lain. Siswa juga akan merasa sangat dihargai saat menerima tanggapan dari temannya. Tahap kegiatan yang mengarah pada dukungan untuk lingkungan kelas dengan komunikasi yang lebih baik, jujur serta efektif,
- e. Aplikasikan artinya menggunakan hasil pembelajaran yang didapat untuk memecahkan masalah dan menghubungkan dengan bidang yang relevan. Tahap dimana guru melakukan aktivitas terbimbing pemecahan masalah bagi para siswa dengan mengaplikasikan temuan ilmu atau aturan-aturan yang diperolehnya dengan jujur dan bertanggung jawab.
- f. Duniawi artinya menerapkan hasil pembelajaran yang didapat dengan kehidupan nyata. Tahap dimana guru memberikan penekanan pada siswa tentang hubungan antara ilmu yang diperoleh dengan aktifitas keseharian mereka, melakukan aktifitas terbimbing bagi para siswa untuk mengaplikasikan temuan ilmu atau aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dan dilakukan penilaian atas sikap dan perilakunya sehingga tumbuh kebiasaan baiknya.
- g. Ukhrowi artinya menerapkan hasil pembelajaran yang didapat dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah SWT. Guru memberikan penekanan pada siswa tentang hubungan ilmu yang didapat dengan peluang menjadi tabungan amal di akhirat, membiasakan diri siswa untuk melakukan amal-amal positif sesuai yang diperintah Allah SWT.

3. Alasan Penggabungan aspek dalam model pembelajaran terpadu

Alasan (Wolfinger, 1994). penggabungan aspek dalam model pembelajaran terpadu dikarenakan: ⁹

- a. Masalah dan pengalaman belajar siswa bersifat interdisipliner,
- b. Untuk memahami, mempelajari dan memecahkan masalah dibutuhkan “multiskill”,
- c. Perlu tuntutan interaksi kolaboratif yang tinggi untuk pemecahan masalah,
- d. Siswa lebih mudah membuat hubungan antarskemata dan pemahaman antar konteks,
- e. Lebih efisien, dan
- f. Perlu tuntutan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan penjabaran tersebut, pembelajaran terpadu modifikasi Wolfinger bertumpu pada eksplorasi topik dalam kurikulum sehingga siswa mampu belajar menghubungkan proses dan isi antar mata pelajaran. Pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dimaksudkan untuk memberikan bekal kemampuan berbahasa yang berguna untuk siswa dalam mempelajari beragam disiplin ilmu secara luas.

B. Konsepsi, Model dan Kegiatan Pengembangan Pembelajaran

1. Konsep Pengembangan Pembelajaran

Menurut pengertian pengembangan pembelajaran yang telah dipaparkan, maka konsep pengembangan pembelajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu: ¹⁰

- a. Pengembangan pembelajaran sebagai teknologi artinya suatu pembelajaran yang lebih terdorong dengan menggunakan teknik-teknik, metode, dan pendekatan yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori-teori yang konstruktif terhadap solusi dan problem pembelajaran.

⁹ Wolfinger, D. M. *Science and Mathematics in Early-Childhood Education*. (USA: Harper Collins College Publisher. 1994), 271

¹⁰ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, 17

- b. Pengembangan pembelajaran sebagai suatu sistem artinya sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk meningkatkan pembelajaran. Pengembangan sistem pengajaran melalui proses yang sistemik selanjutnya diimplementasikan dengan mengacu pada sistem perencanaan pembelajaran.
- c. Pengembangan pembelajaran sebagai sebuah disiplin artinya cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori tentang strategi pengajaran dan implementasinya terhadap strategi tersebut.
- d. Pengembangan pembelajaran sebagai sains adalah mengkreasi secara detail spesifikasi dari pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan akan situasi maupun fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas maupun yang lebih sempit dari materi pelajaran dengan segala tingkatan kompleksitasnya.
- e. Pengembangan pembelajaran sebagai teknologi artinya suatu perencanaan yang mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkahlaku kongnitif dan teori-teori konstruktif terhadap solusi dan problem-problem pengajaran.⁶

Dengan mengacu kepada sudut pandang tersebut, maka pengembangan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pengajaran yang dianut dalam kurikulum. Pengembangan pembelajaran sebagai sebuah proses, disiplin ilmu pengetahuan, system dan teknologi pembelajaran bertujuan agar pengembangan pengajaran berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Model Perancangan dan Pengembangan Pembelajaran Terpadu

Model Pengembangan pembelajaran sebagai sebuah proses, disiplin ilmu pengetahuan, system dan teknologi pembelajaran bertujuan agar pengembangan pengajaran berjalan dengan efektif dan efisien.

- a. Model Fogarty (1991), menyebutkan sepuluh model dalam merencanakan pembelajaran terpadu, yaitu Model Peggalan (Fragmented), Model Keterhubungan (Connected), Model Sarang (Nested), Model Urutan (Sequenced), Model Bagian (Shared), Model Jaring Laba-laba (Webbed), Model Galur (Threaded), Model Keterpaduan (Integrated), Model Celupan (Immersed), dan Model Jaringan (Networked).¹¹
- b. Model Jacobs (1989) dalam Resmini mengungkapkan terdapat lima pilihan keterpaduan pembelajaran, antara lain: (1) Disclipline Based, adalah bentuk keterpaduan yang bertolak dari mata pelajaran tertentu, misalnya topik ekonomi dikaitkan dengan masalah sosial politik

¹¹ Fogarty, R. *How to Integrate The Curricula*. (Palatine, Illinois: Skylight Publishing, Inc. 1991).

yang terjadi, (2) Parallel, yaitu memadukan tema yang sama dalam beberapa mata pelajaran, (3) Multidisciplinary, adalah bentuk pembelajaran sejumlah bidang ilmu yang terpisah melalui tema, (4) Interdisciplinary, yaitu bentuk pembelajaran yang menggabungkan sejumlah mata pelajaran dalam satu tema. Kegiatan pembelajaran berlangsung dalam waktu yang bersamaan, dan (5) Integrated.¹²

- c. Model pembelajaran terpadu modifikasi Wolfinger, dalam T. Raka Joni (2013) mengungkapkan bahwa pembelajaran terpadu terjadi apabila peristiwa autentik atau eksplorasi topik (tema) menjadi pengendali dalam kegiatan pembelajaran. Partisipasi dalam kegiatan eksplorasi tema menuntut siswa belajar sekaligus proses dan isi beberapa mata pelajaran secara serempak. Berikut bagan relasi antar ketiganya yang digambarkan melalui piramida terbalik berikut:¹³



Gambar 6.1: Relasi Model Pembelajaran Tematik dengan Model Pembelajaran Terpadu dan Kurikulum Terpadu

Sumber: T. Raka Joni (2013: 150)

Terdapat hubungan erat antara pembelajaran terpadu, kurikulum terpadu, dan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah salah satu bagian pembelajaran terpadu, pembelajaran terpadu berasal dari induk kurikulum terpadu.

¹² Syaefudin, Udin dan Resmini. *Pembelajaran Terpadu*. (Bandung: UPI-Press. 2006)

¹³ Joni, T. Raka, *Pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif*, (Jakarta: Balitbang Depdikbud, 2013), 150

3. Ciri Penggabungan aspek dalam model pembelajaran terpadu

Ciri-ciri Pembelajaran Terpadu Hilda Karli dan Margaretha (Lukman Hakim), mengemukakan beberapa ciri pembelajaran terpadu, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Holistik, suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi.
- b. Bermakna, keterkaitan antara konsep-konsep lain akan menambah kebermanaknaan konsep yang dipelajari dan diharapkan anak mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah nyata di dalam kehidupannya.
- c. Aktif, pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan diskoveri-inquiri. Peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang secara tidak langsung dapat memotivasi anak untuk belajar.

C. Dimensi, Fokus dan Karakteristik Pengembangan Pembelajaran

1. Dimensi-dimensi pengembangan pembelajaran

Istilah pengembangan pembelajaran sebagaimana disebut di atas mencakup dimensi yang luas. yakni: ¹⁵

- a. Signifikansi. Tingkat signifikansi tergantung pada tujuan pendidikan yang diajukan dan signifikansi dapat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibangun selama proses pembelajaran
- b. Feasibilitas. Artinya pengembangan pembelajaran harus disusun berdasarkan pertimbangan realities baik yang berkaitan dengan biaya maupun pengimplementasiannya.
- c. Relevansi. Konsep relevansi berkaitan dengan jaminan bahwa pengembangan pembelajaran memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik pada waktu yang tepat agar dapat dicapai tujuan spesifik secara optimal.
- d. Kepastian. Konsep kepastian minimum diharapkan dapat mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga.

¹⁴ Lukman Hakim " Integrated Learning Dalam Perspektif Pendidikan Islam" *Jurnal At-Turās*, 4: 2, (Desember 2017), 242

¹⁵ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, 18

- e. Ketelitian. Prinsip utama yang perlu diperhatikan ialah agar pengembangan pembelajaran disusun dalam bentuk yang sederhana, serta perlu diperhatikan secara sensitive kaitan-kaitan yang pasti terjadi antara berbagai komponen.
- f. Adaptabilitas. Diakui bahwa pengembangan pembelajaran bersifat dinamis, sehingga senantiasa perlu mencari informasi sebagai umpan balik. Penggunaan berbagai proses memungkinkan pembelajaran yang fleksibel atau adaptable dapat dirancang untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan.
- g. Waktu, factor yang berkaitan dengan waktu cukup banyak, selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksikan masa depan, juga validasi dan reliabilitas analisis yang dipakai, serta kapan untuk menilai kebutuhan kependidikan masa kini dalam kaitanya dengan masa mendatang.
- h. Monitoring merupakan proses mengembangkan criteria untuk menjamin bahwa berbagai komponen bekerja secara efektif.
- i. Isi pembelajaran, artinya dalam isi pembelajaran merujuk pada hal-hal yang akan direncanakan.dalam pembelajaran yang baik perlu memuat: a) tujuan apa yang diinginkan, atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan pendukungnya; b) bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layananlayanan pendukungnya; c) tenaga manusia, yakni mencakup cara-cara mengembangkan prestasi, spesialisasi, prilaku, kompetensi maupun kepuasan siswa; dan d) Konteks sosial atau elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pengajaran.

2. Fokus Perhatian Pengembangan Pembelajaran Terpadu

Fokus perhatian pembelajaran terpadu terletak pada proses yang ditempuh siswa saat berusaha memahami isi pembelajaran sejalan dengan bentuk-bentuk keterampilan yang harus dikembangkannya (Aminuddin, 1994). Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai: ¹⁶

- a. Suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling serta dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak;

¹⁶ Aminuddin. *Pembelajaran Terpadu sebagai Bentuk Penerapan Kurikulum 1994 Mata pelajaran Bahasa Indonesia*. (Makalah dalam Seminar JPBS IKIP Malang, 26 November 1994), 12

- b. Suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serempak (simultan);
- c. Merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda, dengan harapan siswa akan belajar dengan lebih baik dan bermakna.

3. Karakteristik Pengembangan Pembelajaran Terpadu

Terdapat beberapa karakteristik yang perlu Anda pahami dari pembelajaran terpadu. Coba perhatikan uraian berikut ini, kemudian Anda bandingkan dengan pembelajaran konvensional yang biasa dilakukan oleh guru di sekolah saat ini:¹⁷

- a. Pembelajaran terpadu berpusat pada siswa (student centered). Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Peran guru lebih banyak sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar.
- b. Pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa (direct experiences). Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak.
- c. Dalam pembelajaran terpadu pemisahan antarmata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Bahkan dalam pelaksanaan di kelas-kelas awal sekolah dasar, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan temamata yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa.
- d. Pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Pembelajaran terpadu bersifat luwes (fleksibel), sebab guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada.
- f. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

¹⁷ Asep Herry Hernawan, & Novi Resmini, *Modul 1 Konsep Dasar dan Model-model Pembelajaran Terpadu* Tersedia di <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PDGK4205-M1.pdf> (diakses: Selasa 1 Oktober 2024: 4:05)

D. Desain, Prinsip Langkah Pembelajaran

1. Desain Pembelajaran Terpadu

Model dapat dipahami sebagai "suatu tipe (desain), suatu deskripsi atau analogi yang digunakan untuk membantu visualisasi yang tak langsung dapat diamati, suatu sistem asumsi-asumsi, data-data, dan inferensi-inferensi yang digunakan untuk menggambarkan objek atau peristiwa matematis, suatu desain sederhana yang berasal dari sistem kerja (terjemahan realitas), suatu deskripsi atau sistem imajiner, dan penyajian yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan menunjukkan sifat bentuk aslinya."¹⁸ Sedangkan definisi model pembelajaran terpadu menurut Trianto (2007) merupakan model tematik integratif yang telah berkembang dari tahun 1968 sampai sekarang. Lebih lanjut Trianto menjelaskan keuntungan model pembelajaran terpadu, antara lain: ¹⁹

- a. Penyeleksian tema sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk belajar,
- b. Lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman,
- c. Memudahkan perencanaan,
- d. Pendekatan tematik dapat memotivasi siswa,
- e. Memudahkan siswa dalam melihat berbagai kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait.

2. Prinsip-prinsip Pembelajaran terpadu Holistik Integral

Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu umumnya dikategorikan menjadi empat kategori, menurut Trianto, menurut Jejen Musfah: "1) prinsip penggalian tema, 2) prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu, 3) prinsip evaluasi dan 4) prinsip reaksi"²⁰. dijelaskan sebagai berikut:

a. Prinsip penggalian tema

¹⁸ Komaruddin Hidayat. 2001. 101 Strategi Pembelajaran Aktif. (Yogyakarta: Yappendis. 2001), 152

¹⁹ Trianto. *Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Prestasi Pustaka. 2007), 55

²⁰ Marta Jaya, "Kurikulum Pendidikan Holistik Integral (PPHI) Dalam Penguatan Kecakapan Spiritual Siswa Smp Islam Terpadu Lhi Yogyakarta" *RAUDHAH: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*. 7: 1 (Juni 2022), 113

Prinsip penggalian tema antara lain : a). Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan memadukan banyak bidang studi, b). Tema harus bermakna artinya bahwa tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya c). Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. d). Tema yang dikembangkan harus mampu mewadahi sebagian besar minat anak, e). Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar, f) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku, serta harapan dari masyarakat, g). Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar.

b. Prinsip pelaksanaan terpadu

Prinsip pelaksanaan terpadu di antaranya : a) guru hendaknya jangan menjadi “single actor “ yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar, b) pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok, c) guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam poses perencanaan.

c. Prinsip evaluatif

Prinsip evaluatif adalah : a). memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya, b) guru perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang telah disepakati dalam kontrak.

d. Prinsip reaksi

Prinsip reaksi, dampak pengiring (nuturan efek) yang penting bagi perilaku secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Karena itu, guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap reaksi siswa dalam semua “event“ yang tidak diarahkan ke aspek yang sempit tetapi ke suatu kesatuan utuh dan bermakna. Waktu pembelajaran terpadu bisa bermacam-macam yaitu: a) pembelajaran terpadu yang dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu apabila materi yang dijalankan cocok sekali diajarkan secara terpadu; b) Pembelajaran terpadu bersifat temporer, tanpa kepastian waktu dan bersifat situasional, dimana pelaksanaannya tidak mengikuti jadwal yang teratur, pelaksanaan

pembalajaran terpadu secara spontan memiliki karakteristik dengan kegiatan belajar sesuai kurikulum yang isinya masih terkotak-kotak berdasarkan mata pelajaran.

3. Bentuk keterpaduan dalam kegiatan pembelajaran,

Jacobs (1989) mengemukakan lima pilihan bentuk keterpaduan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu: (a) discipline based, (b) parallel, (c) multidisciplinary, (d) interdisciplinary, dan (e) integrated. Secara ringkas kelima model tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.²¹

- a. Bentuk *discipline based* adalah bentuk keterpaduan yang bertolak dari mata pelajaran tertentu. Sebuah topik ekonomi misalnya dapat dihubungkan dengan masalah sosial politik dan ilmiah.
- b. Bentuk parallel memadukan tema-tema yang sama dalam beberapa mata pelajaran. Bentuk ini mengkondisikan tingkat keterpaduan yang kurang mendalam.
- c. Bentuk *multidisciplinary* adalah bentuk pembelajaran sejumlah mata pelajaran secara terpisah melalui sebuah tema.
- d. Bentuk interdisciplinary adalah bentuk pembelajaran yang menggabungkan sejumlah mata pelajaran dalam sebuah tema. Kegiatan pembelajaran berlangsung dalam waktu yang bersamaan.
- e. Bentuk *integrated* merupakan bentuk pembelajaran yang memadukan sebuah konsep dari sejumlah mata pelajaran melalui hubungan tujuantujuan, isi, keterampilan, aktivitas, dan sikap. Dengan kata lain, bentuk pembelajaran integrated merupakan pembelajaran antarmata pelajaran yang ditandai oleh adanya pepaduan tujuan, kemampuan, sikap dari pelbagai mata pelajaran dalam topik tertentu secara utuh.

4. Langkah Kegiatan Pembelajaran terpadu modifikasi Wolfinger

Langkah pembelajaran terpadu modifikasi Wolfinger dapat diuraikan sebagai berikut:²²

- a. Memilih tema/topik yang akan dipelajari sebagai bagian pembelajaran terpadu. Tema yang dipilih harus luas sehingga siswa mampu menginvestigasi berbagai konsep yang berkaitan. Tema yang dipilih harus sesuai dengan perkembangan siswa. Guru perlu mempertimbangkan aspek kognitif dan sosial siswa.

²¹ Jacob, H.H., Ed. *Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementation*. (Alexandria, V.A.: ASCD. 1989), 307

²² Wolfinger, D. M. *Science and Mathematics*, 275

- b. Menentukan konsep yang akan dikembangkan dalam pembelajaran terpadu. Konsep didaftar dalam bentuk pernyataan untuk menentukan secara pasti apa yang dipelajari. Daftar pernyataan berguna bagi guru untuk mengecek apa saja yang akan dipelajari dan dipilih dalam serangkaian kegiatan. Konsep yang dipilih secara langsung berkaitan dengan tema dan meningkatkan pemahaman terhadap tema tersebut.
- c. Menentukan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan untuk menginvestigasi daftar tersebut. Dalam menentukan rencana kegiatan, perhatikan proses ketrampilan sains dan konsep matematika yang diperlukan dalam kegiatan tersebut.
- d. Menentukan mata pelajaran apa saja yang berkaitan dengan konsep.
- e. Mereview kegiatan dan mata pelajaran terkait dalam pembelajaran terpadu. Review berfungsi untuk menentukan keefektifan penggunaan mata pelajaran tertentu yang dipilih.
- f. Mengorganisasikan materi untuk mempermudah pendistribusian dan penggunaannya. Kegiatan dilakukan berkelompok atau individual, sehingga materi dibagi sejumlah kelompok /individu yang ada.
- g. Menentukan urutan kegiatan yang akan disajikan di kelas, diawali dari sesuatu yang diketahui menuju sesuatu yang belum diketahui.
- h. Mengadakan diskusi tindak lanjut. Kegiatan diskusi dan penyajian keseluruhan dalam pembelajaran terpadu akan meningkatkan kemampuan siswa untuk mendeskripsikan apa yang sudah dilakukan dan menggambarkan kesimpulan tentang kegiatan tersebut.

5. Model Pengembangan Pembelajaran SD IT Bustanul Ulum

Studi Kasus: Model Pengembangan Pembelajaran SD IT Bustanul Ulum.²³ Model pembelajaran adalah "bentuk pembelajaran yang menggambarkan kegiatan belajar mengajar dari awal hingga akhir yang diberikan oleh guru. Model pembelajaran ialah garis besar dari keseluruhan dari strategi, pendekatan, metode dan teknik pembelajaran. Pelaksanaan antara pendekatan, strategi, metode, teknik dan bahkan taktik pembelajaran yang sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh inilah yang membentuk apa yang disebut dengan model pembelajaran.

²³Muhammad Fatchulloh, *Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Bustanul Ulum Lampung Tengah*.(Skiptsi) (FTK. UIN Raden Intan Lampung, 2018), 70

a. Pendekatan Pembelajaran

Dalam pelaksanaannya SD IT Bustanul Ulum menerapkan dua jenis pendekatan pembelajaran yakni:

- 1) Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa (*student centered approach*) dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru (*teacher centered approach*).
- 2) Pendekatan ini pada dasarnya diterapkan dikelas IV dan V, pembagian peran seorang guru terhadap peserta didik dilakukan dalam sesi diskusi dan tanya jawab pada saat presentasi setiap kelompok.

b. Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran adalah upaya guru dalam menciptakan suatu sistem lingkungan belajar yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran, agar tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai dan efektif.²⁴ Strategi pembelajaran menjadi salah satu barometer profesionalis seorang guru mengingat proses pembelajaran merupakan proses komunikasi multiarah antarpeserta didik, guru, dan lingkungan belajar. Karena itu, strategi pembelajaran menjadi pedoman bertindak secara sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga materi pelajaran dengan mudah dapat dipahami.

- 1) Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru, sebab dalam strategi ini guru memegang peran yang sangat dominan.² Strategi ini meliputi ceramah dan tanya jawab, dimana guru secara aktif memberikan rangsangan kepada siswa untuk dapat menemukan dan mengamati kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan materi yang dipelajari.
- 2) Strategi pembelajaran inkuiri adalah kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban yang sudah pasti dari suatu masalah yang dipertanyakan. Strategi pembelajaran inkuiri menekankan pada proses mental dan proses berpikir dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki setiap individu secara optimal.³ Pada prakteknya strategi inkuiri berpusat pada siswa. Pembelajaran PAI di SD It Bustanul Ulum juga menerapkan strategi ini. Hal ini dilaksanakan pada

²⁴ Syamsu S, "Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Antisipasi Krisis Akhlak Peserta Didik Pada Sma Negeri Di Palopo" *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No. 2, Desember 2015) 377.

saat kegiatan inti dimana meminta peserta didik untuk maju dan mendemonstrasikan bacaan Q.S Al –Furqan ayat 67 beserta artinya yang diikuti oleh seluruh murid. Kemudian kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dan membahas mengenai QS Al-Furqon ayat 67 dan QS al-Isra ayat 27 yang berisi tentang hidup sederhana dan larangan bersikap foya-foya atau mubadzir, setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan dan kemudian mempresentasikan hasilnya didepan kelas, setelah setiap kelompok selesai memberikan kesimpulan maka guru sebagai mediator memberikan penguatan dan menjelaskan kembali tentang penerapan hidup sederhana.

- 3) Strategi pembelajaran kontekstual adalah suatu konsepsi yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. strategi pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang beranggapan bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara alamiah, bekerja dan mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan sekedar mengetahuinya. Kemudian mengimplementasikan dan bertanya mengenai pengalaman siswa mengenai pantang menyerah. Siswa diminta untuk memberikan contoh sikap pantang menyerah dan mendiskusikan serta menyimpulkan beberapa sikap yang mencerminkan sikap pantang menyerah dalam kehidupan bersama kelompoknya. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang sangat krusial, dimana belajar dan mengajar merupakan satu kesatuan tunggal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, Interaksi belajar sangat diperlukan untuk mencapai timbal balik dan rasa saling menghargai dan memotivasi peserta didik guna menanamkan sikap pada peserta didik dalam pembelajaran dua arah sehingga mereka akan aktif dan merasa di butuhkan dalam proses pembelajaran tidak hanya bersifat pasif dan pasrah menerima pembelajaran melainkan juga ikut berperan serta dalam proses belajar mengajar.
- 4) Strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang saling asuh antarpeserta didik, melibatkan sejumlah peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil, tingkat kemampuannya berbeda untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan. SD IT Bustanul Ulum juga menerapkan model pembelajaran kooperatif learning, yakni dengan diadakannya metode Lomba Cepat Tepat (LCT) oleh pendidik di kelas IV dimana pada model pembelajaran ini peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah anggota 3 disetiap kelompoknya. Model kooperatif learning sendiri adalah model pembelajaran yang mendukung kontekstual learning. Dimana dalam sistem nya didefinisikan dengan belajar

kelompok yang terstruktur dimana menurut Johnson dan Johnson memiliki lima unsur pokok diantaranya saling ketergantungan positif, interaksi personal, keahlian bekerja sama, tanggung jawab individual dan proses kelompok.

c. Metode Pembelajaran SD IT Bustanul Ulum

Metode merupakan hal yang penting dalam menyampaikan suatu materi Pembelajaran. Metode pembelajaran menjadi salah satu faktor kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Apabila metode tidak diterapkan maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Metode pembelajaran juga diasumsikan sebagai teknik pembelajaran. Rumiati menjelaskan metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan Metode pembelajaran diantaranya ialah; 1) ceramah, 2) demonstrasi, 3) diskusi, 4) simulasi, 5) pengalaman lapangan, 6) brainstorming, 7) debat, dan sebagainya. SD IT Bustanul Ulum menerapkan beberapa metode yang disusun dalam RPP yang sesuai dengan bahasan materi yang akan dipelajari.

d. Media Pembelajaran SD IT Bustanul Ulum

Media dipersepsikan sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi dalam kegiatan pembelajaran agar isi materi lebih mudah dipahami oleh siswa. Maka dari itu, media pembelajaran merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran agar peserta didik terangsang dan menumbuhkan minat dalam belajar. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik materi yang diajarkan dapat membantu pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif. Media PAI meliputi: 1) Material seperti buku 2) Immaterial yakni seperti contoh kasus, cerita, legenda, budaya 3) Kondisional, misalnya suasana simulasi yang diciptakan sebelum atau saat proses belajar berlangsung di kelas atau tempat kejadian; 4) Personal, misalnya nama atau foto atau gambar suatu kejadian di masalah dalam sejarah Islam. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran di kelas tanpa menggunakan media akan menimbulkan kesulitan pada siswa dalam memahami materi pembelajaran. Media untuk pembelajaran PAI tidak hanya terbatas yang bersifat material namun juga dapat berupa immaterial, kondisional dan personal sehingga mampu digunakan secara bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI. Dalam Qur'an Surat Al Maidah ayat 16:

e. Pengegembangan Pembelajaran SD IT Bustanul Ulum

Pengembangan pembelajaran di SD IT Bustanul diantaranya:

1) Penanaman Karakter Islami Di SD IT Bustanul Ulum

Indikator pelaksanaan kegiatan belajar di SD IT Bustanul Ulum ialah tertib dalam beribadah diantaranya tertib

- (a) Shalat lima waktu, berpuasa di bulan suci ramadhan, hafal dan mempraktekan doa sehari-hari, tertib berinteraksi dengan Al-Qur'an, tartil membaca Al Qur'an, Terbiasa mengucapkan salam, rajin belajar dan giat menuntut ilmu, bersikap mandiri, santun, berakhlak mulia dan gemar berbuat kebajikan, senang membantu orang lain, gemar berinfaq dan bershodaqoh, gemar melakukan amalan, terbiasa makan dan minum sambil duduk, berperilaku bersih dan sehat, gemar berwudhu, peduli dengan kebersihan lingkungan, peduli dengan jenis makanan dan minuman sehat.
- (b) Cinta Al Qur'an; Visi dan misi SD Bustanul Ulum mengedepankan pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai keislaman dalam diri anak. Integrasi nilai karakter dan nilai Islam dalam pendidikan merupakan peran yang penting dalam menciptakan generasi masa depan yang berkarakter. Praktek beribadah yang secara rutin dilaksanakan di SD IT Bustanul Ulum secara tidak langsung mampu membentuk jati diri pada kepribadian peserta didik. SD IT Bustanul Ulum menerapkan kegiatan untuk selalu berinteraksi dengan AL-Qur'an. Kebiasaan para peserta didik membaca Al-Qur'an setiap hari merupakan kebiasaan yang mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menjalani aktivitas dalam belajar. 1) Membaca Al-Qur'an dengan Tartil; SD IT Bustanul Ulum juga mengajarkan untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil. Membaca Al Quran dengan tartil adalah wajib. Dalam membaca dan juga mempelajari kitab suci Al Quran tentu saja tidak boleh sembarangan. 2) Menghafal surat-surat dalam Al-Qur'an juga menjadi salah satu kegiatan di SD IT Bustanul Ulum. Berbagai manfaat dapat diperoleh dengan membaca Al-Qur'an diantaranya mendapat kenikmatan dunia.

2) Penanaman Karakter Islami Dalam Mengucapkan Salam

Kebiasaan mengucapkan salam juga dilakukan di SD IT Bustanul Ulum, salam merupakan salah satu tanda akan rasa saling menghormati, saling mendoakan satu sama lain dan mampu meningkatkan rasa persaudaraan. Salam bukan sekedar ungkapan kasih-sayang, tetapi memberikan juga alasan dan logika kasih-sayang yang di wujudkan dalam bentuk doa pengharapan agar anda selamat dari segala

macam duka-derita. Tidak seperti kebiasaan orang Arab yang mendoakan untuk tetap hidup, tetapi Salam mendoakan agar hidup dengan penuh kebaikan.

3) Pengembangan Karakter yang Berilmu

Pendidikan tidak memandang usia, mendidik dilakukan sejak anak masih dalam kandungan. Terdapat pepatah mengatakan bahwa "Mendidik anak sejak kecil adalah ibarat mengukir di atas batu". Sabda Nabi saw tersebut sangat tepat untuk menggambarkan pentingnya proses pendidikan anak sejak dini. Ketika nilai ini telah tertanam, kelak saat anak dewasa, nilai ini akan menancap kuat dan tak mudah tergerus arus zaman. Layaknya mengukir diatas batu, tak mudah berubah dan sukar terkikis. Pendidikan anak sejak kecil tidak hanya menentukan masa depan mereka, tapi juga akan menentukan corak bangsa dan peradaban. Kualitas generasi akan menentukan baik atau rusaknya sebuah peradaban. Aspek afektif berupa kesadaran untuk selalu menjaga kelestarian alam dan sikap psikomotor dapat ditunjukkan peserta didik dengan selalu terampil dalam lingkungan sekitar dan mengembangkan pola pikir terhadap pentingnya kelestarian alam. Seperti halnya banyak diisyaratkan dalam al-Qur'an, agar manusia selalu menggunakan akalunya untuk memikirkan segala hal yang telah Allah ciptakan, demi mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Artinya : *"... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat ..."* (Q.S Ar-rad:11)

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa SD IT Bustanul Ulum memiliki model pembelajaran yang bervariasi, meskipun terkadang masih ada beberapa kekurangan dalam kegiatan pembelajaran SD IT Bustanul Ulum benar-benar menyelaraskan kehidupan sehari-hari dengan dalil yang ada dalam Al-Qur'an. Pengajaran Pendidikan Agama Islam tidak hanya terbatas pada materi pembelajaran saja melainkan dari segi proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Visi dan misi yang diselaraskan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menjadi bukti bahwa SD IT Bustanul Ulum menjunjung tinggi nilai-nilai dalam Al-Qur'an yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dimana hal tersebut memiliki banyak manfaat dalam menanamkan sikap akhlakul karimah yang memang sejalan dengan kurikulum 2013 yang mengedepankan pengembangan karakter selain peningkatan di bidang akademik.

Tugas Mahasiswa

- Mengidentifikasi dan mengabstraksikan 4 poin penting dari kajian Pembelajaran Sekolah Islam Terpadu:
 - Konsep Dasar Pengembangan Pembelajaran terpadu
 - Konsepsi, Model dan Kegiatan Pengembangan Pembelajaran
 - Dimensi, Fokus dan Karakteristik Pengembangan Pembelajaran
 - Desain, Prinsip Langkah Pembelajaran
- Memukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
- Membatasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
Mata Kuliah :
Metode :
Oleh :

NIM :
JURUSAN :

Resensi Rangkuman:

A Esensi/isi /Sub Materi

B Esensi/isi /Sub Materi

C Esensi/isi /Sub Materi

D Esensi/isi /Sub Materi

summary: Maksimal 10 kalimat

Temukan Nilai/Natijah/Konkhasi dari empat sub materi

Ket: Penulisan maksimal 500 Kata

Isi /Aplod Foto Resmi Mu

Isi Identitas MK & Individu

Isi /aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:

Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

- Mempresentasikan Hasil CK dalam bentuk Poster (untuk itu Membuat Poster menjadi wajib)

Part: 7

Pengembangan Sumber daya Manusia Sekolah Islam Terpadu

Pengelolaan

KEMAMPUAN AKHIR PEMBELAJARAN

Setelah mendapat materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami Konsep Dasar Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan
- Mengidentifikasi Konsep Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan
- Menjelaskan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan
- Menjelaskan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan
-

POKOK BAHASAN

1. Konsep Dasar Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan
2. Teori, Prinsip Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan
3. Dimensi, Metoda dan Jenis Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan
4. Model Komponen Pengembangan SDM Terpadu dan Terintegratif

TOPIK BAHASAN

Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor dominan dalam suatu institusi, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Pendidikan memerlukan SDM berkualitas untuk melaksanakan perannya dalam melayani kebutuhan pendidikan masyarakat. Kebutuhan pendidikan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat praktis situasional maupun bersifat prediktif antisipatif bagi transformasi sosial. Untuk itu, sangat penting upaya pengembangan SDM bagi terwujudnya SDM bidang pendidikan yang berkualitas. Pengembangan SDM dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, baik secara formal maupun informal, yang dilaksanakan secara simultan berkelanjutan. Terdapat lima domain SDM yang dipandang penting dalam pengembangan SDM bidang pendidikan. Kelima domain tersebut adalah: profesionalitas, daya kompetitif, kompetensi fungsional, keunggulan partisipatif, dan kerja sama. Namun demikian, pengembangan terhadap kelima domain SDM tersebut diperlukan *total quality control* (TQC) dan program diklat terpadu agar tercapai efektivitasnya. Secara umum, terdapat dua orientasi pendidikan dalam pembangunan bangsa, yaitu orientasi individual dan orientasi masyarakat. Orientasi individual, pendidikan berperan dalam pembentukan insan terdidik (*educated person*) yaitu melalui proses pengembangan potensi diri. Kemampuan yang dimiliki oleh insan terdidik merupakan sarana bagi pemahaman diri dan lingkungan, upaya adaptasi dan partisipasi dalam perubahan, pelaku utama bagi perubahan (inovator), dan memiliki orientasi prediktif dan antisipatif. Dengan demikian, manusia terdidik dapat menjadi anutan bagi yang lainnya (*reference behavior*) dan memiliki andil dalam membangun masyarakat (*society building*). Untuk itu, manusia terdidik harus memiliki keunggulan partisipatif bagi terwujudnya transformasi sosial yang menyeluruh. Sedangkan orientasi masyarakat, pendidikan memiliki tiga peran utama yakni sebagai agen konservatif (*agent of conservation*), agen inovatif (*agent of innovation*), dan agen perubahan (*agent of change*). Sebagai agen konservatif, pendidikan secara operasional praktis melalui kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada penanaman dan pelestarian nilai-nilai sosial-budaya asli (*indigeneous*) yang memiliki ketangguhan dan ketahanan (*homeostatic*). Dengan demikian, masyarakat akan memiliki jati diri dalam menyikapi arus globalisasi. Manusia sebagai agen inovatif, pendidikan memiliki peran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, mendesiminasikan, mensosialisasikan, dan mengaplikasikannya. Melalui perannya tersebut, pendidikan akan menghasilkan masyarakat pembelajar (*learning society*) yang diekspresikan dengan gemar mencari informasi, menggunakan, dan mengkomunikasikannya. Sedangkan sebagai agen perubahan, pendidikan memiliki konsekuensi terhadap aplikasi dari produk inovasi pendidikan, sehingga pendidikan menjadi katalisator bagi terjadinya transformasi sosial. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada masa sekarang, melainkan bersifat dinamis dan antisipatif bagi terjadinya perubahan. Pada Bagian menyajikan; Konsep Dasar Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan; Teori, Prinsip Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan; Dimensi, Metoda dan Jenis Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan; dan Model Komponen Pengembangan SDM Terpadu dan Terintegratif

A. Konsep Dasar Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan

1. Makna dan Hakikat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan

Pengembangan adalah "suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan."¹ Pengembangan dan pendidikan merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam konstelasi ini, pengembangan dapat dilakukan melalui pendidikan, sehingga pendidikan menjadi wahana bagi pengembangan. Untuk itu, maka pendidikan memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sebagai aset bagi proses pengembangan dan SDM yang kompeten tersebut dicapai melalui proses pengembangan. Dengan demikian, SDM menjadi bagian penting dalam pengembangan dan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen saling yang saling terkait secara fungsional bagi tercapainya pendidikan yang berkualitas. Pengembangan dan pelatihan merupakan dua konsep yang sama, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Tetapi, dilihat dari tujuannya, umumnya kedua konsep tersebut dapat dibedakan. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini, dan pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja."²

Bella, (dalam Hasibuan) pendidikan dan latihan sama dengan pengembangan yaitu merupakan proses peningkatan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Pendidikan berorientasi pada teori, dilakukan dalam kelas, berlangsung lama dan biasanya menjawab *why*. Latihan berorientasi pada praktek, dilakukan di lapangan, berlangsung singkat dan biasanya menjawab *how*."³ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UURI No. 20 Th. 2003: 2). Sedangkan latihan, secara implisit menjadi bagian dari pendidikan.

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 68.

² Kadarisman, M. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),.11

³ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 70.

Pada Hakikatnya, pengembangan adalah upaya meningkatkan sesuatu agar lebih bertambah baik. Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan. Seperti dikemukakan Sikula: "*development in reference to staffing and personnel matters, is a long term educational process utilizing a systematic and organized procedure by which managerial personel learn conceptual and theoretical knowledge for general purposes. Training is a short term educational process utilizing a systematic and orgenized procedure by which nonmanagerial personnel learn technical knowledge and skill for a definite purpose.*"⁴ Maksudnya; pengembangan dalam kaitannya dengan masalah kepegawaian dan personalia, (SDM), adalah proses pendidikan jangka panjang yang memanfaatkan prosedur sistematis dan terorganisasi yang dengannya personel manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang memanfaatkan prosedur sistematis dan terorganisasi yang dengannya personel nonmanajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu.

Karakteristik Sumber Daya Manusia (SDM), dalam konteks ini, "adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu."⁵ Selanjutnya dijelaskan bahwa daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan adalah diperoleh dari usaha pendidikan. Daya fisik adalah kekuatan dan ketahanan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas yang diembannya. Dengan demikian, SDM bidang pendidikan adalah kompetensi fungsional yang dimiliki tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Di dalam melaksanakan tugasnya, SDM dituntut mengaktualisasikan kemampuannya, baik daya fikir maupun daya fisik secara terintegrasi. Namun demikian, kedua kemampuan tersebut saja tidak cukup, melainkan harus diimbangi dengan kecerdasan emosional (*Emotional Intelligence*). Manakala kita memandang duni pekerjaan adalah sebagai suatu masyarakat, maka kecerdasan emosional sangat diperlukan untuk mengenal dan memahami diri sendiri serta rekan kerja. Goleman, menegaskan bahwa "kecerdasan emosional memiliki keunggulan dibandingkan kecerdasan intelektual, jika dasar penentunya adalah keberhasilan hidup di tengah masyarakat"⁶. Demikian kecerdasan emosional sangat diperlukan dalam pengembangan Pendidikan.

⁴ Andrew E.Sikula. *Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja*. (Jakarta: Pustaka Binaman,1981), 38

⁵ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* , 243.

⁶ Goleman, D. (2005). *Why is Emotional Intelligence More Important than IQ?*. (Varlik Publications. Istanbul Turkey. 2005), 211

Yenni Imroatul Mufidah, mengkaji Pengembangan Sumber Daya Pendidik dari sudut pandang ahli, (Guskey 1982 dan Zhao 2009);⁷ Guskey, memandang bahawa "pengembangan sumber daya pendidik, merupakan proses dan kegiatan yang direncanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi pendidik untuk memperbaiki kualitas belajar siswa" Dalam konteks ini, Zhao, memaknai pengembangan sumber daya pendidik "sebagai kegiatan promosi pendidikan sendiri (self-education) dan proses pembelajaran bagi pendidik dengan berpartisipasi dalam berbagai pendidikan lanjutan untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitudes) yang terkait dengan pengetahuan dasar, mengajar, administrasi, dan kerjasama dalam mengajar.

2. Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Islam Terpadu

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Sekolah Islam Terpadu memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang unggul, adaptif, dan beretika sesuai dengan tuntutan era globalisasi. SDM berkualitas dihasilkan melalui proses pendidikan yang terstruktur dan pelatihan yang berkesinambungan. Tilaar (1998), memandang ada tiga tuntutan utama SDM dalam era globalisasi: "SDM yang unggul, SDM yang terus belajar, dan SDM yang memiliki nilai-nilai *indigeneous*."⁸ *Indigenous* diartikan sebagai *pribumi asli* atau istilah lainnya kearifan lokal yang terdiri dari dua kata kearifan (wisdom) dan lokal (local). Oleh karena itu, pengembangan SDM di Sekolah Islam Terpadu harus mencerminkan peningkatan kualitas, produktivitas, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Berdasarkan pandangan itu, terdapat beberapa tujuan pengembangan SDM yang harus dicapai dalam konteks holistik dan terintegrasi. Begitu pula dalam upaya pengembangan SDM pada sekolah Islam terpadu hendaknya berdasarkan kepada prinsip peningkatan kualitas dan kemampuan kerja. Sedarmayanti, mengidentifikasi Terdapat beberapa tujuan dari pengembangan SDM, di antaranya adalah:⁹

a. Meningkatkan Produktivitas Kerja

Misi Sekolah Islam Terpadu mengedepankan pembentukan lingkungan belajar yang kondusif, dimana produktivitas kerja SDM dipacu melalui penguatan kompetensi profesional dan spiritual. Dengan produktivitas yang tinggi, para pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan

⁷ Yenni Imroatul Mufidah, "Pengembangan Sumber Daya Pendidik" *TA'DIBIA Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* . 8:1 (Mei 2018), 77

⁸ Tilaar. H.A.R. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*. (Magelang : Tera Indonesia, 1998), 33

⁹ Hendita Yosepa, dkk. "Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Terhadap Tingkat Etos Kerja Karyawan Pada Hotel Santika Sukabumi " *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8: (Juni 2020), 3

mampu menciptakan inovasi dalam proses pembelajaran, mengelola waktu secara efektif, serta meningkatkan prestasi peserta didik. Pengembangan produktivitas ini dilakukan melalui program pelatihan, peningkatan keterampilan teknis, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam bekerja.

b. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendidikan di Sekolah Islam Terpadu juga menjadi fokus utama dalam pengembangan SDM. Melalui pengelolaan yang holistik dan terintegrasi, SDM didorong untuk menggunakan sumber daya secara optimal, termasuk waktu, tenaga, dan fasilitas yang tersedia. Efisiensi ini tidak hanya diterapkan pada aspek administratif, tetapi juga pada proses pembelajaran yang lebih interaktif dan terarah, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal dan waktu yang lebih singkat.

c. Meningkatkan Status dan Karier Kerja

Sekolah Islam Terpadu mendorong setiap tenaga pendidik dan kependidikan untuk terus mengembangkan kariernya melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. Program pengembangan SDM difokuskan untuk meningkatkan status profesional dengan mendorong mereka meraih kualifikasi yang lebih tinggi, sertifikasi, dan pelatihan lanjutan. Dengan demikian, SDM yang berkualitas dapat diakui secara luas di dunia pendidikan, sekaligus membuka kesempatan untuk pengembangan karier yang lebih luas baik di level nasional maupun internasional.

d. Meningkatkan Pelayanan terhadap Klien

Pelayanan prima kepada siswa dan orang tua sebagai klien utama menjadi salah satu tujuan pengembangan SDM di Sekolah Islam Terpadu. Dengan peningkatan kompetensi pelayanan, guru dan staf mampu memberikan solusi terbaik bagi perkembangan pendidikan siswa, baik dari segi akademik, spiritual, maupun karakter. Hal ini sesuai dengan misi Sekolah Islam Terpadu yang ingin mewujudkan lembaga pendidikan yang ramah, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik serta orang tua dalam proses pendidikan yang holistik.

e. Meningkatkan Moral-Etis

Sekolah Islam Terpadu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika Islam yang tercermin dalam setiap tindakan SDM-nya. Pengembangan moral dan etika menjadi landasan utama dalam proses pembentukan karakter tenaga pendidik dan kependidikan. Hal ini

diwujudkan melalui program pelatihan yang menekankan pada integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta sikap profesional yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga setiap keputusan dan tindakan yang diambil mencerminkan nilai-nilai moral yang tinggi.

f. Meningkatkan Kesejahteraan

Kesejahteraan SDM juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan di Sekolah Islam Terpadu. Dengan memberikan perhatian pada kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual, SDM dapat bekerja secara optimal dan penuh dedikasi. Peningkatan kesejahteraan ini meliputi aspek finansial, kesehatan, serta kenyamanan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan hidup antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini sejalan dengan tujuan holistik Sekolah Islam Terpadu yang memperhatikan kesejahteraan seluruh elemen pendidiknya.

Melalui pengembangan SDM yang terintegrasi, Sekolah Islam Terpadu tidak hanya menciptakan tenaga profesional yang kompeten, tetapi juga membentuk insan yang memiliki kualitas spiritual dan moral tinggi, mampu berkontribusi dalam pembentukan generasi masa depan yang unggul.

3. Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan

Sumber Daya Manusia dalam bidang Pendidikan "adalah kekayaan utama sebuah organisasi oleh karena itu harus dikelola dengan baik. faktor penentu produktivitas di sekolah adalah sumber daya manusia itu sendiri yang terdiri dari kepala sekolah, pendidik dan karyawan. Daya saing sekolah juga sangat ditentukan oleh SDM yang dimiliki."¹⁰ Pentingnya sumber daya manusia disekolah harus menjadi perhatian tinggi oleh pemerintah, praktisi pendidikan dan juga yayasan pendidikan dalam mengelola SDM di sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam memberdayakan sumber daya yang ada di sekolahnya "*Empowerment will moderate the relationship between empowering leadership and creativity.*"¹¹

Pendidik bukan hanya *transfer of knowledge* namun juga mampu memberikan teladan yang baik, profesional, berfikir kritis, kreatif, dinamis dan mampu menanamkan karakter yang baik kepada anak didik, begitupun staf maupun karyawan yang ada disekolah harus profesional dan memiliki kepribadian yang baik juga. Pengembangan merupakan upaya-upaya pribadi seorang pegawai untuk mencapai suatu

¹⁰ Desi Eri Kusumaningrum et al., "Problematika Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sekolah Menengah Pertama Berbasis Pesantren", Ilmu Pendidikan: *Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan*, 2:2 (April, 2017), 139–50,

¹¹ Sirait, Jumaria, *Komitmen Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Sekolah*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021),57

rencana karier. Berikut merupakan indikator pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dalam pandangan Krismiyati, (2017), motivasi, kepribadian, keterampilan: ¹²

a. Motivasi.

Suatu dorongan atau penyemangat kepada seseorang agar orang tersebut dapat berusaha untuk melakukan apa yang diinginkan itu tercapai dengan baik. Motivasi yang didapatkan bisa berasal dari atasan maupun dari dalam diri, ada hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu: yang didapatkan bisa berasal dari atasan seperti motivasi terhadap kekuasaan (dorongan hati untuk mempengaruhi perilaku orang lain serta mengontrol dan memanipulasi lingkungan) maupun dari dalam diri seperti motivasi terhadap prestasi (dorongan hati untuk memberikan sumbangan/kontribusi nyata dalam setiap kegiatan).

b. Kepribadian.

Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, sifat, yang dimiliki seseorang yang berkembang ketika seseorang berhubungan dengan orang lain. Kepribadian sangat kaitannya dengan nilai, norma, dan perilaku. kepribadian menyangkut kemampuan untuk menjaga integritas, termasuk sikap, tingkah laku, etika, dan moralitas.

c. Keterampilan

Keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas. atau kecakapan yang disyaratkan. Dengan adanya pelatihan, keterampilan karyawan akan semakin membaik. Keterampilan yang baik dapat didapatkan dari dalam diri atau dengan pelatihan.

Dengan demikian, motivasi, kepribadian, keterampilan pegawai dibutuhkan dalam Sekolah Islam terpadu, kolistik dan terintegratif. dengan harapan dapat memberikan teladan yang baik, profesional, berfikir kritis, kreatif, dinamis dan mampu menanamkan karakter yang baik kepada anak didik, begitupun staf maupun karyawan yang ada disekolah harus profesional dan memiliki kepribadian yang baik juga.

¹² Krismiyati. "Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SD Negeri Inpres Angkasa Biak". *Jurnal Officer*, 3:1 (Juni, 2017). 44..

B. Teori, Prinsip Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan

1. Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia

Di dalam perspektif teori manajemen pengembangan mutu sumber daya manusia (MSDM), ada dua pendekatan, yaitu: Pendekatan "buy" dan "make" dalam manajemen pengembangan sumber daya manusia merupakan konsep yang dikembangkan oleh Peter Cappelli, seorang profesor di bidang manajemen di Wharton School, University of Pennsylvania. Cappelli memperkenalkan ide ini untuk menjelaskan bagaimana organisasi dapat memilih antara dua strategi dalam memperoleh talenta. Lisdartina&Rini Setyaningsih dalam Jurnalnya mengidentifikasi "Pendekatan "buy": Organisasi berfokus pada rekrutmen talenta dari luar, biasanya untuk mengisi kebutuhan mendesak atau mendapatkan keahlian yang tidak dapat dikembangkan secara internal dalam waktu singkat. dan Pendekatan "make": Organisasi berorientasi pada pengembangan SDM internal, berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan yang ada untuk mempersiapkan mereka mengisi peran penting di masa depan".¹³ Konsep ini membantu organisasi menentukan pendekatan terbaik berdasarkan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang mereka dalam mengelola talenta

a. Pendidikan, merupakan sebuah proses pengembangan kualitas pribadi oleh seorang individu.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa terdapat beberapa parameter untuk bisa mengetahui perkembangan kualitas sumber daya manusia, diantaranya dari angka indeks pendidikan serta kesehatan. Pendidikan dapat menjadi salah satu investasi modal untuk manusia. Pendidikan dalam suatu organisasi merupakan sebuah proses pengembangan kemampuan kepada arah yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Dalam proses pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu upaya yang sangat penting dilakukan, hal tersebut diantaranya dalam rangka meningkatkan kemampuan intelektual ataupun kepribadian manusia sehingga pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan secara terarah dan juga terencana karena dikelola oleh SDM yang yang memiliki pendidikan yang baik.

b. Bimbingan, merupakan sebuah proses berupa bantuan yang akan diberikan kepada individu yang membutuhkan.11

Maksud dari pembinaan dan pengembangan ini adalah untuk menambah keahlian dan efisiensi kerja pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan menempatkan dia pada jabatan yang setepat-tepatnya. Perlu diketahui bahwa pegawai atau tenaga pendidik merupakan manusia bukan robot. Sebagai manusia, dia membutuhkan peningkatan dan perbaikan pada dirinya termasuk dalam tugasnya.

¹³ Lisdartina&Rini Setyaningsih. "Teori Dan Model Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lembaga Pendidikan Islam Menurut Ahmad Fatah Yasin"*Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*. 6: 1, (April 2021).1 - 10

c. Pelatihan, merupakan perbaikan kinerja

Pelatihan, merupakan perbaikan kinerja serta meningkatkan motivasi kerja para karyawan, sehingga para karyawan dapat mengalami kemajuan dalam pengetahuan, keahlian serta keterampilannya sesuai dengan bidang pekerjaan yang dimilikinya. Pada umumnya hasil yang diharapkan dari program pelatihan yaitu penguasaan ataupun peningkatan keterampilan oleh peserta pelatihan. Istilah pelatihan sering digunakan dengan istilah latihan atau biasa disebut dengan training. Melalui pelatihan, sebuah organisasi juga dapat menghasilkan tenaga kerja ataupun karyawan yang sesuai dengan tuntutan organisasi.

2. Prinsip Pengembangan Sumber Daya Manusia

Terkait dengan prinsip pengembangan sumber daya manusia (pendidik), "harus dilihat secara menyeluruh sebagai manusia yang utuh, baik aspek kepribadian, eksistensi dan budaya secara komprehensif."¹⁴ Dalam hubungan manusia dengan masyarakat, manusia utuh adalah manusia yang dapat hidup dan berinteraksi dengan manusia lain dan adanya kemampuan bekerja sama dengan orang lain secara selaras, serasi dan seimbang. Sehingga sebuah organisasi dapat mengembangkan sumber daya manusia secara optimal. Secara umum Hasibuan (2016), memaparkan 4 prinsip pengembangan SDM, antara lain sebagai berikut:¹⁵

a. Peningkatan Kualitas dan Kemampuan Bekerja Karyawan

Dalam pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas dan kemampuan bekerja karyawan harus dilihat sebagai proses yang tidak hanya berfokus pada kompetensi teknis, tetapi juga memperhatikan manusia secara utuh. Hal ini mencakup aspek kepribadian, eksistensi, dan budaya yang komprehensif. Artinya, program peningkatan kualitas harus memperhatikan keseimbangan antara keterampilan karyawan dalam pekerjaan dan pengembangan kepribadian mereka, sehingga mereka dapat berfungsi secara efektif dalam lingkungan sosial dan budaya organisasi. Dengan pendekatan terpadu, holistik, dan integratif, peningkatan kemampuan kerja karyawan tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada harmoni antara kepribadian dan hubungan sosial.

b. Program Pengembangan dengan Sasaran, Kebijakan, Prosedur, Kurikulum, dan Waktu

Pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi harus menyusun program yang mencakup sasaran, kebijakan, prosedur, kurikulum, dan waktu pelaksanaan yang jelas. Program ini perlu dirancang secara terpadu, holistik, dan integratif dengan mempertimbangkan

¹⁴ Ndraha, Talisiduhu. *Pengantar Teori Perkembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1999), 73

¹⁵ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 72

manusia sebagai individu yang utuh. Aspek kepribadian, eksistensi, dan budaya harus tercermin dalam kebijakan yang tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada perkembangan pribadi dan sosial karyawan. Kurikulum yang diterapkan sebaiknya tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pembangunan karakter dan etika kerja, yang penting bagi keberlangsungan hidup mereka di dalam dan luar lingkungan kerja. Dengan pendekatan ini, program pengembangan dapat lebih efektif dalam menciptakan karyawan yang kompeten, berbudaya, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan.

c. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja

Program pengembangan yang berprinsip pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja tidak hanya harus diukur dari hasil produktivitas semata, tetapi juga dari bagaimana karyawan dapat berkembang sebagai individu yang utuh. Pendekatan yang terpadu dan holistik mencakup pengembangan keterampilan profesional serta penguatan kepribadian dan eksistensi karyawan dalam konteks budaya kerja. Efektivitas dalam bekerja akan meningkat ketika karyawan merasa dihargai secara komprehensif sebagai individu yang memiliki nilai, baik dalam lingkup profesional maupun personal. Efisiensi bukan hanya soal waktu dan biaya, tetapi juga bagaimana karyawan dapat bekerja dengan selaras, serasi, dan seimbang dengan lingkungan sosial dan budaya organisasi. Dengan demikian, organisasi tidak hanya mencapai tujuan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan.

d. Transparansi dalam Program Pengembangan

Program pengembangan yang diinformasikan secara terbuka kepada semua karyawan memastikan bahwa setiap individu dapat mempersiapkan diri secara holistik untuk perubahan yang akan terjadi. Transparansi ini penting agar karyawan tidak hanya melihat pengembangan sebagai tuntutan, tetapi juga sebagai peluang untuk berkembang secara menyeluruh, baik dari segi kepribadian, eksistensi, maupun budaya. Ketika karyawan mengetahui dan memahami tujuan dan proses pengembangan, mereka dapat menyiapkan diri secara mental, fisik, dan sosial. Dengan pendekatan terpadu dan integratif ini, setiap karyawan dapat merespons program pengembangan dengan cara yang lebih adaptif, sehingga mereka mampu berfungsi dengan optimal dalam lingkungan kerja yang berubah. Keterbukaan ini juga mendorong terciptanya suasana kerja yang selaras dan harmonis, karena setiap individu merasa dilibatkan dalam proses perubahan.

3. Konsep Utama Pembinaan dan Pengembangan SDM

Maksud dari pembinaan dan pengembangan ini adalah untuk menambah keahlian dan efisiensi kerja pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan menempatkan dia pada jabatan yang setepat-tepatnya. Perlu diketahui bahwa pegawai atau tenaga pendidik merupakan manusia bukan robot. Sebagai manusia, dia membutuhkan peningkatan dan perbaikan pada dirinya termasuk dalam tugasnya.

Ada tiga konsep Utama dalam strategi Pengembangan SDM, dikembangkan oleh Cahyanil (2005), mencakup pada: ¹⁶

a. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif merupakan konsep utama dalam strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM). Keunggulan kompetitif berfokus pada bagaimana sebuah organisasi atau individu mampu menciptakan nilai lebih dibandingkan pesaing. Dalam konteks SDM, keunggulan kompetitif dapat diwujudkan melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan inovasi. SDM yang berkualitas tinggi akan menjadi aset utama dalam memenangkan persaingan, baik di pasar tenaga kerja maupun di sektor industri. Strategi ini melibatkan pengembangan kapasitas adaptasi dan inovasi yang terus-menerus untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan teknologi.

b. Kapabilitas Khusus

Kapabilitas khusus mengacu pada kemampuan unik yang dimiliki oleh individu atau organisasi, yang membedakannya dari yang lain. Kapabilitas ini dapat berupa keterampilan teknis, pengetahuan mendalam tentang industri tertentu, atau kemampuan manajerial yang luar biasa. Pengembangan kapabilitas khusus dalam SDM harus difokuskan pada penguatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar. Kapabilitas ini memberikan daya saing yang tidak mudah ditiru oleh pesaing, sehingga mampu menjaga posisi strategis organisasi di pasar.

c. Kesesuaian Strategi

Kesesuaian strategi mengacu pada pentingnya menyelaraskan pengembangan SDM dengan tujuan strategis organisasi. Menekankan bahwa strategi SDM yang efektif harus konsisten dengan visi, misi, dan rencana jangka panjang organisasi. Hal ini berarti pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi SDM harus mendukung pencapaian tujuan bisnis yang lebih besar. Kesesuaian ini menciptakan

¹⁶ Khoirun Nisa, dkk. "Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada CV Geprek Jon X Papa Risol" *DINAMIKA PUBLIK: Jurnal Manajemen dan Administrasi Bisnis*. 1: 2 (Mei 2023), 103

sinergi antara upaya pengembangan individu dengan pertumbuhan organisasi, sehingga memastikan SDM tidak hanya berkembang secara individual, tetapi juga memberikan kontribusi maksimal terhadap keberhasilan strategis organisasi.

C. Dimensi, Metoda dan Jenis Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan

1. Dimensi Pengembangan SDM Bidang Pendidikan Kholostik, Terpadu dan Terintegratif

Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Sekolah Islam Terpadu (SIT) Kholostik, Terpadu, dan Terintegratif meruju pada telaah Pengembangan Sumber Daya Manusia Nugraha (2016) dibentuk dari empat dimensi yaitu: pendidikan, pengalaman, keterampilan dan kemampuan teknologi¹⁷ Empat dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan dimensi utama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) karena mencakup pembentukan pengetahuan, pemahaman agama, dan pengembangan karakter. Dalam konteks Sekolah Islam Terpadu (SIT), pentingnya pendidikan holistik, terpadu, dan terintegratif adalah agar siswa tidak hanya berkembang secara intelektual, tetapi juga spiritual, emosional, dan sosial. Pendidikan yang menyeluruh ini membantu mencetak generasi yang memiliki pemahaman agama yang kuat, serta kemampuan berfikir kritis dan kreatif, yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global. Selain itu, pendidikan yang terintegrasi dengan ajaran Islam menciptakan generasi yang memiliki kesadaran moral yang tinggi dan tanggung jawab sosial yang kuat.

b. Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja menjadi dimensi penting dalam pengembangan SDM karena memberikan kesempatan kepada individu untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan ke dalam situasi praktis. Dalam pengembangan Sekolah Islam Terpadu (SIT), dimensi pengalaman kerja dapat diintegrasikan melalui program magang atau proyek-proyek sosial berbasis komunitas yang melibatkan siswa. Ini tidak hanya memperkaya keterampilan mereka dalam lingkungan profesional, tetapi juga memperkuat karakter Islami dalam dunia nyata. Pengalaman praktis membantu membentuk siswa menjadi pemimpin yang memiliki integritas tinggi, serta mampu menghadapi tantangan dan kompleksitas pekerjaan dengan nilai-nilai keislaman.

¹⁷ Nugraha, R. (2016). Pengaruh Pengembangan Sumberdaya Manusia, Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Kabupaten Morowali. Katalogis, 4(10).

c. Keterampilan

Keterampilan menjadi aspek krusial dalam pengembangan SDM yang holistik. Di Sekolah Islam Terpadu (SIT), pengembangan keterampilan tidak hanya berfokus pada kompetensi teknis seperti sains, matematika, atau bahasa, tetapi juga mencakup keterampilan hidup seperti berpikir kritis, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Sekolah Islam Terpadu harus merancang kurikulum yang mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan multi-disiplin, termasuk keterampilan sosial dan komunikasi yang baik. Dengan demikian, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan di era modern, sekaligus mampu memegang teguh prinsip-prinsip Islam dalam setiap keputusan yang mereka buat.

d. Kemampuan Teknologi

Kemampuan teknologi merupakan dimensi penting dalam menghadapi era digital. Pengembangan teknologi di Sekolah Islam Terpadu (SIT) harus terintegrasi dengan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, agar siswa tidak hanya mahir dalam penggunaan teknologi tetapi juga bijaksana dalam penggunaannya. Teknologi harus dimanfaatkan sebagai alat untuk mendukung proses belajar-mengajar yang lebih efektif, seperti melalui platform e-learning, pemanfaatan perangkat lunak pendidikan, dan pembelajaran jarak jauh. Dengan demikian, siswa SIT dapat bersaing di dunia global dengan kemampuan teknologi yang mumpuni tanpa melupakan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam.

2. Metode Pengembangan SDM Pendidikan

Ada 3 cara atau metode yang dapat dilakukan dalam proses ini antara lain:¹⁸

a. *On the job training.*

Latihan ini dilaksanakan dengan menempatkan pegawai baru untuk memangku jabatannya dibawah pengawasan langsung yaitu dia didampingi langsung oleh seorang pegawai yang berpengalaman. Latihan ini dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sampai pegawai baru tersebut dapat berdiri sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Keunggulan dari latihan ini dalah proses transfer latihan sangat tinggi karena dia dilatih keterampilan dilingkungan dimana dia sesungguhnya bekerja.

¹⁸ Bafadal, Ibrahim, *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Dalam Rangka Manajemen Peningkatan Mutu berbasis Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
29.

b. On-site tetapi bukan on the job.

Latihan di tempat kerja tetapi bukan on the job tepat untuk program after-hours yang di tuntut. Latihan ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan pegawai sambil membiarkan mereka menjalankan tugasnya tanpa mengganggu yang lain.

c. Off the job training.

Latihan semacam ini sangat tepat dilakukan bila akibat kesalahan tinggi. Misalnya melatih para pilot dalam simulator penerbangan. Off the job tepat dilakukan bila keterampilan yang diperlukan sangat rumit (keterampilan khusus). Ada beberapa kelemahan dalam latihan semacam ini, antara lain biaya latihan tinggi, kurangnya kecenderungan para peserta latihan akan menerapkan apa yang mereka pelajari pada pekerjaannya karena perbedaan lingkungan latihan, dan sebagainya.

3. Jenis dan Indikator Pengembangan SDM diperlukan dalam Penyelenggaraan Sekolah Islam Terpadu

Berdasarkan pandangan Hasibuan, terdapat dua jenis pengembangan SDM, yaitu: "pengembangan SDM secara formal dan secara informal"¹⁹, dilelaskan sebagai berikut:

- a. Pengembangan SDM secara formal yaitu SDM yang ditugaskan oleh lembaga untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut maupun lembaga diklat. Pengembangan SDM secara formal dilakukan karena tuntutan tugas saat ini maupun masa yang akan datang. Dengan demikian, jenis pengembangan ini dapat memenuhi kebutuhan kompetensi SDM yang bersifat *empirical needs* dan *predictive needs* bagi eksistensi dan keberlanjutan lembaga.
- b. Pengembangan SDM secara informal yaitu pengembangan kualitas SDM secara individual berdasarkan kesadaran dan keinginan sendiri untuk meningkatkan kualitas diri sehubungan dengan tugasnya. Banyak cara yang dapat dilakuklan SDM untuk meningkatkan kemampuannya, namun jenis pengembangan ini memerlukan motivasi intrinsik yang kuat dan kemampuan mengakses sumber-sumber informasi sebagai sumber belajar.

Jenis pengembangan SDM Aamy (dalam Sary Zuanda, dkk.), berdasar pada pemahaman kemajuan di bidang pendidikan dan teknologi telah mendorong pertumbuhan manajemen sumber daya manusia di seluruh dunia. Untuk tetap kompetitif, perusahaan/organisasi harus

¹⁹ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 73

meningkatkan output. maka pendidikan pengembangan pelatihan berfokus pada pengembangan keterampilan mengajar dengan ketelitian, maka pelatihan berfokus pada pencapaian tujuan tertentu.²⁰

- a. Pendidikan menitikberatkan pada perkembangan mental dan emosional peserta didik, sedangkan pelatihan menitikberatkan pada pengembangan keterampilan jasmani.
- b. Masa pelatihannya kurang dari satu tahun, namun masa pelatihannya jauh lebih lama.
- c. Topik pendidikan mempunyai cakupan yang lebih luas, sedangkan pelatihan berkaitan dengan muatan yang spesifik.
- d. Tidak ada kebiasaan menggunakan metode pengajaran tradisional dan tradisional termasuk “permainan belajar” selama pelatihan.
- e. Pelatihan akan dikeluarkan sertifikat dan ijazah lanjutan akan dikeluarkan sebagai bukti kelulusan.
- f. Pelatihan memperhatikan tujuan, kebijakan, anggaran, kurikulum, peserta dan waktu pelaksanaan dalam pelatihan dan pengembangan staf. Pendidik menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh sekolah dan lembaga lainnya.

D. Model Komponen Pengembangan SDM Terpadu dan Terintegratif

1. Asumsi Model Komponen Pengembangan SDM Terpadu dan Terintegratif

Berdasar pada konsep pendidikan holistik, terpadu dan terintegratif menjadi dasar dari pendekatan Sekolah Terpadu, yang menganggap bahwa pendidikan harus mencakup pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Hal ini sejalan dengan teori *multiple intelligences* yang diusulkan oleh Howard Gardner, yang menekankan bahwa setiap individu memiliki beragam jenis kecerdasan yang perlu dikembangkan. Menurut Roe dan Norton (dalam Komariah, & Cepi Triatna), Pengelolaan sumber daya manusia (guru, konselor, karyawan, dan sebagainya). Menjadi prioritas pada pengelolaan program sekolah secara holistik dan integratif.²¹

2. Rancangan dan Proses Pelatihan dan Pengembangan SDM yang Efektif di Lembaga Pendidikan

Merancang model Pelatihan dan Pengembangan SDM yang Efektif di Lembaga Pendidikan, diantaranya:

- a. Tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangandilembaga pendidikanharus jelas dan terukur. Setelah melakukan analisis yang sesuai untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, kekuatan organisasi dan personel dinilai untuk menentukan tujuan dan prioritas pelatihan.

²⁰ Sary Zuanda, dkk. "Konsep Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Efektif di Lembaga Pendidikan" *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8:1 (Juni 2024)

²¹ Aan Komariah, & Cepi Triatna, *Visionary Leadershi*, 5

Menurut Siagian, organisasi menghadapi masalah anggaran karena harus membayar program pelatihan dan pengembangan. Bagaimana dana ini dialokasikan? Artinya, "pelatihan atau pendidikan lanjutan hanya diberikan ketika ada kebutuhan. Kebutuhan harus selalu ditentukan dengan analisis yang tepat. Analisis kebutuhan harus dapat menentukan setidaknya dua hal: masalah saat ini dan jumlah masalah yang diperkirakan akan muncul di masa depan".²².

- b. Pelatih harus merupakan profesional yang berkualifikasi penuh. Swatno menyatakan bahwa "mencari dan mempekerjakan seorang pembina yang sulit tidak hanya sulit, tetapi juga sangat sulit. Mayoritas bisnis besar tidak memiliki departemen khusus yang menangani pelatihan dan pengembangan. Bisnis dapat bergantung pada lembaga pendidikan dan pelatihan jika mereka tidak memiliki pelatih sendiri. Lembaga ini bertanggung jawab atas pelatihan dan kemajuan"²³. Guru pendidikan orang dewasa harus memberi tahu peserta mengapa mereka membutuhkan informasi tentang pelatihan.
- c. Instruksi pelatihan kejuruan harus Spesifik'; Instruksi pelatihan kejuruan harus dipecah menjadi bagian yang lebih kecil sehingga karyawan dapat melihat bagaimana setiap elemen berhubungan satu sama lain. Agar pelatihan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, pelajar dewasa disarankan untuk memasukkan topik terkait pekerjaan ke dalam pelatihan mereka.
- d. Materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan. Jenis pelatihan dapat dibuat untuk mencapai berbagai tujuan dan dapat dimasukkan ke dalam kategori yang berbeda, seperti pelatihan yang diwajibkan secara teratur antara lain: 1) Setiap pekerja akan menerima pelatihan untuk memenuhi persyaratan. 2) Pelatihan teknis dan kejuruan. 3) Pelatihan interpersonal dan pemecahan masalah. 4) Meningkatkan hubungan interpersonal, operasional, dan interpersonal dalam pekerjaan organisasi. 4) Pengembangan dan pelatihan inovatif yang berfokus pada peningkatan keterampilan individu dan organisasi dalam jangka panjang.

Adapun proses atau langkah-langkah pengembangan hendaknya dilakukan sebagai berikut:²⁴

- a. Sasaran; Setiap pengembangan harus terlebih dahulu ditetapkan secara jelas sasaran yang ingin dicapai. Penetapan sasaran didasarkan pada kebutuhan jabatan atau pekerjaan dari karyawan yang bersangkutan.

²² Sondang P. Siagian. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta. Bumi Aksara, 2017), 67

²³ Bejo Siswanto. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 110

²⁴ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 76

- b. Kurikulum; Kurikulum atau mata pelajaran yang akan diberikan harus mendukung tercapainya sasaran dari pengembangan itu. Kurikulum harus ditetapkan secara sistematis, jumlah jam pertemuan, metode pengajaran, dan sistem evaluasinya harus jelas agar sasaran dari pengembangan tersebut optimal.
- c. Sarana; Mempersiapkan tempat dan alat-alat yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengembangan.
- d. Peserta; Menetapkan syarat dan jumlah peserta yang dapat mengikuti pengembangan. Misalnya usia, jenis kelamin, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikannya.
- e. Pelatih; Menunjuk pelatih atau instruktur yang memenuhi persyaratan untuk mengajarkan setiap mata pelajaran sehingga sasaran pengembangan tercapai.

3. Model Komponen Pengembangan SDM Terpadu

Terkait dengan prinsip atau model pengembangan sumber daya manusia (pendidik), "harus dilihat secara menyeluruh sebagai manusia yang utuh, baik aspek kepribadian, eksistensi dan budaya secara komprehensif."²⁵ Konsep pendidikan holistik menjadi dasar dari pendekatan Sekolah Islam Terpadu, yang menganggap bahwa pendidikan harus mencakup pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Hal ini sejalan dengan teori *multiple intelligences* yang diusulkan oleh Howard Gardner, yang menekankan bahwa setiap individu memiliki beragam jenis kecerdasan yang perlu dikembangkan. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu aspek krusial dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Namun, pengembangan SDM yang efektif tidak hanya melibatkan pelatihan dan pendidikan saja, tetapi juga memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup berbagai aspek kehidupan karyawan. Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi konsep pengembangan SDM terpadu dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan produktivitas secara menyeluruh. Komponen Pengembangan SDM Terpadu:²⁶

²⁵ Ndraha, Talisiduhu. *Pengantar Teori Perkembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1999), 73

²⁶ Model Komponen Pengembangan SDM Terpadu, tersedia di <https://manajemen.uma.ac.id/2024/04/komponen-pengembangan-sdm-terpadu> (diakses Kamis, 3 Oktober 2024: 4:45).

- f. Komponen Pelatihan dan Pendidikan, meliputi; 1) Menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan individu dan organisasi; 2) Mengembangkan keterampilan teknis dan kepemimpinan; 3) Mendorong pembelajaran kontinu dan pengembangan profesional.
- g. Komponen Kesehatan dan Kesejahteraan, meliputi: 1) Menyediakan program kesehatan fisik dan mental; 2) Memberikan akses ke layanan medis dan konseling; 4) Memfasilitasi program kesehatan pencegahan dan promosi gaya hidup sehat.
- h. Komponen Keseimbangan Kerja dan Kehidupan, meliputi: 1) Menyediakan fleksibilitas dalam jadwal kerja; 2) Mendukung kebijakan; cuti yang seimbang; 3) Mempromosikan manajemen waktu yang efektif dan mengurangi stres kerja.
- i. Pengakuan dan Penghargaan, meliputi: 1) Mengakui pencapaian individu dan tim. 2) Memberikan penghargaan atas kontribusi yang luar biasa. 3) Membangun budaya penghargaan dan apresiasi di tempat kerja.
- j. Pengembangan Karir, meliputi: 1) Menyediakan jalan karir yang jelas dan terstruktur. 2) Memberikan peluang pengembangan keterampilan dan pengetahuan. 3) Mendukung program mentoring dan coaching untuk pertumbuhan profesional.
- k. Kerjasama Tim dan Kolaborasi, meliputi: 1) Mendorong kerjasama antar tim dan departemen. 2) Memfasilitasi komunikasi yang efektif dan transparan. 3) Membangun budaya kerja yang inklusif dan mendukung.
- l. Pengelolaan Kinerja dan Umpan Balik, meliputi: 1) Menyediakan mekanisme pengukuran kinerja yang adil dan transparan. 2) Memberikan umpan balik konstruktif secara teratur. 3) Mengidentifikasi dan mendukung pengembangan potensi individu.
- m. Budaya Organisasi, meliputi: 1) Membangun budaya yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan. 2) Memperkuat identitas dan komitmen terhadap visi dan misi organisasi. 3) Mengembangkan lingkungan yang mendukung inovasi dan pengambilan risiko yang sehat.

Pada prinsipnya, integrasi komponen-komponen dalam strategi pengembangan SDM di Lembaga Pendidikan dapat menciptakan lingkungan kerja yang seimbang, produktif, dan memungkinkan pertumbuhan holistik karyawan serta kesuksesan jangka panjang organisasi.

Tugas Mahasiswa

1. Mengidentifikasi dan mengabstraksikan 4 poin penting dari kajian Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu
 - Konsep Dasar Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan
 - Teori, Prinsip Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan.....
 - Dimensi, Metoda dan Jenis Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan
 - Model Komponen Pengembangan SDM Terpadu dan Terintegratif
2. Memukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
3. Membatasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Mari/Tanggal :
Mata Kuliah :
Metode :
Oleh :
NIM :
JUR./FE :



Isi /Aplod Foto Resmi Mu

Isi Identitas MK & Individu

Resensi Rangkuman:

- A** Esensi/isi /Sub Materi
- B** Esensi/isi /Sub Materi
- C** Esensi/isi /Sub Materi
- D** Esensi/isi /Sub Materi

summary: Masimal 10 kalimat

Temukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi

Ket:
Penulisan maksimal 500Kata

Siswa dg.
Mata Kuliah,
NIM,

Isi /aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:

Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

4. Mempresentasikan Hasil CK dalam bentuk Poster (untuk itu Membuat Poster menjadi wajib)

Part: 8

Pengelolaan Peserta Didik Sekolah Islam Terpadu

KEMAMPUAN AKHIR PEMBELAJARAN

Setelah mendapat materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami Konsep Dasar Pengelolaan Peserta Didik Sekolah Islam Terpadu
- Mengidentifikasi Konsep Dasar Pengelolaan Peserta Didik Sekolah Islam Terpadu
- Menjelaskan Konsep Dasar Pengelolaan Peserta Didik Sekolah Islam Terpadu

POKOK BAHASAN

- Konsep Dasar Pengelolaan Peserta Didik Sekolah Islam Terpadu
- Perencanaan Pengelolaan Peserta Didik di Sekolah Islam Terpadu
- Pengaturan Orientasi, Kedairan dan Kedisiplinan Peserta Didik
- Pola Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik di Sekolah Islam Terpadu

TOPIK BAHASAN

Pengelolaan peserta didik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen pendidikan. Peranannya sangat strategis sebagai *pupil personnel administration* suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan siswa sampai ia matang di madrasah /madrasah. Manajemen peserta didik menunjuk kepada pekerjaan atau kegiatan pencatatan peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan madrasah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada madrasah itu. Oleh karena itu, layanan prima lembaga pendidikan, menjadi suatu keniscayaan, baik dari segi tuntutan/keharusan regulasi maupun tuntutan kebutuhan oleh masyarakat dalam setiap lembaga pendidikan di baik itu pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, tidak terkeuali pada sekolah secara holistik dan integratif, karena lembaga pendidikan ini memiliki misi dan tujuan sebagai layanan sosial dan keagamaan. Fungsi manajemen peserta didik, adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri se-optimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial keagamaan, segi aspirasi, segi kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Karena manajemen peserta didik ini akan mengatur keseluruhan hal peserta didik dari awal peserta didik masuk madrasah hingga lulus dari madrasah. Namun, penerapan manajemen peserta didik masih belum terlalu maksimal. Hal ini berdampak langsung pada peserta didik, banyak peserta didik mempunyai karakter yang kurang baik dan bebas melakukan apapun di madrasah tanpa melihat aturan yang ada, bahkan sampai berulang-ulang kali tanpa ada rasa bersalah dan menyesal. Oleh sebab itu, perlu adanya perbaikan pada sistem manajemen peserta didik agar nantinya memiliki peserta didik dapat dikelola dengan baik dan akan membuat karakter peserta didik lebih baik lagi. Pengelolaan peserta didik merupakan bagian dari proses penyelenggaraan sekolah adalah kiat manajemen sekolah dalam mengelola masukan-masukan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan atau output sekolah. “proses adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain Sesuatu yang dapat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input”. Oup tut sekolah secara mudah dapat dikatakan sebagai siswa yang berhasil keluar sebagai pemenang dari ajang pergulatan ilmu yang diakhiri dengan ujian-ujian dan menghasilkan nilai penghargaan, berupa angka-angka nilai. Out put sekolah fokusnya pada siswa, tetapi siswa yang memiliki kompetensi nalar, dan juga kompetensi lainnya. Out put sekolah, tidak hanya diukur dari lulusan tetapi pada umumnya, diukur dari tingkat kinerjanya. Kinerja sekolah bukan semata-mata kinerja siswa yang belajar, tetapi kinerja seluruh komponen sistem, artinya kinerja sekolah dalam pencapaian atau prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses persekolahan. Kinerja sekolah diukur dari efektivitasnya, kualitasnya, produktivitasnya, efesiansinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, surplusnya, dan moral kerjanya”. Begitu pentingnya pengelolaan peserta didik dalam konteks program sekolah secara holistik dan integratif, Roe dan Norton, menempatkannya pada posisi ke lima setelah "1) Perencanaan program, 2) pengembangan, program; 2) Pengembangan kurikulum; 3) Pengembangan proses belajar mengajar; 4) Pengelolaan sumber daya manusia (guru, konselor, karyawan, dan sebagainya. 5) Pelayanan siswa; 6) Pengelolaan fasilitas; 7) Pengelolaan keuangan; 8) Pengelolaan hubungan sekolah-masyarakat; 9) evaluasi program; 10) Perbaikan program berkelanjutan" Itulah Pentingnya pada bagian ini membahas Pengelolaan peserta didik merupakan bagian dari proses penyelenggaraan sekolah.

A. Konsep Dasar Pengelolaan Peserta Didik Sekolah Islam Terpadu

1. Makna dan Hakikat Pengelolaan Peserta Didik Sekolah Islam Terpadu

Pengelolaan atau "manajemen peserta didik" merupakan gabungan dari kata "manajemen" dan frase "peserta didik". Apa yang dimaksud dengan "pengelolaan peserta didik"? Bermula dari pemikiran Knezevich (1961), yang mengartikan manajemen peserta didik, sebagai "*pupil personnel administration*" Maknanya "sebagai layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di madrasah".¹

Kemudian berkembang beberapa pengertian yang terkait manajemen peserta didik, diantaranya; Imam Gunawan, dalam bukunya "Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar", mengartikan manajemen peserta didik; sebagai "usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk madrasah sampai dengan mereka lulus madrasah".² Mujahidin, E., dkk. mengartikan "Manajemen peserta didik", pada dua makna: "(1) "sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk madrasah sampai dengan mereka lulus" (2) "manajemen peserta didik menunjuk kepada pekerjaan atau kegiatan pencatatan peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan madrasah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada madrasah itu".³

Pada hakikatnya manajemen peserta didik adalah "suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau suatu lembaga". Apabila dikaitkan dengan Pengelolaan Peserta Didik pada Sekolah Islam Terpadu. Maka pengertian itu menjadi; "suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari Sekolah Islam Terpadu". Adapun Sekolah Islam Terpadu dalam konteks ini, adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri se-optimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial keagamaan, segi

¹ Rusdiana A. *Pengelolaan Pendidikan*. Cet-1. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 181

² Imam Gunawan, *Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar*. (Bandung : Alfabeta, 2017), 134.

³ Mujahidin, E., dkk. "Pengembangan Manajemen Peserta didik Program Tahfizh". *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9: 1 (April, 2020), 75

aspirasi, segi kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya, dengan semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Singkatnya Manajemen peserta didik yang bermutu ”berkontribusi pada adanya output pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi manajemen peserta didik baik dimadrasah atau madrasah agar mendukung pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler (mata pelajaran) tujuan institusional (lembaga/satuan) dan tujuan pendidikan nasional”.⁴ Seperti diisyaratkan dalam Qur’an surat Azzumar ayat 9;

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (QS. Az-zumar [39]: 9).

Ayat di atas, mengisyaratkan betapa pentingnya kegiatan manajemen peserta didik merupakan bagian yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Islam Terpadu . Program-program kegiatan manajemen peserta didik yang diselenggarakan di Sekolah Islam Terpadu , harus didasarkan kepada kepentingan, pertimbangan dan peningkatan kemampuan peserta didik dalam bidang kognitif, afektif dan psikomotor dan sesuai dan keingan, bakat dan minat peserta didik. Pengadaan program kegiatan manajemen kepeserta didikan diharapkan menghasilkan keluaran yang bermutu.

Adapun, karakteristik peserta didik SIT yang diharapkan; Berawal dari SIT bertujuan untuk mencetak peserta didik dengan karakteristik yang dikehendaki oleh pengelola. Karakteristik tersebut adalah "karakteristik yang identik dengan karakteristik kader tarbiyah. ..."jadi misalnya karakteristik yang hendak dibentuk dari pribadi santri, kalau di sini adalah yang *salim al-akidah, shahi hat al-iba dah, matin al-*

⁴ Badrudin, *Manajemen Peserta Didik*, Cet ke-1 (Jakarta:Indeks, 2014), 16

khuluq, qawiyy al-jism, qadir ala al-kasb, mutsaqqaf al-fikr, mujahid linafsih, munadzzam fi shan'ih, haris ala waqtih dan nafi' li ghairih. Jadi yang kita ajarkan dalam proses pembelajaran itu mengarah kepada pembentukan karakteristik tersebut"⁵.

Keseluruhan aktifitas peserta didik dalam proses pengembangan dirinya tidak lepas dari nilai-nilai tarbiyah. Anak-anak kelas empat sampai kelas enam misalnya, harus mengikuti mentoring ketika pembelajaran sudah usai. Mentoring adalah kegiatan tarbiyah yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik dalam pembentukan pribadi sebagaimana disebutkan dalam karakteristik peserta didik. Sebenarnya tidak hanya peserta didik yang sudah kelas tinggi. Dari sejak kelas satu sebenarnya mereka sudah mulai dikenalkan dengan penanaman karakter-karakter tersebut. Hanya saja, usia kelas satu sampai kelas tiga masih terlalu dini dilakukan mentoring.

2. Fungsi dan Tujuan Pengelolaan Peserta Didik di Sekolah Islam Terpadu

Fungsi manajemen peserta didik secara khusus dirumuskan sebagai berikut:⁶

- a. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik, ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi: kemampuan umum (kecerdasan), kemampuan khusus (bakat), dan kemampuan lainnya.
- b. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial madrasah nya dan lingkungan sosial masyarakatnya. Fungsi ini berkaitan dengan hakekat peserta didik sebagai makhluk sosial.
- c. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, ialah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan dan minatnya. Hobi, kesenangan dan minat peserta didik demikian patut disalurkan, oleh karena ia juga dapat menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan.
- d. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya.

⁵ Abdussuyukur. Konsep dan Praktik Sekolah Islam Terpadu dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia. Disertasi, (Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 140.

⁶ Annisa Nuraisyah Annas, "Manajemen Peserta Didik Berbasis Kecerdasan Spiritual Pendidikan Islam" *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 5:2 (Agustus 2017), 136

e. Kesejahteraan demikian sangat penting karena dengan demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan sebayanya.

Adapun, tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di Sekolah Islam Terpadu; Sebagaimana Akhmad Sudrajat (dalam Kompri), lebih lanjut menyatakan bahwa ”proses belajar mengajar di madrasah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan madrasah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Maka tujuan khusus manajemen peserta didik adalah sebagai berikut:⁷

- a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik.
- b. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum (kecerdasan), bakat, dan minat peserta didik.
- c. Menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik.

Dengan terpenuhinya a, b, dan c di atas diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka.

3. Prinsip Landasan Dasar dan Pendekata Manajemen Peserta Didik Sekolah Islam Terpadu

a. Prinsip Pengembangan Manajemen Peserta Didik Sekolah Islam Terpadu

Seperti yang telah penulis uraikan pada poin sebelumnya, bahwa manajemen peserta didik berfungsi sebagai fasilitator peserta didik dalam mengembangkan diri dari dimensi individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan, serta dimensi-dimensi lain agar proses pembelajaran berlangsung dengan tertib, teratur dan lancar. Untuk mewujudkan semua itu, perlu adanya beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik adalah sebagai berikut: ⁸

- 1) Manajemen peserta didik haruslah sejalan dengan tujuan manajemen madrasah, hal ini karena manajemen peserta didik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen madrasah itu sendiri;
- 2) Seluruh kegiatan manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan haruslah dalam rangka mendidik peserta didik, bukan untuk

⁷Kompri *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik*. (Bandung: Alfabeta, 2014), 196.

⁸Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2011), 13

- kepentingan-kepentingan diluar misi pendidikan;
- 3) Seluruh kegiatan manajemen peserta didik diharapkan dapat membuat para peserta didik yang berasal dari latar belakang yang beda-beda menjadi satu kesatuan sosial yang solid;
 - 4) Manajemen peserta didik hendaknya dipandang sebagai pengelolaan pembimbingan peserta didik. Pembimbingan akan berlangsung dengan optimal apabila subyek yang dibimbing bersedia dengan lapang dada untuk dibimbing. Dalam hal ini subyek yang dimaksud adalah peserta didik;
 - 5) Setiap kegiatan manajemen peserta didik hendaknya dapat memupuk sifat kemandirian dalam diri tiap-tiap peserta didik. Hal ini tentunya tidak berlangsung secara instan. Diharapkan sedikit demi sedikit sifat kemandirian siswa akan muncul dari kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik secara bertahap;
 - 6) Hasil dari kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi aspek kehidupan peserta didik itu sendiri, baik itu kehidupannya di madrasah, masyarakat, masa kini dan masa depan.

b. Landasan Pengembangan Peserta Didik Sekolah Islam Terpadu

Dasar hukum pengembangan manajemen peserta didik dapat dijabarkan dalam beberapa peraturan dan perundang undang-undangan:⁹

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alenia keempat yang mengamanatkan bahwasanya pemerintah Negara Indonesia hendaknya dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah serta dalam kaitannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian pada UUD 1945 pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Bukan hanya hak, namun pada ayat kedua di pasal yang sama, dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Selain itu pemerintah juga harus menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa.

⁹Bayu Setya Abrori, *Implementasi Manajemen Peserta Didik di SD Negeri 2 Brebes Kabupaten Brebes* (Skripsi). (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019), 16

2) Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003

Kemudian secara terperinci dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengamanatkan bahwa:

- (a) Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu (pasal 5 ayat 1);
- (b) Setiap warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak untuk mendapatkan pendidikan khusus (pasal 5 ayat 4);
- (c) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan sepanjang hayat (pasal 5 ayat 5);
- (d) Pasal 6 ayat 1 mengamanatkan mengenai usia peserta didik yang wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni pada usia tujuh sampai dengan lima belas tahun;
- (e) Pasal 6 ayat 2 mengamanatkan bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab setiap warga negara;
- (f) Pasal 12 ayat 1 menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki peserta didik:
 - (1) Mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik;
 - (2) Mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - (3) Mendapatkan beasiswa apabila peserta didik berprestasi sedangkan orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - (4) Mendapatkan biaya pendidikan apabila orangtua peserta didik tidak mampu membiayai pendidikannya; Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - (5) Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu;
- (g) Pasal 12 ayat 2 yang menjelaskan kewajiban yang dimiliki oleh peserta didik:
 - (1) Menjamin keberlangsungan proses pendidikan dengan cara menjaga norma-norma pendidikan;
 - (2) Ikut serta dalam menanggung pembiayaan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Peraturan Pemerintah RI. Tahun Nomor 28 tahun 1990

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun nomor 28 tahun 1990 *tentang pendidikan dasar* yang mengamanatkan bahwa:

- (a) Usia minimal untuk dapat diterima di Sekolah Dasar ialah enam tahun (pasal 15 ayat 1);
- (b) Salah satu syarat wajib untuk dapat diterima di Sekolah Lanjutan Pertama/Sederajat ialah harus sudah tamat dari Sekolah Dasar/satuan pendidikan yang sederajat;
- (c) Siswa memiliki hak untuk: mendapat perlakuan sesuai bakat, kemampuan dan minat; memperoleh pendidikan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut peserta didik tersebut; mengikuti program pendidikan yang berkelanjutan, sesuai dengan bakat minat, kemampuan dan mendapat pengakuan atas tingkat pendidikan tertentu; mendapatkan bantuan berupa fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan-bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku; mendapat hasil evaluasi belajar; dapat menyelesaikan program pendidikan lebih cepat dari ketentuan awal sesuai dengan peraturan yang berlaku; berhak untuk mendapat pelayanan khusus apabila peserta didik mengalami kecacatan tertentu;
- (d) Siswa memiliki kewajiban untuk: ikut serta dalam pembiayaan pendidikan kecuali peserta didik yang dibebaskan dari keewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; patuh dengan peraturan yang berlaku; menghormati tenaga kependidikan; ikut serta dalam pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan madrasah serta dalam memelihara sarana prasarana madrasah terkait.

c. Pendekatan Pengembangan Peserta Didik Sekolah Islam Terpadu

Dalam manajemen peserta didik, umumnya menggunakan dua pendekatan sebagaimana dikonsepsikan, Yager (dalam Rusdiana), yakni pendekatan kuantitatif (*the quantitative approach*) dan pendekatan kualitatif (*the qualitative approach*).¹⁰ Bagi manajemen peserta didik Sekolah Islam Terpadu, kurang lengkap apabila tidak menggunakan pendekatan religius. Maka apabila Sekolah Islam Terpadu ingin survive dan mengena dihati masyarakat Islam, Pendekatan manajemen peserta didik Sekolah Islam Terpadu paling tidak dapat menggunakan tiga pendekatan:

¹⁰ Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan*, 184.

1) Pendekatan Kuantitatif

Pada pendekatan kuantitatif, peserta didik dituntut untuk memenuhi tuntutan-tuntutan lembaga yang lebih bersifat birokratik dan administratif. Asumsi pendekatan ini ialah apabila peserta didik dapat memenuhi tugas-tugas, harapan, ataupun tuntutan lembaga maka peserta didik akan menjadi matang dan mencapai keinginannya. Secara operasional, Yeager dalam Imron, mengarahkan, pendekatan kualitatif ini berimplikasi terhadap kewajiban peserta didik: "(1) kehadiran peserta didik secara mutlak; (2) memperketat presensi; (3) penuntutan disiplin yang tinggi; (4) menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya secara tepat waktu."¹¹

Secara keseluruhan pendekatan ini memberikan beban pada peserta didik dengan tuntutan-tuntutan yang diberikan. Namun hal tersebut akan relevan apabila dipandang sebagai sarana mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia nyata yang tentunya memiliki tuntutan-tuntutan yang beragam.

2) Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif atau *the qualitative approach*. Pendekatan ini memiliki titik berat/penekanan pada kesejahteraan peserta didik. Apabila dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif yang mengasumsikan jika peserta didik mampu maka ia akan matang, pada pendekatan ini asumsi diarahkan agar peserta didik senang dan sejahtera terlebih dahulu. Dengan asumsi "Apabila peserta didik senang/sejahtera dengan diciptakannya lingkungan yang kondusif serta iklim pendidikan yang mendukung, maka mereka akan dapat belajar dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki secara lebih optimal".¹²

Kedua pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan kuantitatif dipandang lebih terukur dalam pencapaian target dan tujuannya namun memberikan beban kepada peserta didik secara lebih berat. Pendekatan kualitatif dipandang lebih manusiawi dan mengimplementasikan prinsip bahwa peserta didik adalah subyek pendidikan. "Tentunya agar lebih optimal dalam dunia pendidikan, kedua pendekatan ini dapat disatukan agar menjadi pendekatan padu."¹³

¹¹ Imron, *Manajemen Peserta*, 15

¹²Eka, Prihatin. *Manajemen Peserta Didik*. Cet-2 (Bandung: Alfabeta, 2014), 12

¹³ Badrudin, *Manajemen Peserta*, 28

Dalam pendekatan padu, peserta didik tetap memiliki tuntutan-tuntutan dari lembaga yang bersifat birokratik dan administratif, namun di sisi lain madrasah /madrasah juga harus memberikan timbal balik berupa penyediaan fasilitas dan membangun iklim madrasah /madrasah yang kondusif bagi perkembangan potensi para peserta didik.

Berdasarkan rumusan pendekatan terpadu dalam manajemen peserta didik tersebut, maka dapat dibangun asumsi bahwa penyediaan iklim madrasah yang kondusif, kesejahteraan peserta didik, dan pelayanan yang optimal merupakan usaha-usaha untuk mendisiplinkan peserta didik dalam menyelesaikan tuntutan-tuntutan lembaga.

3) Pendekatan Ruligius

Bagi Sekolah Islam Terpadu tidak hanya sampai disitu ada suatu hal yang lebih prinsip dengan pendekatan pengelolaan terpadu manajemen peserta didik Sekolah Islam Terpadu , yang lebih utama melalui pendekatan Ruligius. Islam memerintahkan belajar pada ayat yang diturunkan pada Rasulullah Saw. Oleh karena belajar itu utama dan sarana terbaik mencerdaskan umat¹⁴. Perintah tersebut tidak terbatas pada persoalan duniawi saja, tapi dalam urusan ukhrawi. Firman Allah swt dalam Q.S. at –Taubah: 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: ”Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (Q.S. at –Taubah [9]: 122).

Makna, ayat di atas mengindikasikan bahwa; pendekatan, atau salah satu cara yang bisa dilakukan ialah dengan belajar di sebuah lembaga yang khusus mengajarkan ilmu agama Islam. Penyelenggaraan Madrasah Diniyyah sangat berperan penting dalam pembentukan karakter dan akhlak anak. Mereka akan diarahkan untuk menjadi seorang anak yang memiliki pondasi agama yang kuat dan terbentuk pribadi anak yang berakhlakul karimah.

¹⁴Ida Rohmawati, *Optimalisasi Peran Madrasah Dalam Pengembangan Sstem Nilai Masyarakat*.(Malang: Pedagogia, 2012),7

Diantara ketiga pendekatan tersebut, sudah barang tentu dapat diambil jalan tengahnya, atau pendekatan padu. Dalam pedekan ini, calon peserta didik ataupun peserta didik, diminta untuk memenuhi tuntutan regulasi dan birokrasi serta administratif Madrasah, pada suatu pihak, tetapi pada sisi lain, sejatinya Madrasah menawarkan insentif-insetif lain yang dapat memenuhi kebutuhan layanan dan kesejahteraannya. Pada satu pihak siswa maupun calon siswa diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berasal dari lembaganya, tetapi disisi lain juga disediakan iklim yang kondusif untuk menyelesaikan tugasnya.

4. Ruang lingkup Manajemen Peserta didik Terpadu holistik dan integratif

Ada dua pandangan ahli yang mengkaji model ruang lingkup manajemen peserta didik (Nasihin 2009) dan (Prihatin, 2011) dalam Mujahidin, E., dkk (2020), dijelaskan sebagai berikut: ¹⁵

a. Model Manajemen Peserta didik Nasihin,

Nasihin, memandang ruang lingkup manajemen peserta didik mencakup; analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi, penempatan peserta didik, pembinaan dan pengembangan peserta didik, pencatatan dan pelaporan, kelulusan dan alumni, serta layanan-layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik seperti bimbingan konseling, layanan perpustakaan, layanan kesehatan dan lain-lain.

b. Model Manajemen Peserta didik Prihatin

Prihatin, memandang, ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi; perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik, pengelompokan peserta didik, kehadiran peserta didik, pembinaan disiplin peserta didik, kenaikan kelas dan penjurusan, perpindahan peserta didik, kelulusan dan alumni, kegiatan ekstra kelas, tata laksana manajemen peserta didik, peranan kepala madrasah dalam manajemen peserta didik, mengatur layanan peserta didik".

c. Model Manajemen/Pengelolaan Peserta didik Terpadu holistik dan integratif Knezevich (1961),

Berdasar pada penelitian yang dilakukan oleh Zarkasih, dkk. "Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Knezevich (1961) mengartikan manajemen peserta didik atau pupil personnel administration sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan

¹⁵Mujahidin, E., dkk. "Pengembangan Manajemen, 75

dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. anajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar dapat menunjang proses belajar mengajar sehingga tujuan dari sebuah pendidikan dapat tercapai"¹⁶.

Dari tiga pandangan diatas, serta mempertimbangkan kajian Knezevich (1961), yang megartikan manajemen peserta didik, sebagai “*pupil personnel administration*” diambil jalan tengahnya, atau pendekatan terpadu padu. Di buku yang lain Knezevick .menyebutkan bahwa ada 20 prinsip manajemen yang disederhanakan menjadi 4. Dalam pemhasan ini mengambil 4 unsur pokok yaitu ”perencanaan, penerimaan, pengaturan orientasi, kehadiran dan kedisipilinan peserta didik”¹⁷. Menjadi poko pembahasan selanjutnya.

B. Perencanaan Pengelolaan Peserta Didik di Sekolah Islam Terpadu

1. Perencanaan Program Pengelolaan Peserta Didik

Perencanaan pengelolaan peserta didik merupakan aktivitas pertama yang dilakukan dalam manajemen peserta didik. Perencanaan pengelolaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan dimuka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan pengelolaan peserta didik¹⁸ , dilakukan sejak peserta didik akan mendaftar masuk, maupun mereka akan lulus.

Dalam perencanaan penerimaan peserta didik termasuk di dalamnya analisis kebutuhan peserta didik. Ada, beberapa langkah yang harus dilakukkan oleh para pengelola peserta didik, dalam rangka merencanakan pengelolaan peserta didik, meliputi kegiatan sebagai berikut: ¹⁹

a. Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima

Penentuan jumlah ini akan tergantung pada daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia. Selain itu akan ditentukan oleh rasio guru dan murid. Pada umumnya standar ideal jumlah siswa dalam satu kelas adalah berkisar 40-50 orang untuk ukuran kelas besar dan 25-30 orang untuk kelas kecil. Untuk rasio murid guru adalah 1 :30

¹⁶Zarkasih, dkk. Sekolah Islam Terpadu (SIT): Manajemen dan Model Pendidkan Alternatif di Indonesia (Pekan Baru: Cahaya Firdaus, 2020), 61

¹⁷Rusdiana A. *Pengelolaan Pendidikan*, 181

¹⁸Imron, *Manajemen Peserta*, 21.

¹⁹ Tatang Amirin. *Manajemen Pendidikan*. (Yogyakarta: UNY Press. Arends, 2013), 51

b. Menyusun program kegiatan kesiswaan

Penyusunan program ini harus memerhatikan beberapa hal yaitu, visi dan misi lembaga pendidikan/sekolah yang bersangkutan, minat dan bakat peserta didik, sarana dan prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, dan tenaga kependidikan yang tersedia.

Melihat dua masalah di atas, dalam konteks SIT, perlu mengadopsi model program *Tahfizh Wadi Mubarak*; hal pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan bagian apa saja yang berkepentingan dalam melakukan kajian. Kedua, menentukan waktu yang tepat. Perencanaan kuota (formasi) peserta didik program sangat berkaitan dengan 4 macam informasi:²⁰

- 1) Informasi tentang potensi lulusan Madin;
- 2) Informasi tentang dinamika pengembangan program Madin;
- 3) Informasi tentang ketersediaan sarana-prasarana dan
- 4) Informasi tentang kemampuan pembiayaan mahad dalam kegiatan operasional.

Dari empat jenis informasi di atas, bisa diketahui siapa saja pihak yang berkepentingan terlibat dalam kajian perencanaan peserta didik yaitu bagian manajemen cabang untuk jenis informasi yang pertama, ketua yayasan dan bagian penelitian dan pengembangan yayasan untuk jenis informasi yang kedua, kepala bagian operasional untuk jenis informasi yang ketiga, dan ketua yayasan beserta bendahara untuk jenis informasi yang keempat.

2. Penerimaan Peserta Didik Sekolah Islam Terpadu

Rekrutmen/Penerimaan Peserta didik di sebuah lembaga pendidikan pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan, dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) yang bersangkutan.²¹ Jadi, rekrutmen peserta didik adalah kegiatan mencari peserta didik baru untuk dapat mendaftar di suatu madrasah.

Langkah-langkah dalam kegiatan rekrutmen peserta didik adalah:²²

²⁰ Mujahidin, E., dkk. "Pengembangan Manajemen, 77

²¹ Tim Dosen AP UPI. *Manajemen Pendidikan*, 208.

²² Amirin. *Manajemen Pendidikan*, 52

a. Persiapan

- 1) Penyiapan Administrasi dan regulasi kegiatan rekrutmen peserta didik
- 2) Membentuk panitia penerimaan peserta didik baru yang meliputi dari semua unsur guru, tenaga TU, dan dewan madrasah /komite madrasah. Pembentukan panitia ini disusun secara musyawarah dan terdiri dari semua unsur guru, tenaga tata usaha, dan dewan madrasah /komite madrasah. Panitia ini bertugas mengadakan pendaftaran calon peserta didik, mengadakan seleksi, dan menerima pendaftaran kembali peserta didik yang diterima.
- 3) Pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Pengumuman penerimaan peserta didik baru ini berisi hal-hal sebagai berikut:²³
 - (a) Gambaran singkat lembaga pendidikan (madrasah) yang meliputi: sejarah madrasah, visi dan misi madrasah, kelengkapan fasilitas madrasah, tenaga kependidikan yang dimiliki serta hal-hal lain yang perlu disampaikan pada calon pelamar;
 - (b) Persyaratan pendaftaran peserta didik baru;
 - (c) Cara pendaftaran;
 - (d) Waktu pendaftaran, yang meliputi hari, tanggal, dan jam pelayanan;
 - (e) Tempat pendaftaran;
 - (f) Berapa uang pendaftaran dan kepada siapa uang tersebut diserahkan, serta bagaimana pembayarannya;
 - (g) Waktu dan tempat seleksi yang meliputi hari, tanggal, dan jam seleksi;
 - (h) Pengumuman hasil seleksi yang meliputi waktu pengumuman hasil seleksi dan di mana calon peserta didik dapat memperoleh.

b. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik

Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (madrasah) tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.²⁴

²³ Tim Dosen AP UPI. *Manajemen Pendidikan*, 208-9

²⁴ Rusdiana. *Pengelolaan Pendidikan*, 199

Seleksi peserta didik penting dilakukan terutama bagi lembaga pendidikan (madrasah) yang calon peserta didik melebihi dari daya tampung yang tersedia di lembaga pendidikan (madrasah) tersebut. Jadi, seleksi peserta didik baru adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan peserta didik yang akan diterima atau yang tidak diterima di suatu lembaga pendidikan (madrasah) dengan ketentuan tertentu. Adapun cara-cara seleksi yang dapat digunakan adalah:²⁵

- 1) Melalui tes atau ujian, meliputi tes psikotest, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, atau tes keterampilan.
- 2) Melalui penelusuran bakat dan minat yang didasarkan pada prestasi yang diraih oleh calon peserta didik dalam bidang olahraga atau kesenian.
- 3) Berdasarkan nilai STTB atau nilai UAN.

Proses seleksi dalam penerimaan peserta didik baru dinilai sangat penting. Dengan adanya seleksi pada calon peserta didik baru, maka akan diperoleh peserta didik yang berkualitas dan berkarakter baik. Setiap peserta didik nantinya akan disaring dan dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap lembaga pendidikan (madrasah).

c. Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik

Setelah melalui proses seleksi, maka masuk ke dalam tahap pengumuman dan kemudian melakukan daftar ulang. Bagi calon peserta didik yang diterima diharuskan mendaftar ulang pada lembaga pendidikan (madrasah) yang menerimanya. Pada waktu daftar ulang, biasanya calon peserta didik harus melengkapi persyaratan-persyaratan administratif yang berguna bagi pengisian data peserta didik di lembaga pendidikan (madrasah) tersebut.²⁶

3. Orientasi, Pembinaan, dan Pengembangan Peserta Didik

Orientasi peserta didik baru adalah kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan (madrasah) tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Sehingga orientasi peserta didik baru ini merupakan kegiatan mengenalkan lingkungan baru kepada peserta didik dengan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan (madrasah) yang bersangkutan.²⁷

²⁵ Tim Dosen AP UPI. *Manajemen Pendidikan*, 209

²⁶ Tim Dosen AP UPI. *Manajemen Pendidikan*, 210

²⁷ Rusdiana. *Pengelolaan Pendidikan*, 204

Tujuan orientasi peserta didik adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Agar peserta didik mengenal lebih dekat mengenai diri mereka sendiri di tengah-tengah lingkungan barunya.
- 2) Agar peserta didik mengenal lingkungan madrasah, baik lingkungan fisiknya maupun lingkungan sosialnya.
- 3) Pengenalan lingkungan madrasah demikian sangat penting bagi peserta didik dalam hubungannya dengan:
 - (a) Pemanfaatan sebaik mungkin terhadap layanan yang dapat diberikan oleh madrasah .
 - (b) Sosialisasi diri dan pengembangan diri secara optimal.
- 4) Menyiapkan peserta didik baru secara fisik, mental, dan emosional agar siap menghadapi lingkungan madrasah baru dan siap dalam proses pembelajaran.

Adapun, fungsi orientasi peserta didik adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Bagi peserta didik baru, orientasi peserta didik berfungsi sebagai:
 - (a) Wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosialnya.
 - (b) Wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menentukan sikap.
 - 2) Bagi personalia madrasah dan atau tenaga kependidikan, orientasi peserta didik berfungsi sebagai titik tolak dalam memberikan layanan-layanan yang mereka butuhkan.
 - 3) Bagi peserta didik senior, orientasi peserta didik baru memiliki fungsi untuk mengetahui lebih dalam mengenai peserta didik penerusnya di madrasah tersebut. Hal ini berkaitan dengan kepemimpinan estafet organisasi peserta didik di madrasah tersebut.
- *) Pembinaan, dan Pengembangan Peserta Didik, pada subbab. C dan D.

²⁸ Imron, *Manajemen Peserta*, 74

²⁹ Imron, *Manajemen Peserta*, 74-5

4. Pengelompokkan dan Penempatan Peserta Didik

Penempatan peserta didik, dalam konteks ini, (pembagian kelas), yaitu kegiatan pengelompokkan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas, pengelompokkan peserta didik bisa dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik.³⁰ Menurut Wiliam A Jeager dalam (Tim Dosen AP UPI) pengelompokkan peserta didik dapat didasarkan kepada:³¹

- 1) Fungsi integrasi, yaitu pengelompokkan yang didasarkan atas kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik, seperti jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Pengelompokkan ini menghasilkan pembelajaran yang klasikal.
- 2) Fungsi perbedaan, yaitu pengelompokkan peserta didik didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang ada dalam individu peserta didik, seperti minat, bakat, kemampuan, dan sebagainya. Pengelompokkan ini menghasilkan pembelajaran individual.

Sehingga, penempatan peserta didik merupakan kegiatan pembagian kelas peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) yang bersangkutan.

5. Pencatatan/pengadministrasian dan Pelaporan Peserta Didik

Pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai sejak peserta didik diterima di madrasah sampai dengan tamat atau meninggalkan madrasah. "Tujuan pencatatan tentang kondisi peserta didik dilakukan agar lembaga mampu melakukan bimbingan yang optimal pada peserta didik".³² Sedangkan pelaporan dilakukan sebagai tanggung jawab lembaga dalam perkembangan peserta didik di sebuah lembaga, dibuktikan dengan pengadministrasian.

a. Buku Induk Siswa

Pencatatan dalam konteks ini dipelakukan pada peserta didik baru. "Kegiatannya mengisi identitasnya di catat dalam buku induk adalah sebagai berikut":³³

³⁰ Amirin. *Manajemen Pendidikan*, 53

³¹ Tim Dosen AP UPI. *Manajemen Pendidikan*, 210

³² Amirin. *Manajemen Pendidikan*, 53

³³ Rusdiana. *Pengelolaan Pendidikan*, 204

- 1) Nomor urut
- 2) Nomor Induk
- 3) Identitas peserta didik, yang meliputi:
 - (a) Nama lengkap peserta didik
 - (b) Tempat/tanggal lahir peserta didik
 - (c) Kebangsaan peserta didik
 - (d) Alamat peserta didik
- 4) Identitas orang tua/wali peserta didik, meliputi:
 - (a) Nama ayah peserta didik
 - (b) Nama ibu peserta didik
 - (c) Nama wali peserta didik
 - (d) Hubungan peserta didik dengan wali
 - (e) Alamat ayah peserta didik
 - (f) Alamat ibu peserta didik
 - (g) Alamat wali
- 5) Latar belakang Pendidikan peserta didik:
 - (a) Asal madrasah (SD) dan nomor STTB/Ijazah peserta didik
 - (b) Asal madrasah (SMP) dan nomor STTB/Ijazah peserta didik
 - (c) Nilai raport peserta didik di madrasah tiap semester.

b. Buku-buku Kelengkapan Administrasi Kesiswaan

Selain Buku Induk Siswa, Sekolah/Madrasah perlu dilengkapi pula dengan

- 1) Formulir Pendaftaran Siswa Baru

- 2) Daftar Calon Siswa Baru
- 3) Daftar Siswa Baru
- 4) Daftar Kontrol Buku Induk Siswa
- 5) Daftar Kontrol Klapper Siswa
- 6) Buku Induk Register Peserta Didik
- 7) Buku Mutasi Siswa
- 8) Daftar Penyerahan STTB, dsj.

Buku induk dan buku-buku lainnya itu, perlu dirawat serapi mungkin, karena ia harus ada selama madrasah tersebut masih ada. Ia berisi catatan mengenai hal penting tentang diri siswa sejak madrasah berdiri. Nomor induk siswa tersebut dibuat urut, mulai dari siswa yang terdaftar pertama kali di madrasah sampai yang terakhir.

6. Kelulusan dan Alumni

Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen kesiswaan. Kelulusan adalah pernyataan dari sekolah sebagai suatu lembaga tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh siswa. Setelah seorang siswa selesai mengikuti seluruh program pendidikan di suatu sekolah, dan berhasil lulus dalam UN, maka kepadanya diberikan surat keterangan atau sertifikat, yang umumnya disebut Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

Proses kelulusan biasanya ditandai atau dikukuhkan dalam suatu upacara, yang biasa disebut “upacara kelulusan”. Akhir-akhir ini istilah kelulusan banyak diganti dengan istilah “wisuda”. Dalam wisuda ini, di samping mewisuda siswa-siswa yang lulus, sekaligus sekolah “melepas” siswa dan “menyerahkan kembali” kepada para orang tua. Dengan demikian “habislah” (dalam arti telah selesai) hubungan ikatan antara sekolah dan orang tua siswa. Sedangkan hubungan para lulusan (alumni) dan sekolah diharapkan masih akan tetap terjalin.

C. Pengaturan Orientasi, Kedairan dan Kedisiplinan Peserta Didik

1. Pengaturan Orientasi Peserta Didik

Pengaturan Orientasi Peserta Didik dalam konteks ini terbatas pada beberapa hal sebagai berikut:³⁴

a. Alasan dan Batasan Orientasi Peserta Didik

Orientasi adalah pengenalan. Pengenalan ini meliputi lingkungan fisik madrasah dan lingkungan sosial madrasah. Lingkungan fisik madrasah meliputi prasarana dan sarana madrasah seperti jalan menuju madrasah, halaman madrasah, tempat bermain di sekolah/ madrasah, lapangan olah raga, gedung dan perlengkapan madrasah, serta fasilitas-fasilitas lain yang disediakan di madrasah. Sedangkan lingkungan sosial madrasah meliputi: kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan selain guru, teman sebaya seangkatan, dan peserta didik senior di madrasah. Lingkungan sosial madrasah tersebut adakalanya terorganisir dan adakalanya tidak terorganisir.

b. Tujuan dan Fungsi Orientasi Peserta Didik

Tujuan orientasi peserta didik baru adalah sebagai berikut:

- 1) Agar peserta didik mengenal lebih dekat mengenai diri mereka sendiri di tengah-tengah lingkungan barunya.
- 2) Agar peserta didik mengenal lingkungan madrasah, baik lingkungan fisiknya maupun lingkungan sosialnya.
- 3) Pengenalan lingkungan madrasah demikian sangat penting bagi peserta didik dalam hubungannya dengan: (a) Pemanfaatan semaksimal mungkin terhadap layanan yang dapat diberikan oleh madrasah ; (c) Sosialisasi diri dan pengembangan diri secara optimal; (d) Menyiapkan peserta didik secara fisik, mental dan emosional agar siap menghadapi lingkungan baru madrasah .

Adapun fungsi orientasi peserta didik adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi peserta didik sendiri, orientasi peserta didik berfungsi sebagai: (a) Wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosialnya. Di wahana ini peserta didik dapat menunjukkan: inilah saya kepada teman sebayanya; (b) Wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap.

³⁴ Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan*, 204

- 2) Bagi personalia madrasah dan atau tenaga kependidikan, dengan mengetahui siapa peserta didik barunya, akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan-layanan yang mereka butuhkan.
- 3) Bagi para peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini, akan mengetahui lebih dalam mengenai peserta didik penerusnya di madrasah tersebut. Hal ini sangat penting terutama berkaitan dengan kepemimpinan estafet organisasi peserta didik di madrasah tersebut.

c. Pekan Orientasi Peserta Didik

Pekan orientasi peserta didik adalah kelanjutan dari orientasi hari-hari pertama masuk madrasah. Jika pada hari-hari pertama masuk madrasah, peserta didik diperkenalkan dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial madrasah secara global, maka pada pekan orientasi studi ini mereka diperkenalkan secara rinci.

Adapun lingkungan madrasah yang diperkenalkan secara rinci tersebut adalah: (1) peraturan dan tata tertib madrasah, (2) guru dan personalia madrasah, (3) perpustakaan madrasah, laboratorium madrasah, bengkel madrasah, (4) kafetaria madrasah, bimbingan dan konseling madrasah, layanan kesehatan madrasah, (5) layanan asrama madrasah, (6) orientasi program studi, (7) cara belajar yang efektif dan efisien di madrasah dan (8) organisasi peserta didik.

2. Pengaturan Kehadiran Peserta Didik

Kehadiran peserta didik di madrasah (school attendance) adalah kehadiran dan keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas madrasah pada jam-jam efektif di madrasah. Sedangkan ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan madrasah .

Pada jam-jam efektif madrasah, peserta didik memang harus berada di madrasah. Kalau tidak ada di madrasah, haruslah dapat memberikan keterangan yang syah serta diketahui oleh orang tua atau walinya. Hal demikian sangat penting, oelh karena ada insiden-insiden seperti: peserta didik menyatakan kepada orang tua atau walinya bahwa ia berangkat ke madrasah, tetapi ternyata tidak hadir di madrasah. Carter V. Good (1981) memberi batasan kehadiran sebagai berikut: *“The act of being present, particulary at school (certain court dicisions have defined attendance at school as not merely being bodily presence but including actual participation in the work and activities orientasi*

the school).³⁵ Maksudnya: “Tindakan kehadiran, khususnya di sekolah (keputusan pengadilan tertentu telah menetapkan kehadiran di sekolah tidak hanya sebagai kehadiran fisik tetapi termasuk partisipasi nyata dalam pekerjaan dan kegiatan di orientasi sekolah).”

Pengertian kehadiran seperti yang dikemukakan di atas seringkali dipertanyakan, terutama pada saat teknologi pendidikan dan pengajaran telah berkembang pesat seperti sekarang ini. Kalau misalnya saja, aktivitas-aktivitas madrasah dapat dipancarkan melalui TV dan bisa sampai ke rumah, apakah kehadiran peserta didik secara fisik di madrasah masih dipandang mutlak?

Jika pendidikan atau pengajaran dipandang sebagai sekedar penyampaian pengetahuan, sedangkan para peserta didik dapat menyerap pesan-pesan pendidikan melalui layar kacanya di rumah, ketidakhadiran peserta didik di madrasah secara fisik mungkin tidak menjadi persoalan. Sebaliknya, jika pendidikan bukan sekedar penyerapan ilmu pengetahuan, melainkan lebih jauh membutuhkan keterlibatan aktif secara fisik dan mental dalam prosesnya, maka kehadiran secara fisik di madrasah, tetap penting apapun alasannya, dan bagaimanapun canggihnya teknologi yang dipergunakan. Pendidikan telah lama dipandang sebagai suatu aktivitas yang harus melibatkan peserta didik secara aktif, dan tidak sekedar sebagai penyampaian informasi belaka.

3. Pengaturan Kedisiplinan bagi Peserta Didik

a. Kontek Disiplin

Webster's New World Dictionary (dalam Rusdiana), membeikan batasan disiplin sebagai: Latihan untuk mengendalikan diri, karakter dan keadaan secara tertib dan efisien. Maksudnya disiplin adalah suatu keadaan di mana sesuatu itu berada dalam keadaan tertib, teratur dan semestinya, serta tidak ada suatu pelanggaran-pelanggaran baik secara langsung atau tidak langsung.³⁶ Adapun pengertian disiplin peserta didik adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik di madrasah, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap madrasah secara keseluruhan.

b. Jenis-Jenis Disiplin

³⁵ Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan*, 205

³⁶ Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan*, 205

Ada tiga macam disiplin, yang perlu diperhatikan dalam konteks ini, yaitu:³⁷

- 1) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian. Menurut kacamata konsep ini, peserta didik di madrasah dikatakan mempunyai disiplin tinggi manakala mau duduk tenang sambil memperhatikan uraian guru ketika sedang mengajar. Peserta didik diharuskan mengiyakan saja terhadap apa yang dikehendaki guru, dan tidak boleh membantah. Dengan demikian, guru bebas memberikan tekanan kepada peserta didik, dan memang harus menekan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik takut dan terpaksa mengikuti apa yang diingini oleh guru.
- 2) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permissive. Menurut konsep ini, peserta didik haruslah diberikan kebebasan seluas-luasnya di dalam kelas dan madrasah. Aturan-aturan di madrasah dilonggarkan dan tidak perlu mengikat kepada peserta didik. Peserta didik dibiarkan berbuat apa saja sepanjang itu menurutnya baik. Konsep permissive ini merupakan anti tesa dari konsep otoritarian. Keduanya sama-sama berada dalam kutub ekstrim.
- 3) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab. Disiplin demikian, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berbuat apa saja, tetapi konsekuensi dari perbuatan itu, haruslah ia tanggung. Karena ia yang menabur, maka ialah yang menuai. Konsep ini merupakan konvergensi dari konsep otoritarian dan permissive di atas.

Menurut konsep kebebasan terkendali ini, peserta didik memang diberi kebebasan, asal yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kebebasan yang diberikan. Sebab tidak ada kebebasan mutlak di dunia ini, termasuk di negara liberal sekalipun. Ada batas-batas tertentu yang harus diikuti oleh seseorang dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, termasuk juga kehidupan bermasyarakat dalam setting madrasah. Bahkan pendamba kebebasan mutlak pun, sebenarnya akan terbatas oleh kebebasan itu sendiri.

Kebebasan jenis ketiga ini juga lazim dikenal dengan kebebasan terbimbing. Terbimbing karena dalam menerapkan kebebasan tersebut, diaksentuasikan kepada hal-hal yang konstruktif. Manakala arah tersebut berbalik atau berbelok ke hal-hal yang destruktif, maka dibimbing kembali ke arah yang konstruktif.

³⁷ Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan*, 205

c. Teknik Pembinaan Disiplin

Berdasarkan tiga konsep disiplin tersebut, kemudian dikemukakan Imron (dalam Rusdiana), teknik-teknik alternatif pembinaan disiplin peserta didik.³⁸

- 1) Teknik *external control*, ialah suatu teknik di mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Teknik ini meyakini kebenaran akan teori X, yang mempunyai asumsi-asumsi tak baik mengenai manusia. Karena tak baik, mereka senantiasa diawasi dan dikontrol terus, agar tidak terjerembab ke dalam kegiatan-kegiatan yang destruktif dan tidak produktif. Menurut teknik *external control* ini, peserta didik harus terus menerus didisiplinkan, dan kalau perlu ditakuti dengan ancaman dan ditawari dengan ganjaran. Ancaman diberikan kepada peserta didik yang tidak disiplin, sementara ganjaran diberikan kepada peserta didik yang mempunyai disiplin tinggi.
- 2) Teknik *inner control* atau *internal control*. Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik di atas. Teknik ini mengupayakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri mereka sendiri. Peserta didik disadarkan akan arti pentingnya disiplin. Sesudah sadar, ia akan mawas diri dan berusaha mendisiplinkan diri sendiri. Jika teknik ini dapat dikembangkan dengan baik, maka akan mempunyai kekuatan yang lebih hebat dibandingkan dengan teknik *external control*. Jika teknik *inner control* ini yang dipilih oleh guru, maka guru haruslah bisa menjadi teladan dalam hal kedisiplinan. Sebab, guru tidak akan dapat mendisiplinkan peserta didiknya, tanpa ia sendiri harus berdisiplin. Guru harus sudah punya *self control* dan *inner control* yang baik.
- 3) Teknik *cooperatit control*. Menurut teknik ini, antara pendidik dan peserta didik harus saling bekerjasama dengan baik dalam menegakkan disiplin. Guru dan peserta didik lazimnya membuat semacam kontrak perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati bersama-sama. Sangsi atas pelanggaran disiplin juga ditaati dan dibuat bersama.

Kontrak atau perjanjian seperti ini sangat penting, oleh karena hanya dengan cara demikianlah pendidik dan peserta didik dapat bekerjasama dengan baik. Dalam suasana demikianlah, maka peserta didik juga merasa dihargai. Inisiatif yang berasal dari dirinya, biarpun itu berbeda dengan inisiatif guru, asalkan baik juga diterima oleh guru dan peserta didik lainnya.

³⁸ Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan*, 205

4. Pengaturan Pembinaan Kesiswaan

Pengaturan Pembinaan Peserta Didik dalam konteks ini terbatas pada beberapa hal sebagai berikut: ³⁹

a. Administrasi Pembinaan Kesiswaan

Pembinaan kesiswaan adalah suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, pengembangan, dan pemberian berbagai bentuk kegiatan kepada peserta didik sebagai insan pribadi, insan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Tujuan Pendidikan Nasional. Terkait dengan pembinaan siswa, menyatakan bahwa ada lima hal yang dilakukan dalam pembinaan siswa di antaranya; (a) memberikan orientasi kepada siswa siswa baru, (b) mencatat kehadiran siswa, (c) mencatat prestasi siswa, (d) membina disiplin siswa, dan (e) membina siswa yang telah tamat belajar. ⁴⁰

b. Materi dan Jalur Pembinaan Kesiswaan

Materi pembinaan kesiswaan mencakup:

- 1) Pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meliputi kegiatan: (a) pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara; (b) pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara; (c) pembinaan kepribadian dan budi pekerti luhur; (d) pembinaan berorganisasi, pendidikan politik, dan kepemimpinan; (e) pembinaan keterampilan dan kewirausahaan; (f) pembinaan kesegaran jasmani dan daya kreasi; dan (g) pembinaan persepsi, apresiasi, dan kreasi seni.
- 2) Materi dan Jalur Pembinaan Organisasi Kesiswaan, meliputi: (a) organisasi kesiswaan; (b) latihan kepemimpinan; (c) kegiatan ekstrakurikuler; dan (d) kegiatan wawasan wyatamandala.
- 3) Pelatihan Kepemimpinan meliputi: (a) pelatihan kepemimpinan bagi pembina osis; (b) pelatihan kepemimpinan bagi pengurus osis; (c) pelatihan kepemimpinan bagi perwakilan kelas (d) Pelatihan kepemimpinan bagi anggota OSIS. ⁴¹ Pelatihan kepemimpinan bagi pembina

³⁹Rusdiana, *Pengelolaan Pendidikan*, 206

⁴⁰Rohiyat. *Manajemen Sekolah:Teori dan Praktek*. (Bandung: Refika Aditama, 2009), 26.

⁴¹ Mulyasa (2005), menyebutkan bahwa “organisasi sekolah atau lebih dikenal dengan sebutan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) diadakan ketika siswa sudah mencapai pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan pendidikan Sekolah Manengah Atas (SMA)”. OSIS beranggotakan seluruh siswa yang berada

OSIS juga dikenal dengan orientasi pengembangan pembimbing kesiswaan (OPPK) dan latihan bagi pengurus OSIS⁴² dan perwakilan kelas melalui Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS).

c. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan perbaikan dan pengayaan yang berkaitan dengan program kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk lebih memantapkan pembentukan kepribadian. Kegiatan ini dilaksanakan di luar jam pelajaran yang tercantum di dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan madrasah .

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meliputi kegiatan: (a) melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing; (b) memperingati hari-hari besar agama, (c) melaksanakan perbuatan amaliah sesuai dengan norma agama; (d) membina toleransi kehidupan antarumat beragama; dan (e) menyelenggarakan kegiatan seni yang bernafaskan keagamaan.
- 2) Pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi kegiatan: (a) melaksanakan upacara bendera pada setiap hari Senin dan Sabtu, serta hari-hari besar Nasional; (b) melaksanakan bakti sosial; (c) mengadakan lomba karya tulis; (d) melaksanakan pertukaran siswa antarpropinsi; (e) menghayati dan mampu menyanyikan lagu-lagu Nasional; (f) pembinaan pendidikan pendahuluan bela Negara

pada satu sekolah tempat OSIS itu berada dan pengurus OSIS adalah mereka yang dipilih oleh seluruh anggota OSIS dalam kurun waktu 1 tahun kepengurusan. Mulyasa, E. (2005). *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2005), 159.

⁴² Berdasarkan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (2008) sebagai pedoman Pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah dan dijelaskan bahwa Osis memiliki 3 fungsi yaitu: (a) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai Wadah Organisasi Siswa Intra Sekolah merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. OSIS sebagai wadah organisasi artinya tempat dimana para siswa melakukan kegiatan bersama, bertukar ilmu, bertukar pikiran, mengeluarkan pendapat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. (b) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai Penggerak/ Motivator OSIS sebagai motivator artinya mempengaruhi semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersamasama dalam mencapai tujuan. Motivasi adalah suatu perangsang dan dorongan bagi seseorang agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik dan produktif. Sedangkan motivator adalah yang melakukan suatu dorongan tersebut. (c) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai Pembinaan Siswa OSIS sebagai pembinaan kesiswaan merupakan jalur pembinaan yang berusaha memberi bekal pengetahuan dan pengalaman kepada siswa untuk memimpin dirinya, orang lain, dan lingkungannya dalam mengikuti kegiatan sekolah dan kehidupan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk mencapai keberhasilan pendidikan siswa di sekolah. Tri Joko. Implementasi Manajemen Organisasi Siswa Intra Sekolah Sebagai Strategi Dalam Pengembangan Kepemimpinan Siswa Smp Negeri 2 Sukadana. *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM METRO*. 3:1 (Juni. 2018),73.

- 3) Pembinaan pendidikan pendahuluan bela Negara, meliputi: (a) melaksanakan tata tertib madrasah;⁴³ (b) melaksanakan baris-berbaris; (c) mempelajari dan menghayati sejarah perjuangan bangsa; (d) melaksanakan wisata siswa, pencinta alam, kelestarian alam dan lingkungan; dan (e) mempelajari dan menghayati semangat perjuangan para pahlawan bangsa.
- 4) Pembinaan kepribadian dan budi pekerti luhur, meliputi kegiatan: (a) melaksanakan tata krama pergaulan; (b) menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran rela; (c) berkorban dengan jalan melaksanakan perbuatan amal untuk meringankan beban dan penderitaan orang lain. (c) meningkatkan sikap hormat siswa terhadap orang tua, uru, dan sesama siswa di lingkungan masyarakat. (c) pembinaan berorganisasi, pendidikan politik, dan kepemimpinan
- 5) Pembinaan berorganisasi, pendidikan politik, dan kepemimpinan meliputi: (a) memantapkan dan mengembangkan peran siswa di dalam OSIS sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; (b) membentuk kelompok belajar berdasarkan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan (c) melaksanakan latihan kepemimpinan siswa; (d) mengadakan forum diskusi ilmiah; (e) mengadakan media komunikasi OSIS (bulletin, majalah dinding, dsb.); (f) mengorganisasikan suatu pentas atau bazaar.
- 6) Pembinaan Keterampilan dan Kewirausahaan, meliputi: (a) meningkatkan keterampilan dalam menciptakan suatu barang tidak berguna menjadi berguna; (b) meningkatkan keterampilan di bidang teknik, elektronik, pertanian, dan peternakan; (c) meningkatkan usaha-usaha keterampilan tangan; (d) meningkatkan usaha-usaha keterampilan tangan; (e) meningkatkan usaha koperasi madrasah dan unit produksi; (f) Melaksanakan praktik kerja nyata (PKN) atau pengalaman kerja lapangan (PKL).
- 7) Pembinaan kesegaran jasmani dan daya kreasi, meliputi: (a) Meningkatkan Kesadaran Hidup Sehat Di Lingkungan Madrasah, Rumah, Dan Masyarakat; (b) Melaksanakan Usaha Kesehatan Madrasah ; (c) Melaksanakan Keindahan Madrasah, Penghijauan, Dan Kebersihan Madrasah ; (d) Menyelenggarakan Kantin Sehat; (e) Meningkatkan Kesehatan Mental; (f) Melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan

⁴³Tujuan tata tertib adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang menunjang terhadap kelancaran, ketertiban dan suasana yang damai dalam pembelajaran. Dalam informasi tentang Wawasan Wiyatamandala (1993:21) disebutkan bahwa ketertiban adalah suatu kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian dan keseimbangan tata kehidupan bersama sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Suradi, "Pembentukan Karakter Siswa melalui Penerapan Disiplin Tata Tertib Sekolah" *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual*. 2: 4, (November, 2017) 526.

- Narkotika, Obat Terlarang, Minuman Keras, Dan Merokok; (g) Melaksanakan Senam Pagi Indonesia, Senam Kesegaran Jasmani, Dan Olah Raga Lainnya; (h) Menyelenggarakan Lomba Berbagai Macam Olah Raga; (i) Mengembangkan Motto: "Rekreasi Dan Kreatif"
- 8) Pembinaan persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. meliputi: (a) Mengembangkan wawasan dan keterampilan siswa di bidang seni suara, seni tari, seni kerajinan, drama,/sastra, musik, dan fotografi; (b) Menyelenggarakan sanggar berbagai seni; (c) Meningkatkan daya cipta seni; dan (d) Mementaskan, memamerkan berbagai cabang seni, baik hasil karya siswa/ madrasah maupun karya seni dari luar lingkungan madrasah.
- 9) Kegiatan Wawasan Wiyatamandala,⁴⁴ pada hakikatnya merupakan suatu sikap pandang dan kesadaran serta tanggung jawab terhadap lingkungan pendidikan yang fungsinya sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar dan tidak untuk kegiatan lain yang tidak mendukung pendidikan; Unsur-unsur Wawasan Wiyatamandala sebagai berikut:
- (a) Madrasah sebagai lingkungan pendidikan;

⁴⁴Peran dalam intrakurikuler adalah dengan belajar giat sesuai tugas-tugas yang diberikan Peran dalam ekstrakurikuler adalah ikut aktif dalam ekstra yang berlaku. Berdasarkan Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor:13090/CI.84 tanggal 1 Oktober 1984 perihal Wawasan Wiyatamandala sebagai sarana ketahanan sekolah, maka dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan ketahanan sekolah bagi sekolah-sekolah di lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen pendidikan dan kebudayaan, mengeterapkan Wawasan Wiyatamandala yang merupakan konsepsi yang mengandung anggapan-anggapan sebagai berikut:

- 1) Sekolah merupakan Wiyatamandala (lingkungan pendidikan) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan diluar bidang pendidikan.
- 2) Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh proses pendidikan dalam lingkungan sekolahnya, yang harus berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk: meningkatkan ketakwaan teradap Tuhan yang maha Esa, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
- 3) Antara guru dengan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang baik untuk mengemban tugas pendidikan. Para guru, di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru sebagai manusia yang dapat digugu (dipercaya) dan ditiru, betapapun sulitnya keadaan yang melingkunginya. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, namun harus mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang sadar atau tidak, dapat menimbulkan pertientangan antara kita sama kita.
- 4) Untuk mengimplementasikan wawasan Wiyatamandala perlu diciptakan suatu situasi di mana siswa dapat menikmati suasana yang harmonis dan menimbulkan kecintaan terhadap sekolahnya, sehingga proses belajar mengajar, kegiatan kokurikuler, dan ekstrakurikuler dapat berlangsung dengan mantap.
- 5) Upaya untuk mewujudkan wawasan Wiyatamandala antara lain dengan menciptakan sekolah sebagai masyarakat belajar, pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler, serta menciptakan suatu kondisi kemampuan dan ketangguhan yakni memiliki tingkat keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan yang mantap. (Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor:13090/CI.84 tanggal 1 Oktober 1984 perihal Wawasan Wiyatamandala).

- (b) Kepala madrasah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah/madrasah nya;
- (c) Guru dan orang tua siswa yang saling pengertian dan kerja sama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan;
- (d) Warga madrasah, baik dalam maupun luar lingkungan sekolah/ madrasah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru;
- (e) Masyarakat sekitarnya yang harus mendukung kerukunan antarwarga madrasah.

5. Pengaturan Hubungan Sekolah dengan Alumni

Hubungan sekolah dan alumni memang perlu tetap dipelihara. Dari hubungan dengan alumni ini, sekolah bisa memanfaatkan hasil-hasilnya. Sekolah bisa menjaring berbagai informasi. Misalnya, informasi tentang materi-materi pelajaran mana yang kiranya sangat membantu studi di perguruan tinggi. Mungkin juga informasi tentang lapangan kerja yang bisa dijangkau bagi alumni yang tidak melanjutkan studi.

Hubungan antara sekolah dengan para alumni dapat dipelihara pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh para alumni, yang biasa disebut dengan istilah “reuni”.⁴⁵

D. Pola Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik di Sekolah Islam Terpadu

Pembinaan dan pengembangan peserta didik merupakan langkah ketiga yang ditempuh dalam manajemen peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar sebagai bekal kehidupan di masa depan. Lembaga pendidikan (madrasah) dalam pembinaan dan pengembangan peserta didik biasanya melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler.⁴⁶

Hal itu penting dilakukan oleh Lembaga pendidikan (lingkungan pendidikan), mengingat bahwa ”perkembangan anak yang sehat akan berkembang jika kombinasi dari fasilitas yang diberikan oleh lingkungan dan potensialitas kodrati anak bisa mendorong berfungsinya segenap

⁴⁵ Tim Dosen AP UPI. *Manajemen Pendidikan*, 211

⁴⁶ Tim Dosen AP UPI. *Manajemen Pendidikan*, 221

kemampuan anak”.⁴⁷ Dan kondisi sosial menjadi sangat tidak sehat apabila segala pengaruh lingkungan merusak, bahkan melumpuhkan potensi psiko-fisis anak.

Hal di atas kiranya sesuai dengan konsep Islam tentang aspek yang mempengaruhi perkembangan dan kreatifitas anak dalam pembelajaran. Ini dapat kita temukan dalam Al-Qur’an surat Al-Isra’: 84 yaitu:

قُلْ كُلْ يَعْمَلْ عَلَىٰ شَاكْرَتِهِ فَرِيكُمْ أَعْمَ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”. (QS. Al-Isra’ [17]: 84).

Ala Syaklatihi” dalam tafsir Al-Maraghi sebagaimana dijelaskan di atas bermakna bahwa perkembangan individu dipengaruhi atas metode (jalan) dan keadaan individu dalam mencari petunjuk ataupun kesesatan serta sebuah kepastian (cetakan) atasnya berupa kebaikan-kebaikan. sedangkan dalam Ibnu Katsir bermakna: *علي حدته و طبيعته* “bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh asal kejadiannya dan tabiat (pembawaan) nya”.

Di samping Al-Qur’an, di atas, Hadits Rosul yang sangat mashur juga memberikan penguat atas pengaruh hereditas dan lingkungan pada perkembangan anak, yaitu:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانَهُ أَوْ نَصْرَانَهُ أَوْ مَجْسَانَهُ (رواه مسلم)

Artinya:”Tiap-tiap anak dilahirkan menurut fitrahnya, orang tua yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi”. (H. R. Muslim).

Makan fitrah dalam hadits di atas adalah potensi hereditas (keturunan) dan merupakan bawaan sejak lahir. Sedangkan pada kalimat sesudahnya merupakan proses perkembangan dan pertumbuhan anak yang dipengaruhi oleh kondisi diluar dirinya, baik itu dilingkungan keluarga, madrasah, dan sosial yang melingkupinya.

Pembinaan dan pengembangan peserta didik mutlak dilakukan untuk membina dan membantu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dalam beraneka ragam pembelajaran. Biasanya pihak madrasah melaksanakan bermacam-macam kegiatan seperti kegiatan

⁴⁷ Kartono, Kartini. *Psikologi Anak*. (Bandung: Alumni, 1982).114

kurikuler dan ekstrakurikuler. Tujuan ekstrakurikuler adalah agar siswa dapat memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan, mendorong pembinaan nilai dan sikap demi untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dapat disediakan seperti: Pramuka, olahraga dan sebagainya.⁴⁸

1. Pembinaan Peserta Didik

a. Batsan Pembinaan Peserta didik

Pembinaan peserta didik merupakan salah satu langkah penting dalam manajemen peserta didik. Hal ini dikarenakan peserta didik yang masuk di lembaga pendidikan membutuhkan bimbingan untuk dapat mengolah potensi yang dimilikinya. Sejalan dengan itu, Nurhadi, yang menyatakan bahwa, “Siswa yang diterima di sebuah madrasah, maka siswa itu menjadi warga madrasah dan tanggung jawab perkembangan dan pertumbuhan sebagian sudah berada di pihak madrasah .”⁴⁹

Mendukung pendapat tersebut, Rohiat (2010) menjelaskan bahwa pembinaan siswa adalah pemberian pelayanan kepada siswa di madrasah baik pada jam pelajaran madrasah ataupun luar jam pelajaran madrasah.⁵⁰

Dua pendapat ahli tersebut menerangkan bahwa pembinaan peserta didik diperlukan sebagai upaya pemberian bimbingan kepada peserta didik selama menempuh pendidikan di suatu lembaga pendidikan, agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pembinaan peserta didik, sangat diperlukan keberadaanya. Hal ini karena pembinaan peserta didik memuat tujuan yang baik bagi perkembangan peserta didik. Selanjutnya tujuan pembinaan peserta didik termuat dalam Permendiknas No. 39 Tahun 2008 Pasal 1 yang meliputi:

- 1) Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu meliputi bakat, minat dan kreativitas.
- 2) Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan madrasah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan.
- 3) Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat.

⁴⁸ Mantja, W. *Profesionalisasi Tenaga Kependidikan*, (Malang: Elang Mas, 2007), 40-1

⁴⁹ Nurhadi. *Sejarah perpustakaan dan perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), 154.

⁵⁰ Rohiyat. *Manajemen Sekolah*, 27

- 4) Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.”

b. Konten pembinaan peserta didik

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, selanjutnya ada berbagai upaya yang dilakukan. Upaya-upaya tersebut termuat dalam berbagai macam konten kegiatan pembinaan peserta didik. Berikut merupakan konten pembinaan peserta didik yang termuat dalam berbagai sumber.

1) Pembinaan peserta didik: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2008

Pembinaan peserta didik menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan Bab 1 Pasal 3 ayat 2 disebutkan, pembinaan peserta didik meliputi: a. “Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. budi pekerti luhur atau akhlak mulia; c. kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara; d. prestasi akademik, seni dan atau olah raga sesuai bakat dan minat; e. demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural; f. kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan; g. kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi; h. sastra dan budaya; i. teknologi informasi dan komunikasi; dan j. komunikasi dalam bahasa Inggris.”

- (a) Pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa meliputi kegiatan: (1) melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing; (2) memperingati hari-hari besar keagamaan; (3) melaksanakan perbuatan amaliah sesuai dengan norma agama; (4) membina toleransi kehidupan antar umat beragama; (5) mengadakan kegiatan lomba yang bernuansa keagamaan; dan (6) mengembangkan dan memberdayakan kegiatan keagamaan di madrasah.
- (b) Pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia, meliputi kegiatan: (1) melaksanakan tata tertib dan kultur madrasah ; (2) melaksanakan gotong royong dan kerja bakti (bakti sosial); (3) melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tata krama pergaulan; (4) menumbuhkembangkan kesadaran untuk rela berkorban terhadap sesama; (5) menumbuhkembangkan sikap hormat dan menghargai warga madrasah ; dan (6) melaksanakan kegiatan 7K (Keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian dan kerindangan)

- (c) Pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara, meliputi kegiatan: (1) melaksanakan upacara bendera pada hari Senin dan atau hari Sabtu, serta hari-hari besar nasional; (2) menyanyikan lagu-lagu nasional (Mars dan Hymne); (3) melaksanakan kegiatan kepramukaan; (4) mengunjungi dan mempelajari tempat-tempat bernilai sejarah; (5) mempelajari dan meneruskan nilai-nilai luhur, kepeloporan, dan semangat perjuangan para pahlawan; (6) melaksanakan kegiatan bela negara; (7) menjaga dan menghormati simbol-simbol dan lambang-lambang negara; dan (8) melakukan pertukaran siswa antar daerah dan antar negara.
- (d) Pembinaan prestasi akademik, seni, dan atau olah raga sesuai bakat dan minat, antar lain meliputi kegiatan: (1) mengadakan lomba mata pelajaran atau program keahlian; menyelenggarakan kegiatan ilmiah; (2) mengikuti kegiatan workshop, seminar, diskusi panel yang bernuansa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); (3) mengadakan studi banding dan kunjungan (studi wisata) ke tempat-tempat sumber belajar; (4) mendesain dan memproduksi media pembelajaran; (5) mengadakan pameran karya inovatif dan hasil penelitian; (6) mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan madrasah ; (7) membentuk klub sains, seni dan olah raga; (8) menyelenggarakan festival dan lomba seni; dan (9) menyelenggarakan lomba dan pertandingan olah raga.
- (e) Pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural, antara lain meliputi kegiatan: (1) memantapkan dan mengembangkan peran siswa di dalam OSIS sesuai dengan tugasnya masing-masing; (2) melaksanakan latihan kepemimpinan siswa; (3) melaksanakan kegiatan dengan prinsip kejujuran, transparan, dan profesional; (4) melaksanakan kewajiban dan hak diri dan orang lain dalam pergaulan masyarakat; (5) melaksanakan kegiatan kelompok belajar, diskusi, debat dan pidato; (6) melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan; (7) melaksanakan penghijauan dan perindangan lingkungan madrasah.
- (f) Pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan, antara lain meliputi kegiatan: (1) meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam menciptakan suatu barang menjadi lebih berguna; (2) meningkatkan kreativitas dan keterampilan di bidang barang dan jasa; (3) meningkatkan usaha koperasi siswa dan unit produksi; (4) melaksanakan praktek kerja nyata (PKN) atau pengalaman kerja lapangan (PKL) atau praktek kerja industri (Prakerin); dan (5) meningkatkan kemampuan keterampilan siswa melalui sertifikasi kompetensi siswa berkebutuhan khusus.

- (g) Pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi antara lain: (1) melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat; (2) melaksanakan usaha kesehatan madrasah (UKS); (3) melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (narkoba), minuman keras, merokok, dan HIV AIDS; (4) meningkatkan kesehatan reproduksi remaja; (5) melaksanakan hidup aktif; (6) melakukan diversifikasi pangan; dan (7) melaksanakan pengamanan jajanan anak madrasah.
- (h) Pembinaan sastra dan budaya, antara lain meliputi kegiatan: (1) mengembangkan wawasan dan keterampilan siswa di bidang sastra; (2) menyelenggarakan festival atau lomba, sastra dan budaya; (3) meningkatkan daya cipta sastra; dan (4) meningkatkan apresiasi budaya. Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), antara lain meliputi kegiatan: (1) memanfaatkan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran; (2) menjadikan TIK sebagai wahana kreativitas dan inovasi; dan (3) memanfaatkan TIK untuk meningkatkan integritas kebangsaan. Pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris, antara lain meliputi kegiatan: (1) melaksanakan lomba debat dan pidato; (2) melaksanakan lomba menulis dan korespondensi; (3) melaksanakan kegiatan English Day; (4) melaksanakan kegiatan bercerita dalam bahasa Inggris (Story Telling); dan (5) melaksanakan lomba puzzies words atau scrabble.

2) Pembinaan peserta didik: Berdasar Tim Dosen AP (2010)

Tim Dosen AP (2010), mengemukakan, pembinaan terhadap peserta didik meliputi layanan-layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Layanan-layanan yang dibutuhkan peserta didik di madrasah meliputi:⁵¹

- (a) Layanan Bimbingan dan Konseling Layanan BK merupakan proses pemberian bantuan terhadap siswa agar perkembangannya optimal sehingga anak didik bisa mengarahkan dirinya dalam bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan situasi lingkungan madrasah, keluarga dan masyarakat. Fungsi bimbingan di sini adalah membantu peserta didik dalam memilih jenis madrasah lanjutan, memilih program, lapangan pekerjaan sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Selain itu bimbingan dan konseling juga membantu guru dalam menyesuaikan program pengajaran yang disesuaikan bakat, minat siswa, serta membantu siswa dalam menyesuaikan diri dengan bakat dan minat siswa untuk mencapai perkembangan yang optimal.
- (b) Layanan perpustakaan Diperlukan untuk memberikan layanan dalam menunjang proses pembelajaran di madrasah, melayani informasi

⁵¹ Tim Dosen AP UNY. *Manajemen Pendidikan*. (Yogyakarta: UNY Press. 2010), 53-55.

yang dibutuhkan serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Keberadaan perpustakaan penting, karena perpustakaan juga dipandang sebagai kunci dalam pembelajaran siswa di madrasah. Bagi siswa madrasah dapat menjadi penyedia bahan pustaka yang memperkaya dan memperluas cakrawala pengetahuan, meningkatkan keterampilan, membantu siswa dalam mengadakan penelitian, memperdalam pengetahuan berkaitan dengan subjek yang diminati, serta meningkatkan minat baca siswa dengan adanya bimbingan membaca dan sebagainya.

- (c) Layanan Kantin diperlukan di setiap madrasah agar kebutuhan anak terhadap makanan bersih, bergizi dan higienis bagi anak terpenuhi sehingga kesehatan anak terjamin selama di madrasah.
- (d) Layanan kesehatan Layanan kesehatan di madrasah biasanya dibentuk dalam sebuah Usaha Kesehatan Madrasah (UKS). Sasaran utama UKS untuk meningkatkan atau membina kesehatan siswa dan lingkungan hidupnya. Program UKS adalah: (1) mencapai lingkungan hidup yang sehat; (2) pendidikan kesehatan; (3) pemeliharaan kesehatan di madrasah.
- (e) Layanan transportasi Sarana transportasi bagi peserta didik sebagai penunjang untuk kelancaran proses belajar-mengajar.
- (f) Layanan asrama Bagi siswa, layanan asrama sangat berguna untuk mereka yang jauh dari keluarga sehinggalah membutuhkan tempat tinggal yang nyaman untuk beristirahat.

3) Pembinaan peserta didik: Berdasar Nasihin dan Sururi (2009)

Nasihin dan Sururi, menyebutkan lembaga pendidikan dalam pembinaan dan pengembangan peserta didik biasanya melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler.⁵²

- (a) Kegiatan kurikuler; Kegiatan kurikuler adalah semua kegiatan yang telah ditentukan di dalam kurikulum yang pelaksanaannya dilakukan pada jam-jam pelajaran. Kegiatan kurikuler dalam bentuk belajar mengajar di kelas dengan nama pelajaran atau bidang studi yang ada di madrasah. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan kurikuler ini.
- (b) Kegiatan ekstrakurikuler; Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan peserta didik yang dilaksanakan di luar ketentuan yang ada di dalam kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler ini biasanya terbentuk berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Setiap

⁵² Nasihin, & Sururi. *Manajemen Peserta Didik*. (Bandung: Alfabeta. 2009), 211-212.

peserta didik tidak harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ia bisa memilih kegiatan mana yang dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Bisa dikatakan kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan wadah kegiatan peserta didik di luar pelajaran atau di luar kegiatan kurikuler.

Uraian mengenai pembinaan peserta didik yang diambil dari berbagai sumber di atas, menunjukkan suatu benang merah bahwa pembinaan peserta didik, pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua yakni, pembinaan yang berkaitan dengan aspek akademik dan aspek non akademik.

a. Pembinaan aspek akademik dan non akademik (intra kulikuler)

Pembinaan aspek akademik, meliputi: (1) pembinaan prestasi akademik, seni dan olah raga sesuai dengan bakat dan minat; (2) pembinaan sastra dan budaya; (3) pembinaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan (4) pembinaan berbahasa Inggris.

Pembinaan non akademik meliputi: (1) pembinaan keimanan dan ketakwaan; (2) pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia; (3) pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara; (4) pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural; (5) pembinaan kreativitas kurikuler dalam bentuk belajar mengajar di kelas dengan nama pelajaran atau bidang studi yang ada di madrasah.

Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan kurikuler ini.

b. Kegiatan ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan peserta didik yang dilaksanakan di luar ketentuan yang ada di dalam kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler ini biasanya terbentuk berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik.

Setiap peserta didik tidak harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ia bisa memilih kegiatan mana yang dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Bisa dikatakan kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan wadah kegiatan peserta didik di luar pelajaran atau di luar kegiatan kurikuler.

2. Pengembangan Peserta Didik

a. Batasan Pengembangan Peserta didik

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral peserta didik sesuai dengan kebutuhannya melalui pendidikan dan latihan.⁵³ Pengembangan peserta didik adalah penataan dan penaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai ke luar dari madrasah. Pengembangan peserta didik bukan hanya bentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi berbagai aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik secara optimal.

b. Tujuan Pengembangan Peserta didik

Pengembangan peserta didik bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di madrasah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan madrasah.⁵⁴

Namun pada kenyataannya, tujuan pendidikan tidak hanya untuk pengembangan pengetahuan peserta didik, tetapi juga sikap kepribadian, serta aspek sosial emosional, disamping keterampilan lain. Madrasah tidak hanya bertanggung jawab memberikan berbagai ilmu pengetahuan, tetapi memberikan bimbingan dan bantuan terhadap anak-anak yang bermasalah, baik dalam belajar, emosional, maupun sosial, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing.

c. Tri Tugas Pengembangan Peserta didik

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, bidang pengembangan peserta didik memiliki tiga tugas yaitu penerimaan siswa baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Tiga tugas tersebut menjabarkan tanggung jawab kepala madrasah dalam mengelola bidang kesiswaan berkaitan dengan hal-hal berikut ini.⁵⁵

a. Kehadiran peserta didik di madrasah dengan berbagai permasalahannya.

⁵³Development, "Pengembangan" tersedia dalam <http://developmentcountry.blogspot.co.id>, (diakses 11 Februari 2021)

⁵⁴Mulyasa, *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 69

⁵⁵Mulyasa, *Manajemen & Kepemimpinan*, 69-70

- b. Penerimaan, Orientasi, Klasifikasi, dan penempatan peserta didik di kelas dan program studi.
- c. Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar.
- d. Program supervise bagipeserta didik yang mempunyai kelainan, seperti pembelajaran remedial dan pembelajaran luar biasa.
- e. Pengendalian disiplin peserta didik.
- f. Program bimbingan dan penyuluhan.g.program kesehatan dan keamanan.
- g. Penyusuaian pribadi, social, dan emosional.

3. Tugas lain dalam mendukung Pengembangan Peserta didik

Prinsip Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral peserta didik sesuai dengan kebutuhannya melalui pendidikan dan latihan.⁵⁶

a. Pengembangan potensi Peserta didik

Pengembangan potensi peserta didik yang menjadi amanah dalam UU Sisdiknas tentu tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, manajemen peserta didik yang baik mutlak diperlukan untuk mengiringi proses pendidikan. Sejalan dengan itu, Nasihin dan Sururi,⁵⁷ menjelaskan bahwa komponen peserta didik keberadaanya sangat dibutuhkan, terlebih dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di madrasah, peserta didik merupakan subjek sekaligus objek proses transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Mengingat hal tersebut, dapat dikatakan peserta didik merupakan komponen pendidikan yang utama.

Pelatihan adalah usaha untuk memperbaiki penampilan pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Supaya efektif, pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman belajar, aktivitas-aktifitas yang terencana sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya dan tujuan organisasi.

⁵⁶Development, "Pengembangan",<http://developmentcountry.blogspot.co.id>, (diakses,11 Februari, 2021)

⁵⁷Nasihin dan Sururi. *Manajemen Peserta*. 203.

b. Diklat Pengembangan Potensi Peserta didik

Istilah Pelatih sering disamakan dengan istilah pengembangan. Pengembangan menunjuk kepada kesempatan-kesempatan belajar yang didesain guna membantu pengembangan para pekerja.⁵⁸ sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga pegawai yang bersangkutan lebih maju dalam melaksanakan tugas tertentu. Pelatih bersifat praktis, sedang pendidikan lebih bersifat teoretis. Dasar pikiran mengenai pelatihan/pendidikan, mencakup tujuh pokok hal sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Tujuan pelatih/pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
- 2) Materi pelatihan/pendidikan harus relevan dengan tujuan latihan.
- 3) Jadwal disusun sehingga mendukung bagi pelatih maupun bagi pengikut pelatihan/pendidikan.
- 4) Lokasi pelatih/pendidikan dipilih yang memberi kegairahan dalam proses pelatihan/pendidikan.
- 5) Kuantitas dan kualitas peserta harus tidak mengganggu kepada jalannya pelaksanaan pelatihan/pendidikan.
- 6) Pelatih harus dipilih yang memiliki kualifikasi yang diperlukan.
- 7) Metode pelatihan harus disesuaikan dengan pengikut pelatihan dan materi yang diberikan.

c. Pengembangan Bakat Minat Siswa

Belajar Orang tua dan guru mengikuttanggung jawab bersama, yaitu tanggung jawab menumbuhkan bakat minat anak dan memperluas cakrawalanya (horizon), sedemikian rupa hingga hal itu selanjutnya meningkatkan kegairahannya untuk belajar. Jika orang tua tidak berhasil, kecuali hanya setingkat dengan tingkat madrasah yang dicapai oleh si anak, boleh jadi nilainya sangat menarik perhatiannya.

Dalam hal itu, besar kemungkinan anak akan menjadi betul-betul memperhatikan pekerjaannya untuk dirinya, jika orang tuanya memperhatikan apa yang dipelajarinya. Kecapatan anak belajar bertambah, baik di rumah maupun di madrasah, apabila ada padanya keinginan untuk belajar. Hanya sehalus bukan kuasa orang tua untuk membuka atau menutup keinginan tersebut, seperti membuka atau

⁵⁸Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), 165-166.

⁵⁹Hani Handoko T, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2008), 203.

menutup kran air. Tetapi mereka harus mengatur masalah pengajaran anak-anak mereka dengan bijaksana dengan trampil, sebagaimana dilakukan oleh guru.⁶⁰

- 1) Haruslah kita yakin bahwa pertumbuhan telah sampai kepada tingkat yang patut untuk mempelajari apa yang diharapkan untuk dipelajarinya.
- 2) Kita harus yakin pula bahwa ia mengerti apa yang kita harapkan supaya dipelajari.
- 3) Perlu pula kita jaga agar ia melakukan proses belajar, bukan hanya proses menyimak saja.
- 4) di samping itu perlu pula dijaga, agar belajar itu memuaskan baginya.

4. Studi Kasus: Pola Pembinaan dan Pengembangan Karter Peserta Didik di Sekolah Islam Terpadu

Ada 4 Nilai-nilai karakter yang ditanamkan dan dikembangkan di SMP Islam Terpadu Izzuddin Palembang adalah: a) Karakteristik pembentukan karakter keagamaan/religiusitas; b) Karakteristik pembentukan karakter personality c) Karakteristik pembentukan karakter sosial dan d) Karakteristik pembentukan karakter nasionalis/kebangsaan.⁶¹

a. Karakteristik pembentukan karakter keagamaan/religiusitas

Pola Pembentukan Karakter Peserta Didik Di Smp Islam Terpadu Izzuddin Palembang

Program Magister Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang, 2018

Karakteristik pembentukan karakter keagamaan/religiusitas yang meliputi butir-butir sebagai berikut: (1) bersuci dan menjaga kesucian dengan benar, (2) berdo'a setelah wuḍu, (3) menjalankan ṣalat lima waktu dengan berjama'ah, (4) ṣalat ḍuha, (5) solat sunnah ba'diyah dan qobliyah dengan tertib dan khusu', (6) membaca Al-Qur'ān penuh kesadaran, (7) membaca do'a sebelum dan sesudah aktifitas.

b. Karakteristik pembentukan karakter personality

Karakteristik pembentukan karakter personality yang meliputi butir-butir sebagai berikut: (1) Jujur, (2) Bertanggung jawab, (3) Bergaya hidup sehat, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Percaya diri, (7) Berpikir logis, (8) Mandiri, dan (9) Cinta ilmu.

⁶⁰Imaduddin Ismail, *Pengembangan Kemampuan Belajar pada Anak-anak*, (Jakarta: Bulan bintang, 19800), 42-43.

⁶¹Robi Awaludin; Pola Pembentukan Karakter Peserta Didik Di Smp Islam Terpadu Izzuddin Palembang. (Rinkasan Tesis). Program Magister Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, 2018), 133

c. Karakteristik pembentukan karakter sosial

Karakteristik pembentukan karakter sosial yang meliputi: (1) Ta'zîm dan hormat kepada guru, dan semua staff, (2) Santun dalam berkata berkomunikasi dan bertindak dengan teman sebaya, guru atau orang lain, (3) Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, (4) Menghargai karya dan prestasi orang lain, (5) Peduli sosial, dan (6) Peduli lingkungan.

d. Karakteristik pembentukan karakter nasionalis/kebangsaan

Karakteristik pembentukan karakter nasionalis/kebangsaan yang meliputi: (1) Patuh pada aturan-aturan, dan (2) Demokratis. Pola pembentukan karakter siswa di SMP Islam Terpadu Izzuddin Palembang bertumpu pada tiga pilar/komponen, yaitu (a) Pengembangan program dan kebijakan sekolah yang meliputi; pimpinan sekolah sebagai model, dan pembinaan dan pemantauan SDM dan fisik, (b) Program pembelajaran, yang meliputi; pengembangan guru sebagai model karakter, pembelajaran yang efektif, dan penciptaan kelas yang kondusif, dan (c) kemitraan dengan wali siswa dalam rangka upaya mensinergikan pembiasaan siswa, melalui: pemantauan karakter siswa di rumah atau di asrama, keteladanan orang tua/wali bagi anak di rumah, dan penciptaan lingkungan keluarga yang edukatif

Tugas Mahasiswa

- Mengidentifikasi dan mengabstraksikan 4 poin penting dari kajian Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu.
 - Konsep Dasar Pengelolaan Peserta Didik Sekolah Islam Terpadu
 - Perencanaan Pengelolaan Peserta Didik di Sekolah Islam Terpadu
 - Pengaturan Orientasi, Kedairan dan Kedisiplinan Peserta Didik
 - Pola Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik di Sekolah Islam Terpadu
- Memukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
- Membatasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
Mata Kuliah :
Metode :
Dok :
NIM :
JURUSAN :

 Isi /Aplod Foto Resmi Mu

 Isi Identitas MK & Individu

Resensi/Rangkuman:

A Esensi/isi /Sub Materi

B Esensi/isi /Sub Materi

C Esensi/isi /Sub Materi

D Esensi/isi /Sub Materi

summary: Maksimal 10 kalimat

Temukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi

Ket: Penulisan maksimal 500Kata

 Isi /aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:
Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

- Mempresentasikan Hasil CK dalam bentuk Poster (untuk itu Membuat Poster menjadi wajib)

Part: 9

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Islam Terpadu

KEMAMPUAN AKHIR PEMBELAJARAN

Setelah mendapat materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami Konsep Dasar Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Islam Terpadu
2. Mengidentifikasi Konsep Dasar Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Islam Terpadu
3. Menjelaskan Konsep Dasar Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Islam Terpadu

POKOK BAHASAN

4. Konsep Dasar Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Islam Terpadu
5. Jenis Sarana dan Prasarana Pendidikan
6. Dasar Kebijakan dan Standar Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pendidikan
7. Manajemen/Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan

TOPIK BAHASAN

Pengelolaan Sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen pendidikan posisinya sangat strategis, untuk mendukung dan memperlancar proses pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak bagi suatu lembaga pendidikan, guna mencapai tujuan pendidikan. Adanya sarana dan prasarana pendidikan tidak dapat diabaikan melainkan harus dipikirkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kualitas dan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana, dijadikan layanan prima lembaga pendidikan, menjadi suatu keniscayaan, baik dari segi tuntutan/keharusan regulasi maupun tuntutan kebutuhan masyarakat dalam setiap lembaga pendidikan di baik itu pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, tidak terkecuali Sekolah Islam Terpadu . Dikarenakan lembaga pendidikan Islam mempunyai misi dan tujuan sebagai layanan sosial. Fungsi manajemen sarana dan prasarana dalam konteks Sekolah Islam Terpadu , diposisikan sebagai wahana utama bagi peserta didik untuk mengembangkan diri se-optimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial keagamaan, segi aspirasi, segi kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Pengelola sarana dan prasarana Madrasah yang efektif dan efisien, dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu: mulai dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan Evaluasi/pengawasan, dan penghapusan. Apa yang dibutuhkan oleh madrasah perlu dikelola dengan cermat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran. Diskusi tentang manajemen sarana dan prasarana pengembangan Sekolah Islam Terpadu , masih belum berfungsi dengan baik dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh para manajer dan pelaksana di internal lembaga pendidikan mungkin pada tingkat pendidikan tersier sudah ada staf atau petugas sendiri di departemen/kementrian. Begitu pentingnya pengelolaan peserta didik dalam konteks program sekolah secara holistik dan integratif, Roe dan Norton, menempatkannya pada posisi keenam setelah "1) Perencanaan program, 2) pengembangan, program; 2) Pengembangan kurikulum; 3) Pengembangan proses belajar mengajar; 4) Pengelolaan sumber daya manusia (guru, konselor, karyawan, dan sebagainya. 5) Pelayanan siswa; 6) Pengelolaan fasilitas; 7) Pengelolaan keuangan; 8) Pengelolaan hubungan sekolah-masyarakat; 9) evaluasi program; 10) Perbaikan program berkelanjutan" Itulah Pentingnya pada bagian ini membahas Sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian dari proses penyelenggaraan sekolah.

A. Konsep Dasar Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Islam Terpadu

1. Makna dan Hakikat Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Islam Terpadu

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan oleh Bapadal sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien.¹ Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah/Madrasah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di Sekolah/Madrasah.

Para ahli mendefinisikan manajemen sarana dan prasarana pendidikan, diantaranya;² (1) Rohiat, mendefinisikan manajemen sarana dan prasarana, "kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan/material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah, Manajemen sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. (2) Sobri, mendefinisikan manajemen sarana dan prasarana, sebagai kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pendayagunaan, pemeliharaan, penginventarisan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah serta tepat guna dan tepat sasaran.

Pada hakikatnya, dengan terkelolanya sarana dan prasarana sekolah/ madrasah yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah/madrasah yang bersih, rapi, dan indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan, baik bagi guru maupun murid untuk berada disekolah. Di samping itu juga tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun siswa sebagai pelajar.

¹Rusdiana A. *Pengelolaan Pendidikan*. Cet-1. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 215

²Nurbaiti. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah" *Jurnal Manajer Pendidikan*, 9:4, (Juli, 2015), 537

2. Tujuan Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Tujuan daripada pengelolaan sarana dan prasarana sekolah ini adalah untuk memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal ini. Bafadal, menjelaskan secara rinci tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut:³

- a. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasana yang baik, sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan dengan dana yang efisien;
- b. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien;
- c. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasana pendidikan, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua pihak sekolah;

Dengan demikian manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah/madrasah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun untuk berada di sekolah/madrasah.⁴ Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pendidik maupun bagi peserta didik.

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Dalam Mengelola Sarana dan prasarana sekolah, terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan oleh para pengelola Saprass Madrasah Diniyah, agar semua fasilitas Sekolah/Madrasah, dapat memberikan kontribusi berarti pada jalannya proses pendidikan, bisa tercapai dengan maksimal. Prinsip-prinsip tersebut menurut adalah sebagai berikut:⁵

- a. Prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didayagunakan oleh personel sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah;

³ Rusdiana A. *Pengelolaan Pendidikan*, 215

⁴ Nurbaiti. "Manajemen Sarana, 537,

⁵ Rusdiana A. *Pengelolaan Pendidikan*, 216

- b. Prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan;
- c. Prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, intruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang;
- d. Prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus di delegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab, apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personel sekolah;
- e. Prinsip kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak.

B. Jenis Sarana dan Prasarana Pendidikan

1. Jenis Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Islam Terpadu

Fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat digolongkan sebagai berikut:⁶

a. Ditinjau dari Fungsinya Terhadap (PBM)

Apabila, sarana prasarana pendidikan ditinjau dari fungsinya terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM), antara lain:

- 1) Berfungsi tidak langsung (kehadirannya tidak sangat menentukan). Contoh: tanah, halaman, pagar, tanaman, gedung/bangunan;
- 2) Berfungsi langsung (kehadirannya sangat menentukan) terhadap PBM, seperti alat pelajaran, alat peraga, alat praktek dan media pendidikan.

b. Ditinjau dari Jenisnya

Apabila, sarana prasarana pendidikan ditinjau dari jenisnya, antara lain:

⁶ Rusdiana A. *Pengelolaan Pendidikan*. 214

- 1) Fasilitas fisik atau fasilitas material yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha, seperti kendaraan, mesin tulis, komputer, perabot, alat peraga, model, media, dan sebagainya;
- 2) Fasilitas nonfisik yakni sesuatu yang bukan benda mati, atau kurang dapat disebut benda atau dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha seperti manusia, jasa, uang. Dalam Manajemen Pendidikan Moderen diperlukan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Dapodik, dibelakukan di lingkungan Persekolahan Kemendikbud dan EMIS, deiberlakukan pada Madrasah dilingkungan Kementerian Agama.
 - (a) Informasi yang dibutuhkan dalam manajemen disediakan oleh suatu Sistem Informasi Manajemen (SIM). SIM yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajer secara teratur. Informasi ini dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan serta hasil-hasil yang dicapai.
 - (b) SIM adalah jaringan prosedur pengelolaan data, pengolahan data, pengambilan data dan penyebaran informasi dengan menggunakan berbagai peralatan yang tepat dengan maksud memberikan data pada manajemen setiap waktu diperlukan dengan cepat dan tepat untuk dasar pembuatan keputusan dalam rangka mencapai tujuan.⁷

c. Ditinjau dari Sifat Barangnya

Apabila, sarana prasarana pendidikan ditinjau dari sifatnya (PBM), antara lain:

- 1) Barang bergerak atau barang berpindah/dipindahkan dikelompokkan menjadi barang habis-pakai dan barang tak habis pakai.
- 2) Barang habis-pakai ialah barang yang susut volumenya pada waktu dipergunakan, dan dalam jangka waktu tertentu barang tersebut dapat susut terus sampai habis atau tidak berfungsi lagi, seperti kapur tulis, tinta, kertas, spidol, penghapus, sapu dan sebagainya. (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/MK/V/1971 tanggal 13 April 1971).

⁷ Zarkasih. *Sekolah Islam Terpadu (SIT): Manajemen dan Model Pendidikan Alternatif di Indonesia*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus 2020), 29

- 3) Barang tak-habis-pakai ialah barang-barang yang dapat dipakai berulang kali serta tidak susut volumenya ketika digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, tetapi tetap memerlukan perawatan agar selalu siap-pakai untuk pelaksanaan tugas, seperti mesin tulis, komputer, mesin stensil, kendaraan, perabot, media pendidikan dan sebagainya.
- 4) Barang tidak bergerak ialah barang yang tidak berpindah-pindah letaknya atau tidak bisa dipindahkan, seperti tanah, bangunan/gedung, sumur, menara air, dan sebagainya.

Sedangkan jenis-jenis prasarana pendidikan di sekolah/madrasah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek keterampilan, dan ruang laboratorium.
- 2) Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Beberapa contoh tentang prasarana sekolah jenis terakhir tersebut di antaranya adalah ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan.

2. Fungsi Peran Fasilitas dan Sarana Pendidikan

Sarana dan prasarana sangat mendukung dan memperlancar proses pendidikan, sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak bagi suatu lembaga pendidikan. "Sarana dan prasarana pendidikan ialah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan dengan demikian untuk mencapai tujuan pendidikan maka adanya sarana dan prasarana pendidikan tidak dapat diabaikan melainkan harus dipikirkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya di suatu lembaga pendidikan".⁸

Ditinjau dari fungsi atau perannya terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar maka sarana pendidikan dibedakan menjadi 3 macam yaitu: alat pelajaran, alat peraga dan media pengajaran. Yang termasuk prasarana pendidikan adalah bangunan sekolah, dan alat perabot sekolah. Prasarana pendidikan ini juga berperan dalam proses belajar mengajar walaupun secara tidak langsung. "Penanggung jawab

⁸ Kompri, *Manajemen Sekolah Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 192.

manajemen sarana dan prasarana ialah kepala sekolah, selaku manajer kepala sekolah harus menetapkan kaidah-kaidah manajemen dalam mengelola sarana dan prasarana".⁹

Wahyuningrum, berpendapat bahwa sarana pendidikan adalah “segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pendidikan tercapai”.¹⁰

Dengan demikian, sarana dilihat dari fungsinya atau perannya dapat dibedakan menjadi: alat pelajaran, alat peraga dan media pembelajaran. Prasarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, prasarana yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek ketrampilan, dan ruang laboratorium. Kedua, prasarana yang keberandaanya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contoh dari prasarana yang kedua ini adalah ruang kantor, ruang kepala sekolah, ruang guru, kamar kecil, dan kantin sekolah.

3. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Masalah lain yang perlu diperhatikan ialah perusakan yang sering dilakukan oleh siswa “gatal tangan”. Perilaku ini banyak penyebabnya, antara lain adanya rasa kurang aman, frustrasi, balas dendam karena merasa tidakadilan, dan perkelahian antar kelompok. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:¹¹

- a. Bangkitkan rasa bangga akan keindahan, keunikan sekolah. Ini harus dicontohkan oleh kepala sekolah, guru, dan aparat lainnya. Ajaran agama tentang kebersihan dapat membantu disini.
- b. Siapkan bangunan dalam kondisi prima pada tahun ajaran baru. Itu dilakukan dalam liburan sekolah. Dinding dibersihkan, bangku dan lain-lain demikian juga. Anak-anak yang masuk pada hari-hari pertama tidak lagi melihat coret-coretan pada dinding atau pada bangkunya. Ini akan ada pengaruhnya.
- c. Ketertiban di kelas harus terkendali. Hal-hal kecil jangan di biarkan. Kadang-kadang tanpa diketahui hal kecil itu berkembang menjadi persoalan besar.

⁹Suryosubroto, B. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Cet-4 (Jakarta: Renika Cipta, 2010), 114.

¹⁰ Wahyuningrum. *Manajemen fasilitas pendidikan*. (Yogyakarta: FIP. UNY. 2004), 5

¹¹ Rusdiana A. *Pengelolaan Pendidikan*, 213

d. Jangan mengatakan bahwa anak-anak itu nakal hanya karena membuat coretan pada dinding. Lebih bijak memanggilnya, dan guru menghapus coretan itu bersama anak itu tadi. Boleh dinasehati agar tidak membuat coretan lagi.

Dalam hal menggulangi kenakalan pelajaran, fungsi guru agama diperkirakan cukup besar. Kerja sama guru agama dengan seluruh aparat sekolah perlu dicatat. Pemeliharaan sarana dan prasarana sebenarnya memerlukan dana yang cukup besar, ini tidak bisa dihindari. Tujuannya antara lain supaya sarana dan prasarana tidak cepat rusak, disebabkan pengaruhnya besar pada kesuksesan Sekolah/Madrasah.

C. Dasar Kebijakan dan Standar Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pendidikan

1. Dasar Kebijakan Pengebangan Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan adalah fasilitas-fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Sedangkan prasarana pendidikan merupakan segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan menjadi penting karena mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui pengadaan sarana dan prasarana. Pemerintah menerbitkan beberapa Kebijakan, diantaranya: ¹²

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003; Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XII Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pasal 45, ayat: (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005; tentang standar nasional pendidikan. Merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

¹² Nurbaiti. "Manajemen Sarana, 543

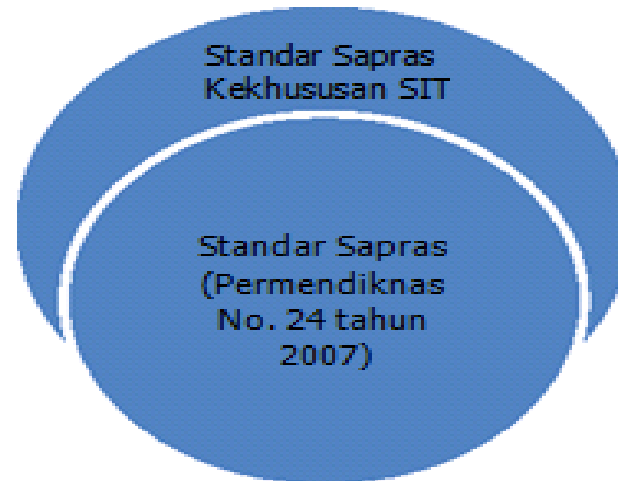
- c. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2007; Peraturan pemerintah No. 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana. Jo. Standar sarana dan prasarana berdasarkan PP. No.19 tahun 2005
- d. Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010; Dalam pengadaan sarana dan prasarana dalam sistem drooping ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya menekankan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa pemerintah.
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/MK/V/1971 tanggal 13 April 1971). Barang habis-pakai ialah barang yang susut volumenya pada waktu dipergunakan, dan dalam jangka waktu tertentu barang tersebut dapat susut terus sampai habis atau tidak berfungsi lagi, seperti kapur tulis, tinta, kertas, spidol, penghapus, sapu dan sebagainya.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007; Berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah pada Bab III Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerjadan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/pmk.06/2007; Pemeliharaan sarana dan prasarana milik negara diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/pmk.06/2007 tentang tata Cara pelaksanaan penggunaan, Pemanfaatan, penghapusan, dan Pemindahtanganan barang milik Negara. Pemeliharaan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan sarana dan prasarana dalam kondisi yang baik dan tetap berfungsi.

2. Kerangka Kerja Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sekolah Islam Terpadu

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 telah menetapkan Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Standar yang sudah ditetapkan tersebut tentu harus menjadi acuan seluruh penyelenggara pendidikan. Dengan demikian, bagi semua sekolah anggota JSIT Indonesia hendaknya berupaya untuk dapat memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Permendiknas tersebut di antaranya mengatur tentang sarana dan prasarana dengan kriteria minimum. Hal ini berarti bahwa kriteria tersebut harus dapat dipenuhi dan semestinya dapat dipenuhi oleh seluruh sekolah baik SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA dimanapun berada. "SIT dengan segala keunikannya, tentu saja harus memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan pemerintah pemerintah, untuk kemudian dikembangkan dengan standar khas SIT. Pada kondisi real, tidak semua penyelenggara SIT memiliki kemampuan dan ketersediaan dana dalam memenuhi standar sarana dan prasarana. Yang penting dilakukan antara lain melakukan skala prioritas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, melakukan berbagai akses dan pendekatan kepada pemilik dana seperti Pemda atau DPR, dan melakukan berbagai penghimpunan dana yang halal dan tidak mengikat.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kerangka kerja pemenuhan, pencapaian dan pengembangan standar sarana dan prasarana SIT dapat digambarkan sebagai berikut":¹³



Gambar: 9.1. Tinjauan Standar Sarana dan Prasarana Pada Sekolah Islam Terpadu

Sumber: diadaptasi dari Zarkasih, dkk 2020

¹³ Zarkasih, dkk. *Sekolah Islam Terpadu (SIT): Manajemen dan Model Pendidikan Alternatif di Indonesia*, (Pekan Baru: Cahaya Firdaus, 2020), 14

Gambar di atas memberikan penjelasan bahwa sebuah SIT hendaknya segera dapat mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan pemerintah untuk kemudian dikembangkan dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana khas sekolah Islam terpadu. Hal ini dilakukan agar SIT menjadi sekolah yang legal dan memiliki kredibilitas dalam menyelenggarakan pendidikan dengan terlebih dahulu memenuhi aspek minimum sarana dan prasarana pendidikan.

3. Standar Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sekolah Islam Terpadu

Pada prinsipnya standar sarana dan prasarana pendidikan tidak terkecuali pada Sekolah Islam Terpadu (SIT) mengacu pada Permendiknas no 24 tahun 2007. meliputi: ¹⁴

a. Standar Umum Sarana dan Prasarana SIT

Secara umum standar sarana dan prasarana mengacu pada Permendiknas no 24 tahun 2007.

- a. Lahan, Lahan sekolah terletak di daerah yang aman dari longsor dan banjir, terkena cukup cahaya matahari, kemiringan lahan kurang dari 15%, dan tidak terletak di daerah sempadan sungai dan jalur kereta api.
- b. Bangunan Gedung; Bangunan gedung harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persaratak kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Dari sisi kesehatan, bangunan gedung harus memiliki ventilasi udara yang baik, pencahayaan yang baik, sistem sanitasi yang baik, tidak ada genangan air, dan cat dan komponen gedung lainnya tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Sementara itu, persyaratan keamanan yang harus dipenuhi antara lain adalah memiliki lampu penerangan pada setiap ruang, setiap ruangan memiliki kemudahan akses jika terjadi keadaan darurat, memiliki pintu dan tangga darurat bagi gedung 2 lantai atau lebih, memiliki tabung pemadam kebakaran yang cukup, mampu meredam getar, memiliki sistem pengaman, memiliki sistem jalur evakuasi. Adapun persyaratan kenyamanan yang harus dipenuhi antara lain gedung mampu meredam kebisingan, daya listrik sekurang-kurangnya 900 watt, cat tidak merusak mata dan memberikan rasa nyaman.
- c. Lingkungan Sekolah; Persyaratan standar lingkungan sekolah meliputi persyaratan aman, sehat, resik, dan indah. Aman meliputi ama dari area yang berbahaya, setiap daerah yang berbahaya diberi tanda, dan aman dari tindakan kekerasan dan kejahatan pada

¹⁴ Zarkasih, dkk. *Sekolah Islam Terpadu (SIT)*, 16

peserta didik. Untuk memenuhi persyaratan sehat, lingkungan sekolah harus terbebas dari lokasi yang merusak kesehatan fisik dan psikis, kantin dan jajanan disekolah terbebas dari bahan-bahan yang merusak kesehatan seperti pengawet buatan, pemanis buatan, dan lainnya. Memenuhi persyaratan resiko berarti lingkungan sekolah terbebas dari sampah-sampah dan kotoran yang berserakan. Sementara memenuhi persyaratan indah berarti lingkungan sekolah tertata api, memiliki taman sekolah, maupun taman kelas.

b. Standar Masjid/Mushola

Setiap sekolah Islam terpadu harus memiliki Masjid/Mushola yang luasnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dengan pertimbangan kecukupan untuk shalat fardhu berjamaah. Luas minimum bangunan Masjid/Mushola setara dengan ruang kelas dan dilengkapi dengan sajadah untuk mencirikan tempat berdirinya imam, jam dinding, karpet, lemari, kamar mandi, tempat wudhu, cermin, dan lampu penerangan.

c. Standar Ruang Kelas

Seluruh SIT harus dapat memenuhi standar ruang kelas yang ada dalam Permendiknas no. 24 tahun 2007. Ruang kelas hendaknya tidak ditempatkan pada lokasi yang bising. Ukuran minimum ruang kelas adalah 2m² /peserta didik, dengan luas minimum 30m² dan lebar minimum 5m. Ukuran ruang kelas harus mampu mengakomodasi keperluan perubahan layout untuk keperluan pembelajaran. Kelas tidak menggunakan cat yang mengganggu kesehatan dengan warna yang tidak mengganggu sistem penglihatan. Dinding sebisa mungkin kedap suara dan area ruang kelas tidak berpotensi membahayakan seperti sudut lancip atau lantai licin. Atap/plafond kelas bersifat aman, tidak membahayakan, baik bahan maupun pemasangannya. Pintu mudah ditutup dan dibuka dan dilalui oleh peserta didik dalam keadaan darurat. Lantai rata dan mudah dibersihkan. Pada area berbahaya diruang kelas diberikan tanda bahaya.

d. Standar Perpustakaan

Setiap satuan pendidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan yang menjadi anggota JSIT harus memiliki sekurang-kurangnya satu ruang perpustakaan. Lokasi mudah diakses peserta didik, tidak bising, dan cukup cahaya matahari. Ukuran minimal setara dengan satu setengah kali ruang kelas. Ukuran harus mampu mengakomodasi keperluan perubahan lay out untuk keperluan

pelayanan dan pelaksanaan program perpustakaan. Dalam perpustakaan hendaknya terdapat ruang penyimpanan rak buku, ruang pelayanan, administrasi, gudang, area baca dan area diskusi. Koleksi dasar perpustakaan sekurang-kurangnya memiliki 2500 judul dengan 60% nya adalah non fiksi. Dari sisi muatan, koleksi perpustakaan tidak mengandung hal-hal yang merusak aqidah dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam (seperti pornografi, khurofat, tahayul).

e. Standar Ruang Audio Video (AVI)

Ruang Audio Visual adalah sebuah tempat yang dapat digunakan untuk berbagai proses pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran berbasis audio visual (AVI). Lokasi ruang AVI sama dengan karakteristik lokasi perpustakaan. Ruang AVI yang berdiri sendiri, tanpa digabung dengan ruang lain, memiliki luas sekurang-kurangnya setara dengan ruang kelas. Sementara ruang AVI yang bergabung dengan ruang lain seperti perpustakaan, memiliki area yang dapat menampung jumlah peserta didik satu rombongan belajar. Standar Media Centre

Media centre adalah suatu tempat yang berfungsi untuk pengelolaan, evaluasi, pengembangan, dan produksi media-media pembelajaran baik media yang bersifat digital maupun non digital. Media centre dapat dilengkapi dengan mini studio dan workshop. Luas ruangan media centre sekurang-kurangnya setara dengan luas ruang kelas. Memiliki ventilasi yang baik atau memiliki pendingin ruangan.

f. Standar Ruang Laboratorium

Ruang laboratorium ialah tempat dilaksanakannya percobaan maupun praktek lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran IPA atau kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan mutu peserta didik dalam penguasaan ilmu-ilmu sains. Setiap satuan pendidikan atau penyelenggara yang menjadi anggota JSIT harus memiliki laboratorium IPA. Tingkat SMP/MTs memiliki laboratorium IPA sekurang-kurangnya satu untuk setiap 6 rombongan belajar.

- 1) Laboratorium IPA SMP/MTs disiapkan khusus untuk mendukung kegiatan eksperimen/percobaan yang berhubungan dengan penguasaan peserta didik SMP terhadap bidang sains yang secara praktek memerlukan peralatan khusus. Lokasi laboratorium IPA harus terletak di

area yang nyaman. Rasio minimum luas ruang laboratorium IPA 2,4 m² /peserta didik dengan luas minimum 18 m² dan lebar minimum 5m.

- 2) Standar Laboratorium Komputer/e-Learning; Ruang laboratorium komputer/e-learning adalah sebuah ruang yang terdiri dari perangkat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi yang digunakan untuk pembelajaran komputer dan pembelajaran lainnya yang menggunakan komputer dan jaringannya. Setiap satuan pendidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan yang menjadi anggota JSIT harus memiliki sekurang-kurangnya satu ruang laboratorium komputer/e-learning. Ruang laboratorium komputer setara dengan satu setengah kali ruang kelas. Ukuran ruang laboratorium komputer harus mampu mengakomodasi perubahan lay out yang aman dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
- 3) Standar Laboratorium Seni, Laboratorium seni adalah sebuah ruang atau area yang merupakan tempat ekspresi dan eksperimen kesenian peserta didik dan guru SIT. Laboratorium seni dimaksudkan untuk meningkatkan seluruh potensi kecerdasan peserta didik. Laboratorium seni sekurang-kurangnya menampung aktivitas seni lukis dan seni musik dan terpenuhi alat-alatnya.

g. Standar Lapangan dan Sarana Bermain

Luas minimum 3m²/peserta didik dan sekurang-kurangnya memiliki luas minimum 1.000 m². ukuran dan lapangan sarana bermain harus mampu mengakomodasi keperluan bermain, keperluan pembelajaran olah raga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstra kurikuler.

h. Standar Ruang Konseling

Ruang konseling merupakan tempat pelayanan pembimbingan dalam rangka pengembangan seluruh potensi peserta didik. Luas minimum ruang konseling 12m², dengan lebar sekurang-kurangnya 3m.

i. Standar Ruang UKS/Klinik

Ruang UKS/Klinik SIT adalah sebuah tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan, pembinaan sikap hidup sehat sivitas SIT, pengontrol dan pembentuk budaya hidup sehat, pengontrol kualitas kesehatan lingkungan, makanan, dan minuman di SIT. Setiap satuan pendidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan yang menjadi anggota JSIT harus memiliki sekurang-kurangnya satu ruang UKS/Klinik. Bagi SIT yang memiliki lebih dari 12 rombongan belajar harus memiliki klinik.

Ruang UKS/Klinik setara dengan satu setengah kali ruang kelas. Ukuran ruang UKS/Klinik harus mampu mengakomodasi keperluan penanganan kesehatan peserta didik.

j. Standar Ruang Pimpinan, Guru dan Ruang Tata Usaha

Ruang pimpinan adalah sebuah tempat untuk melakukan pengelolaan sekolah, pertemuan dengan stakeholder, atau tamu lainnya. Ukuran ruang pimpinan, sekurang-kurangnya setengah dari ruang kelas.

- 1) Ruang pimpinan adalah sebuah tempat untuk melakukan pengelolaan sekolah, pertemuan dengan stakeholder atau tamu lainnya. Ukuran ruang pimpinan sekurang-kurangnya setengah dari ruang kelas.
- 2) Standar Ruang Guru; Ukuran ruang guru harus dapat menampung seluruh guru yang hadir dalam satu hari kehadiran.
- 3) Standar Ruang Tata Usaha; Ruang tata usaha adalah sebuah tempat untuk melakukan pengelolaan sekolah, pertemuan dengan stakeholder atau tamu lainnya. Ukuran ruang tata usaha sekurang-kurangnya setengah dari ruang kelas.

k. Standar Ruang Organisasi Kepesertadidikan

Ruang organisasi kepeserta didikan adalah sebuah ruang atau area yang merupakan perkantoran untuk berbagai organisasi kepeserta didikan yang dikembangkan oleh sekolah. Ukuran ruang organisasi kepeserta didikan sekurang-kurangnya setengah dari ruang kelas

l. Standar Gudang

Gudang adalah tempat menyimpan peralatan pembelajaran diluar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah yang tidak/belum berfungsi di satuan pendidikan dan tempat menyimpan arsip sekolah yang berusia lebih dari 5 tahun. Ukuran ruang sekurang-kurangnya setengah dari ruang kelas.

m. Standar Jamban

Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar/kecil. Banyaknya jamban minimum tiga unit per sekolah. Rasio jumlah jamban ialah 1:40 peserta didik putra dan 1:40 peserta didik putri dan 1 untuk guru. Jamban harus berdinding, beratap, dan mudah dikunci. Tersedia air bersih, tidak berbau. Posisi tidak menghadap atau membelakangi kiblat.

D. Manajemen/Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah berkaitan erat dengan aktivitas-aktivitas pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pemeliharaan, inventarisasi, serta penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Stoops dan Johnson (1967) pernah mengungkapkan bahwa "langkah-langkah manajemen sarana prasarana pendidikan itu meliputi analisis kebutuhan, analisis anggaran, seleksi, penetapan kebutuhan, pembelian, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemakaian, inventarisasi dan pemeliharaan."¹⁵ Sejalan dengan persepektif Barnawi, M. Arifin, proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang akan dibahas disini berkaitan erat dengan:¹⁶ (1) perencanaan sarana dan prasarana pendidikan islam; (2) pengadaan sarana dan prasarana pendidikan islam; (3) inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan islam; (4) pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan islam; dan (5) penghapusan sarana dan prasarana sekolah.

1. Perencanaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan (primer) dan kebutuhan yang menunjang. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah pada Bab III Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerjadan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.¹⁷

Dalam proses perencanaan ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti baik berkaitan dengan karakteristik sarana dan prasarana yang dibutuhkan, jumlahnya, jenisnya dan kendalanya (manfaat yang didapatkan), beserta harganya. Berkaitan dengan hal ini. Jones, menjelaskan bahwa perencanaan pengadaan perlengkapan pendidikan di sekolah harus diawali dengan analisis jenis pengalaman pendidikan yang diprogramkan di sekolah. Sukarna (dalam Rusdiana), menjelaskan sebagai berikut:¹⁸

¹⁵Rosnaeni, "Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan", Rosnaeni, "Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan", *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8: 1, (Juni 2019), 39

¹⁶Barnawi, M. Arifin, *Manajemen Sarana & Prasarana Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2014), 47.

¹⁷Nurbaiti. "Manajemen Sarana, 538

¹⁸ Rusdiana A. *Pengelolaan Pendidikan*, 217

- a. Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan atau menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah.
- b. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya untuk satu triwulan atau satu ajaran.
- c. Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya.
- d. Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Dalam hal ini, jika dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pengadaan semua kebutuhan yang diperlukan, maka perlu diadakan seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan dengan melihat urgensi setiap perlengkapan yang diperlukan. Semua perlengkapan yang urgen didaftar dan didahulukan pengadaannya.
- e. Memadukan rencana (daftar) kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana atau anggaran yang tersedia, maka perlu diadakan seleksi lagi dengan melihat skala prioritas.
- f. Penetapan rencana pengadaan akhir.

Tujuan perencanaan adalah demi menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas kegiatan untuk dilaksanakan dan sesuai dengan tingkat kepentingan. Maka Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah harus memperhatikan hal-hal berikut:¹⁹ (a) Kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan karena barang-barang yang tidak tepat akan menjadi sumber pemborosan; (b) Kesesuaian dengan jumlah dan tidak terlalu berlebihan dan kekurangan; (c) Mutu yang selalu baik agar dapat dipergunakan secara efektif; (d) Jenis alat atau barang yang diperlukan harus tepat dan dapat meningkatkan efisiensi kerja.

2. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Syahril dalam (Nurbaiti), memiliki arti “keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk menghadirkan atau menyediakan (dari tidak ada menjadi ada), semua sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan rencana atau usul kebutuhan yang telah ditetapkan”²⁰

¹⁹ Nurbaiti. ”Manajemen Sarana, 538

²⁰ Nurbaiti. ”Manajemen Sarana, 539

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah/madrasah pada hakekatnya adalah kelanjutan dari program perencanaan yang telah disusun oleh sekolah sebelumnya. Sistem pengadaan sarana dan prasarana sekolah/madrasah dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain adalah: ²¹

- a. *Dropping* dari pemerintah,²² hal ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada sekolah. Bantuan ini sifatnya terbatas sehingga pengelola sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tetap harus mengusahakan dengan cara lain.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah dengan cara membeli baik secara langsung maupun melalui pemesanan terlebih dahulu.
- c. meminta sumbangan dari wali murid atau mengajukan proposal bantuan pengadaan sarana dan prasarana sekolah ke lembaga-lembaga sosial yang tidak mengikat.
- d. Pengadaan perlengkapan dengan cara menyewa atau meminjam ke tempat lain.
- e. Pengadaan perlengkapan sekolah dengan cara tukar menukar barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan sekolah.

3. Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan penyusunan barang-barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku.²³ Hal ini sesuai dengan keputusan menteri keuangan RI Nomor Kep. 225/MK/ V/4/1971; bahwa barang milik negara berupa semua barang yang berasal atau dibeli dengan dana yang bersumber baik secara keseluruhan atau bagian sebagainya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun dana lainnya yang barang-barang dibawah penguasaan kantor departemen dan kebudayaan, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

²¹Rusdiana A. *Pengelolaan Pendidikan*, 218

²²Sarana dan prasarana sekolah yang pernah didrooping dari pemerintah yaitu berupa buku-buku pelajaran, buku penunjang dan alat-alat olah raga. Drooping ini biasanya memerlukan proses yang lama karena harus membuat proposal pengadaan dahulu. Proposal yang diajukan ini kadang-kadang tidak langsung disetujui oleh dinas karena mengalami kesalahan, sehingga harus diperbaiki kembali, hal ini kadang terjadi berulang-ulang sehingga menyebabkan memakan waktu lama dalam pembuatan proposal ini. Dalam pengadaan sarana dan prasarana dalam sistem drooping ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya menekankan bahwa; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa pemerintah. (Nurbaiti. "Manajemen Sarana, 540).

²³ Rusdiana A. *Pengelolaan Pendidikan*, 218

Kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah meliputi:²⁴

- a. Pencatatan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan didalam buku penerimaan barang, buku bukan inventaris, buku (kartu) stok barang.
- b. Pembuatan kode khusus untuk perlengkapan yang tergolong barang inventaris. Caranya dengan membuat kode barang dan menempelkannya atau menuliskannya pada badan barang perlengkapan yang tergolong sebagai barang inventaris. Tujuannya adalah untuk memudahkan semua pihak dalam mengenal kembali semua perlengkapan pendidikan di sekolah baik ditinjau dari kepemilikan, penanggung jawab, maupun jenis golongannya. Biasanya kode barang itu berbentuk angka atau numerik yang menunjukkan departemen, lokasi, sekolah, dan barang.
- c. Semua perlengkapan pendidikan di sekolah yang tergolong barang inventaris harus dilaporkan. Laporan tersebut sering disebut dengan istilah laporan mutasi barang. Pelaporan dilakukan daalm periode tertentu, sekali dalam satu triwulan. Dalam satu tahun ajaran misalnya, pelaporan dapat dilakukan pada bulan juli, oktober, januari, dan april tahun berikutnya. Aaadapun Pencatatan sarana dan prasarana di sekolah dilakukan pada:²⁵
 - 1) Buku penerimaan barang, mencatat semua barang yang diterima sekolah;
 - 2) Buku asal-usul barang, mencatat asal usul barang (pembelian, hibah/ hadiah/sumbangan, tukar menukar, dan meminjam/menyewa);
 - 3) Buku golongan inventaris, sebagai buku pembantu untuk mencatat barang inventaris menurut golongan barang yang telah ditentukan;
 - 4) Buku induk inventaris, mencatat semua barang inventaris milik Negara atau yayasan dalam lingkungan sekolah menurut urutan tanggal penerimaannya;
 - 5) Buku bukan inventaris, mencatat semuabarang habis pakai seperti: kapur, pensil, penghapus papan tulis, kertas HVS, tinta, dan sebagainya; dan
 - 6) Buku stok barang, mencatat barang habis pakai yang masuk/diterima danbarang yang keluar/digunakan dan sisabarang/stok barang.

²⁴ Bafadal, *Manajemen Perlengkapan*, 32

²⁵ Nurbaiti. "Manajemen Sarana, 541

4. Pendistribusian dan Penggunaan Sarana dan prasarana

Pendistribusian atau penyaluran perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu.²⁶ Adapun penggunaan/pemakaian sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab pimpinan lembaga pendidikan tersebut yang bisa dibantu oleh wakil bidang sarana dan prasarana atau petugas yang berkaitan dengan penanganan sarana dan prasarana.

Pendistribusian dan pemanfaatan sarana dan prasarana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/pmk.06/2007 tentang tata Cara pelaksanaan penggunaan, Pemanfaatan, penghapusan, dan Pemindahtanganan barang milik Negara.²⁷ Kegiatan pendistribusian dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, dalam prosesnya ada 3 hal yang harus diperhatikan yaitu: (a) ketepatan barang yang disampaikan, baik jumlah maupun jenisnya, (b) ketepatan sasaran penyampaiannya, (c) ketepatan kondisi barang yang di salurkan. Dalam rangka itu paling tidak 3 langkah yang sebaiknya ditempuh oleh bagian penanggungjawab penyimpanan atau penyaluran, yaitu; (a) penyusunan alokasi barang, (b) pengiriman barang, dan (c) penyerahan barang.²⁸

5. Pengawasan Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh pimpinan organisasi. Berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, perlu adanya kontrol baik dalam pemeliharaan atau pemberdayaan.²⁹ Pengawasan (control) terhadap sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan usaha yang ditempuh oleh pimpinan dalam membantu personel sekolah untuk menjaga atau memelihara, dan memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan sebaik mungkin demi keberhasilan proses pembelajaran di sekolah.

6. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan aktivitas yang harus dijalankan untuk menjaga agar perlengkapan yang dibutuhkan oleh persnel sekolah dalam kondisi siap pakai.³⁰ Kondisi siap pakai ini akan sangat membantu terhadap

²⁶Eka Prihatini, *Teori Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011),58.

²⁷ Nurbaiti. "Manajemen Sarana, 542

²⁸ Bafadal, *Manajemen Perlengkapan*, 38

²⁹ Rusdiana A. *Pengelolaan Pendidikan*,219

³⁰ Nurbaiti. "Manajemen Sarana, 543

kelancaran proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Oleh karena itu, semua perlengkapan yang ada di sekolah membutuhkan perawatan, pemeliharaan, dan pengawasan agar dapat diperdayakan dengan sebaik mungkin.

Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah jika ditinjau dari sifat maupun waktunya terdapat beberapa macam, yaitu:³¹

- a. ditinjau dari sifatnya, yaitu: pemeliharaan yang bersifat pengecekan, pencegahan, perbaikan ringan dan perbaikan berat,
- b. ditinjau dari waktu pemeliharannya, yaitu: pemeliharaan sehari-hari (membersihkan ruang dan perlengkapannya), dan pemeliharaan berkala seperti pengecatan dinding, pemeriksaan bangku, genteng, dan perabotan lainnya.

Pemeliharaan sarana dan prasarana milik negara diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/pmk.06/2007 tentang tata Cara pelaksanaan penggunaan, Pemanfaatan, penghapusan, dan Pemindahtanganan barang milik Negara. Pemeliharaan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan sarana dan prasarana dalam kondisi yang baik dan tetap berfungsi.³²

7. Penghapusan Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Barang-barang yang ada di lembaga pendidikan, terutama yang berasal dari pemerintah tidak akan selamanya bisa digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, hal ini karena rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, barang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan. Dengan keadaan seperti diatas maka barang-barang tersebut harus segera dihapus untuk membebaskan dari biaya pemeliharaan dan meringankan beban kerja inventaris dan membebaskan tanggung jawab lembaga terhadap barang-barang tersebut.³³

Penghapusan sarana dan prasarana Madrasah adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga (bisa juga milik negara) dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu aktivitas dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan, penghapusan bertujuan untuk:³⁴

- a. Mencegah dan membatasi kerugian yang lebih besar sebagai akibat pengeluaran dana untuk perbaikan yang perlengkapan yang rusak.
- b. Mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan yang tidak berguna lagi.

³¹ Rusdiana A. *Pengelolaan Pendidikan*, 219

³² Nurbaiti. "Manajemen Sarana, 543

³³ Eka Prihatini, *Teori Administrasi Pendidikan*, 61

³⁴ Rusdiana A. *Pengelolaan Pendidikan*, 219

- c. Membebaskan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan.
- d. Meringankan beban inventaris.

Kepala Sekolah/Madrasah memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan terhadap perlengkapan sekolah. Namun perlengkapan yang akan dihapus harus memenuhi persyaratan-persyaratan penghapusan. Demikian pula prosedurnya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeliharaan sarana dan prasarana milik negara diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/pmk.06/2007 tentang tata Cara pelaksanaan penggunaan, Pemanfaatan, penghapusan, dan Pemindahtanganan barang milik Negara. Pemeliharaan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan sarana dan prasarana dalam kondisi yang baik dan tetap berfungsi.³⁵ Adapun barang-barang yang memenuhi syarat untuk dihapus adalah:

- a. Barang-barang dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi.
- b. Barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
- c. Barang-barang kuno yang penggunaannya sudah tidak efisien lagi.
- d. Barang-barang yang terkena larangan.
- e. Barang-barang yang mengalami penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang.
- f. Barang-barang yang pemeliharaannya tidak seimbang dengan kegunaannya.
- g. Barang-barang yang berlebihan dan tidak digunakan lagi.
- h. Barang-barang yang dicuri.
- i. Barang-barang yang diselewengkan.
- j. Barang-barang yang terbakar dan musnah akibat bencana alam.³⁶

Dalam penghapusan barang ini, kepala sekolah beserta stafnya hendaknya mengelompokkan dan mendata barang-barang yang akan dihapus, kemudian mengajukan usulan penghapusan beserta lampiran jenis barang yang akan dihapus ke Diknas/Depag. Setelah SK dari kantor pusat tentang penghapusan barang sesuai berita acara yang ada. Penghapusan barang ini dapat dilakukan dengan cara pemusnahan atau pelelangan.

³⁵ Nurbaiti. "Manajemen Sarana, 543


³⁶ Rusdiana A. *Pengelolaan Pendidikan*, 220

Tugas Mahasiswa

- Mengidentifikasi dan mengabstraksikan 4 poin penting dari kajian Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Islam Terpadu.
 - Konsep Dasar Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Islam Terpadu
 - Jenis Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - Dasar Kebijakan dan Standar Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pendidikan
 - Manajemen/Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan
- Memukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
- Membatasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
Mata Kuliah :
Metode :
Dok :
NIM :
JURUSAN :

 Isi /Aplod Foto Resmi Mu

 Isi Identitas MK & Individu

Resensi/Rangkuman:

A Esensi/isi /Sub Materi

B Esensi/isi /Sub Materi

C Esensi/isi /Sub Materi

D Esensi/isi /Sub Materi

summary: Maksimal 10 kalimat

Temukan Nilai/Natijah/Kontribusi dari empat sub materi

Ket: Penulisan maksimal 500Kata

Isi /aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:

Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

- Dari CK tersebut, Wajib dibuatkan Poster untuk Presentasi Harian.

Part: 10

Pengelolaan Biaya Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu

KEMAMPUAN AKHIR PEMBELAJARAN

Setelah mendapat materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami Konsep Dasar Pengelolaan Biaya Pendidikan Sekolah Islam Terpadu
2. Mengidentifikasi Konsep Dasar Pengelolaan Biaya Pendidikan Sekolah Islam Terpadu
3. Menjelaskan Konsep Dasar Pengelolaan Konsep Dasar Pengelolaan Biaya Pendidikan Sekolah Islam Terpadu

POKOK BAHASAN

- Konsep Dasar Pengelolaan Biaya Sekolah Islam Terpadu
- Karakteristik, Prinsip, dan Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan
- Kategori dan Klasifikasi Pengelolaan Biaya Pendidikan
- Manajemen Pembiayaan dan Model Standar Pengelolaan Biaya Pendidikan Sekolah Islam Terpadu

TOPIK BAHASAN

Pengelolaan biaya pendidikan yang transparan dan akuntabel, merupakan suatu keniscayaan. Mendesak dari segi keharusan regulasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Keuangan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah/madrasah, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung-jawabkannya secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Komponen keuangan dan pembiayaan perlu dikelola sebaikbaiknya. Agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan seara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Sehingga dalam hal pengelolaan perlu dilakukan manajemen keuangan yang baik. Atas dasar itu, para pengelolaan pembiayaan pendidikan, diharapkan mampu mempertahankan dan melaksanakan manajemen pembiayaan secara efektif, efisien, serta transparan sehingga, apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan madrasah dapat dicapai. Oleh karena itu, kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan di madrasah harus mengetahui dan mampu mengelola keuangan madrasah dengan baik, bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Diskusi tentang manajemen pembiayaan dalam pengembangan Sekolah Islam Terpadu, masih belum berfungsi dengan baik dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh para manajer dan pelaksana di internal lembaga pendidikan mungkin pada tingkat pendidikan tersier sudah ada staf atau petugas sendiri di departemen/kementrian. Begitu pentingnya pengelolaan Pembiayaan pendidikan dalam konteks program sekolah secara Terpadu, holistik dan integratif, Roe dan Norton, menempatkannya pada posisi ketujuh setelah; "1) Perencanaan program, 2) pengembangan, program; 2) Pengembangan kurikulum; 3) Pengembangan proses belajar mengajar; 4) Pengelolaan sumber daya manusia (guru, konselor, karyawan, dan sebagainya. 5) Pelayanan siswa; 6) Pengelolaan fasilitas; 7) Pengelolaan keuangan/Pembiayaan; 8) Pengelolaan hubungan sekolah-masyarakat; 9) evaluasi program; 10) Perbaikan program berkelanjutan" Itulah Pentingnya pada bagian ini membahas Pengelolaan keuangan/Pembiayaan pendidikan merupakan bagian dari proses penyelenggaraan sekolah.

A. Konsep Dasar Pengelolaan Biaya Sekolah Islam Terpadu

1. Batasan Manajemen Biaya Sekolah Islam Terpadu

Frasa Manajemen Pembiayaan Madrasah, merupakan gabungan dari manajen, pembiayaan, dan Sekolah Islam Terpadu. Apa yang dimaksud dengan manajemen pembiayaan sekolah/madrasah menurut Luneto (dalam Nafisah, dkk.), merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.¹ Kompri, memandang manajemen pembiayaan dalam Lembaga Pendidikan (Sekolah Islam Terpadu), berbeda dengan manajemen keuangan perusahaan yang berorientasi profit atau laba. Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai organisasi publik yang nirlaba (non profit), oleh karena itu manajemen pembiayaan memiliki keunikan sesuai dengan misi karakteristik pendidikan. Permasalahan yang terjadi di dalam lembaga terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan diantara sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang serampangan, tidak mendukung visi misi dan kebijakan sebagaimana tertulis di dalam rencana strategis lembaga pendidikan.²

Biaya merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisien dan efektivitas kegiatan di dalam suatu organisasi. Jika suatu kegiatan dilaksanakan dengan biaya yang relatif rendah, tetapi menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, maka hal ini dapat dikatakan kegiatan tersebut secara efisien dan efektif.³

Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah pembiayaan, demikian pula di lembaga pendidikan islam. Soal-soal yang menyangkut pembiayaan di sekolah islam formal ataupun nor formal (Sekolah Islam Terpadu), pada garis besarnya berkisar pada: uang sumbangan pembiaanaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah Islam seperti perbaikan sarana dan sebagainya.

Menurut Soeryani, manajemen Pembiayaan dalam arti sempit adalah tata pembukuan. Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggung jawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Maisarah, menjelaskan bahwa Manajemen Pembiayaan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain.⁴

¹Duroton Nafisah, dkk. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah" *Economic Education Analysis Journal*. 6: 3 (Agustus, 2017), 790.

²Kompri. *Manajemen Sekolah Teori dan Praktek*. (Bandung: Alfabeta.2014), 313

³Matin. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan aplikasinya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014), 01.

Jadi yang dimaksud dengan manajemen pembiayaan Sekolah Islam Terpadu , adalah pengelolaan semua bentuk keuangan baik pemasukan dan pengeluaran yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan ini dapat dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban serta pelaporan.

2. Esensi Manajemen Pembiayaan Sekolah Islam Terpadu

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Dalam pengimplementasiannya sangat menuntut kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara akuntabel dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengertian biaya dalam konsep ekonomi adalah pengorbanan-pengorbanan yang dinyatakan dalam bentuk uang, diberikan secara rasional, melekat pada proses produksi, dan tidak dapat dihindarkan. Bila tidak demikian, maka pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai pemborosan.⁵

Akntabilitas dalam pandangan berarti pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT atas apa yang telah dilakukan. Menurut Ar Rahman (Amalia, et al.),⁶ ”akuntabilitas bisa dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada Allah SWT, karena segala sesuatu yang dititipkan Allah SWT kepada manusia merupakan amanah dan segala yang dikerjakan atau diperbuat manusia harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak”. Seperti firman Allah dalam Al-Al-Mudassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya” ”tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (Al-Al-Mudassir [74]: 38).

Ayat di atas, mengisyaratkan bahwa amanah harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Begitu pula penerima amanah, juga harus bersikap adil dan menyampaikan kebenaran/tidak ada yang ditutup-tutupi. Akuntabilitas harus diikuti suatu pengendalian yang baik sesuai dengan komitmen yang telah dibuat antara pemberi amanah dengan penerima amanah.

⁴Sulistyorini, *Esensi Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 130

⁵Abdullah, Faisal. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. (Malang: UMM, 2008), 31.

⁶Amalia, et al. ”Risiko Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Jatim Syariah” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 6 : 9 (September 2019), 1759.

Transparansi dalam pesefetif Islam, menurut Tapanjeh (Amalia, et al.), adalah:⁷ (1) Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait aktivitas pengelolaan keuangan Madrasah termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. (2) Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang diberikan. (3) Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Purwanto, memandang "...biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan yang diberikan untuk setiap kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan."⁸ Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis merumuskan bahwa biaya adalah segala sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk sumber daya, untuk mendapatkan pengembalian berupa uang atau layanan dalam rangka pencapaian tujuan dari kegiatan tertentu.

Dalam konteks ini Harmanto dan Zulkifli (2003), memandang bahwa:

"...Biaya adalah sebagai berikut: (1) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkui pembagian kepada penanam modal. (2) Biaya dalam arti luas, biaya (*cost*) adalah jumlah uang yang dinyatakan dan sumber-sumber (ekonomi) yang dikorbankan terjadi dan akan terjadi untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. (3) Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu, sehingga biaya dalam arti luas diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva."⁹

Berkenaan pengertian biaya pendidikan, Anwar, menyatakan bahwa, "Biaya pendidikan memiliki pengertian yang luas, hampir segala pengeluaran yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pendidikan dianggap sebagai biaya."¹⁰ Sehubungan dengan itu, manajemen pendidikan mengkaji, menganalisis pengeluaran, segi manfaat dan efisiensinya, sehingga pengeluaran untuk pendidikan merupakan biaya pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari uraian di atas dapat dianalisa bahwa biaya merupakan suatu dampak yang diterima oleh seseorang atau kelompok, baik dari aspek keuangan atau sumber daya lain setelah yang bersangkutan melaksanakan kegiatan atau diberikan layanan. Dalam hal penggunaan sumber daya keuangan, biaya (*cost*) tidak sama dengan anggaran (*budget*). Apabila biaya merupakan segala bentuk pengeluaran akibat dari suatu

⁷Amalia, et al. "Risiko Pembiayaan, 1760.

⁸Purwanto, Ng. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002). 12,

⁹Harnanto dan Zulkifli. *Manajemen Biaya*. (Yogyakarta: UPP AMP YKP, 2003). 24.

¹⁰Anwar, Moch. Idochi. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2003), 10.

kegiatan, maka anggaran cenderung pada sisi penerimaan dan pengeluarannya. Fattah, menyatakan bahwa, “Anggaran adalah rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.”¹¹

Dari pengertian di atas dapat digambarkan bahwa anggaran adalah input yang diperoleh oleh suatu satuan kerja atau organisasi untuk membiayai kegiatan. Berkaitan dengan investasi, pendidikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Dalam konteks pembangunan perekonomian bangsa, maka pendidikan dapat dipandang sebagai investasi karena pendidikan yang berhasil akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan ekonomi mendorong perkembangan pendidikan, dan pendidikan yang maju merupakan salah satu persyaratan untuk perkembangan ekonomi selanjutnya.

Dari aspek investasi, maka biaya pendidikan sebagai segala sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk sumber daya, untuk mendapatkan pengambilan berupa barang atau layanan jasa dalam rangka pencapaian tujuan di bidang pendidikan. Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses pelaksanaan pendidikan.

Biaya pendidikan juga merupakan komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Biaya pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).

3. Tugas dan Fungsi Manajemen Pembiayaan Sekolah Islam Terpadu

Dalam mengelola keuangan ini, kepala sekolah/madrasah berfungsi sebagai “*otorisator*” dan “*ordonator*”.¹²

- a. Sebagai *otorisator* kepala sekolah/madrasah diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran anggaran.
- b. Sebagai *ordonator*, kepala sekolah/madrasah sebagai pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan.

¹¹Nanang Fattah *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*.(Bandung: Remaja Rosda Karya,2006). 47.

¹²Departemen Pendidikan Nasional. *Manajemen Keuangan. Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama. 2002), 23.

Pemberdayaan fungsi-fungsi manajemen diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu, maka peningkatan fungsi-fungsi manajemen dalam pembiayaan pendidikan harus dilakukan dalam rangka mencapai lima target, yaitu:¹³

- a. Efisiensi pengadaan barang dan jasa
- b. Alokasi belanja yang tepat sasaran
- c. Alokasi belanja yang berkeadilan sosial.
- d. Peningkatan pelayanan kualitas pelayanan
- e. Citra baik lembaga pendidikan. .

Makna target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang akan dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu, Efisiensi dalam konteks itu dimaknai "tidak boros". Bagi Sekolah Islam Terpadu, lima target itu melekat pada kebijakan pimpinan dalam Islam, sebagaimana Fiman Allah SWT., dalam Q.S Al-Isra' ayat 27 yaitu;

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: "Sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudara setan-setan, sedang setan terhadap Tuhannya adalah ingkar." (Q.S Al-Isra' [17]: 27).

Fattah, menyatakan bahwa fungsi pembiayaan dapat digolongkan kedalam tiga jenis, yaitu: "...(a) sebagai alat penaksir; (b) sebagai alat otorisasi pengeluaran dana, dan (c) sebagai alat efisiensi"¹⁴

Pembiayaan pendidikan dijalankan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah dalam pembangunan di bidang pendidikan.

Menurut Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional fungsi-fungsi pembiayaan pendidikan adalah:¹⁵

- a. Memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin;
- b. Penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan

¹³Cooke, Alan. D.J., Meyvis, Tom., & Schwartz, Alan. "Avoiding Future Regret in Purchase Timing Decisions". *Journal of Consumer Research*. 2:1 (January. 2001), 28.

¹⁴Nanang Fattah. *Ekonomi dan*, 49.

¹⁵Depdiknas: *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional. Tahun. 2005*. (Jakarta: Diknas, 2005), 31.

- c. Memberikan insentif dan disinsentif bagi: (1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan; (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan secara berkelanjutan; dan (3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pengelola pendidikan.

Fungsi pembiayaan pendidikan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pendidikan. Seperti disebutkan dalam UUD. Nomor 32 Tahun 2004, bahwa "...sektor pendidikan adalah salah satu yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Departemen Pendidikan Nasional akan terus membantu provinsi dan kabupaten/kota dalam pembiayaan pembangunan sector pendidikan".¹⁶

Bersamaan dengan itu, komitmen dan kemampuan kabupaten/kota dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan terus ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas. Bantuan pembiayaan pendidikan dan pengembangan kapasitas pada prinsipnya diarahkan untuk makin memperkuat desentralisasi dan kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembiayaan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan harus mampu menjadi strategi peningkatan akses, mutu dan tata kelola. Kapasitas pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengelola sumber-sumber daya pendidikan sangat menentukan keberhasilan program-program pengembangan pendidikan. Pembiayaan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah berdasarkan kriteria seperti tujuan yang akan dicapai dalam pemenuhan standar nasional pendidikan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan, akuntabilitas dalam pengelolaan serta manfaat yang diperoleh.

Dalam program pemihakan terhadap masyarakat miskin, pemerintah akan mulai menghilangkan hambatan biaya seluruh biaya operasional satuan pendidikan di luar gaji pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini merupakan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pemerintah secara bertahap akan membebaskan seluruh beban operasional satuan pendidikan negeri dan swasta menuju pendidikan dasar bebas biaya. Walaupun orang tua siswa dibebaskan dari biaya operasional satuan pendidikan, masih banyak keluarga miskin yang tidak mampu memenuhi biaya pribadi untuk anaknya sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Untuk mengantisipasinya program penyediaan beasiswa yang disalurkan melalui biaya satuan pendidikan ke sekolah untuk menutup biaya pribadi bagi siswa yang tidak terhambat masuk sekolah. Bantuan beasiswa juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi sekolah.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*,

Pendidikan merupakan upaya atau kegiatan yang dilakukan secara sadar sistematis dan berkelanjutan, dalam upaya mendewasakan manusia atau dengan kata lain mencerdaskan kehidupan bangsa. Mayoritas kegiatan tersebut berlangsung di lembaga pengajaran dari pendidikan prasekolah sampai dengan perguruan tinggi, termasuk lembaga pendidikan lainnya, baik formal, non formal dan in formal.

Dalam prosesnya pendidikan membutuhkan sejumlah biaya yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sarana dan prasarana serta kegiatan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan sebagai pengorbanan yang dikeluarkan untuk dapat terselenggaranya proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan.

4. Tujuan Manajemen Pembiayaan Sekolah Islam Terpadu

Shrode dan Voich (dalam Fatah), menyatakan bahwa, “tujuan utama manajemen pembiayaan adalah produktivitas dan kepuasan”.¹⁷ Salanjutnya Aminuddin, menegaskan bawa tujuan manajemen pembiayaan adalah “produktifitas, efektifitas dan efisiensi” maksudnya:¹⁸

a. Produktivitas

Produktivitas memiliki arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (Input). Produktivitas sebagai bentuk usaha berhubungan dengan penggunaan berbagai sumber daya yang baik untuk mendapatkan suatu hasil yang optimal. Produktivitas tidak dapat dipisahkan dengan unsur efektivitas dan efisiensi.

Produktivitas berarti sikap mental yang senantiasa berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari sebelumnya, dan hari esok harus melebihi kualitasnya dari generasi sebelumnya. Safarinda dalam Sinungan, (dalam Saepudin, dkk. 2017).¹⁹ Syarat seseorang mampu produktivitasnya tinggi adalah tingkat pendidikan dan keahlian, jenis teknologi dan hasil produksi, kondisi kerja, serta kesehatan, kemampuan fisik dan mental. Produktifitas dalam persepeftif Islam, mengaitkannya dengan produktivitas lebah sebagaimana yang dijelaskan dalam QS An Nahl 69;

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: ”...kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir” (QS An Nahl [16]: 69);

¹⁷Nanang Fattah. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 15

¹⁸Aminuddin. *Manajemen Pendidikan Telaah Teoritis Praktis*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2016), 24-25

¹⁹Encep Saepudin, dkk. ”Model Produktivitas Kerja Ditinjau Dari Perspektif Al Quran” *Jurnal Islamadina*, 18:1, (Maret 2017), 60.

b. Efektivitas

Efektivitas adalah terkait dengan tingkat pemenuhan output atau tujuan proses. Semakin tinggi pencapaian target dan tujuan dalam suatu proses maka dapat dikatakan proses tersebut semakin efektif. Karena itu keputusan tentang efisiensi haruslah kontekstual dan proporsional. "Keputusan kontekstual dan proporsional ini sangat membutuhkan ketersediaan informasi tentang karakteristik situasi dan input yang terlibat dalam proses pendidikan dalam jumlah dan mutu yang memadai"²⁰.

Efektivitas dalam persepektif Islam, mengkaikan dengan suatu organisasi atau kegiatan yang dijalankan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan terealisasi tujuan tersebut maka semua itu akan sia-sia. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS. Al-Kahfi ayat 103-104 yang berbunyi:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

Artinya: Katakanlah: "Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang paling merugi perbuatannya?" Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya". (QS. Al-Kahfi [18]: 103-104).

Ayat di atas, mengisyaratkan bahwa dalam Analisis efektifitas biaya yang digunakan harus memperhatikan karakteristik situasi dan input yang terlibat dalam proses pendidikan. Perbedaan karakteristik situasi dan input mempunyai implikasi pada biaya pendidikan yang diperlukan.

c. Efisiensi

Efisiensi adalah ukuran yang berhubungan dengan tingkat penggunaan berbagai sumber daya dalam suatu proses semakin sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Efisiensi juga merupakan perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal. (a) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil

²⁰Mulyasa. E. *Menjadi Guru Profesional*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005). 82

yang ditetapkan. (b) Dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.²¹

Karenanya, akan tampaklah dari cara hidupnya yang sangat efisien di dalam mengelola setiap sumber yang dimilikinya. Dia menjauhkan sikap yang tidak produktif dan mubazir karena mubazir adalah sekutunya setan yang mahajelas.²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: [59]: 18).

B. Karakteristik, Prinsip, dan Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan

1. Karakteristik Pengelolaan Biaya Pendidikan

Karakteristik utama pembiayaan pendidikan yang bersifat *budgetair* dan *non budgetair* termasuk dalam pengertian biaya pendidikan dalam arti luas. Pembiayaan pendidikan yang bersifat *budgetair* yaitu biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga. Sedangkan pengertian biaya pendidikan yang bersifat *nonbudgetair* yaitu biaya-biaya pendidikan yang dibelanjakan oleh murid, atau orangtua/keluarga dan biaya kesempatan pendidikan.²³

2. Karakteristik Sumber dan alokasi pembiayaan pendidikan

Pada dasarnya pembiayaan pendidikan dapat dimaknai sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan dibiayai atau didanai. Pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan dibiayai, siapa yang membiayai serta siapa yang perlu dibiayai dalam suatu proses pendidikan. Biaya dalam lembaga pendidikan biasanya meliputi: *Direct cost dan indirect cost, Social cost dan private cost*. dilihat dari segi anggaran, biaya pendidikan menunjukkan sisi pengeluaran dari anggaran pendidikan. Pengertian ini mengandung dua hal yaitu berkaitan dengan sumber pembiayaan dan alokasi pembiayaan pendidikan. Biaya dalam lembaga pendidikan biasanya meliputi.²⁴

²¹Trianti, Khoiriyah, *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)*, Skripsi, (Malang: Univ. Brawijaya. 2014), 37.

²²Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 105

²³Nanang Fattah *Ekonomi dan*, 48.

²⁴Harnanto dan Zulkifli. *Manajemen Biaya.....*, 25.

a. Direct cost dan indirect cost

Direct cost (pembiayaan langsung) yaitu pembiayaan yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung akan berpengaruh kepada output pendidikan. Biaya langsung ini meliputi gaji guru dan personil lainnya, pembelian buku, fasilitas kegiatan belajar mengajar, alat laboratorium, dll. Untuk pengajaran biaya langsung harus memenuhi unsur sbb: inheren pada hasil, kuantitatif dapat dihitung, tidak dapat di hindarkan *indirect* dapat melaksanakan pendidikan. *Indirect cost* (biaya tidak langsung) meliputi biaya hidup, transportasi, dan biaya-biaya lainnya.

b. Social cost dan Private cost

Social cost dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sekolah yang harus dibayar oleh masyarakat. *Private cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya, dan termasuk didalamnya *forgone opportunities* (biaya kesempatan yang hilang). Pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan dibiayai, siapa yang membiayai serta siapa yang perlu dibiayai dalam suatu proses pendidikan. Pengertian ini mengandung dua hal yaitu berkaitan dengan sumber pembiayaan dan alokasi pembiayaan pendidikan. Besaran anggaran secara tersirat menunjukkan komitmen serta prioritas kegiatan dari suatu kebijakan pendidikan. penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Sementara itu anggaran atau budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. fungsi anggaran.

3. Prinsip-Prinsip Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Prinsip dalam konteks ini selalu berhubungan dengan tujuan yang akan di capai dari tujuan manajemen pembiayaan, yang telah dibahas pada sub di tas. Berikut ini dijelaskan masing-masing prinsip tersebut, (transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pesefektif Garner (dalam Rusdiana), sebagai berikut:²⁵

²⁵ Rusdiana & Wardija. *Manajemen Keuangan Sekolah*. (Bandung: Arsad Press, 2013), 30

a. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung-jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

c. Efektivitas

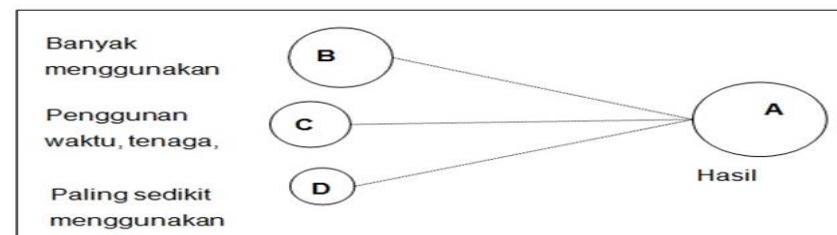
Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner (2004), mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. *Effectiveness "characterized by qualitative outcomes"*. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

d. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. *"Efficiency characterized by quantitative outputs"* (Garner, dalam Rusdiana). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal: ²⁶

1) Dilihat dari segi penggunaan waktu

Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya: Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang sebesar-besarnya. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 10.1.
Hubungan Penggunaan waktu, tenaga dan biaya dan Hasil yang diharapkan

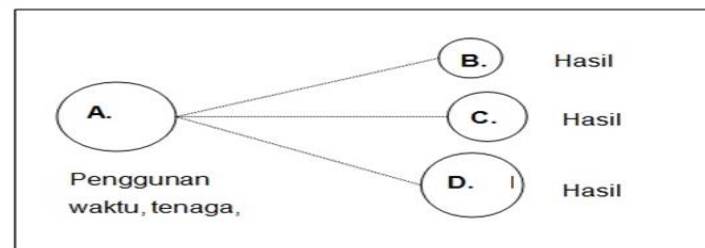
Sumber: Diadaptasi dari Garner, 2004, (Rusdiana&Wardija 2013)

²⁶ Rusdiana A& Wardija. *Manajemen Keuangan*, 31

Pada gambar di atas menunjukkan penggunaan daya C dan hasil D yang paling efisien, sedangkan penggunaan daya A dan hasil D menunjukkan paling tidak efisien.

2) Dilihat dari segi hasil

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan menggunakan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. Ragam efisiensi tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 10.2.

Hubungan Penggunaan waktu, Tenaga, Biaya tertentu dan Ragam Hasil yang diperoleh

Sumber: Diadaftasi dari Garner, 2004, (Rusdiana&Wardija 2013)

Pada gambar di atas menunjukkan penggunaan waktu, tenaga, biaya A dan hasil B paling tidak efisien. Sedangkan penggunaan waktu, tenaga, biaya A dan hasil D paling efisien. Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

4. Kebijakan Pengembangan Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Guna mencapai tujuan utama manajemen pembiayaan adalah produktivitas dan kepuasan, produktifitas, efektifitas dan efisiensi. Pemerintah berupaya menerbitkan beberapa peraturan dan perundan-udaganan untuk dijadikan payung hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaar biaya pendidikan, diantaranya:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan; Pemerintah secara bertahap akan membebaskan seluruh beban operasional satuan pendidikan negeri dan swasta menuju pendidikan dasar bebas biaya. Walaupun orang tua siswa dibebaskan dari

biaya operasional satuan pendidikan, masih banyak keluarga miskin yang tidak mampu memenuhi biaya pribadi untuk anaknya sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Untuk mengantisipasinya program penyediaan beasiswa yang disalurkan melalui biaya satuan pendidikan ke sekolah untuk menutup biaya pribadi bagi siswa yang tidak terhambat masuk sekolah. Bantuan beasiswa juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi sekolah.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Fungsi pembiayaan pendidikan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pendidikan. Seperti disebutkan dalam UUD. Nomor 32 Tahun 2004, bahwa "...sektor pendidikan adalah salah satu yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Departemen Pendidikan Nasional akan terus membantu provinsi dan kabupaten/kota dalam pembiayaan pembangunan sector pendidikan".²⁷

c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, pasal 60 ayat 2 tentang pendanaan pendidikan menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.²⁸

Pasal 62 ayat (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

C. Kategori dan Klasifikasi Pengelolaan Biaya Pendidikan

1. Kategori Biaya Pendidikan

Dalam manajemen pendidikan, biaya pendidikan dipisah dalam tiga kategori, yaitu: biaya operasional, biaya pengembangan staf dan biaya investasi.²⁹

²⁷Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*,

²⁸Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (cetakan kedua). (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 244

²⁹Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Cetakan 5. (Bandung: Alfabeta., 2005), 28.

a. Biaya Operasional

Biaya operasional yakni biaya pendidikan yang digunakan untuk menunjang kelancaran operasional pembelajaran. Pembiayaan dalam kelompok inilah yang saat ini diberikan pemerintah pusat melalui DBO (Dana Bantuan Operasional).

b. Biaya Pengembangan Staf

Biaya pengembangan staf yakni pembiayaan pendidikan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan sekolah mencapai mutu layanan yang optimal. Termasuk pembiayaan dalam kelompok ini adalah biaya untuk membantu guru-guru mengikuti berbagai seminar dan *workshop* yang terkait langsung dengan kemampuan profesional guru, membantu guru dalam meningkatkan kualifikasi akademiknya lewat beasiswa studi ke S2 dan sejenisnya.

c. Biaya Investasi

Biaya investasi yakni pembiayaan pendidikan yang diagendakan sebagai investasi masa depan sekolah. Termasuk dalam kelompok pembiayaan ini adalah pembangunan gedung, laboratorium sekolah, jaringan internet untuk pembelajaran, penyediaan sarana prasarana perpustakaan dan sejenisnya yang semua itu bermakna sebagai investasi keunggulan sekolah di masa depan.

2. Jenis-jenis Pembiayaan Pendidikan

Jika pada bagian terdahulu dijelaskan tentang peranan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan, selanjutnya akan dijelaskan mengenai jenis dan penggolongan dalam pembiayaan pendidikan. Beberapa jenis dan golongan biaya pendidikan yang dipaparkan berikut ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai konsep pembiayaan pendidikan. Beberapa jenis atau golongan biaya pendidikan tersebut adalah:

a. Biaya Langsung dan Tidak langsung (Direct and Indirect Cost)

1) Biaya langsung (direct cost)

Biaya langsung (direct cost) diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.³⁰

³⁰Anwar, Moch.Idhochi. 1991. "Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan". *Mimbar Pendidikan*, 9:1 (Januri, 1991), 28.

Biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Contohnya biaya untuk gaji guru, dan pengadaan fasilitas belajar mengajar Gaffar (1991). Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri.³¹

Pada prinsipnya, biaya yang secara langsung merupakan dana yang digunakan untuk operasional sekolah serta langsung dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan proses belajar mengajar.

2) Biaya Tidak langsung (indirect cost)

Biaya tidak langsung (indirect cost) diartikan sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan (earning foregone by students), bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba, bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan (implicit rent and depreciation).³²

Dana tidak langsung, pada prinsipnya adalah dana yang berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Dana tidak langsung adalah dana yang mencakup dana penunjang siswa untuk dapat hadir ke sekolah, diantaranya ialah biaya hidup, transportasi, serta catatan resmi. Berdasarkan pengelolaannya dana jenis ini tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam anggaran perencanaan sekolah.

b. Biaya Rutin dan Biaya Pembangunan (Recurrent and Capital Cost)

Biaya rutin dan pembangunan merupakan bagian dari biaya langsung (direct cost) meliputi:

1) Biaya rutin (recurrent cost)

Biaya rutin (recurrent cost) adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Menurut Gaffar, biaya rutin dihitung berdasarkan "*per student enrolled*". Menurut biaya

³¹Gaffar, M. F. "Konsep dan Filosofi Biaya Pendidikan", *imbar Pendidikan*, 9:1 (Januri, 1991), 133.

³²Fattah, *Ekonomi dan....*, hlm. 33.

rutin dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) rata-rata gaji guru per tahun, (2) ratio guru, murid, dan (3) proporsi gaji guru terhadap keseluruhan biaya rutin.³³

Pada prinsipnya dana rutin, merupakan dana yang digunakan dalam pembiayaan kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Digunakan untuk menunjang program belajar-mengajar, pembayaran gaji gurudan personil seekolah, administrasi kantor, pemeliharaan serta perawatan sarana prasarana sekolah. Konsep yang digunakan dalam menghitung dana rutin ialah menggunakan konsep *unit cost*. *Unit cost* merupakan biaya yang digunakan atau dikeluarkan untuk memberi pelayanan kepada seorang siswa per tahun dalam suatu jenjang pendidikan.

Menghitung *unit cost* menurut Fatah, adalah membagi jumlah dana yang tersedia dalam program anggaran dengan jumlah kredit yang diambil siswa pertahun dari program tersebut. Biaya program pengajaran akan dipengaruhi oleh:³⁴

- (a) Gaji guru dan tenaga administrasi
- (b) Dana ruangan
- (c) Dana perlengkapan dan alat
- (d) Dana bahan pelajaran.

2) Biaya Pembangunan

Biaya pembangunan (*capital cost*) adalah biaya yang digunakan untuk pembelian tanah, pembangunan ruang kelas, perpustakaan, lapangan olah raga, konstruksi bangunan, pengadaan perlengkapan mobelair, biaya penggantian dan perbaikan. Menurut Gaffar, biaya pembangunan di hitung atas dasar "*per student place*". Menurutnya dalam menghitung biaya pembangunan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu: tempat yang menyenangkan untuk murid belajar, biaya lokasi atau tapak (*site*), dan biaya perabot dan peralatan.³⁵

Dana pembangunan, pada prinsipnya, merupakan dana yang digunakan untuk pembelian tanah bangunan ruangan kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, konstruksi bangunan, sertaa penggantian dan perbaikan. Dalam menghitung besarnya dana pembangunan maka digunakan konsep *capital cost per student place*. Dana pembangunan ini dibedakan menjadi tiga, yaitu untuk siswa di sekolah, asrama siswa, dan tempat tinggal guru.

³³Gaffar, M.F. *Perencanaan Pendidikan; Teori dan Motologi*. (Jakarta: Depdikbud, 1987), 52.

³⁴Fatah, *Ekonomi dan*, hlm. 26.

³⁵Gaffar, *Perencanaan Pendidikan*, hlm. 67

c. Biaya Pribadi dan Biaya Masyarakat (Private and Social Cost)

1) Biaya pribadi (private cost)

Biaya pribadi (private cost) adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya *forgone opportunities*. Kumar (dalam Kalia, 2011), menjelaskan terkait *private cost* tersebut bahwa: “...*The private cost refers to the part of expenditures/investments which are incurred either by the parents or students or both. It means that financial expenses incurred by the students or parents or both (including relatives, etc.) In a year for acquiring education is called the private cost*”.³⁶ Maksudnya: “... Biaya pribadi mengacu pada bagian dari pengeluaran/ investasi yang dikeluarkan baik oleh orang tua atau siswa atau keduanya. Artinya biaya keuangan yang dikeluarkan oleh siswa atau orang tua atau keduanya (termasuk saudara, dll.) Dalam setahun untuk memperoleh pendidikan disebut biaya pribadi”. Lebih jauh dijelaskan bahwa *private cost* pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu:

- (a) Biaya Akademik mengacu pada item biaya seperti biaya dan dana yang dibayarkan kepada lembaga (biaya kuliah, biaya ujian, biaya perpustakaan, biaya laboratorium, dll), pembayaran yang dilakukan untuk mendapatkan pembinaan pribadi, buku, alat tulis, instrumen, dan lain-lain.
- (b) Biaya pemeliharaan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk pakaian, asrama, transportasi, dan penginapan. Biaya ini dikenal juga sebagai biaya insidental.

2) Biaya Masyarakat (sosial cost)

Social cost dijelaskan oleh Akangbou (dalam Akpotu, 2008), bahwa “biaya sosial merupakan pengeluaran sosial atau investasi pemerintah pada pendidikan sementara biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh individu dan rumah tangga mereka”.³⁷ Biaya sosial mengacu pada belanja langsung yang sebenarnya oleh pemerintah dan individu atau orang tua mereka dalam memberikan pendidikan.

Pada prinsipnya dana masyarakat”ialah dana yang dikeluarkan masyarakat untuk kepentingan pendidikan yang berupa uang sekolah, uang buku, dan dana lainnya”³⁸ Tita Rosita, memandang dana tidak langsung, seperti pajak dan retribusi dana pribadi ialah dana langsung yang

³⁶Kalia, S.. *Cost of Education to Student; Private Cost*. (New York: Holt Rinehart and Winstons, 2011), 441.

³⁷Akpotu, N. E. “Social Cost Analysis of Secondary Education in South West Nigeria (1996-2001)” *Journal.Soc.Sci.*,16:1, (Januari 2008), 31.

³⁸Levy, Murnane, Michael and Barton Weitz. *Retailing Management*. Edition. (New York: McGraw-Hill, 2001), 311,

dikeluarkan dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup setiap siswa. Selanjutnya, perbandingan unsur-unsur *private cost* dan *social cost* dijelaskan pada Tabel 11.1, sebagai berikut:³⁹

Tabel 11. 1.
Perbandingan Jenis-jenis *Social and Private Cost*

	Private Costs	Social Cost
Direct Costs	<u>Out-of-pocket expenses borne by the student or the student's family, including:</u> <ul style="list-style-type: none"> • fees actually paid by the family; • transportation costs incurred by the family; • family's purchase of books, school uniforms, etc 	<u>All the resources directly used in the production of education, including:</u> <ul style="list-style-type: none"> • time of teachers and other school employees (measured by salaries and benefits); • cost of recurrent inputs, e.g., books, material, heating and electricity, etc; • other recurrent cost (sometimes borne by families), such as transportation, uniforms, meals, etc; • cost of capital goods, e.g., buildings and equipment (measured by their rental value).
Indirect Costs (Opportunity Costs)	<u>After-tax income foregone by the family, i.e., the value to the family of the best alternative use of the student's time, including:</u> <ul style="list-style-type: none"> • earnings foregone • value of production foregone in family business/farm 	<u>Before-tax income foregone.</u> (These are the same as private indirect costs except for taxes that would have been levied on the student's higher income; in other words, social indirect costs are higher than the private indirect costs by the amount of taxes foregone. See footnote 2.)

Sumber: Murnane, 2001. (Tita Rosita, 2012)

3) Opportunity Cost

Opportunity cost mengacu pada biaya yang harus dikorbankan untuk memilih tindakan tertentu dengan mengorbankan tindakan yang lain. Dengan kata lain, manfaat yang bisa diterima dengan mengambil tindakan alternatif yang tidak dipilih.⁴⁰ Sebagai contoh dalam pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan mahasiswa untuk kuliah bukan saja SPP yang dibayarkan setiap semester melainkan juga kesempatan memperoleh gaji yang seharusnya diperoleh jika mahasiswa tersebut memilih untuk bekerja. Dengan demikian, besarnya gaji yang seharusnya diterima ketika mahasiswa tersebut memilih bekerja merupakan *opportunity cost* yang harus dihitung sebagai biaya pendidikan.

³⁹Tita Rosita, *Perencanaan dan Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung: UPI, 2012), 41.

⁴⁰Tita Rosita, *Perencanaan dan Pembiayaan*, 42.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan antara lain: Pendidikan merupakan membutuhkan biaya. Pembiayaan terhadap pendidikan harus dibayar lebih mahal karena pendidikan adalah investasi. *Human Capital* yang berupa kemampuan dan kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan, belajar sendiri, belajar sambil bekerja memerlukan biaya yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Perolehan keterampilan dan kemampuan akan menghasilkan tingkat balik *Rate of Return* yang sangat tinggi terhadap penghasilan seseorang.

3. Model-model Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Menurut John dan Morphet bentuk prinsip dari model biaya sekolah (pendidikan) seperti berikut:⁴¹

b. *Flat Grant model*

Model bantuan dialokasikan pada sekolah lokal distrik tanpa pertimbangan variasi atau perbedaan diantara distrik dalam kemampuan membayar pajak lokal ada dua variasi utama dalam model ini yakni:

- 1) keseragaman jumlah yang diterima permurid, perguru, atau suatu unit lain yang diperlukan, yang dibagi tanpa memerlukan pertimbangan perbedaan variasi dalam unit cost untuk program pelayanan pendidikan yang berbeda
- 2) jumlah variable kebutuhan perunit yang menggambarkan adanya variasi dalam unit cost yang dialokasikan bagi sekolah-sekolah lokal yang ada di daerah.

c. *Equilization model*

Equilization model, dalam model ini dana negara bagian atau state dialokasikan bagi sekolah lokal di daerah dan melihat kemampuan lokal dalam membayar pajak. Dalam model ini dana yang lebih untuk biaya permurid, perguru atau unit-unit lainnya yang diperlukan dialokasikan bagi daerah yang memiliki sumber yang menengah agar tetap bisa melaksanakan program pendidikan dengan baik

d. *Nonequalizing Matching Grant*

Model ini menghendaki daerah lokal atau mencocokkan dana atas keuangan yang ada tanpa pertimbangan variasi kemampuan membayar pajak dari daerah.

⁴¹Morphet.. *The Economic & Finance of Education*. (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1971) 322.

4. Program dan Anggaran Pembiayaan Pendidikan

a. Anggaran biaya Pendidikan

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Masih dalam buku yang sama menurut Nanang Fattah, Anggaran penerimaan adalah Pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Untuk sekolah dasar negeri, umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orangtua murid, dan sumber lain.⁴²

Adapun anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antara sekolah yang satu dan daerah yang lain Serta dari waktu ke waktu. Berdasarkan pendekatan unsur biaya (ingredient approach), pengeluaran sekolah dapat dikategorikan kedalam beberapa item pengeluaran yaitu:

- 1) Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran;
- 2) Pengeluaran untuk tata usaha sekolah;
- 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- 4) Kesejahteraan pegawai;
- 5) Administrasi
- 6) Pembinaan teknis education dan
- 7) Pendataan

Perhitungan biaya dalam pendidikan akan ditentukan oleh unsur-unsur tersebut yang didasarkan pula pada perhitungan biaya nyata (the real cost), sesuai dengan kegiatan menurut jenis dan volumenya. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per siswa (unit cost). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan aggregate biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun.

⁴² Fattah, *Ekonomi dan*, 47.

Mengacu pada pengertian di atas, dana pendidikan sebenarnya tidak selalu identik dengan uang, melainkan juga terkait dengan segala sesuatu pengorbanan yang diberikan untuk setiap aktivitas dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, dana yang dikeluarkan memiliki keterkaitan dengan mutu pendidikan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam pembiayaan pendidikan sebagai penunjang peningkatan mutu diperlukan pengelolaan yang terencana agar tujuan dari pendidikan dapat tercapai dengan baik. Secara lebih jelas, pembiayaan pendidikan pada tingkat instansi yang membina penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pusat hingga daerah berkisar pada program rutin dan pembangunan. Untuk hal itu, Fattah, memberikan penjelasan tentang anggaran rutin dan anggaran pembangunan, sebagai berikut:⁴³

1) Anggaran Rutin

Anggaran rutin atau *recufrent expenditure* adalah anggaran yang ditunakan untuk membiayai pengeluaran rutin atau berulang-ulang, seperti gaji, barang yang harus sering diganti, serta kegiatan operasional yang bersifat reguler pada suatu lembaga.

Program pembiayan pendidikan rutin, meliputi:⁴⁴

- (a) Belanja pegawai, yaitu gaji, tunjangan, dan belanja pegawai lainnya
- (b) Belanja barang dan jasa untuk keperluan sehari-hari perkantoran, pembelian alat-alat tulis kantor, barang cetak, alat-alat rumah tangga, pengiriman surat dan barang, sewa gedung, keamanan kantor dan lain- lain.
- (c) Belanja pemeliharaan, yaitu untuk pemeliharaan gedung, peralatan kantor, barang-barang inventaris dan lain-lain.
- (d) Belanja perjalanan, yaitu untuk perjalanan dinas, penginapan dan lain-lain.

2) Anggaran Pembangunan

Anggaran pembangunan atau *capital expenditure* adalah pengeluaran untuk barang-barang yang tahan lama, seperti gedung sekolah, laboratorium, sarana olahraga, fasilitas belajar lainnya serta bantuan operasional kegiatan penunjang organisasi. Program pembangunan (proyek), yaitu: Pengeluaran yang berhubungan dengan biaya lembaga pendidikan untuk pembelian beberapa sumber atau input proses pembelajaran, seperti sarana dan prasarana, serta operasional kelembagaan penunjang pengembangan institusi.⁴⁵

⁴³Fattah, 2004. *Ekonomi dan*, 48.

⁴⁴Anwar, *Administrasi Pendidikan dan.....* 105.

⁴⁵Anwar, *Administrasi Pendidikan dan.....* 106.

b. Biaya Operasional

Biaya operasional satuan pendidikan berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan, meliputi:⁴⁶

- 1) Gaji pendidikan dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
- 2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
- 3) Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lainnya.

Adapun jenis-jenis pembiayaan terdiri dari berdasarkan Standar Nasional Pendidikan meliputi: Biaya personal, yaitu belanja pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Suryadi, menyatakan, bahwa "Rendahnya biaya pendidikan berdampak terhadap kualitas keluaran pendidikan, karena secara langsung berpengaruh terhadap kapasitas dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan".⁴⁷

c. Biaya Produksi

Lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya pada bidang usaha lainnya menghadapi masalah yang sama, yaitu biaya produksi, tetapi ada beberapa kesulitan khusus mengenai penerapan perhitungan biaya ini. Hallack (dalam Sofjan.), mengemukakan tiga macam kesulitan, yaitu berkenaan dengan:⁴⁸

- 1) Definisi produksi pendidikan,
- 2) Identifikasi transaksi ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan, dan
- 3) Suatu kenyataan bahwa pendidikan mempunyai sifat sebagai pelayanan umum.

Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis adalah biaya satuan per peserta didik (*unit cost*). Biaya satuan di tingkat satuan pendidikan merupakan *aggregate* biaya pendidikan tingkat sekolah baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikerluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam satu tahun pelajaran.

Biaya satuan per peserta didik merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Oleh karena biaya satuan ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah

⁴⁶ PPNomor 19 Tahun 2005. tentang: *Standar Nasional Pendidikan*.

⁴⁷ Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis kebijakan pendidikan suatu pengantar*, (Bandung: Remaja Roesda Karya, 1999) 305.

⁴⁸ Assauri Sofjan. *Manajemen Produksi dan Operasi*. (Jakarta: LP-FE Universitas Indonesia., 2004). :33

peserta didik pada masing-masing satuan pendidikan, maka ukuran biaya satuan dianggap standar dan dapat dibandingkan antara satuan pendidikan yang satu dengan yang lainnya.

Analisis mengenai biaya satuan dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dapat dilakukan dengan menggunakan satuan pendidikan sebagai unit analisis. Dengan menganalisis biaya satuan, memungkinkan kita untuk mengetahui efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber di satuan pendidikan, keuntungan dari investasi pendidikan, dan pemerataan pengeluaran masyarakat, pemerintah untuk pendidikan. Disamping itu, juga dapat menjadi penilaian bagaimana alternatif kebijakan dalam upaya perbaikan atau peningkatan sistem pendidikan.

Menurut Gaffar, bahwa, "...*unit cost* yang dipergunakan adalah *perstudent unrolled* untuk *reccurent cost place* untuk *capital cost*. Tujuan mengitung biaya dengan menggunakan *unit cost* adalah untuk mengetahui *financial implication* pendidikan dalam mencapai tujuan dan target tertentu."⁴⁹

Untuk perguruan tinggi, standar ideal *unit cost* pendidikan adalah 18 juta per mahasiswa. Menurut Fasli dan Supriadi, "...*unit cost* pendidikan tinggi yang ideal adalah Rp 18 juta per mahasiswa, apabila *unit cost* tidak memenuhi rasio ideal, maka perguruan tinggi tersebut akan sulit mengembangkan kegiatan akademik dan pelayanan pendidikan".⁵⁰

Namun demikian, bahwa sebagian besar perguruan tinggi belum memiliki *unit cost* ideal, sehingga dalam melaksanakan operasional kegiatan banyak ditemui hambatan dalam proses pembelajaran maupun pelayanan pendidikannya. Dengan demikian, besarnya biaya pendidikan pada suatu satuan pendidikan berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran pada satuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Fattah, bahwa:⁵¹

- a. Terdapat hubungan yang positif dan kontribusi yang signifikan antara biaya dengan kualitas belajar mengajar.
- b. Terdapat hubungan yang positif dan kontribusi yang signifikan dengan mutu hasil belajar.
- c. Terdapat hubungan yang positif dan kontribusi yang signifikan antara mutu proses belajar mengajar-mengajar dengan mutu hasil belajar siswa.

⁴⁹Gaffar, *Perencanaan Pendidikan*;....., 38.

⁵⁰Fasli dan Supriadi, *Reformasi Pendidikan*....., 35.

⁵¹Fattah, *Ekonomi dan*, 111.

Sehingga sekali permasalahan muncul dalam penyelenggaraan pendidikan, salah satunya adalah keterbatasan anggaran pendidikan dan juga termasuk kelemahan dalam mengelola biaya pendidikan. Berkaitan dengan keterbatasan anggaran, “....Hal penting dipertanyakan adalah apakah bangsa Indonesia sudah melakukan sesuatu yang terbaik yang dapat dilakukan dalam keadaan yang serba terbatas ini? Dalam keadaan seperti ini, kita tetap harus berusaha bagaimana caranya agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kondisi yang ada sekarang ini”⁵²

D. Manajemen Pembiayaan dan Model Standar Pengelolaan Biaya Pendidikan Sekolah Islam Terpadu

1. Landasan Teori Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Dalam proses manajemen pembiayaan pendidikan, setidaknya ada enam tokoh yang mempunyai pandangan tentang bagaimana proses manajemen pembiayaan pendidikan itu.⁵³ Pertama adalah Thomas H. Jhones. Menurut Jhones, ada tiga tahapan dalam proses manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu (1) *financial planning*, (2) *implementation involves accounting* dan (3) *evaluation involves auditing*. *Financial planning* mempunyai persamaan kata yaitu *budgeting* (penganggaran). Penganggaran merupakan proses yang paling mendasar karena berisi berbagai keputusan untuk mengkoordinir sumber-sumber yang ada secara sistematis guna mencapai sasaran yang diharapkan. Implementasi merupakan pelaksanaan anggaran melalui berbagai kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan evaluasi merupakan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kedua, adalah Brimley. Brimley membagi empat proses manajemen pembiayaan yaitu: (1) *planning*, (2) *receiving funds*, (3) *spending funds* dan (4) *evaluating results*. Ketiga, Blocher. Blocher, membagi menjadi 4 tahapan yaitu: ⁵⁴ (1) manajemen strategik, (2) perencanaan pengambilan keputusan, (3) pengendalian manajemen dan operasional, dan (4) penyusunan laporan keuangan. Sedangkan tokoh dalam negeri di antaranya adalah Suad Husnan. Menurut Husnan, manajemen pembiayaan meliputi kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan.⁵⁵ Nafarin, membagi fungsi manajemen keuangan kepada empat yaitu: ⁵⁶ perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan meliputi pengorganisasian dan penganggaran. Perencanaan merupakan proses menyusun rencana sehingga rencana merupakan hasil perencanaan. Proses perencanaan meliputi perumusan strategi,

⁵²Fasli dan Supriadi, *Reformasi Pendidikan.....*, 36.

⁵³Haryati, Sri. ”Manajemen Biaya Pendidikan”.*Jurnal Untidar*. 7:2.(Desember, 2013), 52.

⁵⁴Blocher. J. E. *Manajemen Biaya* (Alih Bahasa oleh A. Susty Ambarriani). (Jakarta: Salemba Empat.2000), 2-3

⁵⁵Husnan, Suad. *Manajemen Keuangan*. (Yogyakarta. UPP AMP YKPN. 2002), 4

⁵⁶Nafarin, M. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi 3. (Jakarta: Salemba Empat. 2009), 4

perencanaan strategi, penyusunan program, dan penganggaran, jadi penganggaran merupakan tahap keempat dalam sistem manajemen strategis. Pengorganisasian merupakan proses menyusun organisasi sehingga organisasi merupakan hasil pengorganisasian. Penganggaran (budgeting) adalah merupakan proses menyusun anggaran sehingga anggaran (budget) adalah hasil (bagian) dari penganggaran. Selain itu Arikunto, memandang dari sudut Manajemen Pendidikan berpendapat bahwa kegiatan pembiayaan pendidikan meliputi tiga hal, yaitu: (1) *budgeting* (penyusunan anggaran); (2) *accounting* (pembukuan); dan (3) *auditing* (pemeriksaan).⁵⁷

2. Proses Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Dari keenam pandangan tokoh tersebut maka penulis akan menggunakan pendapat Arikunto dalam merumuskan proses manajemen pembiayaan pendidikan, mengacu pada rumusan Thomas H. Jhones. Menurut Jhones sebagai berikut:⁵⁸

a. Perencanaan Anggaran (Budgeting)

Langkah awal dalam manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah adalah membuat atau menyusun perencanaan anggaran (budgeting). Menurut Gitosudarmo, anggaran adalah jumlah-jumlah yang direncanakan dan harus dicapai di masa yang akan datang sehingga anggaran merupakan hasil akhir dari rencana keuangan suatu organisasi.⁵⁹ Dari keterangan tersebut, pada dasarnya anggaran bukanlah suatu tujuan, melainkan sebagai alat untuk menjabarkan suatu program ke dalam bentuk biaya untuk setiap kegiatan dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, kemampuan seorang leader dalam menganalisis keefektifan biaya dalam suatu program akan menentukan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget).⁶⁰ *Budget* merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan

⁵⁷Jefril Rahmadoni, "Isu Global Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di SD *Indonesian Creative School* Pekanbaru" *JMKSP: Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*. 3:2 (Desember, 2018), 164.

⁵⁸Arikunto, *Manajemen Pendidikan*. 317

⁵⁹Gitosudarmo, Indriyo Basri. *Manajemen Keuangan*. (Yogyakarta: BPFE. 1992), 226-

⁶⁰Fattah, *Ekonomi dan*, 112.

pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan/kesepakatan antara pucuk pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana”. Guna menentukan perkiraan kebutuhan secara tepat maka setiap anggaran harus berorientasi ke masa depan.

Di setiap lembaga pendidikan atau sekolah/madrasah, setidaknya harus membuat perencanaan anggaran sekurang-kurangnya satu tahun anggaran. Perencanaan anggaran di sekolah biasa dikenal dengan istilah RAPBS/M (rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah). Selain itu juga ada yang memberinama RKAS/M (rencana kerja dan anggaran sekolah/madrasah).

Menurut Nanang Fattah, dalam penyusunan RAPBS/M atau RKAS/M diperlukan seorang leader yang handal yang mempunyai visi ke depan. Seditidaknya ada empat kemampuan yang harus dimiliki seorang leader dalam menyusun RAPBS/M atau RKAS/M, yaitu:⁶¹

- 1) Penetapan tujuan dalam hubungannya dengan maksud-maksud pendidikan di sekolah sebagai keharusan untuk mempersiapkan anggaran belanja yang efektif.
- 2) Menerjemahkan tujuan ke dalam program-program pendidikan yang ditunjukkan untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan sehingga mampu menentukan anggaran belanja dengan tepat.
- 3) Menentukan sumber daya manusia dan material yang diperlukan untuk mengimplementasikan program-program pendidikan.
- 4) Membuat perkiraan anggaran belanja dengan teliti.

Selain itu, biasanya madrasah juga mengembangkan penggalan dana dalam bentuk:⁶²

- 1) Amal Jariah. Amal jariah diwujudkan berupa sumbangan orang tua siswa baru. Formula sumbangan ini diberikan setelah siswa dinyatakan diterima menjadi siswa pada suatu sekolah/madrasah. Sifat amal jariah ini tidak mengikat, sukarela dan pembayarannya bisa diangsur.
- 2) Zakat Mal. Dalam hal ini, BP3 bisa mengedarkan formulir jakaat mal kepada orang tua siswa pada setiap bulan Ramadhan.

⁶¹ Fattah, *Ekonomi dan*, 56.

⁶² Sulistyorini, *Esensi Manajemen*, 57

- 3) Uang syukuran. Orang tua diharapkan bisa mengisi khas madrasah secara sukarela sebagai rasa syukur tatkala anaknya naik kelas.
- 4) Amal Jum'atau. Sebagai salah satu sarana untuk ikhlas beramal bagi setiap siswa, maka BP3 bisa mengedarkan kotak amal kepada siswa secara sukarela.

Setelah mengetahui sumber dana yang ada, selanjutnya sekolah/madrasah membuat RAPBS/M. Dalam menyusun RAPBS/M kepala madrasah sebaiknya membentuk tim dewan guru. Setelah itu tim dan kepala madrasah menyelesaikan tugas, memerinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah. Dengan melibatkan para guru ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan secara moral semua guru dan kepala madrasah merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut. Dalam menetapkan jumlah anggaran, dua hal yang perlu diperhatikan yaitu unit *cost* (satuan biaya) dan volume kegiatan. Untuk anggaran rutin SBPP, BOS/M, jenis kegiatan dan satuan biayanya sudah ditentukan. Kepala madrasah bersama dengan staf madrasah diharapkan dapat menyusun prioritas penggunaan dana permata anggaran secara cermat.

b. Pelaksanaan Anggaran (Accounting)

Tahapan pelaksanaan anggaran meliputi penerimaan dan penggunaan keuangan sekolah. Baik transaksi penerimaan maupun transaksi penggunaan harus dicatat, dikelompokkan secara benar melalui *accounting system* yang baik. Menurut sisi penerimaan maka dana yang terkumpul merupakan sumber biaya potensial untuk membiayai setiap kegiatan dan pengembangan pendidikan di sekolah. Pembukuan anggaran, (Accounting), baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar. Hal ini dilakukan supaya dapat membuat suatu laporan keuangan dan penggunaannya yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Adapun untuk menunjang pengelolaan keuangan yang baik, kepala madrasah hendaknya memperhatikan:⁶³

- 1) Perlengkapan administrasi keuangan, yaitu madrasah memiliki tempat khusus untuk menyimpan perlengkapan administrasi keuangan, memiliki alat hitung, dan memiliki buku-buku yang dibutuhkan.
- 2) Sekolah/Madrasah memiliki RAPBS/RAPBM yang telah disahkan oleh yang berwenang, serta memiliki program penjabarannya.

⁶³ Diknas. *Manajemen Keuangan*. 45.

- 3) Pengadministrasian keuangan, yaitu madrasah memiliki logistik (uang dan barang) sesuai dengan mata anggaran dan sumber dananya masing-masing madrasah memiliki buku setoran keuangan Bank/KPKN/yayasan, memiliki daftar penerimaan gaji/honor guru dan tenaga lainnya, dan yang terakhir madrasah memiliki laporan keuangan triwulan dan tahunan

Menurut Panduan Pelaksanaan Pembinaan SMP RSBI dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah SMP RSBI (dalam Rahmadoni), sumber penerimaan dana pendidikan berasal dari:⁶⁴ (1) pemerintah pusat (dana Bantuan Operasional Sekolah); (2) pemerintah pusat (blockgrant); (3) pemerintah provinsi; (4) pemerintah kota; (5) iuran komite sekolah (sumbangan masyarakat). Sedangkan pembiayaan pendidikan di SMP RSBI terdiri dari: (1) gaji guru dan karyawan; (2) belanja barang; (3) kegiatan pelajar; (4) kegiatan komite sekolah; (5) belanja pemeliharaan; (6) pengadaan pengembangan sekolah; dan (7) pengembangan sekolah sebagai RSBI meliputi: pencapaian akreditasi sekolah, kurikulum berstandar internasional, standar proses pembelajaran, pemenuhan tenaga kependidikan, dan lainnya.

c. Evaluasi Anggaran (Auditing)

Pertanggung jawaban keuangan menurut Loebbecke (1995), sering disebut dengan *auditing*⁶⁵, adalah suatu proses yang ditempuh oleh seorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan M. Guy dkk, memandang *auditing*;⁶⁶ “sebagai suatu proses sistematis yang secara obyektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Thomas H. Jones (dalam Mulyasa), memandang *Auditing*, “merupakan salah satu cara pembuktian dan penentuan apakah penganggaran dan pengelolaan yang dimaksud telah sesuai dengan pelaksanaan dan sesuai dengan tugas yang ditetapkan”⁶⁷. Proses ini meliputi pertanggung jawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. *Auditing* dalam persepektif Fatah termasuk kegiatan pengawasan anggaran bertujuan untuk ”mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat

⁶⁴ Rahmadoni, ”Isu Global Manajemen, 66

⁶⁵ Alvin A. Harens dan James K. Loebbecke *Auditing*. (Jakarta: Erlangga, 1995), 71.

⁶⁶ Guy Dan. C. Wayne Alderman. Alan J. Winters.. *Auditing*. (Jakarta: Erlangga, 2002) 5.

⁶⁷ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003. hlm., 204.

penggunaannya”⁶⁸. Pengawasan anggaran dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan untuk setiap komponen dalam anggaran dengan realisasi anggaran. Proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok (1) memantau (monitoring); (2) menilai; dan (3) melaporkan hasil-hasil temuan, kegiatan/ monitoring dilakukan terhadap kinerja aktual, baik dalam proses maupun hasilnya.

Auditing senantiasa berkaitan dengan masalah keuangan dan mengandung makna bahwa dalam prosesnya perhatian dari pemeriksaan dititikberatkan pada aliran uang yang ada dalam organisasi. Aliran uang tersebut mencakup pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang.

d. Pelaporan penggunaan anggaran

Kegiatan pelaporan penggunaan anggaran merupakan kegiatan yang cukup penting dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Karena menurut Matin, pelaporan penggunaan anggaran pendidikan merupakan bagian dari system pengawasan yang memuat hasil-hasil pelaksanaan rencana dan program pendidikan, masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang dihadapi dan alternatif-alternatif yang digunakan untuk mengatasi permasalahan. Adapun tujuan dari pelaporan penggunaan anggaran adalah untuk:⁶⁹

- 1) Menginformasikan kemajuan, perkembangan nyata atau realisasi fisik dan keuangan baik rutin maupun pembangunan dalam suatu periode tertentu.
- 2) Mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dan program kerja rutin dan pembangunan dengan realisasinya hingga kurun waktu tertentu.
- 3) Mengidentifikasi masalah yang timbul dan mengupayakan alternatif pemecahannya.
- 4) Memberikan informasi yang dibutuhkan pimpinan dan menjadi masukan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan yang tepat.

Kegiatan pelaporan penggunaan anggaran dilakukan secara periodik kepada pihak-pihak yang berhak menerima laporan. Kegiatan ini harus menyertakan atau melampirkan bukti-bukti empirik di setiap transaksi yang dilakukan. Isi laporan harus dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Oleh sebab itu isi laporan harus akurat sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan serta disampaikan tepat pada waktunya. Laporan pertanggungjawaban hendaknya disampaikan secara tertulis dan disajikan dalam sebuah format yang sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi sehingga mudah digunakan dan dapat menampung semua data dan informasi yang sifatnya penting.

⁶⁸ Fattah, *Ekonomi dan*, 65.

⁶⁹ Matin. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, 208.

3. Model Standar Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Islam Terpadu

a. Standar Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Islam Terpadu

Untuk sekolah Islam terpadu, pembiayaan dalam mengelola sekolah mengikuti standar-standar tertentu. Secara umum, pembiayaan SIT adalah sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Pembiayaan pendidikan SIT mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Bab IX Pasal 62 tentang Standar Pembiayaan dan Peraturan Menteri terkait (Permen 69 tahun 2009)
- 2) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya operasional.
- 3) Investasi yang meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap.
- 4) Biaya operasi, yang meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji (gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan jam mengajar, uang lembur, transportasi, konsumsi, tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan, asuransi kecelakaan, minimal JAMSOSTEK, dan tunjangan pajak), tunjangan Hari Raya, pengadaan bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana dan lain sebagainya.
- 5) Biaya personal harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 6) Semua sekolah menetapkan standar pembiayaan dengan tidak menyalahi ketentuan-ketentuan di atas.
- 7) Sumber pembiayaan untuk kegiatan SIT berasal dari sumber-sumber yang bersifat mandiri dan sumber lain yang tidak mengikat.

b. Tujuan Standar proses pengelolaan pembiayaan

Tujuan standar pengelolaan pembiayaan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam tata kelola keuangan sekolah dengan berlandaskan akuntabilitas dan transparan yang dapat dipertanggungjawabkan secara nilai dan moral. Ruang lingkup standar pengelolaan yang dimaksud dalam standar ini pengelolaan pembiayaan kegiatan sekolah yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan realisasinya dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) yang dituangkan dalam bentuk ledger bulanan.

⁷⁰ Zarkasih. *Sekolah Islam Terpadu (SIT): Manajemen dan Model Pendidikan Alternatif di Indonesia*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus 2020), 24

c. Lingkup standar proses pengelolaan pembiayaan

Lingkup standar proses pengelolaan pembiayaan sekolah adalah: 1) Sumber Pendanaan/pembiayaan sekolah; 2) Proses pengelolaan; 3) Pertanggungjawaban Pembiayaan; 4) Pengendalian Pembiayaan; dan 5) Standar Akuntansi. Pengelolaan pembiayaan SIT dituangkan dalam RAPBS yang merupakan bagian sangat penting dan strategis dalam manajemen sekolah, disusun setiap pertengahan periode untuk digunakan dalam periode berikutnya, yang meliputi:

1) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS-1) yang dibuat untuk masa lima tahun. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS-2) yang dibuat untuk masa satu tahun. Dalam menyusun RAPBS, dapat menyertakan: 1) Yayasan; 2) Unsur Pimpinan Sekolah/Madrasah; 3) Perwakilan Guru; 4) Perwakilan Tenaga; 5) Kependidikan/TU; 6) Unsur Komite Sekolah/Madrasah; 7) Perwakilan Peserta Didik; 8) Unsur Tokoh Masyarakat Sekitar; 9) Unsur Alumni; 10) Unsur Pemerintah (Staf Dinas Pendidikan dan Pengawas); 11) Unsur Anggota Profesi, dan 12) Unsur Pengusaha. Dengan Ketetapan, minimal menyertakan poin 1-5 dari unsur diatas yang dibuktikan dengan notulensi dan daftar hadir rapat.

2) Sumber Pembiayaan,

Sumber Pembiayaan, meliputi:

- (a) RAPBS-1 dan RAPBS-2 yang sudah disahkan disebut APBS-1 dan APBS-2 berisi didalamnya program kegiatan yang sudah dirumuskan untuk satu periode kedepan, didalamnya tertuang kegiatan-kegiatan serta anggarannya masing-masing sesuai dengan pos-pos pengeluaran di tingkat sekolah di tingkat sekolah di tingkat sekolah di tingkat sekolah di tingkat sekolah.
- (b) Dari sisi pendanaan (pendapatan) seluruh jenis dan sumber pendapatan yang diperoleh setiap periode harus dituangkan dalam APBS baik yang bersumber dari pemerintah pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, masyarakat maupun unit sekolah dan sumber-sumber lain yang diperoleh secara langsung oleh sekolah.
- (c) Dari sisi belanja sekolah, APBS berisi seluruh jenis pengeluaran untuk kegiatan pendidikan sekolah yang diketahui bersama oleh unsur pimpinan sekolah, Yayasan, Komite Sekolah, dan stakeholder terkait lainnya.

- (d) Kedua sisi anggaran tersebut (pendapatan dan belanja sekolah) dituangkan kedalam suatu neraca tahunan sekolah yang disebut APBS yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapat untuk setiap sumber pendapatan.
- (e) Sumber pembiayaan adalah bentuk pemasukan finansial maupun non finansial yang dapat dikonversikan dan dihitung dalam nilai rupiah.
- (f) Bentuk pemasukan dapat berupa dana pengembangan, dana pendidikan, SPP, dana kegiatan, dan dana infaq atau bantuan pemerintah. Berupa: (1) Dana pengembangan atau dana bangunan adalah dana yang dikenakan pada peserta didik pada awal masuk sebagai peserta didik di sekolah yang bersangkutan. (2) Dana pendidikan adalah dana yang dikenakan pada peserta didik pada awal masuk yang diperuntukkan bagi pengadaan sarana alat media pembelajaran. (3) SPP adalah kewajiban pembayaran bagi peserta didik yang dikenakan setiap bulan. (4) Dana kegiatan sejumlah dana yang besarnya disepakati bersama komite sekolah yang dikenakan kepada peserta didik dan dibayar setiap tahun untuk menunjang pembiayaan kegiatan peserta didik. (5) Infak atau bantuan pemerintah adalah sejumlah dana yang diberikan dari perorangan atau lembaga pemerintah/swasta yang tidak mengikat.

3) Pengelolaan Pembiayaan

Pengelolaan Pembiayaan meliputi unsur-unsur, sebagai berikut:

- (a) Lembaga penyelenggara dan sekolah melakukan kesepakatan tentang juknis pengalokasian dana yang masuk.
- (b) Sistem pengelolaan pembiayaan SIT harus memenuhi standar akuntansi keuangan sekolah dari Kemendiknas dan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang dapat dipertanggungjawabkan dan harus dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan.
- (c) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBS merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja dengan memperhatikan efisiensi, standar analisa biaya, standar harga, keadilan, kepatutan dan kebutuhan (bukan keinginan)
- (d) Pengeluaran dapat dilakukan dengan toleransi +/- 10% jika melebihi maka harus mendapatkan persetujuan pihak yang terkait.
- (e) Unit kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan, pola keuangan operasionalnya harus mandiri dan dapat memberikan kontribusi kepada SIT (dengan sistem mudharabah dan besaran pembagian tergantung kepada kesepakatan bersama)

- (f) Unit kegiatan yang bersifat sosial dan dakwah dibiayai dari sumber dana infaq, sodaqoh para muhsinin dan sumber dana lainnya yang tidak meningkat.
- (g) Pengalokasian dana untuk kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di dalam APBS minimal 50% dari SPP.

4) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Pengelolaan Pembiayaan meliputi unsur-unsur, sebagai berikut:

- (a) SIT mengembangkan prinsip akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan secara berkala minimal per semester diaudit oleh Auditor Internal
- (b) Dalam menjalankan sistem pendanaan sekolah Islam terpadu, bidang keuangan (penerimaan dan pengeluaran) dan akuntansi mengacu kepada RAPBS yang disetujui dan evaluasi usulan investasi menjamin keamanan dalam segala investasi, pengendalian sumber-sumber keuangan, mencatat transaksi unit usaha, pembuatan laporan keuangan.
- (c) Proses pada poin diatas minimal dikerjakan oleh 2 orang untuk memperkirakan keuntungan potensial dan mengevaluasi peluang usaha yang menguntungkan.

Tugas Mahasiswa

- Mengidentifikasi dan mengabstraksikan 4 poin penting dari kajian Pengelolaan Biaya Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu.
 - Konsep Dasar Pengelolaan Biaya Sekolah Islam Terpadu
 - Karakteristik, Prinsip, dan Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan
 - Kategori dan Klasifikasi Pengelolaan Biaya Pendidikan
 - Manajemen Pembiayaan dan Model Standar Pengelolaan Biaya Pendidikan Sekolah Islam Terpadu
- Memukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
- Membatasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
Mata Kuliah :
Metode :
Dok :
NIM :
JURUSAN :

 → Isi /Aplod Foto Resmi Mu

 → Isi Identitas MK & Individu

Resensi/Rangkuman:

A Esensi/ Sub Materi

B Esensi/ Sub Materi

C Esensi/ Sub Materi

D Esensi/ Sub Materi

summary: Maksimal 10 kalimat

Temukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi

Ket: Penulisan maksimal 500Kata

Isi /aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:

Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

- Dari CK tersebut, Wajib dibuatkan Poster untuk Presentasi Harian.

Part: 11

Pengelolaan Hubungan Sekolah-Masyarakat: Sekolah Islam Terpadu

KEMAMPUAN AKHIR PEMBELAJARAN

Setelah mendapat materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami Konsep Dasar Pengelolaan Humas Sekolah Islam Terpadu
2. Mengidentifikasi Konsep Dasar Pengelolaan Humas Sekolah Islam Terpadu
3. Menjelaskan Konsep Dasar Pengelolaan Humas Sekolah Islam Terpadu

POKOK BAHASAN

1. Kosep Dasar Pengelolaan Humas Sekolah Islam Terpadu dan Masyarakat
2. Landasasan Pengembangan Humas Sekolah Islam Terpadu dan Masyarakat
3. Substansi Humas antara Sekolah Islam Terpadu dan Masyarakat
4. Kerangka Kerja Pengebangan Manajemen Humas dalam Menciptakan Sekolah Islam Terpadu Unggul

TOPIK BAHASAN

Pengelolaan hubungan madsarah dan masyarakat merupakan suatu aktivitas komunikasi antara Sekolah Islam Terpadu dan masyarakat dengan cara membantu, saling toleransi, saling memberi, sehingga timbul suatu hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai kalangan terkait dengan meningkatkan mutu pendidikan. Adanya hubungan Sekolah Islam Terpadu dan masyarakat diharapkan dapat memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, mendapatkan bantuan pendidikan guna memecahkan permasalahan dalam masyarakat, serta dapat memberikan kecocokan antara progarm Sekolah Islam Terpadu dan kebutuhan masyarakat, serta mendapatkan kembali anggota-anggota masyarakat yang berdedikasi tinggi. Idealnya kegiatan hubungan masyarakat disusun dalam bentuk program kerja rutin dan program kerja insidentil. Program kerja rutin yaitu kegiatan yang dilakukan sehari-hari secara berkontinu dan kronologis, sedangkan program kerja insidentil yaitu kegiatan yang dilakukan pada periode tertentu. Selain itu, untuk melaksanakan program-program tersebut, dapat menggunakan teknik manajemen humas sebagai bentuk komunikasi antara Sekolah Islam Terpadu dan masyarakat dengan maksud untuk meningkatkan pengertian masyarakat mengenai kebutuhan pendidikan dan untuk mendorong kemauan dan kerjasama masyarakat untuk perbaikan mutu madrasan. Sebaliknya dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat juga diharapkan menggunakan teknik yang memadai. Teknik tersebut diantaranya adalah teknik pertemuan kelompok, teknik tatap muka, observasi dan partisipan, dan surat menyurat dengan berbagai kalangan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Program kerja hubungan sekolah dan masyarakat dalam penyusunannya perlu memperhatikan beberapa tahapan. Pelaksanaan program humas tersebut harus memperhatikan beberapa strategi untuk meningkatkan hubungan yang baik antara Sekolah Islam Terpadu dan masyarakat. Diskusi tentang manajemen hubungan sekolah/madsarah dan masyarakat dalam pengembangan Sekolah Islam Terpadu , masih belum berfungsi dengan baik dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh para manajer dan pelaksana di internal lembaga pendidikan, mungkin pada tingkat pendidikan tersier sudah ada staf atau petugas sendiri di departemen/kementrian. Begitu pentingnya pengelolaan Hubungan Sekolah dan Masyarakat dalam konteks program sekolah secara Terpadu, holistik dan integratif, Roe dan Norton, menempatkannya pada posisi kedelapan setelah "1) Perencanaan program, 2) pengembangan, program; 2) Pengembangan kurikulum; 3) Pengembangan proses belajar mengajar; 4) Pengelolaan sumber daya manusia (guru, konselor, karyawan, dan sebagainya. 5) Pelayanan siswa; 6) Pengelolaan fasilitas; 7) Pengelolaan keuangan/Pembiayaan; 8) Pengelolaan hubungan sekolah-masyarakat; 9) evaluasi program; 10) Perbaikan program berkelanjutan" Itulah Pentingnya pada bagian ini membahas Pengelolaan keuangan/Pembiayaan pendidikan merupakan bagian dari proses penyelenggaraan sekolah.

A. Kosep Dasar Pengelolaan Humas Sekolah Islam Terpadu dan Masyarakat

1. Batasan Pengelolaan Humas Sekolah Islam Terpadu

Frasa "pengelolaan hubungan Sekolah Islam Terpadu dan masyarakat" merupakan penggabungan dari kata pengelolaan hubungan Sekolah Islam Terpadu dan masyarakat. Apa yang dimaksud pengelolaan/manajemen Menurut Ernie, merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan".¹ Dalam penyelesaian tersebut ada tiga faktor yang terlibat yakni adanya penggunaan sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia atau faktor-faktor produk lain, adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengawasan, adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Selanjutnya manajemen hubungan masyarakat yang dikonsepsikan Ruslan (dalam Zulkarnain), adalah "suatu proses dalam menangani suatu perencanaan, pengorganisasian, mengkomunikasikan serta mengkoordinasikan yang secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama"² Senada dengan itu, Anggoro (dalam Iriyanti), memandang hubungan masyarakat adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya³.

Apabila hal itu, dikaitkan dengan Sekolah Islam Terpadu, maka upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara Sekolah Islam Terpadu dengan segenap masyarakat penggunanya. Dengan perkataan lain, lembaga sekolah/Sekolah Islam Terpadu dalam mewujudkan cita-cita suatu pendidikan berkaitan erat dengan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat.

Esensi manajemen hubungan Sekolah Islam Terpadu dan masyarakat (Humas), adalah "suatu aktivitas komunikasi antara Sekolah Islam Terpadu dan masyarakat dengan cara membantu, saling toleransi, saling memberi, sehingga timbul suatu hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai kalangan terkait dengan meningkatkan mutu Sekolah Islam Terpadu"⁴

¹Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 6.

²Nasution, Z. *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan*. (Malang: UMM-2010),11

³Iriyanti, D. R. *Peran Humas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan di perusahaan daerah air minum (pdam) tirtamarta Yogyakarta*: Tesis Yogyakarta: Fakultas Ekonomi. UNY, 2014), 14

⁴Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2008). 208

2. Tujuan Pengelolaan Humas Sekolah Islam Terpadu

Tujuan dari adanya hubungan sekolah dan masyarakat tersebut adalah untuk:⁵

- a. Memajukan kesejahteraan masyarakat, mendapatkan bantuan madrasah dalam memecahkan permasalahan dalam masyarakat,
- b. Dapat memberikan kecocokan antara program Sekolah Islam Terpadu dengan kebutuhan masyarakat,
- c. Mendapatkan kembali anggota-anggota masyarakat yang berdedikasi tinggi;

3. Manfaat yang diharapkan Pengelolaan Humas Sekolah Islam Terpadu

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan hubungan sekolah/madrasah dengan masyarakat, meliputi beberapa hal:⁶

- a. Mengatur hubungan sekolah dengan orang tua siswa;
- b. Memelihara hubungan baik dengan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3)/Komite Sekolah Islam Terpadu ;
- c. Memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi sosial.
- d. Memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacam-macam teknik atau sarana komunikasi, seperti melalui majalah, surat kabar, atau mendatangkan narasumber.

Dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu lembaga pendidikan. Menurut Zulkarnain, dalam Nur Hakim, humas memiliki fungsi-fungsi yang cukup relevan dalam menghadapi perubahan zaman, antara lain: ⁷

- a. Mampu sebagai motivator dalam menyampaikan komunikasi secara langsung (komunikasi tatap muka) dan tidak langsung (melalui media pers) kepada pimpinan lembaga dan publik intern (dosen/guru, karyawan, dan mahasiswa/ siswa).
- b. Mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mempublikasi lembaga pendidikan. Dalam hal ini humas bertindak sebagai pengelola informasi kepada publik intern dan publik ekstern, seperti: menyampaikan informasi kepada pers dan promosi.
- c. Menciptakan suatu citra yang positif terhadap lembaga pendidikannya.

⁵ Benty, D. N., & Gunawan, I. *Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat*. (Malang: UMM Press. 2015), 9.

⁶ Suryosubroto, B. *Manajemen Pendidikan di Sekolah* Cet:6. (Jakarta; Rineka Cipta, 2012), 19

⁷ Muhammad Nur Hakim "Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Dlanggu Mojokerto)" *Jurnal Nidhomul Haq*, 4: 1 (Juli, 2019), 129.

4. Peran Humas Sekolah dan Masyarakat

Perkembangan humas yang berhubungan dengan perannya, baik secara praktis maupun profesional dalam lembaga pendidikan sebagai salah satu kunci dalam memahami fungsi humas dan komunikasi lembaga terhadap publiknya. Peran *public relations*/humas dalam suatu lembaga dapat terbagi dalam empat kategori, yaitu:⁸

a. Penasihat ahli (expert prescriber)

Seorang pakar humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Hubungan praktisi pakar humas dengan manajemen lembaganya bagaikan hubungan antarpendidik dan peserta didiknya, dalam artipihak manajemen bersikap pasif untuk menerima atau bahkan mempercayai apa yang telah disarankan oleh pakar humas tersebut dalam upaya memecahkan dan mengatasi persoalan *public relations* yang tengah dihadapi oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.

b. Fasilitator komunikasi (communication fasilitator)

Praktisi humas bertindak sebagai komunikator atau mediator dalam upaya membantu pihak manajemen lembaga dalam hal mendengar apa yang diperlukan oleh publiknya. Dipihak lain, dia juga dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak.

c. Fasilitator proses pemecahan masalah (problem solving process fasilitator)

Peran praktisi humas dalam proses menyelesaikan permasalahan dalam bidang humas ini merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan lembaga pendidikan baik sebagai penasihat (adviser) hingga mengambil keputusan dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional.

d. Teknisi komunikasi (communication technician)

Peran teknisi komunikasi menjadikan praktisi humas sebagai wartawan yang nantinya menyediakan layanan komunikasi secara teknis. Sistem komunikasi dalam sebuah lembaga tergantung dari masing-masing bagian, yaitu secara teknis komunikasi, baik media atau arus komunikasi yang digunakan dari tingkat pimpinan dan bawahan tentu berbeda dari tingkat bawahan ke tingkat atasan.

⁸ Amrullah Hasbana, "Perpustakaan Sebagai Lembaga Komunikasi Organisasi Kampus," *Jurnal Al-Maktabah*. 13:1 (Juli, 2014): 54.

Dalam konteks itu, Mulyasa, memandang bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pribadi peserta didik di sekolah. Menurutnya, sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Hubungan yang telah terbangun dengan baik antara sekolah dan masyarakat menurut mulyasa (dalam Sunarto) akan dapat membentuk:⁹

1. Saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja;
2. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing;
3. Kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah

B. Landasan Pengembangan Humas Sekolah Islam Terpadu dan Masyarakat

1. Landasan Yuridis Penyelenggaraan dan Substansi Manajemen Humas

Strategi Humas dalam meningkatkan mutu di Sekolah Islam Terpadu sangat penting, karena pendidikan merupakan organisasi sosial, yang mana secara langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Sekolah Islam Terpadu sebagai suatu lembaga pendidikan baik dan berkualitas tentunya adalah lembaga pendidikan yang dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan bekerjasama dengan masyarakat. Pendidikan harus memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan, maka dalam hal ini praktisi Humas dalam lembaga harus memberikan informasi tentang kualitas pendidikannya berdasarkan kenyataan yang ada. Kualitas pendidikan diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, dapat dilihat dari aspek delapan standar nasional pendidikan yang ada pada dan Standar Nasional Pendidikan

a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

Madrasah Diniyah sebagai pendidikan Non Formal, Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26;

- 1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi wargamasyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

⁹Sunarto, "Studi Humas Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Malang" Jurnal Progresiva. 4:1, (Agustus, 2010), 74

- 2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- 3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- 4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.¹⁰

Pada Pasal 45, ayat:

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

b. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Bab II Pasal 4 yang memuat tentang: “adanya tujuan pendidikan nasional. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut maka sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai”.¹¹

Standar nasional pendidikan (SNP) yang mencakup standar isi, proses, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan, pembiayaan, kompetensi kelulusan serta penilaian. Dengan berorientasi pada standar nasional pendidikan, maka Sekolah Islam Terpadu akan memiliki tugas yang jelas untuk mencapai standar nasional pendidikan tersebut. Perlu ditekankan bahwa hubungan masyarakat sangat berkaitan dengan mutu yang ada pada lembaga pendidikan, hubungan masyarakat harus mampu memberikan informasi yang sifatnya kekinian.

2. Landasasan Historis Manajemen Humas Pendidikan

Secara pasti belum ditemukannya literatur yang menjelaskan kapan sebenarnya humas lembaga pendidikan itu dikenal di lingkungan lembaga? Namun, seiring dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun

¹⁰Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

¹¹Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2005 *tentang Standar Nasional Pendidikan* Bab II Pasal 4

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikenal jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal yang diselenggarakan melalui tatap muka dan atau jarak jauh. Jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs), pendidikan menengah (SMA/MA, SMK/MAK), dan pendidikan tinggi (Sekolah Tinggi, Institut, Perguruan Tinggi, Universitas). Sedangkan jalur pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan sejenisnya.

Sementara pendidikan informal terdiri atas pendidikan keluarga dan lingkungan belajar secara mandiri. ”Artinya humas lembaga pendidikan mulai dikenal dan diperkenalkan di lembaga pendidikan pada masa-masa diundangkannya undang-undang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia dengan adanya sebutan wakil kepala sekolah bidang humas”.¹²

3. Landasasan Normatif Manajemen Humas Sekolah Islam Terpadu

Badasarasar pada beberapa peraturan dan perundangan telah dipaparkan di atas, baik pendidikan khusus maupun pendidikan layanan khusus semuanya harus dilaksanakan dengan pola-pola yang dapat dipertanggungjawabkan dan diharapkan dapat menyentuh mereka semua yang membutuhkan layanan pendidikan khusus. Dengan alasan bahwa pendidikan adalah organisasi sosial yang mau tidak mau, siap tidak siap harus mengikuti setiap perkembangan kehidupan secara global maupun lokal, maka unsur-unsur dalam pelaksanaan penunjang pendidikan juga harus memberikan perkembangan dan informasi yang sifatnya selalu berkembang. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh setiap lembaga pendidikan yang ada, guna membantu masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan di lingkungannya. Karena pendidikan dapat berjalan dengan baik dengan dukungan masyarakat yang baik pula. Dasarnya diawali dari saling mengenal, saling menentahii (silaturahmi).

a. Saling Mengenal

Al-Qur’an sebagai sumber ilmu tentu banyak memberikan penjelasan yang berkaitan dengan tugas praktisi Humas. Seperti dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujuraat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹²Juhji, dkk. *Manajemen Mumas pada Lembaga Pendidikan*, (Bandung, Bakti Persada, 2020),7.

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, kami telah, Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha Mengetahui dan Maha Teliti”. (QS. Al-Hujuraat [49]: 13).

Selain dari aspek yuridis, dasar pelibatan masyarakat dalam pendidikan dapat ditinjau dari dua pangkal, yaitu:

b. Kesamaan Tanggung Jawab

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok dan individu-individu yang berusaha menyelenggarakan pendidikan atau membantu usaha-usaha pendidikan. Dalam masyarakat terdapat berbagai organisasi penyelenggara pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi kepramukaan, organisasi politik, organisasi sosial, organisasi olahraga, atau organisasi kesenian yang bergerak dalam usaha pendidikan. Dalam masyarakat juga terdapat individu-individu atau pribadi-pribadi yang bersimpati terhadap pendidikan di sekolah. Dikisahkan Al-Qur'an nama Luqman sebagai masyarakat, sosok orang tua, disebut dalam surah Luqman: 12.

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِي أَنْ شَكَرْتَهُ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya: ”Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu: Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Luqman [31]: 12)

Dalam ayat 12 di atas diterangkan bahwa Allah telah memberikan hikmah, akal,paham dan memberikan petunjuk untuk memperoleh ma'rifat yang benar kepada Luqman. Oleh karena itu, Luqman menjadi seorang yang hakim (mempunyai hikmah). Ini memberikan pengertian bahwa ajaran Luqman yang disampaikan kepada anaknya berupa ajaran-ajaran hikmah. Orang yang mensyukuri nikmat Allah, sebenarnya dia bersyukur untuk kepentingan dirinya sendiri, sebab Allah akan memberikan pahala yang banyak dan melepaskan dari siksa.¹³

Selanjutnya disebut juga dalam surah Luqman: 13.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

¹³M. Abdul Ghofar dan Abu Ihsan Al-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2008), 3260

Terjemahnya: Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. (QS. Luqman [31]: 13).

Pada ayat 13 ada kata *ya'izhuhu* (يعظه) yang terambil dari kata *wa'zd* (وعظ) yaitu nasihat menyangkut berbagai kebajikan dengan cara yang menyentuh hati. Luqman memulai nasihatnya dengan seruan menghindari syirik sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud Allah yang Esa.¹⁴ Karena itu, dalam mendidik anaknya, Luqman menempuh cara yang amat baik, yang bisa meluluhkan hati anaknya sehingga mau mengikuti nasihat-nasihat yang diberikan

c. Kesamaan Tujuan

Sekolah menghendaki agar para siswanya kelak menjadi manusia pembangun yang Pancasila. Masyarakat juga menghendaki agar semua warga negara menjadi manusia pembangun yang Pancasila. Individu yang Pancasila diharapkan datang dari sekolah. Oleh karena itu, antara sekolah dan masyarakat harus mempunyai kesamaan tujuan. Pada Akhir Surah al-Hujurat ayat 13 yang membedakan manusia yang satu dengan yang lain yakni ketakwaan.

.... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:”.....Sungguh, yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti”. (QS. Al-Hujuraat [49]: 13).

Kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. memiliki dimensi spiritual dan dimensi sosial. Yang menjadikan Islam bukan hanya memiliki dimensi hablu minallah, tetapi dimensi sosial menjadi bagian yang sama pentingnya bagi Islam.

Secara empiris dan fundamental, keterbatasan instansi pendidikan secara alamiah menyebabkan perlunya pelibatan masyarakat. Dengan adanya bantuan masyarakat maka dapat memperingan tugas lembaga dalam meningkatkan mutu pendidikan. Lembaga juga memerlukan adanya dukungan moral dan masukan serta harapan masyarakat sekaligus kontrol atas kinerja dan produktivitasnya.

¹⁴M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 127

4. Aplikasi Humas dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Aplikasi Humas dalam Dunia Pendidikan Pendidikan adalah salah satu sektor publik yang bersifat strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan. Sejatinya keberadaan pendidikan tidak dapat terpisah dari masyarakat. Kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pendidikan membutuhkan pengertian dan dukungan publik. Begitu juga dengan program-program sekolah, yang tidak dapat dijalankan dengan optimal tanpa adanya dukungan dari stakeholder terkait. Oleh karena itu fungsi Public Relations dianggap penting dalam pendidikan, setidaknya mencakup tujuh point di bawah ini: ¹⁵

- a. Mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah.
- b. Untuk dapat menetapkan, bagaimana haean masyarakat terhadap sekolah dan apa harapan-harapannya mengenai tujuan pendidikan di sekolah.
- c. Untuk memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat kepada sekolahnya, baik finansial, materiil maupun moril.
- d. Menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas pendidikan.
- e. Mengikutsertakan masyarakat secara kooperatif dalam usaha memecahkan persoalan pendidikan dan meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat.
- f. Memperkokoh tujuan serta peningkatan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat.
- g. Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Dengan demikian fungsi humas pada pendidikan erat sekali kaitannya dengan peran serta masyarakat dalam pendidikan atau yang selanjutnya disebut juga dengan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

C. Substansi Humas antara Sekolah Islam Terpadu dan Masyarakat

1. Bentuk dan Jenis kegiatan Humas Sekolah Islam Terpadu dan Masyarakat

Purwanto dalam (Sunarto), mengkategorikan hubungan Sekolah Islam Terpadu dan masyarakat dengan dalam 3 aspek, yaitu: ¹⁶

¹⁵Nurtanio Agus P, & Rahmania Utari, *Humas Pendidikan*. (Yogyakarta: FIP Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 7

¹⁶Sunarto, "Studi Humas, 75

a. Apkek Jenis dan Bentuk kegiatan Hubungan

Jenis dan Bentuk kegiatan Hubungan ini, antara lain;

1. Hubungan edukatif hubungan edukatif sebagai hubungan kerja sama dalam hal mendidik/murid, antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga.
2. Hubungan cultural; Adapun hubungan kultural ia artikan sebagi usaha kerja sama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada.
3. Hubungan institusional; Sedangkan hubungan institusional diartika sebagai hubungan kerja sama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerja sama antara sekolah dengan sekolah-sekolah lain, dengan kepala pemerintahan setempat, jawatan penerangan, jawatan pertanian, perikanan dan peternakan, dengan perusahaan-perusahaan pemerintah maupun swasta, yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya.

b. Apkek Kegiatan Humas

Dan dilihat dari aspek kegiatan yang dilaksanakan untuk membangun dan mengembangkan hubungan itu, maka kegiatan hubungan masyarakat ini dapat dibedakan kedalam beberapa jenis yang masing-masing jenis dapat meliputi beberapa bentuk, yaitu:

1. Jenis tulisan; Hubungan masyarakat jenis ini dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu: (a) mengadakan buletin sekolah atau majalah, (b.)menyampaikan lembar informasi kepada masyarakat dalam bentuk liflet atau yang semisalnya, (c) catatan berita gembira atas perkembangan harian peserta didik kepada orang tua, dan (d) catatan berita masalah peserta didik di sekolah untuk orang tua.
2. Jenis lisan; Hubungan masyarakat dalam jenis ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: (a) kunjungan rumah para orang tua peserta didik. (b) panggilan orang tua ke sekolah, dan (c) pertemuan-pertemuan formal orang tua dengan pihak sekolah seperti: rapat musyawarah untuk pengembangan sekolah.
3. Jenis peragaan; Dalam jenis ini kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kurikuler dan ekastra kurikuler peserta didik, serta aktivitas para guru baik di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat.

c. Aspek Penanganan dan Pengembangan Opini publik

Kegiatan hubungan masyarakat dalam jenis ini dapat berbentuk open house, mengundang masyarakat dalam kegiatan masive, seperti pengajian dan seminar, bakti sosial, pameran dan semisalnya. Muslim, dkk., dikutip Subakir, 2001, (dalam Juhji, dkk.); mengemukakan bahwa

“bentuk-bentuk kegiatan tersebut di atas dengan bahasa istilah berbeda. Dia menggunakan dalam bentuk kata kerja hingga menjadikannya sebagai cara untuk dapat menjalankan dan mengembangkan hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat”. Dikatakan bahwa bergagai cara yang dapat digunakan adalah:¹⁷ (1) berkirim surat, (2) bersilaturahmi, (3) terlibat dalam kegiatan masyarakat, (4) datang berkunjung di tempat atau kegiatan masyarakat, (5) bertelepon, (6) mengundang masyarakat dalam acara rapat yang diselenggarakan sekolah, (7) menyertakan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, dan (8) mengadakan pameran.

2. Program-program hubungan Sekolah Islam Terpadu dan Masyarakat

Apabila program hubungan Sekolah Islam Terpadu Diniayah dan Masyarakat ingin survive. Secara teortis, perencanaan program humas selaras dengan pandangan Benty dan Gunawan;¹⁸ sejatinya program kerja humas yang hendaknya disusun melalui program kerja humas dalam program rutin (jangka pendek) dan program kerja insidental (jangka panjang) yang dilaksanakan secara terus menerus dan kronologis.

Program-program hubungan sekolah dan masyarakat tersebut berkaitan erat dengan perencanaan untuk mewujudkan program tersebut dengan efektif dan efisien. Perencanaan program-program humas yang di bedakan menjadi 3 antara lain:¹⁹ (a) perencanaan program jangka pendek atau program harian merupakan program yang dilaksanakan setiap hari seperti rapat komite sekolah, pertemuan orangtua, sholat berjamaah, sholat dhuha, dan mengaji di pondok pesantren bersama warga pondok dan masyarakat, (b) perencanaan program jangka menengah yaitu dilakukan pada pertengahan semester atau pada hari besar agama seperti halal bihalal di Pondok Pesantren Darussalam sekaligus di rumah masyarakat, peringatan hari raya qurban, Muwadda'ah, zakat fitrah, santunan anak yatim, prakerin, dan menjalin hubungan kerjasama, dan (c) perencanaan program jangka panjang yaitu keikutsertaan sekolah dalam kegiatan syukuran desa maupun pesantren, kegiatan pesantren, dan mengaktifkan sumber potensial yang ada.

3. Teknik Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Apabila program hubungan Sekolah Islam Terpadu Diniayah dan Masyarakat ingin survive. Secara teortis, teknik hubungan madrasah dan masyarakat yang disarankan Mulyono, yaitu:²⁰ ”rapat bulanan pengajian umum, pekan perkenalan atau orientasi siswa baru, upacara

¹⁷Juhji, dkk. *Manajemen Mumas pada Lembaga Pendidikan*, (Bandung, Bakti Persada, 2020), 57

¹⁸Benty, D. N, & Gunawan, I. *Manajemen Hubungan*, 147

¹⁹Subairi, “Kerangka Kerja Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Menciptakan Madrasah Unggul” *Kelola: Journal of Islamic Education Management*. 4: 2 (Oktober 2019), 105

²⁰Mulyono, “Teknik Manajemen Humas Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam”, *Jurnal Uhumuna*, 15: 1 (Oktober, 2011), 181

bendera, dakwah keliling, kegiatan olahraga, pramuka atau camping atau perkemahan, kegiatan cinta alam, pameran, menyebarkan brosur, memasang spanduk, iklan di radio atau TV atau medi cetak, pertemuan wali murid, pertunjukan, menghadiri undangan atau pertemuan dan sebagainya”.

Program humas dalam pelaksanaannya diperlukan beberapa teknik humas yang meliputi: ²¹ teknik rapat, pertemuan orangtua, pameran pendidikan, teknik dokumentasi, pencetakan banner, kalender, brosur, dan melibatkan peserta didik untuk turun langsung dijalan untuk mempromosikan sekolah. Teknik manajemen hubungan sekolah dan masyarakat juga memerlukan media yang digunakan untuk mempublikasikan sekolah agar dikenal oleh masyarakat. Media yang digunakan diantaranya adalah melalui kalender, media sosial (*website, whatsapp, facebook, email*), brosur, reklame, dan *banner*.

4. Pola Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Apabila pola hubungan Sekolah Islam Terpadu Diniayah dan Masyarakat ingin survive. Secara teortis, Umar mengungkapkan bahwa:²²

- a. Pola relasi yang serasu antara sekolah dan masyarakat akan menciptakan hal-hal sebagai berikut: (1) Menimbulkan sikap A saling pengertian antara pihak sekolah dan masyarakat; (2) Adanya kegiatan saling membantu; (3) Adanya kerjasama yang erat dari berbagai pihak yang bertanggungjawab atas kesuksesan usaha pihak orang lain”.
- b. Tugas pokok atau beban kerja suatu sekolah tentang hubungannya dengan masyarakat antara lain: (1) Memberikan informasi dan menuangkan gagasan kepada masyarakat yang membutuhkannya; (2) Mendukung kepala sekolah dengan pekerjaan tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukannya; (3) Mendukung kepala sekolah menyiapkan bahan- bahan mengenai persoalan dan penjelasan yang akan disampaikan itu memikat reaksi masyarakat pada saat tertentu; (4) objektif dan serasi; (5) Memperhatikan opini masyarakat.

Untuk membentuk relasi yang serasi antara Sekolah Islam Terpadu dan masyarakat dengan pola humas sebagai berikut:²³ (1) Adanya hubungan edukatif pihak sekolah dan masyarakat; (2) Membangun relasi yang serasi dengan cara memadukan kegiatan antara masyarakat

²¹Subairi, “Kerangka Kerja, 107

²²Umar, M. 2016. *Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016), 26-27

²³Subairi, “Kerangka Kerja Manajemen, 108

dengan sekolah; (3) Berpartisipasi pada setiap kegiatan adat istiadat desa setempat, (4) Menciptakan hubungan kerjasama yang saling bersinergi antara sekolah dengan industri dan perusahaan dengan sama-sama merasakan keuntungannya; (5) Memperhatikan opini masyarakat; dan (6) Mengadakan evaluasi bersama dengan berbagai pihak.

D. Kerangka Kerja Pengebangan Manajemen Humas dalam Menciptakan Sekolah Islam Terpadu Unggul

Membangun humas di lembaga Sekolah Islam Terpadu memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan Sekolah Islam Terpadu dalam meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan ini, perlu untuk menyampaikan informasi secara akurat dan jelas kepada masyarakat, baik hubungan di dalam lembaga Sekolah Islam Terpadu maupun di luar lembaga yaitu masyarakat, guna dapat menimbulkan saling pengertian dan niat baik antara masyarakat dengan Sekolah Islam Terpadu. W. Emerson Reck (dalam Mulyono), menjelaskan bahwa "humas adalah kelanjutan dari proses penetapan keputusan, pemilihan sikap pelayanan yang disesuaikan dengan kepentingan seseorang atau golongan agar orang atau lembaga yang mendapatkan kepercayaan dan niat baik dari mereka. Penerapan kebijakan, layanan dan sikap, untuk memastikan pemahaman dan penghargaan terbaik".²⁴

Ada beberapa tahapan dalam mendukung kerangka kerja manajemen hubungan masyarakat dalam menciptakan lembaga pendidikan sekolah/madrasah yang unggul, antara lain, sebagai berikut:²⁵

1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan merupakan keharusan bagi setiap kegiatan manajemen hubungan masyarakat, tanpa perencanaan maka kegiatan atau perencanaan akan mengalami kendala dan bahkan kegagalan. Perencanaan adalah estimasi kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan madrasah tersebut. Tahap awal dalam proses perencanaan berupa penerapan tujuan dan standar, menentukan aturan dan prosedur, serta membuat rencana dan prediksi akan apa yang akan terjadi, yaitu.²⁶

²⁴Mulyono, 'Teknik Manajemen Humas Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam', *Jurnal Ulumuna*, 15: 1 (Oktober, 2011), 168

²⁵Subairi, "Kerangka Kerja Manajemen, 109

²⁶Muhammad Nur Hakim, 'Mengembangkan Lembaga Pendidikan (Studi Kasus Di SMK Negeri 1 Dlanggu Mojokerto)', *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4.1 (Juni, 2019), 125.

- a. Membina hubungan harmonis dengan masyarakat dalam lingkungan lembaga madrasah, seperti tenaga kerja, tenaga pendidik, dan peserta didik, dan menjalin hubungan dengan masyarakat luar di lingkungan lembaga Sekolah Islam Terpadu , seperti orang tua peserta didik, masyarakat dan di luar lembaga lembaga pendidikan.
- b. Membina dan mempererat komunikasi dua arah baik ke lingkungan lembaga Sekolah Islam Terpadu dan masyarakat luar dengan menyampaikan informasi dan mengumumkan hasil penelitian dan berbagai keputusan- keputusan yang telah disetujui pimpinan.
- c. Menentukan dan mengkaji suatu pandangan atau berbagai diskusi baik yang ada dilembaga Sekolah Islam Terpadu ataupun yang ada dimasyarakat sekitar.
- d. Mampu mendengar keinginan atau aspirasi yang ditemukan di masyarakat.
- e. Berperilaku terampil, cekatan dalam mengartikan keputusan pimpinan dengan baik.

2. Actuating (Pengaktifan)

Pengaktifan merupakan tindakan menjalankan dan mengupayakan agar setiap program dilembaga Sekolah Islam Terpadu dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. *actuating* yang dilakukan ialah untuk mengaktifkan seluruh pelaksana Sekolah Islam Terpadu melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik.²⁷

Niat baik dan kerjasama dapat tercipta karena ada komitmen yang dilakukan oleh humas lembaga madrasah untuk menanamkan saling kepercayaan dan pengertian kepada masyarakatnya. Kemudian diambil tindakan nyata lembaga untuk mencapai komitmen tersebut. Kiryanto mengutip dari Suryosubroto bukunya “*Humas dalam Dunia Pendidikan*”, ada dua kegiatan hubungan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh Sekolah Islam Terpadu yakni:²⁸

a. Kegiatan Internal

Kegiatan ini merupakan pemberian informasi kepada warga Sekolah Islam Terpadu yang diminta, yaitu pendidik, tenaga kependidikan dari semua siswa. Aktivitas internal dapat dibedakan dengan aktivitas langsung (tatap muka) dan tidak langsung (melalui media tertentu).

²⁷Murni, ‘Konsep Manajemen Humas Pada Lembaga Pendidikan’, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islamjemen*, 1.1 (April, 2003), 26–45.

²⁸Kiryanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising 21*. (Yogyakarta: Media Akademi, 2006), 21.

Kegiatan yang bersifat langsung, misalnya: upacara Sekolah Islam Terpadu , pertemuan majelis guru, rekreasi bersama, penjelasan lisan pada berbagai kesempatan. Sedangkan kegiatan tidak langsung, misalnya: penyampaian informasi melalui surat edaran, penggunaan papan buletin di Sekolah Islam Terpadu , penyelenggaraan majalah dinding, penerbitan buletin Sekolah Islam Terpadu untuk dibagikan kepada warga, iklan/ pemberitahuan khusus melalui media massa pada kesempatan tertentu dan lainnya kegiatan tatap muka yang tidak rutin seperti seni pertunjukan, tutup tahun.

b. Kegiatan keluar (Eksternal)

Kegiatan ini saling berkorelasi yang ditujukan kepada masyarakat di luar warga Sekolah Islam Terpadu. Ada dua hal yang bisa dilaksanakan, kegiatan ini bisa langsung (bertemu muka) dan tidak langsung.

- a. Kegiatan tatap muka, misalnya rapat bersama dengan pengurus Yayasan, diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat.
- b. Kegiatan eksternal tidak langsung adalah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat melalui media tertentu, misalnya: informasi melalui TV, penyebaran informasi melalui radio, penyebaran informasi melalui media cetak, pameran Sekolah Islam Terpadu dan diterbitkannya sendiri diterbitkan majalah atau buletin Sekolah Islam Terpadu dengan maksud ditunjukkan kepada publik di luar Sekolah Islam Terpadu .

Situasi ini merupakan manifestasi dari dukungan masyarakat terhadap efisiensi dan efektifitas pelaksana kerjasama yang diberikan secara sadar dan suka rela. Hubungan seperti itu timbul sebagai hasil kerja hubungan dengan masyarakat yang telah memberikan informasi sehingga pihaknya memahami pentingnya eksistensi organisasi Sekolah Islam Terpadu tersebut bagi masyarakat. Ada beberapa beban kerja hubungan masyarakat dalam menciptakan Sekolah Islam Terpadu unggul diantaranya:²⁹

- 1) Memberikan informasi dan menyampaikan ide dan gagasan kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- 2) Membantu pimpinan dengan tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukannya;
- 3) Membantu para pemimpin dalam menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah dan informasi yang akan diberikan kepada orang-orang yang menarik pada waktu tertentu;
- 4) Membantu para pemimpin untuk mengembangkan rencana dan menindak-lanjuti kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kepada

²⁹Sobry Sutikno, *Manajemen Pendidikan, Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan Yang Unggul (Tinjauan Umum Dan Islami)*. (Lombok: Holistica, 2012), 94.

masyarakat, sebagai konsekuensi dari komunikasi timbal balik dengan orang luar untuk menumbuhkan harapan menyempurnakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Sekolah Islam Terpadu.

Pola hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat sebagai hasil kerja sama akan menciptakan hal-hal berikut:

- 1) Adanya saling pengertian antara Sekolah Islam Terpadu dengan pihak masyarakat,
- 2) Adanya kegiatan saling membantu, karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peran masing-masing,
- 3) Adanya kerja sama dengan erat masing-masing pihak dan merasa ikut bertanggung jawab atau suksesnya usaha pihak orang lain.

Untuk melaksanakan pola kerja tersebut harus dilakukan dengan berdasarkan pada konsep berikut:

- 1) Objektif dan serasi. Semua informasi atau pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat harus merupakan suatu ritual dari sekolah yang bersangkutan.
- 2) Organisasi yang tertib dan disiplin. Hubungan sekolah dengan masyarakat hanya akan berfungsi bilamana tugas-tugas pokok dengan organisasi sekolah berjalan secara lancar dan efektif serta memiliki hubungan kerja kedalam dan luar yang efektif pula.
- 3) Hubungan harus bersifat mendorong timbulnya keinginan untuk ikut berpartisipasi dan ikut memberikan dukungan secara wajar dari masyarakat.
- 4) Kontinuitas informasi. Hubungan masyarakat harus berusaha agar masyarakat memperoleh informasi secara kontinu sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Memperhatikan opini masyarakat. Respon yang timbul dikalangan masyarakat sebagai efek back dari informasi yang disampaikan harus mendapat perhatian yang sebenarnya dan sepenuhnya.

Pelaksanaan program-program humas tersebut harus memperhatikan beberapa strategi untuk meningkatkan hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat. Contohnya seperti mengatasi persoalan yang timbul antara sekolah dan masyarakat juga merupakan cara agar dapat membangun hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat. Jika terjadi permasalahan dalam menjalin komunikasi, sekolah atau masyarakat dapat mengulangi informasi yang telah disampaikan apabila terdapat perselisihan antara kedua belah pihak. Tindakan tersebut

merupakan suatu cara yang penting untuk mengantisipasi rasa berburuk sangka diantara kedua belah pihak dengan informasi yang sudah di sampaikan.³⁰

Partisipasi yang efektif hubungan masyarakat dan Sekolah Islam Terpadu sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Pertumbuhan dan perkembangan kognitif anak didik di Sekolah Islam Terpadu sangat ditentukan oleh hal-hal berikut:³¹

- 1) Adanya pengaruh sangat kuat dari dorongan keluarga dan masyarakat terhadap Sekolah Islam Terpadu .
- 2) Adanya sikap positif dari anak didik terhadap keluarga dan rumah tangga.
- 3) Adanya peranan orang tua sebagai pengembang yang menjauhkan sikap negatif terhadap eksistensi Sekolah Islam Terpadu dan pendidikan, serta kepedulian dan perasaan tertarik terhadap kurikulum Sekolah Islam Terpadu danguru.
- 4) Peranan dan tokoh Masyarakat dalam menciptakan hubungan masyarakat (humas) dengan Sekolah Islam Terpadu

3. Controlling (Pengendalian)

Controlling merupakan upaya perbaikan dan pengawasan salah satu kegiatan untuk memahami di lembaga madarasah. Pengawasan umum dengan dukungan pengontrolan, membina dan pelurusan sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan secara sistimatis. Pengawasan atau mengendalikan merupakan kontrol atas jalannya pelaksanaan program. Tanpa adanya kontrol atas program, kesinambungan antar tahap tidak dapat berjalan dengan baik. Hal itu, diperlukan alat Kontrol melalui Prosedur Operasional.

Prosedur Operasional Sebagai alat Kontrol Humas di Sekolah Islam Terpadu dalam upaya mewujudkan kualitas mutu pendidikan melalui bidang kehumasan dirancang agar membentuk partisipasi dari masyarakat untuk mendukung arah mutu pendidikan yang lebih baik, rancangan tersebut dibentuk dengan mengadakan kerjasama mutualisme dengan pihak lingkungan internal dan eksternal sekolah. Terdapat dua program kerja dalam prosedur hubungan masyarakat yaitu:³²

- 1) Bentuk kegiatan dari program umum meliputi kemitraan dengan instansi pemerintah dan wali murid.
- 2) Bentuk kegiatan dari program khusus meliputi pelaksanaan rapat koordinasi, kerjasama, melakukan kunjungan dan pemberian bantuan

³⁰ Benty dan Gunawan, *Manajemen Hubungan*, 132

³¹ Subairi, "Kerangka Kerja Manajemen, 114.

³²Nasution, Z. *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan*. (Malang: UMM-.2010), 78

kepada warga sekolah. bentuk-bentuk program tersebut guna mempermudah warga sekolah dan masyarakat dalam mengakses informasi sekolah.

Untuk hal itu, Nasution, mengisyaratkan bahwa dalam meningkatkan hubungan masyarakat membutuhkan strategi sebagai cara alternatif untuk memaksimalkan tujuan yang direncanakan. Strategi yang telah dirumuskan dilaksanakan kemudian dievaluasi untuk menentukan strategi yang tepat selanjutnya.³³ Manajemen humas yang diterapkan dengan baik dapat menciptakan mutu sekolah yang berkualitas, dengan pengadaan komunikasi serta jejaring yang baik dengan masyarakat.³⁴

Prosedur operasional hubungan masyarakat di sekolah sebagai kontrol program kerja kehumasan akan berfungsi mengendalikan kegiatan:³⁵

- 1) Pengaturan koordinasi pertemuan kepala sekolah dengan komite dan masyarakat dalam mensosialisasikan citra sekolah serta pengadaan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan;
- 2) Mengkoordinasikan pertemuan unsur sekolah dengan orang tua peserta didik untuk pengambilan buku hasil raport siswa;
- 3) Mengatur strategi hubungan kerjasama unsur sekolah seperti; perkemahan, gotong royong, *visit school*, serta kegiatan perlombaan; dan
- 4) Mengatur koordinasi hubungan kerjasama antar lembaga pendidikan terhadap *feedback* penyelenggaraan program kerja sekolah.

Di sisi lain, dalam menjalankan prosedur operasional hubungan masyarakat terdapat beberapa prinsip yaitu keterpaduan, berkesinambungan, menyeluruh, sederhana, konstruktif, kesesuaian dan fleksibel. Ruang lingkup pengelolaan hubungan masyarakat terdapat pola manajemen yang dijalankan baik secara intern maupun ekstern.³⁶ manajemen membutuhkan koordinasi yang baik dan harmonis antar sesama dalam upaya bersama mencapai tujuan dari lembaga pendidikan tersebut.

³³Nasution, *Manajemen Humas*, 79

³⁴Rubinstein, S.A., & McCarthy. *Teachers Union and Management Partnership: How Working Together Improving Student Achievement*. (Washington DC: Center for American Progress. 2014), 9

³⁵Rachmat Satria, dkk. "Peningkatan Mutu Sekolah melalui Manajemen Hubungan Masyarakat" *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7:2 (September 2019), 205

³⁶Lemahieu, P.G., Grunow, A., Baker, L., Nordstrum, L.E., & Gomes, L.M."Networked Improvement Communities: The Disciplines of Improvement Science Meets The Power of Network". *Quality Assurance in Education*, 25:1, (January, 2017). 525.

4. Evaluating (Pengevaluasian)

Tahapan selanjutnya adalah evaluasi, kegiatan ini untuk meninjau terhadap kendala dalam pelaksanaan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat di sekolah, evaluasi akan menjadi tolak ukur terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan dalam peningkatan kualitas mutu sekolah.

a. Evaluasi sebagai peninjauan kembali kegiatan

Evaluasi sebagai peninjauan kembali kegiatan yang telah terlaksana dengan baik dan sesuai sasaran. Peninjauan berupa penilaian untuk mengkaji program-program yang telah disusun dan kemudian ditelaah. Sementara itu, Johnson (dalam Nasution), menyatakan bahwa evaluasi sebagai sistem untuk mendeteksi antara penyesuaian rencana dengan tujuan yang telah dibatasi.³⁷

Untuk hal itu, Rohiyat, menyatakan bahwa; ”pencapaian tujuan program Humas dievaluasi untuk mengukur terhadap rumusan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk menilai program-program tersebut berhasil dilaksanakan”³⁸. Serangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan angka partisipasi Sekolah Islam Terpadu terhadap mutu pendidikan melalui proses persiapan dan perencanaan yang matang.

b. Evaluasi sebagai penilaian terhadap hasil kinerja program

Penilaian terhadap hasil kinerja program, perlu diperbaiki atau diselesaikan dengan modifikasi tertentu. Pada tahapan evaluasi, kinerja dalam hubungan masyarakat sangat dibutuhkan. Ada dua kriteria yang bisa dijalankan, yakni sejauhmana tujuan Lembaga Sekolah Islam Terpadu terjalankan dan tercapai. Sejauh ini, dua kriteria Hubungan masyarakat dalam Lembaga Sekolah Islam Terpadu dapat dinilai dari yang telah dikerjakannya yaitu:³⁹

- 1) *Efektivitasnya*, yaitu sejauh mana tujuan telah tercapai, misalnya apakah masyarakat benar-benar merasa terlibat dalam masalah yang dihadapi sekolah, apakah mereka ingin memberikan masukan untuk peningkatan sekolah dan sebagainya.
- 2) *Efisiennya*, yaitu sejauh mana potensi sumber daya yang ada telah digunakan dengan baik untuk kepentingan kegiatan masyarakat.

Proses penilaian atau evaluasi dapat dilaksanakan pada saat kegiatan dijalankan atau pada saat kegiatan selesai. tujuannya ialah untuk memantau sejauhmana tingkat keberhasilan dan apa kendalanya. Dalam perspektif Islam disebut *Muhasabah* yakni menilai apa yang

³⁷Nasution, *Manajemen Humas*, 78

³⁸Rohiat. *Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2010). 59

³⁹Subairi, “Kerangka Kerja Manajemen, 109

dikerjakan selama ini apa sudah memberikan manfaat atau belum bernilai sama sekali. Evaluasi dilakukan oleh Kepala urusan hubungan masyarakat meninjau terhadap 3 (tiga) aspek sasaran, meliputi:⁴⁰

- a. Bidang sarana akademik, yaitu dengan meninjau terhadap keterampilan lulusan, hasil karya, kuantitas tenaga pendidik, infrastruktur sarana dan prasarana perangkat pembelajaran;
- b. Bidang sarana pendidikan, yaitu meninjau terhadap kelayakan infrastruktur sarana dan prasarana penunjang popularitas sekolah;
- c. Bidang sosial, yaitu mengevaluasi peran warga sekolah dengan masyarakat agar menambah kesan dan kepedulian masyarakat terhadap perkembangan mutu sekolah.

5. Pemodifikasian (Pembaharuan)

Pembaharuan, merupakan kegiatan revisi program sebagai indaklanjut hasil eveluasi program, dikarenakan dalam kegiatan manajemen, terdapat unsur komunikasi. Hubungan dengan masyarakat sebagai kegiatan menejemen operatif merupakan kegiatan yang memikul beban tugas mewujudkan sebahagian kegiatan komunikasi keluar. Hubungan dengan masyarakat dilakukan dengan publisitas tentang kegiatan organisasi kerja yang patut diketahui oleh pihak luar secara luas.

Kegiatan dilakukan dengan menyebar luaskan informasi dan memberikan penerangan untuk menciptakan pemahaman yang sebaik-baiknya dengan kalangan masyarakat luas mengenai tugas dan fungsi yang diemban oleh sekolah, termasuk kegiatan-kegiatan yang sedang, sudah dan akan dikerjakan berdasarkan volume dan beban kerjanya.

⁴⁰Rachmat Satria, dkk. "Peningkatan Mutu Sekolah melalui Manajemen Hubungan Masyarakat" *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7:2 (September 2019), 205

Tugas Mahasiswa

- Mengidentifikasi dan mengabstraksikan 4 poin penting dari kajian Pengelolaan Humas Sekolah Islam Terpadu.
 - Kosep Dasar Pengelolaan Humas Sekolah Islam Terpadu dan Masyarakat
 - Landasan Pengembangan Humas Sekolah Islam Terpadu dan Masyarakat
 - Substansi Humas antara Sekolah Islam Terpadu dan Masyarakat
 - Kerangka Kerja Pengembangan Manajemen Humas dalam Menciptakan Sekolah Islam Terpadu Unggul
- Memukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
- Membatasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
Mata Kuliah :
Metode :
Oleh : NIM :
JURUSAN :

Resensi Rangkuman:

A Esensi/ Sub Materi

B Esensi/ Sub Materi

C Esensi/ Sub Materi

D Esensi/ Sub Materi

summary: Maksimal 10 kalimat

Temukan Nilai/Natijah/Konkhusi dari empat sub materi

Ket: Penulisan maksimal 500 Kata

Isi /Aplod Foto Resmi Mu

Isi Identitas MK & Individu

Isi /aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:

Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

- Dari CK tersebut, Wajib dibuatkan Poster untuk Presentasi Harian.

Part: 12

Pengelolaan Pemasaran Jasa: Sekolah Islam Terpadu

KEMAMPUAN AKHIR PEMBELAJARAN

Setelah mendapat materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami Konsep Dasar Pengelolaan Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu
2. Mengidentifikasi Konsep Dasar Pengelolaan Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu
3. Menjelaskan Konsep Dasar Pengelolaan Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu

POKOK BAHASAN

1. Konsep Dasar Pengelolaan Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu
2. Misi dan Tujuan Manajemen Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu
3. Kerangka Kerja Manajemen Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu
4. Strategi, Etika dan Pendekatan Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu

TOPIK BAHASAN

Pengelolaan pemasaran jasa pendidikan akan baik jika dilakukan dengan baik dan profesional. Layanan pengelolaan pemasaran jasa pendidikan diperlukan guna mempermudah lembaga dalam memasarkan jasa pendidikannya kepada masyarakat. Dikarekan dalam dunia pendidikan saat ini telah terjadi persaingan yang ketat antara satu lembaga dengan lembaga pendidikan lainnya, sehingga yang terjadi banyak lembaga pendidikan yang ditinggalkan oleh penggunanya dengan beberapa alasan. Oleh sebab itu, dalam lembaga pendidikan dibutuhkan suatu kemampuan pengolahan yang professional agar bisa mempraktekkan dalam pengolahan pemasaran jasa pendidikan yang bertujuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan konsumen serta meningkatkan tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan hendaknya dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan lulusannya. Sehingga masyarakatpun selaku pengguna jasa pendidikan tersebut akan berfikir selektif dalam menentukan lembaga mana yang harus dipilih untuk putra-putrinya. Masyarakat sudah cerdas dalam memilih lembaga pendidikan, mereka akan memilih lembaga pendidikan yang menurut mereka terjangkau dan tentunya terbaik dan berkualitas. Oleh sebab itu hendaknya lembaga pendidikan harus bisa membuat inovasi yang baru demi memenuhi kebutuhan dari pengguna. Bila ada lembaga pendidikan yang tidak mengikuti keinginan dari pengguna maka secara otomatis lembaga pendidikan tersebut akan ditinggalkan oleh penggunanya. Sekolah Islam Terpadu, sebagai sebuah lembaga yang menawarkan produk dari jasa pendidikan yang mereka tawarkan kepada masyarakat harus bisa mengambil hati dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa lembaga pendidikan yang dia kelola adalah lembaga pendidikan yang tepat. Oleh sebab itu, perlu adanya inisiatif dari madrasah mulai dari menganalisis segmentasi pasar, melakukan perencanaan, pelaksanaan yang baik, serta melakukan proses pengendalian dan evaluasi. Sebuah lembaga pendidikan hendaknya bisa merancang dan menetapkan strategi-strategi bauran pemasaran apa yang kira mampu dapat meyakinkan pengguna jasa pendidikan, seperti merencanakan program-program kegiatan yaitu dengan menjabarkan visi dan misi lembaga pendidikan, serta melaksanakan rangkain kegiatan dari program-program yang direncanakan secara konsisten dan sistematis. Pentingnya pemasaran jasa “Jasa Sekolah Islam Terpadu”. dalam kaitannya dengan industri jasa pendidikan menghasikan produk-produk, yang dikategorikan: (1) sepenuhnya jasa pelayanan kependidikan, dan (2) produk parsial, yaitu lulusan” Substansinya; (1) kurikuler (2) penelitian, (3) pengembangan kehidupan bermasyarakat; (4) ekstra kurikuler, dan (5) administrasi”Kelima produk itulah, kemudian menjadi wilayah penuh kendali sekolah/madrasah, disamping itu juga dijadikan tolok ukur pelayanan sekolah/madrasah, okeh komponen pendidikan lainnya.

A. Konsep Dasar Pengelolaan Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu

1. Batasan Pengelolaan Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu

Frasa "pengelolaan pemasaran jasa Sekolah Islam Terpadu" merupakan penggabungan dari kalimat "pengelolaan pemasaran" dan "jasa Sekolah Islam Terpadu". Apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran? Philip Kotler, menyebutnya *marketing management* dirumuskan sebagai "*the analysis planing, implementation, and control program designed ocreate, build, and maintain beneficial exchanges with target buyers for the purpose of achieving organizational objectives*".¹

Maksudnya Kotler; "analisis, perencanaan, implementasi dan pengendalian program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran untuk tujuan mencapai tujuan organisasi". Hal ini sangat bergantung pada perancangan organisasi yang menawarkan dalam hal target kebutuhan pasar dan keinginan dan menggunakan harga, komunikasi, dan distribusi yang efektif untuk menginformasikan, memotivasi dan melayani pasar.

Adapun yang dimaksud dengan "Jasa Sekolah Islam Terpadu". Tampubolon (dalam Rusdiana), memandang: "sekolah/madrasah dalam kaitannya dengan industri jasa pendidikan menghasilkan produk-produk, yang dikategorikan: (1) sepenuhnya jasa pelayanan kependidikan, dan (2) produk parsial, yaitu lulusan" Substansinya; (1) kurikuler (2) penelitian, (3) pengembangan kehidupan bermasyarakat; (4) ekstra kurikuler, dan (5) administrasi".² Kelima produk itulah, kemudian menjadi wilayah penuh kendali sekolah/madrasah, disamping itu juga dijadikan tolok ukur pelayanan sekolah/madrasah, okeh komponen pendidikan lainnya.

Pada hakikatnya manajemen pemasan jasa pendidikan dimaksudkana merupakan rangkaian kegiatan manajer pendidikan, mulai dari perancangan organisasi yang menawarkan dalam hal target kebutuhan pasar dan keinginan dan menggunakan harga, komunikasi, dan distribusi yang efektif untuk menginformasikan, memotivasi dan melayani pasar pendikan.

¹ Philip Kotler Armstrong. *Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan Implementasi dan Pengendalian*. Terj.: Wilhelmus W. Bakowatun. (Jakarta: Intermedia, 2002), 14

² Rusdiana. A. *Pengelolaan Pendidikan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 268

2. Esensi Pengelolaan Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu

Perlu disadari bahwa pemasaran jasa pendidikan Islam (Sekolah Islam Terpadu), bukan merupakan suatu program atau kegiatan bisnis yang dilakukan oleh lembaga pendidikan agar madrasah yang dikelola tersebut mendapat siswa sebanyak-banyaknya, tetapi melainkan merupakan tanggungjawab semua pihak. Pada intinya dalam pemasaran jasa pendidikan Islam, Sekolah Islam Terpadu bertujuan untuk memuaskan secara Islami bagi konsumen sebagai pengguna. Kegiatan Sekolah Islam Terpadu, merupakan kegiatan sirkulasi antara pihak satu dengan beberapa pihak lain yang saling mempengaruhi dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karenanya harus memiliki langkah pembelajaran yang berdasarkan teori-teori marketing syari'ah.

Marketing syari'ah, merupakan sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan *value* dari suatu inisiator kepada stek holdernya, yang didalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam. Ini artinya bahwa *Syari'ah marketing*, seluruh proses baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai (*value*), tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang islami. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin, dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah islami tidak terjadi dalam suatu transaksi dalam pemasaran dapat dibolehkan.³ Dalam Q.S Al-Ahzab 21 sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat), Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. (Q.S.Al-Ahzab,[33]: 21).

Disinilah manajer pemasaran Sekolah Islam Terpadu, dituntut memiliki perencanaan atas pelaksanaan, koordinasi, dan kontrol dalam kaitannya dengan fungsi pemasaran riset pemasaran, perencanaan dan pengembangan produk, penetapan harga, iklan, penjualan dan distribusi untuk tujuan untuk memuaskan kebutuhan konsumen, bisnis dan masyarakat.

3. Karakteristik Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu

Karakteristik jasa pendidikan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan diantaranya: ⁴

³Nur Fadilah "Pengertian, Konsep, dan Strategi Pemasaran Syari'ah". *Jurnal Salimiyah*, 1: 2, (Juni, 2020), 206.

⁴Hidayat, A dan Machali, *Pengelolaan Pendidikan*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), 228

- a. Tidak berwujud/terlihat (*intangible*) oleh panca indra, sehingga yang terjadi adalah konsumen tidak dapat melihat, mencium, meraba, bahkan mendengar, dan merasakan sebelum mereka menggunakan jasa tersebut;
- b. Tidak terpisahkan (*inseparability*) antara yang satu dengan yang lain, maksudnya adalah jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya dan juga tidak dipisahkan dengan konsumen karena tujuan dari jasa pendidikan itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna;
- c. Bervariasi (*variability*) atau banyak macam, jenis dan sering berubah-ubah, maksudnya adalah jasa pendidikan sering kali berubah-ubah tergantung siapa, kapan, dan dimana penyajiannya;
- d. Sering mudah musnah (*perishability*) atau hilang, dapat didefinisikan yaitu dengan tidak dapat diperjualbelikan pada masa selanjutnya;
- e. Jasa tidak dapat disimpan dan dikonsumsi pada saat dihasilkan, maksudnya dari tidak bisa disimpan adalah jasa pendidikan tersebut digunakan pada saat itu juga tidak bisa digunakan untuk masa yang akan datang, adapun maksud dari tidak bisa dikonsumsi adalah jasa pendidikan bukanlah produk yang berjenis makanan melainkan berupa skill, pengetahuan dan lain-lain;
- f. Konsumen merupakan salahsatu bagian internal terpenting dari proses produksi jasa, karena konsumen adalah pengguna dari jasa yang telah ditawarkan;
- g. Setiap orang atau apapun yang ikut berhubungan dengan konsumen mempunyai andil dalam memberikan peran;
- h. Karyawan atau staff sebagai penghubung merupakan bagian terpenting dari proses produksi jasa, oleh sebab itu diharapkan dalam pengangkatan karyawan harus bisa dilihat dari kualifikasi dan kompetensinya, karena hal itu akan mempengaruhi mutu dari jasa pendidikan tersebut; dan
- i. Kualitas pembuatan jasa tidak dapat diperbaiki (rehab) pada saat proses produksi karena produk di jasa terjadi secara *real time*.

B. Misi dan Tujuan Manajemen Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu

Pada umumnya, misi dan tujuan umum pemasaran ada tiga yaitu (1) agar terjadi perubahan pengetahuan positif masyarakat terhadap lembaga tersebut, (2) perubahan sikap yang baik terhadap lembaga tersebut, dan (3) perubahan tindakan yang dikehendaki dari perilaku masyarakat tentang lembaga pendidikan tersebut.⁵ Untuk hal itu, perlu disadari bahwa pemasaran jasa pendidikan bukan merupakan suatu

⁵Soemanagara. *Strategic Marketing Communication: Konsep Strategi dan Terapan*. (Bandung: Alfabeta. 2006), 4.

program atau kegiatan bisnis yang dilakukan oleh lembaga pendidikan agar sekolah/madrasah yang dikelola tersebut mendapat siswa sebanyak-banyaknya, tetapi melainkan merupakan tanggungjawab semua pihak. Pada intinya dalam pemasaran jasa pendidikan, lembaga pendidikan bertujuan untuk memuaskan konsumen sebagai pengguna. "Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan sirkulasi antara pihak satu dengan beberapa pihak lain yang saling mempengaruhi dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karenanya harus memiliki langkah pembelajaran yang berdasarkan teori-teori tertentu"⁶ Atas dasar itu, secara konseptual Manajemen Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu, dibangun atas teori-teori, sebagai berikut:

1. Menciptakan Permintaan atau *Demand*

Tujuan pertama manajemen pemasaran adalah untuk menciptakan permintaan melalui berbagai cara. membuat cara terencana untuk mengetahui preferensi dan selera konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, yang berkualitas. Kualitas Layanan Dalam Perspektif Islam, mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. Hal ini tampak dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (QS. al-Baqarah [2]: 267).

⁶Sarifudin & Rehendra Maya. "Implementasi Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Di Madrasah Aliyah Terpadu (Mat) Darul Fallah Bogor" *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 2:2 (Juli, 2019), 141.

Dimensi keandalan yang berkenaan dengan kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat. Pelayanan akan dapat dikatakan reliabel apabila dalam perjanjian yang telah diungkapkan dicapai secara akurat. Ketepatan dan keakuratan inilah yang akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap lembaga penyedia layanan jasa.

2. Menciptakan Kepuasan Pelanggan

Manajer pemasaran harus mempelajari permintaan pelanggan sebelum menawarkan barang atau jasa apa pun kepada mereka. Yang perlu dipelajari adalah bahwa menjual barang atau jasa tidak sepenting kepuasan pelanggan yang didapatkan. Pemasaran modern berorientasi pada pelanggan. Dimulai dan diakhiri dengan pelanggan. Pada dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Pengertian tersebut dapat diterapkan dalam penilaian kepuasan atau ketidakpuasan terhadap satu perusahaan tertentu karena keduanya berkaitan erat dengan konsep kepuasan pelanggan.⁷

Kepuasan pelanggan bersifat dinamis. Oleh karena itu, tantangan besar bagi setiap organisasi adalah mencari peluang agar dapat mewujudkan kepuasan pelanggan secara konsisten dengan sedemikian rupa sehingga tetap cost-effective bagi organisasi serta merupakan tujuan suatu perusahaan jasa karena melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan usaha dan peningkatan profitabilitas perusahaan. Kualitas layanan mempunyai hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan.

Kepuasan Konsumen dalam Perspektif Islam; adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan (perceived) sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan. Di dalam teori [ekonomi](#), kepuasan seseorang dalam mengonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Kalau kepuasan terhadap suatu benda semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya, bila kepuasan terhadap suatu benda semakin rendah maka semakin rendah pula nilai gunanya. Kepuasan dalam terminologi konvensional dimaknai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fisik.

⁷Freddy Rangkti. *Measuring Customer Satisfaction* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 23

Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mementingkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersifat israf (royal) dan *tabzir* (sia-sia). Oleh karena itu, kepuasan seorang muslim tidak didasarkan barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsinya.

Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan. Konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau needs. Mashlahah dipenuhi berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki mashlahah ataupun tidak. Konsumsi bukanlah aktifitas tanpa batas, melainkan juga terbatas oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara', sebagaimana firman Allah dalam Alquran. Al-Mā-idah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Mā-idah [5]: 87).

Kemudian dalam QS. Al-Furqan Ayat 67;

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. Al-Furqan, [25]: 67).

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas dapat dijadikan dasar dan rujukan dalam membangun teori konsumen (secara umum) dan kepuasan konsumsi serta rasionalitas konsumsi (khusus) dalam Islam. Menurut kerangka Islam, Nata Atmadja menjelaskan, bahwa kepuasan dalam Islam meliputi: kepuasan konsumtif dan kepuasan kreatif. Kepuasan konsumtif akan menghasilkan kepuasan siap kreasi, sebab konsumsi yang dilakukan akan memberikan kekuatan fisiknya; sehingga akan menjadi lebih kreatif; artinya akan memperoleh energi setelah mendapatkan kepuasan konsumtif sehingga siap untuk berkreasi.

Kepuasan optimal dapat diketahui dari perintah (hadits) nabi, yaitu untuk berhenti makan sebelum kenyang. Hal ini disebabkan karena pada saat itulah kondisi kreasi dapat diperoleh.

Dalam Islam ada tiga hukum yang berlaku dalam konsumsi, yaitu halal, mubah, dan haram; halal (orang wajib makan); mubah di mana seseorang harus berhati-hati dalam makan karena telah mencapai kepuasan optimal; dan makan menjadi haram jika seseorang telah mencapai kepuasan maksimum tetapi masih terus menambah barang yang dimakannya saat inilah seseorang telah mencapai kepausan optimum. Sedangkan bila telah mencapai kepuasan maksimum, maka harus berhenti makan karena bila melebihi batas-batas kemampuan konsumsi barang yang semula halal bisa menjadi haram.

3. Pangsa Pasar atau Market Share

Menurut Sofian Assauri pengertian pangsa pasar adalah suatu analisis untuk mempelajari besarnya bagian atau luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam prosentase yang disebut dengan istilah *market share*.⁸ Setiap bisnis bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasarnya, yaitu rasio penjualannya terhadap total penjualan dalam konteks perekonomian. Misalnya, [Pepsi](#) dan [Coke](#) saling bersaing untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Untuk ini, mereka telah mengadopsi iklan inovatif, pengemasan inovatif, kegiatan promosi penjualan, dll.

Dalam al Qur'an dan hadist banyak dijelaskan tentang Prinsip wadiah dan mudharabah yang dijadikan sebagai landasan Syariah, seperti dijelaskan dalam QS. An Nisa ayat 58;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. QS. An Nisa [4]: 58)

⁸ Sofian Assuari, *Manajemen Pemasaran dasar, Konsep dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan 3, 2000) , 95

Ayat ini, menjelaskan tentang kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (antara Muwaddi/Penitip dan Mustawda/Penyimpan, masing-masing harus dapat menjalankan amanat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama); demikian juga dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 283;

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah [2]: 283).

4. Peningkatan Keuntungan

Departemen pemasaran adalah satu-satunya departemen yang menghasilkan pendapatan untuk bisnis. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan produk yang ingin memuaskan. Jika perusahaan tidak menghasilkan laba, maka tidak akan mampu bertahan. Selain itu, laba juga diperlukan untuk pertumbuhan dan diversifikasi perusahaan.

Konsep laba materialis tersebut menjadi lebih penting dan tetap terjaga kepentingannya melalui reproduksi ilmu serupa. Kamayanti et al. (dalam Ekasari) menjelaskan bahwa; “hal ini dilakukan untuk memelihara konsep akuntansi materialis yang maskulin untuk memastikan bahwa pihak yang berkuasa atas informasi akuntansi tetap menjadi penguasa (memelihara status quo)”.⁹

Padahal jika ditelisik lebih jauh, Islam menawarkan interpretasi melampaui materialisme atas keuntungan. Dalam Al Qur'an, banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang keuntungan baik yang berkaitan dengan perniagaan (bisnis) ataupun yang berkaitan dengan tata cara perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang berkaitan dengan keuntungan dalam Al-Qur'an tidak dikhususkan untuk

⁹Kurnia Ekasari.”Hermeneutika Laba Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5: 1, (April 2014), 68

perniagaan, namun lebih banyak ditujukan kepada manusia sebagai individu. Hal ini dapat dicontohkan dari surat Fushshilat ayat 35 yang menyatakan:

وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

Artinya: ”Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar”. (QS. Fushshilat, [41]:35).

Pertanyaannya siapakah orang-orang yang beruntung itu? Orang-orang yang beruntung menurut surat Al-A’raaf ayat 157 adalah:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحْرِمُهُمُ النَّجَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggubelunggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. Al-A’raaf [7]:157).

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa sifat yang baik akan diberikan kepada orang yang sabar dan beruntung. Dan orang yang beruntung adalah orang-orang yang mampu bertindak di atas kebenaran hukum Allah, dan meninggalkan segala ketentuan yang dilarang Allah. Keuntungan yang ditawarkan kepada manusia apabila ia mampu berperilaku baik dan mentaati hukum Allah seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an sejatinya bisa dimetaphorakan untuk keuntungan bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya seorang manusia juga

merupakan perusahaan bagi dirinya sendiri. Sehingga tata cara yang ditujukan kepada manusia agar ia menjadi orang (manusia) yang beruntung dapat diterapkan kepada perusahaan yang juga memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Adalah mungkin untuk mewujudkan hal tersebut menjadi suatu premis sepanjang argumen yang mendukung dapat diterima secara logika. Laba memang merupakan bagian yang penting dalam membentuk struktur teori akuntansi, terutama bila laba tersebut ditinjau dari perspektif Islam.

5. Pencitraan Produk yang Baik di Mata Publik

Untuk membangun citra produk yang baik di mata publik adalah tujuan manajemen pemasaran lainnya. Jika departemen pemasaran menyediakan produk-produk berkualitas kepada pelanggan dengan harga yang wajar, tentunya akan menciptakan citra yang baik pada pelanggan. “Citra yang positif bagi sebuah instansi sangat penting karena jika citra tersebut sudah didapatkan maka masyarakat akan menerima dengan baik jasa yang dihasilkan oleh instansi”.¹⁰ Islam mengajarkan guna mencapai kerja sama yang lebih produktif dan untuk melaksanakan kepentingan bersama yang lebih efisien, dengan melancarkan informasi yang berencana dan tersebar luas”.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝ ٣٦

Artinya:”Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga diri” (QS. An-Nisa [4]: 36).

Dapat dipahami bahwayang dijelaskan pada ayat diatas menunjukkan, allah memerintahkan di dalam alquran agar hendaknya kita berbuat baik kepada sesama manusia baik itu keluarga, teman, dan karib kerabat lainnya. Ayat tersebut dapat dijadikan konsep citra, untuk

¹⁰ Frank Jefkins, *Public Relations, Edisi Kelima*, (Jakarta: Erlangga, 2002), 27

membina hubungan baik antar sesama manusia dan menjadi landasan teori dalam hal hubungan masyarakat terkait dengan pemasaran jasa pendidikan dalam perspektif keislaman.

Pencitraan lembaga pendidikan sangat dibutuhkan bahkan menjadi penting dibandingkan dengan lainnya, citra menjadi diperlukan dari segala bidang. Citra adalah suatu pemahaman yang timbul karena pemahaman suatu kenyataan. Namun pemahaman berdasarkan kurang lengkapnya informasi juga akan menimbulkan pencitraan yang tidak sempurna.

Menurut Seitel, dikutip Soemirat & Ardianto, (dalam Wahyuni), "citra merupakan komoditas yang rapuh (fragile commodity), akan tetapi citra perusahaan, yang positif adalah esensial, sukses yang berkelanjutan dan dalam jangka panjang."¹¹

Pencitraan dalam konteks pendidikan adalah sebuah kesan mendalam dari sebuah proses yang dapat ditangkap dan dirasakan oleh panca indra manusia. Lembaga pendidikan yang dicitrakan sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kualitas pencitraan memberikan ciri-ciri sebagai berikut: "(1) Memiliki budaya disiplin yang kuat, (2) Memiliki kurikulum yang relevan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, (3) Memiliki komunitas yang selalu menciptakan cara-cara atau teknik belajar yang kreatif, (4) Berorientasi pada hard knowledge dan soft knowledge yang seimbang, (5) Pengembangan potensi siswa secara holistik"¹²

Objek dari citra meliputi individu maupun instansi yang terdiri dari sekelompok orang di dalamnya. Citra dapat terbentuk dengan memproses informasi yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan citra pada objek dari adanya penerimaan informasi setiap waktu. Besarnya kepercayaan objek terhadap sumber informasi dapat berasal dari instansi secara langsung dan atau pihak-pihak lain secara tidak langsung. Citra instansi menunjukkan kesan objek terhadap instansi yang terbentuk dengan memproses informasi setiap waktu dari berbagai sumber informasi terpercaya.

6. Menciptakan Pelanggan Baru

Bisnis didirikan untuk menjual produk atau layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, pelanggan adalah dasar dari sebuah bisnis. Pelangganlah yang memberikan pendapatan kepada bisnis dan menentukan apa yang akan dijual perusahaan. Apa yang dialami manajemen pendidikan Islam saat ini hampir sama dengan kondisi dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah SAW begitu banyak cobaan dan

¹¹Nurul Yuli Wahyuni "Pencitraan: Upaya Membangun Public Opinion bagi Lembaga Pendidikan Islam" *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*: 2:1(Juni, 2018), 65

¹²Wahyuni "Pencitraan: Upaya, 66

rintangan tetapi pada akhirnya dakwah beliau sangat berhasil. Keberhasilan tersebut tidak bisa lepas dari kecakapan dakwah beliau dalam memikat dan menjalin hubungan dengan baik.¹³

Metode dakwah Rasul yang demikian dapat menjadi rujukan bagi pengembangan Sekolah Islam Terpadu, untuk memberikan pelayanan kepada nasabah supaya terpikat dan loyal kepada lembaga pendidikan. Maka dalam menciptakan pelanggan baru berarti mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas itulah disebut dengan mengedepankan Pelayanan Prima Terhadap Nasabah. Jika suatu Lembaga Pendidikan ingin berkembang dan bertahan dalam bisnis, menciptakan pelanggan baru adalah hal yang sangat krusial. Para manajer harus menganalisis dan memahami keinginan mereka dengan perlakuan yang meneladani akhlak Rasulullah. Untuk hal ini Islam telah mengajarkan dalam QS. Surat Al-Ahzab Ayat 21;

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. (QS. Al-Ahzab [33] 21).

Surat Al-Ahzab ayat 21 adalah ayat yang turun pada saat terjadinya peristiwa ahzab (perang khandak). Ayat ini merupakan gambaran perilaku agung Rasulullah SAW dalam perkataan, perbuatan dan perilakunya. Untuk itu, Allah SWT memerintahkan kita untuk meneladani akhlak dan sifat Rasulullah SAW dalam semua tindakannya.¹⁴

7. Memuaskan Pelanggan

Menciptakan pelanggan baru tidak cukup. Bisnis harus mengembangkan dan mendistribusikan produk dan layanan yang memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan mereka. Jika pelanggan tidak puas, bisnis tidak akan dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi biaya dan untuk mendapatkan pengembalian modal yang wajar.

Pelanggan yang puas bukan berarti hanya membeli produk karena sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mereka juga akan melakukan rekomendasi pada orang-orang terdekat mereka, ini berarti produk Anda akan lebih dikenal banyak orang. Dalam konteks ini, Allah juga menghendaki, setiap umatNya untuk menepati janji yang telah dibuat dan dinyatakan sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 91:

¹³Danang Kurniawan “Service Excellent Berdasarkan Prespektif Islam di Bank Syariah”. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. 3:1 (Juli, 2020), 70.

¹⁴ Kurniawan “Service Excellent, 71.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah sumpah itu), sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (QS. an-Nahl [16]: 91).

Teori yang menjelaskan bagaimana kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan terbentuk adalah *the expectancy disconfirmation* model, yang mengemukakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan sebelum pembelian dengan sesungguhnya diperoleh pelanggan dari produk atau jasa yang dibeli tersebut.¹⁵

Ketika pelanggan membeli suatu produk atau jasa, maka ia memiliki harapan tentang bagaimana produk atau jasa tersebut berfungsi. Pelanggan akan memiliki harapan mengenai bagaimana produk atau jasa tersebut seharusnya berfungsi, harapan tersebut adalah standar kualitas yang akan dibandingkan dengan fungsi atau kualitas produk atau jasa yang sesungguhnya dirasakan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dengan harapan harapannya.¹⁶

Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka layanan dapat dikatakan bermutu sedangkan jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu. Dengan demikian, apabila kenyataan yang diterima oleh pelanggan sesuai dengan harapan atau bahkan lebih, maka layanan tersebut masuk kategori memuaskan.

Ada beberapa metode yang bisa dipergunakan setiap perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya dan pelanggan pesaing. Tjiptono mengidentifikasi empat metode untuk mengukur kepuasan pelanggan:¹⁷

- a. Sistem Keluhan dan Saran Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customeroriented) perlu menyediakan kesempatan dan akses yang mudah dan nyaman bagi para pelanggannya guna menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka.

¹⁵Sumarwan Ujang, *Perilaku Pelanggan:Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia dengan MMA-IPB.2004), 322

¹⁶ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* Jilid 1, (Jakarta: Indeks, 2005), 56

¹⁷Dwi Aryani dan Febrina Rosinta ”Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, (2010), 29-30

- b. *Ghost Shopping* (Mystery Shopping) Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa ghost shoppers untuk berperan atau berpura-pura sebagai pelanggan potensial produk atau jasa perusahaan dan pesaing. Mereka diminta berinteraksi dengan staf penyedia jasa dan menggunakan produk atau jasa perusahaan. Berdasarkan pengalamannya tersebut, mereka kemudian diminta melaporkan temuan-temuannya berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan produk atau jasa perusahaan dan pesaing.
- c. *Lost Customer Analysis* Perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan atau penyempurnaan selanjutnya.
- d. Survei Kepuasan Pelanggan Sebagian besar riset kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan metode survei McNeal & Lamb, baik survei melalui pos, telepon, email, websites, maupun wawancara langsung.

Pengukuran kepuasan pelanggan melalui metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya:¹⁸

- a. *Derived satisfaction*, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yaitu: (1) tingkat harapan atau ekspektasi pelanggan terhadap kinerja produk atau jasa perusahaan pada atribut-atribut relevan, dan (2) persepsi pelanggan terhadap kinerja aktual produk atau jasa perusahaan bersangkutan (*perceived performance*).
- b. *Problem analysis*, dalam teknik iniresponden diminta mengungkapkan masalah-masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan produk atau jasa perusahaan dan saransaran perbaikan. Kemudian perusahaan akan melakukan analisis konten terhadap semua permasalahan dan saran perbaikan untuk mengidentifikasi bidang-bidang utama yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut segera.
- c. *Importance-performance analysis*, teknik ini dikemukakan pertama kali oleh Martilla & James dalam artikel mereka "*Importance-Performance Analysis*" yang dipublikasikan di *Journal of Marketing*. Dalam teknik ini responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan berbagai atribut relevan dan tingkat kinerja perusahaan (*perceived performance*) pada masing-masing atribut tersebut. Kemudian, nilai rata-rata tingkat kepentingan atribut dan kinerja perusahaan akan dianalisis di *Importance-Performance Matrik*.

¹⁸Elok Fatkhiyah. *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Honda AHASS 07819 Hamada Motor Ngoro Kabupaten Mojokerto*. Skripsi (Malang: Fak. Ilmu Pendidikan Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009), 69-70

Inti dari tujuan dan fungsi pemasaran islami (syariah) Menurut Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula (dalam Mubarak), adalah memberikan dua tujuan utama dari Marketing Syariah atau Pemasaran Syariah, yaitu:¹⁹

- a. Me-marketing-kan Syariah dimana perusahaan yang pengelolaannya berlandaskan syariah Islam dituntut untuk bisa bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis. Juga dibutuhkan suatu program pemasaran yang komprehensif mengenai nilai dan value dari produk-produk syariah agar dapat diterima dengan baik, sehingga tingkat pemahaman masyarakat yang masih memandang rendah terhadap perbedaan yang ditawarkan oleh perusahaan yang berbasiskan islami.
- b. Me-marketing-kan dengan mensyariahkan marketing, adalah sebuah teknik pemasaran tidak akan serta merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja tetapi juga karena usaha untuk menciptakan dan menawarkan bahkan dapat merubah suatu nilai kepada para penguasa utamanya (Allah Swt, konsumen, karyawan, pemegang saham). Sehingga usaha tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya dan menjadi bisnis yang berkelanjutan yang sesuai dengan konsep Islami atau Syariah.

C. Kerangka Kerja Manajemen Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu

Kegiatan inti pemasaran jasa pendidikan, yaitu adalah adanya strategi bauran pemasaran. Dalam bauran tersebut terdapat unsur-unsur yang harus saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Jika ke semua unsur tersebut dipadukan akan menciptakan strategi pemasaran yang jitu efektif dalam merebut hati pengguna dan pada akhirnya memenangkan persaingan yang ada. Apabila Lembaga Pendidikan/Madrasah Diniyah ingin bersaing kompetitif untuk merebut pangsa pasarnya. Lembaga pendidikan, mau tidak mau harus mematuhi dan menjalankan prinsip dalam bauran pemasaran jasa pendidikan sebagaimana dikonsepsikan Kloter (7P), dikutip Hidayat dan Mahali (dalam Sarifudin, Rehendra), (product, price, promotion, people, physical, dan proses). Tujuh prinsip dalam bauran pemasaran, yaitu:²⁰

1. Product (produk)

Bahwa produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan oleh produsen ke pasar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, atau dengan kata lain adalah memberikan sejumlah nilai kepada konsumen dalam hal memenuhi kebutuhannya. Adapun maksud dari produk bila dilihat dari konteks jasa pendidikan adalah berupa jasa yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan ke

¹⁹Nurul Mubarak "Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Butik Calista" *Jurnal: Islam-Economic*. 3:1 (Juni, 2017), 80

²⁰ Sarifudin & Rehendra Maya. "Implementasi Manajemen, 143-47

masyarakat dalam hal ini adalah pelanggan. Hal yang ditawarkan adalah berupa reputasi, prospek, dan variasi pilihan. Suatu lembaga pendidikan sebagai yang mengeluarkan produk dapat menawarkan reputasi, prospek, mutu pendidikan yang baik, prospek, dan peluang yang cerah bagi para peserta didik untuk menentukan pilihan-pilihan yang diinginkannya demi keberhasilan di masa yang akan datang. Dalam hal ini lembaga pendidikan harus bisa menghasilkan kompetensi lulusan, yaitu kualifikasi dari kemampuan lulusan dari lembaga pendidikan tersebut yang mencakup sikap (*afektif*), pengetahuan (*pedagogik*), dan keterampilan (*skill*).

2. Price (harga)

Maksud dari penjelasan *price* (harga) yaitu sejumlah kewajiban uang yang harus ditunaikan oleh konsumen atau pengguna untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkan. *Price* dalam konteks ini adalah seluruh biaya pengeluaran dari pengguna untuk mendapatkan jasa pendidikan yang diinginkan. Adapun contoh-contoh *price* itu sendiri seperti uang bangunan, SPP, dan jenis pembayaran lainnya.

3. Place (lokasi)

Berarti lokasi atau tempat keberadaan lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan aktifitas pendidikan. Dalam hal ini diharapkan lokasi atau tempat penyelenggaraan pendidikan berada di wilayah yang mudah diakses oleh pengguna jasa pendidikan. Selain itu, berada di wilayah yang strategis, nyaman, dan mudah dijangkau dari penjuru manapun.

4. Promotion (promosi)

Maksudnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam hal mengkomunikasikan atau menawarkan penjualan produk berupa jasa pendidikan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna. Tujuan dari promosi itu sendiri adalah untuk menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat berkaitan dengan produk jasa pendidikan yang ditawarkan, dalam penyampaian diharapkan bisa meyakinkan konsumen atau pengguna akan keunggulan jasa pendidikan yang ditawarkan. Dalam melakukan kegiatan ini sebuah lembaga pendidikan biasanya mempromosikan lembaganya lewat media elektronik, media cetak, dan media-media lainnya.

5. People (orang)

Orang dalam konteks pengolahan manajemen pemasaran jasa pendidikan dapat diartikan sebagai sumber daya manusia (karyawan) yang terlibat secara langsung seperti tenaga pendidik (guru) maupun tenaga kependidikan seperti staf administrasi dan karyawan-karyawan lainnya.

Pemilihan sumber daya manusia ini sangatlah urgen karena bisa berdampak terhadap keberhasilan tujuan dari pendidikan tersebut. Oleh sebab itu, dalam pengolahan sumberdaya manusia hendaknya dijalankan secara profesional berdasarkan kualifikasi dan kompetensinya.

6. Physical Evendece (bukti fisik)

Adalah bukti adanya lingkungan fisik tempat jasa pendidikan itu dalam mengelolah lembaga pendidikan yang secara langsung penyelenggaraan berhubungan dengan konsumennya. Dalam hal ini ada dua macam katagori bukti fisik yaitu, *pertama* adalah berupa keberadaan gedung atau bangunan sekolah, kelas, gedung perpustakaan, lapangan olahraga, ruangan-ruangan, dan lain-lain. Adapun yang *kedua* adalah berupa bukti yang bersifat pendukung dalam proses penyelenggaraan pendidikan atau bisa disebut sebagai nilai tambah dan memiliki peran yang sangat penting dalam proses jasa pendidikan seperti nilai rapot, catatan-catatan peserta didik, dan lain-lain.

7. Process (proses)

Maksudnya adalah prosedur atau mekanisme yang harus dilakukan dalam rangkaian kegiatan aktivitas untuk menyampaikan jasa yang diciptakan dari produsen ke konsumen atau pengguna. Dalam konteks jasa pendidikan proses adalah proses pendidikan yang mendukung terselenggaranya proses kegiatan belajar mengajar guna terealisasinya tujuan produk dalam hal ini adalah lulusan yang diinginkan oleh lembaga. Perlu disadari bahwa proses kegiatan pemasaran biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu misal manajerial, budaya, politik, dan sosial. Akibat dari beberapa pengaruh yang ada maka individu atau pengguna mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain.

D. Strategi, Etika dan Pendekatan Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu

Apabila suatu organisasi atau lembaga, termasuk lembaga pendidikan ingin survive dalam persaingan, Pendidikan juga memerlukan strategi yang mantap dalam melaksanakan proses pendidikan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Juga bagaimana agar dalam proses tersebut tidak ditemui hambatan serta gangguan baik internal maupun eksternal yang menyangkut kelembagaan atau lingkungan sekitarnya.²¹ Strategi dalam memasarkan produk lembaga pendidikan yang tepat adalah dengan menerapkan prinsip fokus bagaimana caranya agar masyarakat sebagai pengguna terpuaskan. Salah satu langka yang tepat adalah dengan memberikan kesan atau citra yang baik (positif) kepada

²¹Maya Rendra. "Revitalisasi Keteladanan dalam Pendidikan Islam: Upaya Menjawab Peluang dan Tantangan Pendidikan Islam di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)". *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 05:09. (Juli, 2016), 1189.

masayarakat, maksud dari memberikan kesan (citra) adalah sebuah kesan positif yang diperoleh oleh masyarakat sesuai dengan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman seseorang tentang sesuatu lembaga pendidikan.

1. Strategi Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu

Kotler & Keller dalam Adam, mendefinisikan strategi pemasaran ”sebagai suatu fungsi organisasi dan sekumpulan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan serta mengelola hubungan dengan pelanggan yang kesemuanya dapat memberi manfaat bagi organisasi”²².

Adapun manfaat dari strategi pemasaran, yaitu: ²³

- a. Perencanaan strategis penting dilakukan oleh para manajer untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada.
- b. Strategi pemasaran adalah ”desain, implementasi, dan control rencana untuk mempengaruhi pertukaran demi mencapai tujuan organisasi. Hubungan antara pemasaran dan perencanaan merupakan inti pemasaran strategis.
- c. Pemasaran strategis sebagai proses untuk mengembangkan dan memelihara kesesuaian strategis antara tujuan dan kemampuan lembaga, serta perubahan peluang pemasaran.
- d. Pemasaran strategis meliputi aktivitas untuk mengembangkan misi yang jelas, mendukung tujuan dan sasaran lembaga, strategi yang logis, serta pelaksanaan yang tepat.

Apabila suatu organisasi atau lembaga, termasuk lembaga pendidikan ingin survive dalam persaingan, Sejauh ini, Kotler and Kevin Lane Keller, mengemukakan ada sejumlah strategi yang penting digunakan:²⁴

- a. Pemasaran intern (*internal marketing*) menggambarkan pelatihan dan pemotivasian karyawan untuk *melayani* pelanggan dengan baik;
- b. Pemasaran eksternal (*external marketing*), seperti yang diungkapkan Buchari Alma *external marketing* adalah *making promises*, tugasnya membuat, memberikan janji kepada konsumen.²⁵ Unsur penting pemasaran eksternal adalah karyawan sekolah yang mengkomunikasikan jasa pendidikan sebelum menyampaikan jasa pendidikan.

²²Adam, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

²³Philips Kotler, *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian*, 8th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 1995), 86.

²⁴Philips Kotler and Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2009), 48.

²⁵Buchari Alma, *Pemasaran Stratejik Jasa Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2005), 118.

c. Pemasaran interaktif (*interactive marketing*) adalah keahlian civitas akademik dalam melayani pelanggan. Agar rencana pemasaran sebuah sekolah berhasil, maka perlu dibina hubungan, bukan saja dengan pihak luar (konsumen), tapi yang paling penting dengan karyawan sendiri.²⁶ Pemasaran interaktif menggambarkan keahlian karyawan dalam melayani klien.²⁷

2. Unsur-unsur Strategi Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu

Unsur Strategi Pemasaran Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan, yaitu:

a. Segmentasi pasar

Segmentasi pasar, yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing konsumen dibedakan menurut karakteristik kebutuhan produk dan bauran pemasaran tersendiri.

b. Targeting

Targeting, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Dalam targeting ini segmen-segmen yang perlu dievaluasi adalah:

1. Ukuran dan pertumbuhan segmen, perusahaan perlu mengevaluasi data mengenai tingkat permintaan pasar, tingkat pertumbuhan pasar, serta tingkat keuntungan yang diharapkan dari setiap segmen.
2. Daya tarik segmen, setelah mengetahui ukuran dan pertumbuhan segmen, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik jangka panjang setiap segmen.
3. Sasaran dan sumber daya perusahaan, apabila setiap segmen memiliki ukuran dan pertumbuhan segmen tepat, maka perusahaan perlu menentukan sasaran dan sumber daya perusahaan. Suatu segmen yang besar dan menarik mungkin tidak akan berarti apa-apa apabila perusahaan tidak memiliki sumber daya yang tepat untuk bersaing di segmen ini.

²⁶ Wijaya, *Pemasaran Jasa Pendidikan*; (Jakarta: Bumi Aksara, 2016),21.

²⁷ Kotler and Keller, *Manajemen Pemasaran*, 49.

c. Positioning

Positioning adalah menetapkan posisi pasar, tujuannya adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen. Strategi penentuan posisi pasar terdiri dari: dasar atribut (harga murah atau harga mahal), menurut kelas pengguna, menurut kelas produk.

3. Strategi Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu

Strategi Pemasaran Islami Semua aktivitas kehidupan perlu dilakukan berdasarkan perencanaan yang baik. Islam agama yang memberikan sintesis dan rencana yang dapat direalisasikan melalui rangsangan dan bimbingan. Perencanaan tidak lain memanfaatkan “karunia Allah” secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan nilai kehidupan yang berubah-ubah. Dalam arti lebih luas, perencanaan menyangkut persiapan menyusun rancangan untuk setiap kegiatan ekonomi. Konsep modern tentang perencanaan, yang harus dipahami dalam arti terbatas, diakui dalam Islam. Karena perencanaan seperti itu mencakup pemanfaatan sumber yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan dan kesenangan manusia.

Dalam dunia bisnis, pemasaran merupakan strategi bisnis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari seorang inisiator kepada pelanggannya. Menurut ajaran Islam, kegiatan pemasar harus dilandasi dengan nilai-nilai islami yang dijiwai oleh semangat ibadah kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin kesejahteraan bersama.

Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi semangat beribadah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi kepentingan sendiri. Istilah pemasaran tidak banyak dikenal pada masa Nabi. Saat itu konsep yang banyak dikenal adalah jual beli (bay’) yang memang sudah ada sebelum islam datang. Pemasaran dapat dilakukan melalui komunikasi dan silaturahmi dalam rangka untuk memperkenalkan produk atau barang dagangan.

Dalam Hadis Nabi dari Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh al-bukhari dan muslim: “Barangsiapa ingin agar rezekinya dilapangkan dan pengaruhnya diluaskan maka hendaknya ia menyambung tali silaturahmi”.²⁸

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pemasaran juga melakukan silaturahmi sesama manusia. Menjaga silaturahmi sesama manusia adalah hal yang wajib. Karena dalam pemasaran tentunya akan bertemu dengan orang banyak, semakin banyak

²⁸ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 192

relasi yang dikenal akan semakin memperpanjang tali silaturahmi. Maka dari itu sebaiknya senantiasa untuk selalu menjaga tali silaturahmi sesama manusia. Islam agama yang sangat luar biasa.

Islam agama yang lengkap, yang berarti mengurus semua hal dalam hidup manusia. Islam agama yang mampu menyeimbangkan dunia dan akhirat; antara hablum minallah (hubungan dengan Allah) dan hablum minannas (hubungan sesama manusia). Ajaran Islam lengkap karena Islam agama terakhir sehingga harus mampu memecahkan berbagai masalah besar manusia.

Pemasaran Jasa Pendidikan Islami, dalam konteks ekonomi islami, sejatinya disertai keikhlasan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah, maka bentuk transaksinya insya Allah menjadi nilai ibadah dihadapan Allah SWT. Ada beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad berhasil dalam melakukan bisnis yaitu: ²⁹

- a. *Shiddiq* (jujur atau benar) dalam berdagang Nabi Muhammad selalu. dikenalebagai seorang pemasar yang jujur dan benar dalam menginformasikan produknya.
- b. *Fathanah* (cerdas) dalam hal ini pemimpin yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik.
- c. *Tabligh* (komunikatif) jika seorang pemasar harus mampu menyampaikan. keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tetap sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran.

4. Etika Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu

Dalam melakukan pemasaran terdapat etika bisnis yang ada. Seperti etika bisnis pemasaran islami. Terdapat ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai etika dalam pemasaran pendidikan menurut Islam, yaitu:³⁰

- a. Memiliki kepribadian yang baik dan spiritual (takwa) sehingga dalam melakukan pemasaran tidak semata-mata untuk kepentingan sendiri melainkan juga untuk menolong sesama. Pemasaran dilakukan dalam rangka untuk melakukan kebajikan dan ketakwaan kepada Allah dan bukan sebaliknya.

²⁹ Idri, *Hadis Ekonomi*, 193

³⁰ Nurul Mubarak “Strategi Pemasaran , 80

- b. Berlaku adil dalam berbisnis (,,adl). Sikap adil akan mendekatkan pelakunya pada nilai ketakwaan.
- c. Berkpribadian baik dan simpatik serta menghargai hak dan milik orang lain secara benar. Sikap simpatik dan menghargai hak orang lain akan membuat orang lain bahagia dan senang. Islam melarang seseorang mengambil hak orang lain secara batil, tidak baik dan tidak simpatik.
- d. Melayani nasabah dengan rendah hati (Khidmah). Rendah hati dan perilaku lemah lembut sangat dianjurkan dalam islam.
- e. Selalu menepati janji dan tidak curang dalam pemasaran termasuk dalam penentuan kuantitas barang dan jasa.
- f. Jujur dan terpercaya (amanah), tidak menukar barang yang baik dengan yang buruk. Ketika seorang tenaga pemasaran mengiklankan barangnya

5. Pola/Pendekatan Pengelolaan Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu

Keberhasilan pelayanan pendidikan tidak bias lepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya. Barata (dalam Iqbal), mengembangkan pola pelayanan pendidikan berdasarkan konsep 3A, yaitu: ³¹

a. *Attitude* (sikap)

Pelayanan jasa pendidikan berdasarkan konsep sikap meliputi tiga prinsip yaitu pertama melayani pelanggan jasa pendidikan berdasarkan penampilan yang sopan dan serasi, kedua melayani pelanggan jasa pendidikan dengan berpikiran positif, sehat dan logis, dan ketiga melayani pelanggan jasa pendidikan dengan sikap menghargai,

b. *Attention* (perhatian)

Pelayanan prima jasa pendidikan berdasarkan konsep perhatian meliputi tiga prinsip yaitu, pertama mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan jasa pendidikan secara sungguh-sungguh, kedua mengamati dan menghargai perilaku pelanggan jasa pendidikan, dan ketiga mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada pelanggan jasa pendidikan dan

³¹Muhammad Iqbal "Pemasaran Jasa Pendidikan dan Implementasinya sebagai Strategi Pengembangan Pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Depok Sleman Yogyakarta" *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 4: 1, (Mei, 2019), 36.

c. *Action* (tindakan)

Pelayanan prima jasa pendidikan berdasarkan konsep tindakan meliputi lima prinsip yaitu pertama mencatat setiap pesanan dari pelanggan jasa pendidikan, kedua mencatat kebutuhan pelanggan jasa pendidikan, ketiga menegaskan kembali kebutuhan pelanggan jasa pendidikan, keempat mewujudkan kebutuhan pelanggan jasa pendidikan, dan kelima menyatakan terimakasih dengan harapan pelanggan jasa pendidikan mau kembali membeli produk jasa pendidikan.

Jadi, inti dari pelayanan pendidikan adalah memberikan layanan terbaik yang berorientasi pada kepentingan pelanggan jasa pendidikan sehingga memungkinkan pemasar jasa pendidikan untuk memberikan kepuasan pelanggan yang terbaik dan optimal. Upaya memberikan pelayanan atas jasa pendidikan yang terbaik dapat diwujudkan jika pemasar jasa pendidikan menonjolkan kemampuan, sikap, perhatian, tindakan, tanggung jawab yang baik serta terkoordinasi seluruh komponen didalamnya.

Tugas Mahasiswa

- Mengidentifikasi dan mengabstraksikan 4 poin penting dari kajian Manajemen Pemasaran Sekolah Islam Terpadu.
 - Konsep Dasar Pengelolaan Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu
 - Misi dan Tujuan Manajemen Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu
 - Kerangka Kerja Manajemen Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu
 - Strategi, Etika dan Pendekatan Pemasaran Jasa Sekolah Islam Terpadu
- Memukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
- Membatasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
Mata Kuliah :
Metode :
Oleh : NIM :
JURUSAN :

 → Isi /Aplod Foto Resmi Mu

→ Isi Identitas MK & Individu

Resensi/Rangkuman:

A Esensi/isi /Sub Materi

B Esensi/isi /Sub Materi

C Esensi/isi /Sub Materi

D Esensi/isi /Sub Materi

summary: Maksimal 10 kalimat

Temukan Nilai/Natijah/Konkhusi dari empat sub materi

Ket: Penulisan maksimal 500Kata

Isi /Aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:

Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

- Dari CK tersebut, Wajib dibuatkan Poster untuk Presentasi Harian.



FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA

Sekretariat: Perpustakaan Universitas Indonesia
Kampus UI Depok 16424

Telepon: (024) 7270751, 7864134, 7270159

Fax: (021) 7863469; WA: 08128522568; Email: fppti.pusat@gmail.com

10 Juni 2024

Nomor : 54./FPPTI-IX/SI/V/2024
Lampiran : Proposal Kegiatan *Scopus Certification Program for Librarian*
Perihal : Undangan Mengikuti *Scopus Certification Program for Librarian*

Yth. Bapak/ Ibu Ketua FPPPTI Wilayah
(daftar nama terlampir)

Di
Tempat


Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) bekerja sama dengan Elsevier menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan Pustakawan dalam memahami Scopus yaitu *Scopus Certification Program for Librarians (SCP)*, yang diagendakan dilaksanakan setiap tahunnya. SCP ini bermanfaat bagi para pustakawan untuk menguasai pengetahuan, keterampilan dan mendapatkan pengakuan yang luas dalam dunia akademik terkait Scopus. SCP dilaksanakan selama 6 (minggu) secara daring dan *asynchronous/selfpaced* disertai 2 kali pertemuan *synchronous* secara daring.

SCP tahun 2024 ini akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni – 16 Agustus 2024, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

No	Tahapan	Tanggal
1.	Pelaksanaan Sertifikasi	24 Juni – 16 Agustus 2024
2.	Pendaftaran	10 - 17 Juni 2024
3.	Seleksi Peserta	19 - 20 Juni 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi	21 Juni 2024

Sehubungan dengan itu,, kami bermaksud mengundang pustakawan dari Perpustakaan Perguruan Tinggi Anggota FPPTI Wilayah untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan tersebut. Syarat dan ketentuan dapat dilihat pada Proposal Kegiatan yang kami lampirkan pada email. Pendaftaran peserta SCP tahun 2024 melalui <https://s.id/PendaftaranSCP2024> . Untuk pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Novy Diana Fauzy, M.A (**0878-3865-8284**).

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Umum

(Mariyah, S.Sos., M.Hum)

Tembusan:
- Sekretaris Jenderal



FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA

Sekretariat: Perpustakaan Universitas Indonesia

Kampus UI Depok 16424

Telepon: (024) 7270751, 7864134, 7270159

Fax: (021) 7863469; WA: 08128522568; Email: fppti.pusat@gmail.com

Lampiran Surat No.: 54/FPPTI-XI/SI/VI/2024

Yth. Bapak/Ibu

No	KETUA WILAYAH	FPPTI WILAYAH
1	Irma Irawati Ibrahim, S.Sos., M.Kom	DKI JAKARTA
2	Hada Hidayat Margana, M.I.Kom	JAWA BARAT
3	Orisa Mahardhini, S.Sos., M.Hum	BANTEN
4	Dr. Ir. Suraya Kaffi Syahpura, M.T.A	LAMPUNG
5	Hadira Latiar, S.IP., M.A	RIAU
6	Dhani Akbar, S.S., M.A	KEPULAUAN RIAU
7	Nasrijal, S.IP	ACEH
8	Laila Hadri Nasution, S.Sos., M.P	SUMATERA UTARA
9	Aivan Sondra, S.Sos.	SUMATERA BARAT
10	Dr. Terttiaavini, S.Kom., M.Kom	SUMATERA SELATAN
11	Syahril, S.Sos.I., M.Ag	BENGKULU
12	Murjoko, S.Kom., M.Kom	JAMBI
13	Suwondo, S.Hum., M.Kom	JAWA TENGAH
14	Risty Prasetyawati, SIP., M.A	DI YOGYAKARTA
15	Melati Purba Bestari, S.Sos	JAWA TIMUR
16	Dr. Made Hery Wihardika Griadhi, S.H., M.Si	BALI
17	Rika Kurniawaty, M.Hum	NUSA TENGGARA BARAT
18	Dr. Mesakh A.P. Dethan, M.Th, MA	NUSA TENGGARA TIMUR
19	Andi Muh. Rajanuddin, S.Sos., M.I.Kom.	KALIMANTAN TIMUR
20	Dwi Cahyo Prasetyo, S.IP., M.A	KALIMANTAN BARAT
21	Laila Rahmawati, S.Ag., S.S., M.Hum	KALIMANTAN SELATAN
22	Soni Marsabessy, S.Sos	SULAWESI UTARA
23	H. Saharuddin Lurang, S.Sos., M.Si	SULAWESI TENGAH
24	Abdi Manaf, ST., MT	SULAWESI BARAT
25	Hazan, S.Hum., M.IP	SULAWESI SELATAN
26	Dr. Ismet Sulila, S.E., M.Si	GORONTALO
27	Azaz Akbar, S.IP., M.IP	SULAWESI TENGGARA
28	Haris Kolengsusu, S.Pd., M.Cs	MALUKU
29	Dr. Thereseta Evilianingsih, S.IP., M.Si	PAPUA

Lampiran Surat No.: 54/FPPTI-XI/SI/VI/2024



GRATIS!

Scopus Certification Program (SCP) for Librarian 2024

Kerjasama FPPTI & Elsevier

Persyaratan Sertifikasi

1. Peserta sertifikasi merupakan pustakawan atau pengelola perpustakaan dari PTN atau PTS di Indonesia yang aktif sebagai anggota FPPTI.
2. Satu Perguruan Tinggi diwakili oleh 1 orang.
3. Memiliki kompetensi Bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan.
4. Memiliki CV dalam Bahasa Inggris.
5. Bersedia mengikuti sertifikasi selama 6 minggu secara daring dan asynchronous/selfpaced disertai 2 kali pertemuan synchronous secara daring.
6. Wajib menyelesaikan seluruh materi pelatihan yang terdiri dari 6 modul dan menyelesaikan setidaknya 80% setiap kuis dalam model; serta menyelesaikan opening serta exit survey.
7. PTN dan PTS tidak perlu memiliki akses Scopus.com premium. Akses ini akan diberikan secara gratis kepada peserta sertifikasi oleh pihak Elsevier.

Format Sertifikasi

1. Program sertifikasi terdiri dari 6 (enam) modul dilaksanakan secara online menggunakan Learning Management System (LMS).
2. Setiap modul membutuhkan waktu satu jam untuk diselesaikan.
3. Modul dilengkapi dengan tutorial video pendek dan kuis, serta dilengkapi dengan latihan dan materi pendukung.
4. Peserta dapat mempelajari modul setiap satu jam per minggu selama enam minggu dengan total waktu enam jam.
5. Peserta terdiri dari 60 pustakawan.
6. Peserta dapat menyelesaikan pelatihan pada hari dan waktu yang telah dipilih, namun tetap harus komitmen di setiap minggunya.
7. Peserta dapat mengulang kuis untuk mencapai nilai yang diinginkan.
8. Peserta yang berhasil menyelesaikan sertifikasi dapat mengunduh sertifikat kelulusan.

Waktu Pelaksanaan

1. Pelaksanaan sertifikasi 24 Juni - 3 Agustus 2024
2. Waktu pendaftaran: 10 - 17 Juni 2024
3. Seleksi peserta: 19 - 20 Juni 2024
4. Pengumuman hasil seleksi: 21 Juni 2024

Materi Sertifikasi*

- Topical Search
- Author Identity
- Scopus Metrics
- Scopus APIs
- Institutions

Narahubung (WA-Chat)

Novy (087838658284)

*Link Materi : s.id/PanduanScopusSertif2024

Link Registrasi
s.id/ScopusSertif2024



Didukung Oleh



Part: 13

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen: Sekolah Islam Terpadu

KEMAMPUAN AKHIR PEMBELAJARAN

Setelah mendapat materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami Konsep Dasar Pengelolaan SIM Sekolah Islam Terpadu
2. Mengidentifikasi Konsep Dasar Pengelolaan SIM Sekolah Islam Terpadu
3. Menjelaskan Konsep Dasar Pengelolaan SIM Sekolah Islam Terpadu

POKOK BAHASAN

1. Kosep Dasar Pengelolaan Sistem Informasi Sekolah Islam Terpadu
2. Kerangka Kerja Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK)
3. Penerapan Sistem Informasi Manajemen di Sekolah Islam Terpadu
4. Implementasi Peran dan Kegunaan SIM sebagai pendukung Manajerial di Sekolah Islam Terpadu

TOPIK BAHASAN

Pengelolaan Sistem Informasi (SIM) Pendidikan akan baik jika dilakukan dengan baik dan profesional. Lembaga pendidikan dituntut mampu mengembangkan sistem informasi manajemen (SIM) guna meningkatkan mutu layanan pendidikan. Saat ini lembaga pendidikan memiliki beragam kebutuhan dalam melaksanakan dan mengelola organisasinya lembaganya. Salah satu kebutuhan tersebut adalah penyediaan akses data dan informasi yang diperoleh dari proses menghimpun, mendata, mengolah, menggandakan, menyimpan, dan mengirim sampai informasi tersebut diterima oleh pembuat keputusan. Keberadaan dan peran teknologi informasi telah membawa era baru dalam perkembangan pendidikan, namun belum diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia. Kondisi tersebut mendorong perubahan-perubahan dalam berbagai aspek untuk melakukan percepatan perbaikan guna mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Pemanfaatan system informasi manajemen dalam bidang pendidikan tersebut biasa disebut dengan SIMDIK sangat diperlukan dalam pengelolaan/layanan pendidikan, yaitu pelayanan pengajaran, administrasi, fasilitas sekolah, dan pelayanan murid (siswa). Selain itu, sistem informasi manajemen pada lembaga pendidikan tersebut sebagai pendukung kegiatan/aktivitas fungsi manajemen yang meliputi: *planning, organizing, staffing, directing, evaluating, coordinating, dan budgeting*. Pengembangan sistem informasi manajemen dalam lembaga pendidikan sangat diperlukan, guna dalam menghadapi persaingan globalisasi lembaga pendidikan dituntut untuk memberikan informasi lebih cepat, akurat, dan nyaman yang merupakan bagian dari kualitas pelayanan, sehingga akan mejadi sebuah keunggulan bersaing dalam lembaga pendidikan (*competitive advantage*). *Competitive advantages* dapat dicapai bila lembaga dapat memberikan jasa atau pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan sehingga pelanggan menjadi puas dengan layanan yang diberikan. Selain itu, pengguna jasa pendidikan juga puas dengan hasil/*output* yang didapatkan serta *outcome* yang berdaya saing. Diskusi tentang SIMDIK Sekolah Islam Terpadu, masih belum berfungsi dengan baik dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh para manajer dan pelaksana di internal lembaga pendidikan, mungkin pada tingkat pendidikan tersier sudah ada staf atau petugas sendiri di departemen/kementrian. Pentingnya Sistem informasi dimanfaatkan oleh para pemakai layanan informasi guna membantu tugas penentuan kebijakan organisasi bagi para kepala sekolah. Keberadaan sistem informasi manajemen pada ujungnya berfungsi untuk menelaah informasi menjadi bahan pengambilan keputusan. Selain informasi dapat diperoleh melalui sistem ini, informasi juga bisa diperoleh dari informasi luar. Sistem informasi manajemen pendidikan yang digunakan dalam menyelesaikan tugas pada bidang-bidang di sekolah memberikan dampak yang besar atas pencapaian tujuan pendidikan yang telah direncanakan.

A. Kosep Dasar Pengelolaan Sistem Informasi Sekolah Islam Terpadu

1. Pengertian Pengelolaan Sistem Informasi

Frasa ”pengelolaan sistem informasi (SIM) Sekolah Islam Terpadu ” merupakan penggabungan dari kalimat ”pengelolaan sistem informasi” dan ” Sekolah Islam Terpadu ”. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan sistem informasi? George M., dan James A. O’Brien, dalam menyebutnya; ”Sitem merupakan serangkaian prosedur sedangkan informasi merupakan data yang sudah diolah, jadi Sistem informasi (SI) adalah kombinasi dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber daya data, dan kebijakan serta prosedur dalam menyimpan, mendapatkan kembali, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi.¹ Sistem informasi dikembangkan untuk tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan bisnis. Sistem informasi memiliki beberapa manfaat diantaranya Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan realtime serta laporan yang komprehensif.²

Telah diketahui bahwa informasi adalah sebuah bahan penting bagi manajemen. Sistem informasi dalam sebuah organisasi dibatasi oleh data yang dapat diperoleh, biaya untuk pengadaan, pengolahan dan penyimpanan dan sebagainya. Sebuah sistem informasi berdasarkan komputer biasanya dapat mengurangi biaya sekaligus meningkatkan kemampuan dan prestasi sistem informasi.³ Andri Kristanto, mendefinisikan sistem informasi merupakan kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat manusia yang akan mengolah data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut.⁴ Menurut Supriyanto. ”Sistem informasi adalah sistem didalam suatu organisasi, yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem Informasi⁵

2. Esensi Manajemen Sistem Informasi Sekolah Islam Terpadu

Manajemen atau Sistem Informasi Manajemen, adalah ”suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para penguuna yang memiliki kebutuhan serupa”⁶ Dalam pendapat lain, Scott, menjelaskan bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM), ini

¹ Deval Gusrión ”Sistem Informasi Madrasah Diniyah Mesjid Al-Marhamah Berbasis Online” *Jurnal Teknologi*. 9:1 (Juni, 2019), 11.

²Tohari, Hamim, Astah Analisis Serta Perancangan Sistem Informasi Melalui Pendekatan UML, (Yogyakarta: Andi, 2017), 22

³ Jogiyanto, HM, *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*, (Yogyakarta: Andi, 2005)

⁴ Andri Kristanto, *Perancangan Sistem Informasi*. (Yogyakarta: Gava Media. 2008), 33

⁵ Aji Supriyanto, *Pengantar Teknologi Informasi*. Edisi Pertama. (Jakarta: Salemba Empat. 2005), 51

⁶ McLeod, Jr., Raymond; Schell, George P. *Sistem Informasi Manajemen* (Terjemahan). (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 33.

adalah "kumpulan sistem yang terkoordinasi dan bersifat rasional. Sistem tersebut bekerja untuk mengolah data menjadi sebuah informasi yang berharga"⁷.

Sekolah Islam Terpadu adalah suatu pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa di pendidikan sekolah umum".⁸ Sekolah Islam Terpadu yang merupakan sebagai alternatif yang dominan untuk melengkapi pelajaran keagamaan dirasakan perlu sebuah pengembangan sistem informasi, adapun sistem nanti yang dikembangkan adalah bagaimana sistem penilaian siswa madrasah dapat tersimpan dan termonitor oleh guru dan orang tua secara online. Secara Lebih Spesifik JISIT, memandang Sekolah Islam Terpadu pada hakikatnya adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep-konsep pendidikan berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah. Konsep operasional Sekolah Islam Terpadu (SIT) merupakan akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan, dan pengembangan ajaran agama Islam, budaya, dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. Istilah "Terpadu" dalam sekolah Islam Terpadu dimaksudkan sebagai penguat (taukid) dari Islam itu sendiri. Maksudnya adalah Islam yang utuh menyeluruh, integral, bukan parsial, syumuliah bukan *juz'iyah*. Hal ini menjadi semangat utama dalam gerak dakwah di bidang pendidikan ini sebagai "perlawanan" terhadap pemahaman sekuler, dikotomi, *juz'iyah*."⁹

Dengan sistem informasi manajemen Sekolah Islam Terpadu, merupakan bagian dari Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan, diharapkan orang tua akan lebih mudah memantau perkembangan ilmu agama dari anak-anaknya begitu juga ustad dan ustadzah (guru) dapat mengetahui perkembangan ilmu agama anak didikannya karena pada sistem yang akan dibangun juga dilengkapi dengan modul monitoring kegiatan agama dirumah.

3. Sistem Informasi dalam Persepektif Islam

Dalam perspektif Islam ada tiga sumber informasi yang selalu digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia, yaitu:¹⁰

a. Wahyu (Al-Qur'an dan Al-Hadits) atau lazim disebut sebagai *Foundamental of Information*. Inilah salah satu karakter khusus tentang

⁷ Scott, George M.. Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen (Terjemahan). (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 102

⁸ Amin Haedar El-saha Isham, *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*. (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), 17

⁹ JSIT Indonesia, *Sekolah Islam Terpadu Konsep dan Aplikasi*, (Bandung, Syamil Cipta Media, 2006), 28.

¹⁰ Ghani, Zulkipli, Abd., 2001. *Islam Komunikasi dan Teknologi Maklumat*, (UP & D Sdn Bhn, Kuala Lumpur. 2001), 76-77.

kajian informasi dalam Islam;

- b. Manusia. Manusia sebagai sumber informasi terbagai pada dua aspek. Aspek pertama adalah ide atau gagasan. Ide dan gagasan dari manusia dapat diolah menjadi informasi. Aspek kedua adalah pendapat atau opini juga dapat diolah menjadi informasi yang menghasilkan scientific information;
- c. Peristiwa atau realitas yang mensejarah. Peristiwa adalah kejadian yang telah diceritakan atau diberitakan dalam kehidupan sosial, dan hal tersebut dapat diolah atau diproduksi menjadi informasi. Ketiga, sumber tersebut tersusun dalam satu sistem yang saling terkait dalam membentuk dan menghasilkan suatu informasi.

Komponen dalam sistem informasi Islam adalah Islam dan Informasi. Umat Islam (sebagai pengguna, dan pengelola Informasi), media massa (sebagai alat/media), produksi informasi (sebagai hasil), dan lembaga penyebaran informasi, lembaga keagamaan, pustaka, tokoh masyarakat dan keluarga, (sebagai sarana) dan tujuan. Komponen atau unsur-unsur tersebut senantiasa bergerak, kontinyu dan selalu dinamis dalam menciptakan suatu kondisi nyata sesuai dengan yang diharapkan.

Tiada satupun perkara baru yang diperbuat manusia, demikian pula ilmu pengetahuan manusia kecuali pasti ada dalilnya didalam Al-Qur'an".¹¹. Salah satu penyebab munculnya masalah ilmu pengetahuan dalam masyarakat adalah semakin mudah informasi menyebar namun semakin sedikit yang punya kesadaran untuk meneliti. Jika kita bertanya pada Al-Qur'an, bagaimana cara kita menghadapi informasi pengetahuan yang begitu luas ini. Maka kita akan temukan firman Allah swt,

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Dan (ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan Kitab (Al Quran) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri” (Q.S. An-Nahl [16]: 89).

Ayat ini menjelaskan untuk menggunakan sebuah alat/ benda sebagai suatu media dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagaimana Allah SWT menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan segala sesuatu, maka sudah sepatutnya jika seorang

¹¹Jamaluddin dan Mubasyir. *Al-Qur'an Bertutur tentang Makanan dan Obat-Obatan*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2006), 35.

menggunakan suatu media tertentu dalam menjelaskan segala hal. Selain berperan untuk menjelaskan, Al Qur'an juga berfungsi sebagai petunjuk, rahmat, dan pemberi kabar gembira bagi orang yang menyerahkan diri.

Telah terbukti bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman umat manusia baik dunia maupun akhirat. Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam artikel ini, saya hanya membahas 1 ayat saja untuk kita pahami lebih dalam dan semoga dapat bermanfaat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِبْحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang yang fasik kepadamu membawa berita, maka tangguhkanlah (hingga kamu mengetahui kebenarannya) agar tidak menyebabkan kaum berada dalam kebodohan (kehancuran) sehingga kamu menyesal terhadap apa yang kamu lakukan". (Q.S. Al-Hujurat, [49]: 6).

Jika dihubungkan dengan dunia sistem informasi ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk selalu berhati-hati dalam menerima (mengambil) sebuah informasi. Pada dasarnya sistem informasi merupakan kombinasi antara teknologi informasi dan manajemen. Salah satu tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi (data) yang berguna bagi para pemakainya serta menyediakan dan menganalisis informasi untuk menghasilkan sebuah keputusan dari suatu perusahaan atau organisasi.

Teknologi, merupakan segala sesuatu yang dapat membantu/ mempermudah/mempercepat segala aktifitas (kegiatan), oleh karena itu informasi yang kita olah jangan sampai merugikan orang lain. Dalam Sistem Informasi, data merupakan fakta yang tercatat (dokumentasi dari kejadian). Dan jika diolah lebih lanjut data tersebut akan menjadi sebuah informasi yang kemudian menjadi pengetahuan. Ciri-ciri informasi yang baik (Good Information) yaitu:

- a. Valid (Benar),
- b. Relevant (sesuai kebutuhan pengguna), dan
- c. Timeline (sesuai waktu) /update. Dan pada intinya ayat ini menjelaskan tentang pengolahan informasi (data).

Menjelaskan tentang bagaimana caranya memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi kembali sehingga dapat bermanfaat dan tidak merugikan siapapun. Maksudnya kita tidak boleh sembarangan mengambil atau menerima sebuah informasi tanpa didasari dengan adanya fakta. Jadi kita diperintahkan untuk memeriksa dan meneliti (mengkaji) apakah informasi (data) itu benar atau tidak.

B. Kerangka Kerja Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK)

1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK)

Sistem informasi manajemen pendidikan atau *Education Management Information Sistem* (EMIS) merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Gordon B. Davis (dalam Rochaety, dkk.), menjelaskan bahwa "sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang mampu menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi"¹²

Hal yang sama dikemukakan oleh Harbangan Siagian, bahwa; "sistem informasi manajemen mengandung arti sekumpulan orang, seperangkat pedoman dan pemilihan peralatan pengolahan data, menyimpan, mengolah dan memakai data untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan memberikan informasi kepada manajer agar dapat dimanfaatkan pada waktunya secara efisien".¹³ Intinya sistem informasi manajemen pendidikan adalah suatu kumpulan dari komponen yang saling berkaitan yang diatur, dikelola atau dikoordinasikan untuk mengubah data menjadi informasi guna mencapai tujuan pendidikan.

Dodi Irawan, menjelaskan bahwa: "sistem informasi manajemen pendidikan adalah sebuah metode manajemen formal dalam penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu sehingga proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengembangan proyek, dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya dapat dilaksanakan secara efektif".¹⁴ Dalam pengertian lain sistem informasi manajemen

¹²Rochaety, dkk. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 12-13.

¹³Siagian Harbangan. *Administrasi Pendidikan*. (Semarang: Satya Wacana, 1989), 22.

¹⁴Syarif Dodi. Irawan, *Sistem Manajemen Data dan Informasi Pendidikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 20.

pendidikan adalah sekelompok informasi dan dokumentasi yang terorganisasi dalam melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, dan penyebaran informasi yang digunakan untuk manajemen dan perencanaan pendidikan.

Pada hakikatnya sistem informasi manajemen pendidikan adalah sebuah sistem kumpulan data, penyimpanan, pencarian, pengolahan dan penyebarannya yang dirancang khusus untuk digunakan oleh para pengambil keputusan dan administrator untuk merencanakan dan mengelola sistem pendidikan secara efisien, efektif dan berkelanjutan¹⁵.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen sistem informasi pendidikan merupakan sebuah sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan perencanaan pendidikan. Ketersediaan informasi pada Sistem informasi manajemen pendidikan melalui proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data.

2. Model Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di Negara-Negara Berkembang: Rujukan Pengembangan EMIS di Indonesia

Pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana pengalaman beberapa negara berkembang dalam menerapkan sistem informasi manajemen pendidikan di negara masing-masing untuk dijadikan pelajaran dari pengalaman mereka dalam menerapkan sistem informasi manajemen pendidikan. Pengalaman Bangladesh, Mozambik, Ghana, dan Nigeria dalam penerapan sistem informasi manajemen pendidikan menunjukkan beberapa fakta penting yang dapat dijadikan pelajaran.¹⁶

a. Proses Pengumpulan dan Analisis Data

Bangladesh, Mozambik, Ghana, dan Nigeria mengalami masalah yang cukup signifikan dalam hal pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis data. Hal ini terjadi sebagai akibat dari persoalan teknis desain instrumen pengumpulan data serta proses pelaksanaannya. Marcus Powell, dalam penelitiannya menemukan bahwa; "di Ghana, Mozambik, dan Nigeria terjadi ketidaksesuaian antara format pendataan dengan catatan yang dimiliki oleh sekolah"¹⁷. Kondisi ini mengakibatkan pihak sekolah tidak dapat merespon permintaan data dari instansi pemerintah yang menangani pendidikan.

¹⁵Powell, Marcus. *Rethinking Education Management Information Systems: Lessons from and Options for Less Developed Countries*. (Cambridge: InfoDev, 2006), 4,

¹⁶Anwar Darwis "Sistem Informasi Manajemen Pada Lembaga Pendidikan Islam" *Kelola: Journal of Islamic Education Management*. 2: 1 (April, 2017), 66

¹⁷Marcus Powell, *Rethinking Education*, 14.

Masalah lain yang terkait dengan pengumpulan data menurut Powell, adalah: ¹⁸ terjadinya perbedaan hasil yang diperoleh akibat adanya perbedaan kerangka metodologi dan sampel, sebagaimana yang terjadi di Ghana. UNESCO dengan pendekatan *top down* yang didukung oleh Kementerian Pendidikan melakukan pendataan, namun kegiatan ini tidak mendapatkan respon yang baik dari masyarakat karena dianggap sebagai pemaksaan. Di pihak lain, UNICEP dan JICA dengan pendekatan *bottom up* melakukan pendataan dimana pihak sekolah terlibat aktif di dalamnya. Nigeria dan Bangladesh mengalami pengalaman yang hampir sama. Di Nigeria, kegiatan pengumpulan data berhenti ketika tidak lagi tersedia dana untuk kegiatan dimaksud. Begitu pula di Bangladesh yang sangat tergantung pada bantuan luar negeri. Secara umum, masalah yang terkait dengan pengumpulan data, selain terkait dengan masalah teknis, yang paling dominan adalah kurangnya komitmen dari mereka yang terlibat langsung pada proses pengumpulan data. Di samping itu, juga terdapat masalah yang terkait dengan birokrasi pemerintahan. Ketiga factor ini dapat dilihat di Nigeria, Ghana, dan Mozambik.

b. Pemanfaatan Output Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

Di keempat negara yang menjadi sampel penelitian Powell (2006), dalam Darwis, menunjukkan bahwa data sistem informasi manajemen pendidikan digunakan dalam proses pengambilan kebijakan dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi: ¹⁹

- 1) Di Ghana menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen pendidikan berperan penting dalam perencanaan operasional baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 2) Di Nigeria sistem informasi manajemen pendidikan tidak memberikan kontribusi positif terhadap pengambilan kebijakan disebabkan tidak tersedianya data valid dan tepat waktu.”
- 3) Di Mozambik sistem informasi manajemen pendidikan cukup berperan positif pada proses pengambilan kebijakan nasional, namun kurang berperan di tingkat daerah.
- 4) Di Bangladesh sistem informasi manajemen pendidikan belum memberikan kontribusi yang baik pada level nasional karena kurangnya kapasitas dan komitmen, namun berperan cukup baik pada tingkat daerah atau kabupaten.

¹⁸Marcus Powell, *Rethinking Education*, 17

¹⁹ Darwis ”Sistem Informasi, 67.

Dari beberapa kasus yang terjadi di negara-negara berkembang yang disebutkan sebelumnya, menunjukkan bahwa ada kecenderungan sistem informasi manajemen pendidikan memainkan peran yang semakin penting dalam mendukung proses desentralisasi pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan berperan penting dalam memberikan informasi untuk membantu negara, kantor provinsi dan kabupaten merumuskan rencana operasional dan penyediaan anggaran tahunan untuk mendanai pelaksanaan program-program pendidikan.

c. Penyebaran Output Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

Bangladesh, Ghana, Nigeria, dan Mozambik telah berupaya melakukan penyebaran output sistem informasi manajemen pendidikan. Namun proses penyebaran output sistem informasi manajemen pendidikan tidak didukung dengan strategi yang baik sehingga data didistribusikan dengan format yang sulit dimengerti oleh orang-orang di luar sistem pendidikan. Ghana sedikit lebih maju dengan menyediakan data elektronik tapi dalam bentuk Acrobat Reader (pdf) Format dan sebagai konsekuensinya pengguna tidak mudah memanfaatkannya. Oleh karena itu, Powell menekankan; "kebutuhan adanya strategi diseminasi yang memungkinkan data atau output sistem informasi manajemen pendidikan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal".²⁰ Di samping itu, sebelum melakukan diseminasi perlu melakukan identifikasi kelompok sasaran, menentukan dalam format data apa yang harus diproduksi dan periode waktu di mana ia harus didistribusikan.

3. Peran Tehnologi Informasi dan Komunikasi dalam Mendukung Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan instrumen utama dalam sistem informasi manajemen pendidikan. Akan tetapi, hal ini sangat terkait dengan pilihan bangunan infrastruktur TIK dalam mendukung sistem informasi manajemen pendidikan di masing-masing negara. Bagaimanapun juga, setiap negara berbeda dalam kemampuan dan perkembangan tehnologi yang memungkinkan perbedaan dalam memilih bangunan infrastruktur TIK. Pelajaran dari Ghana, Mozambik dan Nigeria menunjukkan bahwa pendekatan minimalis dapat dipilih untuk menekan biaya sarana secara efektif dan efisien. Pendekatan ini sangat cocok bagi negara-negara yang tidak memiliki keterampilan untuk menggunakan dan mempertahankan sistem yang kompleks.

4. Pembangunan Institusi dan Pengembangan Kapasitas

Pembangunan institusi dan pengembangan kapasitas atau *institutional building and capacity development* telah terjadi di keempat negara, namun hanya Ghana dan Nigeria yang telah berupaya mendukung proses pembangunan institusi dan pengembangan kapasitas

²⁰ Powell, *Rethinking Education*, 20

secara koheren. Ghana memberikan contoh praktik terbaik dalam pembangunan institusi (kelembagaan) dan pengembangan kapasitas pada semua tingkat hirarki pendidikan. Hal ini dimungkinkan oleh program reformasi yang komprehensif, yang tujuannya secara spesifik untuk mengembangkan proses pengambilan keputusan di semua tingkat sistem pendidikan. Sementara itu, di Nigeria, Mozambik, dan Bangladesh pembangunan kelembagaan dan pengembangan kapasitas tidak dapat dilakukan secara maksimal dengan adanya berbagai kendala di masing-masing negara.

C. Penerapan Sistem Informasi Manajemen di Sekolah Islam Terpadu

1. Kebijakan Penerapan sistem informasi manajemen di Sekolah Islam Terpadu

Kebijakan di tingkat Persekolahan berada di lingkungan Kemendikbud dikenal dengan Data pokok pendidikan (Dapodik) merupakan salah satu sistem informasi publik yang digunakan di Indonesia yang menyimpan berbagai informasi mengenai sekolah, siswa dan juga guru-guru di seluruh Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang “Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan, Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara atau penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.²¹

2. Pemberlakuan DAPODIK

Pemberlakuan DAPODIK, bagi Persekolahan berada di lingkungan Kemendikbud. Ada 4 (empat) kelompok utama jenis data yang dikumpulkan dari satuan pendidikan, yaitu:

- a. Data Satuan Pendidikan (F-SEK), meliputi Identitas satuan pendidikan, Sarana dan Prasarana (Tanah, Bangunan dan Ruang)
- b. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (F-PTK), meliputi Identitas Pribadi, Kepegawaian, Pendidikan Formal, Riwayat.
- c. Data Peserta Didik (F-PD) meliputi identitas pribadi, alamat, orang tua, prestasi.
- d. Substansi Pendidikan, meliputi rombongan belajar, pembelajaran, anggota rombongan belajar, jadwal, dll.

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1

3. Jenis Data Pemberlakuan DAPODIK

Dapodik, sebagai suatu sistem yang sudah diimplementasikan evaluasi sistem perlu dilakukan. Evaluasi merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk menentukan keberhasilan implementasi suatu sistem informasi. Dengan adanya hasil evaluasi ini, diperoleh faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan sistem serta mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari implementasi sistem tersebut. Adapun Jenis Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Dapodik mengelola 4 jenis data (Tiga Entitas Pendidikan dan Substansi Pendidikan) yaitu: ²²

- a. PTK (Pendidikan dan Tenaga Kependidikan),
- b. Satuan Pendidikan,
- c. Peserta Didik
- d. Substansi Pendidikan.

4. Penerapan Sistem Informasi Manajemen di Sekolah Islam Terpadu

Penerapan sistem informasi manajemen di Sekolah Islam Terpadu dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode dan juga melalui beberapa proses. Dalam hal ini ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh operator sekolah dan kepala sekolah demi terciptanya sistem informasi manajemen yang bermutu di lembaga sekolahnya. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:²³

a. Pengumpulan data sistem informasi manajemen di Sekolah Islam Terpadu.

Salah satu bentuk Sistem Informasi Manajemen dalam Pendidikan adalah Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Dapodik adalah salah satu sistem pengolah data yang terintegrasi untuk menunjang tata kelola data dan informasi yang terpadu. Dapodik ini dibuat dengan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengumpulan data pendidikan agar memudahkan proses perencanaan dan evaluasi pendidikan. Dapodik mulai diberlakukan pada tahun 2006, hingga saat ini dapodik terus mengalami pembaharuan aplikasi. Aplikasi dapodik versi terbaru adalah 4.1.1 untuk jenjang SD, SMP, dan SLB yang dikeluarkan pada bulan juni 2016.

²² Roni Yunis , Fauziatul Laila Ibsah , Desi Arisandy, “Analisis Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada SD Kabupaten Batu Bara,” *Jurnal JSM STMIK Mikroskil*,.18:1,(April,2017).72

²³ Sholehchan, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Di SMP Islam Terpadu Al Ummah Jombang" *Chalim: Journal of Teaching and Learning*, 1:1, (Juni, 2021), 12

b. Peran Operator Sekolah dalam Implementasi dapodik di Sekolah Islam Terpadu

Adanya tenaga pengelola Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan. Wujud adanya pengelola IT atau Operator sekolah yang melaksanakan proses dari Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Pada pelaksanaannya Operator dibantu oleh Unit Manajemen Sekolah yang terdiri dari koordinator kesiswaan, staf tata usaha dan dewan guru. Adapun, peran operator sekolah dalam implementasi dapodik adalah: 1) Menyebarkan formulir pendataan kepada sekolah, PTK, dan Peserta didik dalam rangka mendapatkan data untuk dientri kedalam aplikasi. 2) Mengentri data sesuai dengan data yang terisi di formulir pendataan. 3) Mengirim data ke server melalui aplikasi dapodik.

c. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data, dalam kegiatan pengumpulan data diambil dari unit kegiatan manajemen pendidikan, guru, komite sekolah, alumni dan wali murid. Data yang telah masuk pada pengelola IT atau Operator akan diklasifikasikan sesuai kode data yang telah ditetapkan, kemudian data tersebut akan diolah kemudian akan disimpan secara manual dalam brankas yang telah disediakan. Hal ini dilakukan sebagai arsip apabila dibutuhkan dikemudian hari oleh kepala sekolah ataupun yang berkepentingan. Dengan adanya pengklasifikasian data maka proses pengumpulan data yang dilakukan akan menjadi optimal, sebab data yang sudah diklasifikasikan tidak akan tercampur aduk, karena sudah sesuai dengan kode yang telah ditentukan oleh personalia Sistem Informasi Manajemen, meskipun demikian tidak hanya sampai disitu, akhir dari pengumpulan data juga dilakukan secara manual, agar dikemudian hari apabila dibutuhkan hardcopy dan juga softcopy nya akan mudah di cari di arsip brankas sekolah.

d. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen di Sekolah Terpadu

Pengelolaan atau pemrosesan data, pada kegiatan ini ada sebagian data yang diolah atau diproses oleh unit manajemen sekolah, dewan guru dan karyawan, maka pengelola IT atau Operator hanya menindak lanjuti dengan memasukkan olahan data pada form program aplikasi Dapodik sesuai dengan data yang akan diolah atau diproses. Selanjutnya ketika ada data yang belum diolah atau diproses oleh unit manajemen sekolah maka langkah operator adalah mengklasifikasi sesuai dengan arsip atau brankas. Kemudian diproses dengan memilih peralatan yang tepat baik secara manual maupun elektronik yang akan digunakan dalam pengolahan data.

D. Implementasi Peran dan Kegunaan Sistem Informasi Manajemen sebagai pendukung Manajerial di Sekolah Islam Terpadu

Sistem informasi dimanfaatkan oleh para pemakai layanan informasi guna membantu tugas penentuan kebijakan organisasi bagi para kepala sekolah. Keberadaan sistem informasi manajemen pada ujungnya berfungsi untuk menelaah informasi menjadi bahan pengambilan keputusan. Selain informasi dapat diperoleh melalui sistem ini, informasi juga bisa diperoleh dari informasi luar. Sistem informasi manajemen pendidikan yang digunakan dalam menyelesaikan tugas pada bidang-bidang di sekolah memberikan dampak yang besar atas pencapaian tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Pada akhirnya, peranan tersebut juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Peran-peran tersebut, antara lain²⁴

1. Peranan SIM Pendidikan dalam Aspek Kurikulum

Kepala madrasah bertanggung jawab terhadap penyusunan kelengkapan data pembelajaran, kelengkapan data bimbingan konseling, kelengkapan data kegiatan praktikum, dan penyusunan kelengkapan data kegiatan belajar peserta didik baik di kelas maupun di perpustakaan.

Sistem informasi manajemen dapat membantu melancarkan aktivitas administrasi kurikulum. Data-data mengenai kurikulum pembelajaran biasanya membutuhkan banyak dokumen. Baik itu berupa hard copy maupun soft copy. Dokumen-dokumen tersebut dapat dihimpun dan diarsipkan ke dalam tempat atau lemari penyimpanan. Bagi sekolah yang sudah menerapkan sistem komputerisasi akan lebih memudahkan dalam menyimpan dan mengaksesnya kembali. Meskipun demikian, kedua cara penyimpanan tersebut sama-sama menerapkan sistem dan metode dalam pengelolaan dokumen kurikulum.

Dengan adanya sistem penyimpanan basis data kurikulum maka kepala Sekolah/madrasah dapat mengecek dan memantau sejauh mana kurikulum yang diterapkan dapat berjalan efektif atau tidak. Apabila terdapat data yang belum lengkap, maka kepala madrasah dapat mengetahuinya melalui sistem yang diterapkan. Selain itu, kepala sekolah juga dapat melakukan penilaian terkait progres kurikulum yang berjalan. Sehingga nantinya dapat diputuskan hal-hal apa saja yang harus diperbaiki demi keberhasilan kurikulum. Landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum meliputi: landasan filosofis, psikologis, sosial-budaya, politik, dan IPTEK (Ilmu dan Teknologi) (Hasan, 2017).

²⁴ Sholechan, "Implementasi Sistem Informasi, 14

2. Peranan SIM Pendidikan bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan

kepala sekolah sebagai manajer dalam memberdayakantenaga kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif guna meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah. Selain itu kepala madrasah juga harus mau dan mampu memberdayagunakan seluruh sumber daya sekolah dalam rangka mewujudkan visi, misi dan mencapai tujuan. Kepala madrasah juga harus mampu bekerja melalui orang lain (wakil-wakilnya), serta berusaha untuk senantiasa mempertanggungjawabkan setiap tindakan.

Dalam hal ini, kepala sekolah harus bersikap demokratis dan memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga kependidikan untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Misalnya memberi kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan profesinya melalui berbagai penataran dan lokakarya sesuai dengan bidangnya masing-masing.

3. Peranan SIM Pendidikan pada Bidang Peserta Didik

Tugas kepala sekolah dalam pengelolaan administrasi peserta didik di antaranya berupa tugas menyusun kelengkapan data administrasi peserta didik, menyusun kelengkapan data administrasi kegiatan ekstrakurikuler, menyusun kelengkapan data administrasi hubungan sekolah dengan orang tua peserta didik. Selain itu, kepala madrasah juga dapat memantau peserta didik berdasarkan Informasi yangdi dapat diperoleh melalui jurnal kelas, absen siswa, data kemajuan belajar siswa, dan penilaian siswa baik kegiatan yang dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas seperti kegiatan ekstrakuriler, studi banding, upacara, dan program pendidikan lainnya.

Melalui informasi yang dihasilkan dari administrasi peserta didik maka kepala sekolah dapat memutuskan sesuatu yang membuat peserta didik mengalami peningkatan baik prestasi akademik maupun non-akademik. Kepala sekolah/madrasah juga dapat memutuskan sesuatu yang bisa memfasilitasi peserta didik merasa nyaman dalam pembelajaran di kelas.

4. Peran SIM Pendidikan pada Bidang Sarana dan Prasarana

Sistem informasi manajemen pendidikan "dapat membantu kepala madrasah dalam menyajikan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah dalam bentuk inventarisasi barang.di antaranya berupa mengembangkan kelengkapan data administrasi gedung dan ruang,

pengembangan data administrasi mesin kantor, pengembangan kelengkapan data administrasi buku atau bahan pustaka serta pengembangan kelengkapan data administrasi alat laboratorium”²⁵.

5. Peran SIM Pendidikan Sebagai Pendukung Keputusan

Salah satu tugas penting seorang kepala sekolah adalah pengambilan keputusan yang berkenaan dengan lembaga pendidikan. Ada beberapa jenis-jenis keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah dari berbagai sudut pandang dan secara garis besar dikenal tiga jenis keputusan, yaitu:

a. Keputusan berdasarkan tingkat kepentingan

Pada umumnya sebuah lembaga pendidikan memiliki hierarki manajemen. Secara klasik hierarki ini terbagi atas tiga tingkatan, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat puncak berkaitan perencanaan yang bersifat strategis. Manajemen tingkat menengah menangani masalah pengawasan dan kegiatannya lebih bersifat administrasi. Manajemen tingkat bawah yaitu manajemen operasional, berkaitan dengan kegiatan operasional, berkaitan operasi sehari-hari.

b. Keputusan yang berdasarkan regularitas

Keputusan yang dikemukakan oleh Herbert A.Simon dibagi menjadi keputusan terprogram (programed decision) dan keputusan tidak terprogram (nonprogramed decision), yaitu:²⁶

1) Pengambilan keputusan terprogram

Pengambilan keputusan ini bersifat rutinitas dan berulang-ulang dengan cara penanggulangan telah ditentukan untuk penyelesaian masalah melalui: 1) prosedur, yaitu serangkaian langkah yang berhubungan dan berurutan yang harus diikuti oleh pengambil keputusan, 2) aturan, yaitu ketentuan yang mengatur apa yang harus dan apa tidak boleh dilakukan oleh pengambilan keputusan, 3) kebijakan, yaitu pedoman yang menentukan parameter untuk membuat keputusan.

²⁵ Mulyasa, E. *Kurikulum berbasis kompetensi: Konsep, karakteristik, dan implementasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002), 77

²⁶ Sholechan, "Implementasi Sistem Informasi, 15

2) Pengambilan keputusan tidak terprogram

Pengambilan keputusan ini bersifat tidak rutinitas dan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak berstruktur dan juga dibuat sebagai respon terhadap masalah-masalah unik. Keputusan berdasarkan lingkungan Keputusan ini dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu: Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti yaitu: (a) Alternatif yang harus dipilih hanya memiliki satu konsekuensi jawaban atau hasil, (b) Keputusan yang akan diambil didukung oleh informasi atau data yang lengkap sehingga hasil dari setiap tindakan yang dilakukan dapat diramalkan secara akurat, (c) Pengambilan keputusan harus mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

3) Pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko

Resiko terjadi kalau hasil pengambilan keputusan walaupun tak dapat diketahui dengan pasti akan tetapi diketahui nilai kemungkinannya. Pengambilan keputusan dapat berlangsung dengan hal-hal sebagai berikut: 1) Alternatif yang dipilih mengandung lebih dari satu kemungkinan hasilnya 2) Pengambilan keputusan mewakili lebih dari satu alternatif tindakan. 3) Adanya asumsi bahwa pengambil keputusan mengetahui peluang yang akan terjadi terhadap berbagai tindakan dan hasil.

4) Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti

Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti meliputi beberapa hal berikut: "1) Tidak diketahui sama sekali yang mungkin timbul serta kemungkinan munculnya kondisi-kondisi itu, 2) Pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang benar. 3) Yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil dari suatu tindakan, tetapi tidak diprediksi berapa besar probabilitas setiap hasil tersebut 4) Hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah.

Aplikasi Dapodik terbaru dapat diunduh pada laman:

https://cdn-dapodik.kemdikbud.go.id/panduan/Panduan_Lengkap_Aplikasi_Dapodik_versi_2024.pdf

Tugas Mahasiswa

- Mengidentifikasi dan mengabstraksikan 4 poin penting dari kajian Pengelolaan SIM Sekolah Islam Terpadu.
 - Kosep Dasar Pengelolaan Sistem Informasi Sekolah Islam Terpadu
 - Kerangka Kerja Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK)
 - Penerapan Sistem Informasi Manajemen di Sekolah Islam Terpadu
 - Implementasi Peran dan Kegunaan Sistem Informasi Manajemen sebagai pendukung Manajerial di Sekolah Islam Terpadu
- Memukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
- Membatasi Penulisan keseluruhan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
Mata Kuliah :
Metode :
Oleh : NIM :
JURUSAN :

 → Isi /Aplod Foto Resmi Mu

→ Isi Identitas MK & Individu

Resensi/Rangkuman:

A Esensi/isi Sub Materi

B Esensi/isi Sub Materi

C Esensi/isi Sub Materi

D Esensi/isi Sub Materi

summary: Maksimal 10 kalimat

Temukan Nilai/Natijah/Konklusi dari empat sub materi

Ket: Penulisan maksimal 500Kata

→ Isi /Aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:

Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

- Dari CK tersebut, Wajib dibuatkan Poster untuk Presentasi Harian.

Part: 14

Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan: Sekolah Islam Terpadu

Sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu

KEMAMPUAN AKHIR PEMBELAJARAN

Setelah mendapat materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami Konsep Dasar Evaluasi dan Penjaminan mutu Sekolah Islam Terpadu
2. Mengidentifikasi Konsep Evaluasi dan Penjaminan mutu Sekolah Islam Terpadu
3. Menjelaskan Evaluasi dan Penjaminan mutu Sekolah Islam Terpadu

POKOK BAHASAN

1. Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
2. Kebijakan Pengembangan Sistem penjaminan mutu Pendidikan
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Penjaminan Mutu di Lembaga Pendidikan

TOPIK BAHASAN

Tidak dapat disangkal lagi mutu pendidikan Indonesia hingga saat ini posisinya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara serumpun. Hal ini diduga bukan karena standar nasional pendidikan yang kurang berkualitas namun pemenuhan dan implementasi standar nasional pendidikan belum berjalan secara maksimal. Hasil akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-S/M) bahwa perkembangan mutu sekolah/madrasah belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan terhadap mutu pendidikan. Disinilah kontrol pendidikan merupakan hal yang penting dan mendasar baik pada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kontrol dalam hal apa yang diajarkan, bagaimana cara menyampaikannya, disampaikan oleh siapa, dan mekanisme apa yang harus dilibatkan di dalamnya pemantauan, evaluasi, dan peninjauan? Selain itu, bagaimana seharusnya para pelajar agar berhasil. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya sistem penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, diarahkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Dan Selain itu, bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga bertumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Namun, mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan sehingga sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan yang diharapkan. Dalam upaya tersebut pemerintah telah banyak melakukan terobosan kebijakan dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Salah satunya membentuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada tingkat satuan pendidikan. Dalam memberikan masukan implementasi kebijakan tersebut dilakukan kajian Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Hasil rekomendasi kajian tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Kajian sistem penjaminan mutu pendidikan pada prinsipnya dilakukan untuk menyusun rekomendasi kebijakan dalam memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan. Dengan adanya sistem penjaminan mutu pendidikan maka akan memberikan dampak pada layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pentingnya Penjaminan mutu pendidikan merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, bertahap dan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam memenuhi atau melawati standar pendidikan nasional. Disparitas kodisitas satuan pendidikan menuntut agar setiap satuan pendidikan merumuskan program dan strategi sesuai dengan karakteristik sekolah dan tuntutan stakeholder. Oleh karena itu, Evaluasi penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab satuan pendidikan sehingga strategi penjaminan mutu pendidikan dimungkinkan memiliki ciri khas antar sekolah.

A. Konsep Dasar Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

1. Memahami Makna Mutu Pendidikan

Istilah mutu atau kualitas yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *quality*, dalam kamus "*the standard of something when it is compared to other things like it*"¹, memberikan arti bahwa kualitas adalah suatu standar atau ukuran dari sesuatu ketika dibandingkan dengan hal lain yang sama. Berdasarkan istilah tersebut, dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:²

- Memiliki kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa.
- Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain-lain.
- Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja.
- Memiliki mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita.

Hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Hakikatnya, mutu di bidang pendidikan meliputi mutu *input*, proses, *output*, dan *outcome*. *Input* pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAIKEMB (Pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Menyenangkan, dan Bermakna).

- Input* pendidikan dinyatakan bermutu jika siap diproses, masalah mutu harus menjadi perhatian termasuk dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, masalah mutu dalam dunia pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah dan masyarakat. Mengingat masih diperlukan upaya yang serius guna meningkatkan mutu pendidikan serta persaingan global dalam bidang pendidikan yang menunjukkan kecenderungan makin meningkat dengan baik.
- Output* dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non akademik peserta didik tinggi.

¹ A S Hornby. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. (New York. Oxford University Press, 2010), 1198

² Sudarwan, Deanim. 2008. *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2008), 53.

c. *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar atau sesuai, dan semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan.³

2. Hakikat Evaluasi dan Sistem Penjaminan mutu Pendidikan

Evaluasi atau kontrol merupakan hal yang penting dan mendasar baik pada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kontrol dalam hal apa yang diajarkan, bagaimana cara menyampaikannya, disampaikan oleh siapa, dan mekanisme apa yang harus dilibatkan di dalamnya pemantauan, evaluasi, dan peninjauan? Selain itu, bagaimana seharusnya para pelajar agar berhasil. Selanjutnya disebut Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Seperti yang disampaikan oleh Hoys, Bayne, Wood, bahwa:

*"The control of education is and always has been of fundamental importance to both local and central government. Local government is concerned because the schooling of the children of any community will have immediate implications for the health and wealth of that community. The central government likewise is concerned for the national interest to ensure a continuance of the developments in health, welfare, social and economic terms of the nation state. Therein lies the dichotomy. Who ought to have the overriding control, the ultimate power in terms of what is taught, how it is delivered and by whom, and what mechanisms should be involved in its monitoring, evaluation and review? In addition, how should the learners be managed?"*⁴

Yang dibaksud oleh Hoys, Bayne, Wood yaitu: "Pengendalian pendidikan selalu menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah daerah prihatin karena pendidikan anak-anak di komunitas mana pun akan berdampak langsung terhadap kesehatan dan kesejahteraan komunitas tersebut. Pemerintah pusat juga menaruh perhatian terhadap kepentingan nasional untuk menjamin kelangsungan pembangunan di bidang kesehatan, kesejahteraan, sosial dan ekonomi negara. Disitulah letak dikotominya. Siapa yang seharusnya mempunyai kendali utama, kekuasaan tertinggi dalam hal apa yang diajarkan, bagaimana penyampaian dan oleh siapa, dan mekanisme apa yang harus dilibatkan dalam pemantauan, evaluasi dan peninjauan? Selain itu, bagaimana seharusnya peserta didik dikelola?"

Hal serupa, seperti yang disampaikan oleh Sallis, "Evaluasi/pengontrol mutu atau pengawas biasanya melakukan kontrol mutu. Inspeksi dan pengujian adalah metode pengendalian kualitas yang paling umum, dan banyak digunakan dalam pendidikan untuk menentukan apakah

³ Usman, Husaini. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 41

⁴ Hoys Charles, Jardin Colin Bayne, Margaret Wood. *Improving Quality in Education*. (London and New York: Falmer Press.2005), 17

standar terpenuhi. Jaminan mutu berbeda dengan kontrol mutu”⁵. Selama proses berjalan, jaminan mutu untuk mencegah kesalahan yang terjadi berulang. Jaminan kualitas merancang kualitas ke dalam proses untuk mencoba memastikan bahwa produk tersebut diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Untuk menjamin mutu barang atau jasa maka perlu ada sistem yang dikenal dengan sistem penjaminan mutu yang memastikan proses berjalan sesuai dengan standar mutu yang dijaga dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh sistem penjaminan mutu.

Penjaminan Mutu Pendidikan yang termaktub dalam Permendikbud No. 28 Tahun 2016; adalah "suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu"⁶. Pada hakikatnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Sekolah Islam terpadu terkait didalamnya.

Penerapan penjaminan mutu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana sekolah dan ketersediaan pendidik serta oleh timbul dan terpeliharanya budaya mutu pada seluruh warga sekolah. Pemenuhan standar yang diterapkan di sekolah, baik itu standar nasional maupun standar lainnya tidak dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga pemenuhannya menggunakan skala prioritas dengan mempertimbangkan standar yang memiliki ketercapaian tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekolah, baik tenaga, sarana prasarana maupun pembiayaan. Agar proses pemenuhan standar di sekolah dapat terlaksana secara efektif, efisien dan hasil yang optimal perlu adanya perantara, kolaborasi dan komitmen bersama dari seluruh pihak yang terkait (para pembina, stakeholder dan penyelenggara sekolah) secara berkelanjutan dan sinergis dalam pemenuhan standar, sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing. Implementasi pemenuhan standar adalah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh satuan pendidikan secara sistematis, terarah, akuntabel

⁵ Sallis, Edward. *Total Quality Management in Education*, terjemahan Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi. (Yogyakarta: IRCISOD, 006). 17,

⁶ Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Pasal 1 angka 2

dan berkesinambungan dalam pelaksanaan pemenuhan standar, sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan/kesiapan masing-masing sekolah.

Evaluasi dan Pengendalian mutu pada hakikatnya, merupakan salah satu fungsi manajemen. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai dan memberikan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja guru atau personil lainnya yang terlibat dalam proses pendidikan untuk menjamin bahwa mutu atau kualitas kegiatan tersebut terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi dan pengendalian mutu adalah untuk melakukan pengukuran dan perbaikan agar apa yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal. Sesuai dengan konsep mutu dalam pendidikan yang meliputi unsure input-proses-output. Maka evaluasi dan pengendalian terhadap mutu pendidikan juga diarahkan pada aspek input, proses dan output. Secara lebih rinci pengendalian terhadap mutu pendidikan ditujukan pada aspek mutu kurikulum pembelajaran, mutu pembinaan murid dan aspek mutu manajemen sekolah yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya dan dana pendidikan seperti: personil, siswa, sarana dan fasilitas, biaya dan kerjasama sekolah dengan masyarakat. Sehingga Lembaga Pendidikan tersebut memiliki daya saing yang tinggi.

3. Fungsi Evaluasi dan Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Secara umum Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Tujuannya adalah untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga bertumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Namun, mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan sehingga sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan yang diharapkan.⁷

Tujuan sistem penjaminan mutu yaitu menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sistem penjaminan mutu memiliki fungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

- a. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu.

⁷ Kemendikbud. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. (Jakarta: Balitbang Kemendikbud 2019), 19

- b. Dan Selain itu, bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga bertumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Namun, mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan sehingga sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan yang diharapkan. Dalam upaya tersebut pemerintah telah banyak melakukan terobosan kebijakan dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Salah satunya membentuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada tingkat satuan pendidikan.

B. Kebijakan Pengembangan Sistem penjaminan mutu Pendidikan

Untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya sistem penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, Pengembangan Sistem penjaminan mutu Pendidikan berdasarkan pada kebijakan Peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:⁸

1. Kebijakan Umum Pengembangan Sistem penjaminan mutu Pendidikan

Kebijakan Umum Pengembangan Sistem penjaminan mutu Pendidikan

- a. Peran pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan anak bangsa sangat penting. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3), Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- b. Berdasar pada UU Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan kemudian tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak antara lain pemerintah daerah, satuan pendidikan dan masyarakat.

2. Kebijakan Pengembangan Sistem penjaminan mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang. Sistem penjaminan mutu di Indonesia salah satunya diatur melalui Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah

⁸ Kemendikbud *Sitem Penjaminan Mutu Pendidikan.*, 21

(Kemendikbud, 2016). Permendikbud ini menjelaskan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.

3. Kebijakan Pengembangan Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pada Pendidikan Tinggi

Dasar hukum implementasi SPM Dikti ini adalah:

- a. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti, sebagaimana diatur di dalam Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

C. Sistem Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Hakikat Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, diarahkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, diarahkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan meliputi SPMI dan SPME.

2. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SPMI

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SPMI Dikdasmen dilaksanakan dengan melalui lima siklus tahapan.

- a. Pemetaan mutu, dilaksanakan melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) berdasarkan SNP.
- b. Penyusunan rencana peningkatan mutu, dilaksanakan dengan menyusun rencana pengembangan sekolah dan rencana aksi yang didasarkan pada peta mutu, kebijakan Pemerintah (kurikulum dan SNP), serta rencana strategis pengembangan sekolah.
- c. Pelaksanaan rencana peningkatan mutu, melalui pemenuhan mutu pendidikan dan capaian SNP yang di laksanakan dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran.

- d. Monitoring dan evaluasi, dilakukan untuk memastikan pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai rencana yang telah disusun dan dituangkan dalam laporan pelaksanaan pemenuhan SNP dan implementasi rencana pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan. Monitoring dan evaluasi juga menghasilkan rekomendasi tindakan perbaikan, dengan demikian maka akan ada jaminan kepastian keberlanjutan terjadinya peningkatan mutu.
- e. Penetapan standar mutu baru dan strategi peningkatan mutu, melalui penyusunan strategi peningkatan mutu dari capaian sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan penetapan standar mutu baru yang lebih tinggi guna membangun budaya mutu di satuan pendidikan.

Keberhasilan SPMI Dikdasmen dapat dilihat dari tiga indikator. Pertama, indikator keluaran, meliputi kemampuan satuan pendidikan menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu serta keberadaan organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Kedua, indikator hasil, yaitu apakah proses pembelajaran serta pengelolaan satuan pendidikan sudah berjalan sesuai standar. Ketiga, indikator dampak, di antaranya terbangunnya budaya mutu di satuan pendidikan serta adanya peningkatan mutu hasil belajar. Terdapat beberapa faktor penentu keberhasilan pelaksanaan SPMI Dikdasmen, yaitu budaya organisasi, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, partisipasi pemangku kepentingan, komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan, akuntabilitas, transparansi, dan integritas.

3. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Dikdasmen.

SPME Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. SPME Dikdasmen dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan. SPME Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BSNP, dan BAN-S/M sesuai dengan kewenangannya.

Siklus SPME Dikdasmen dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang terbagi menjadi tiga kelompok.

- a. Siklus fasilitasi peningkatan mutu. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan, perencanaan peningkatan mutu melalui rencana strategis pembangunan pendidikan, fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan

pendidikan, monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu dan fasilitasi peningkatan mutu secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam melakukan fasilitasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), Kemendikbud dibantu oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Fasilitasi oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh dinas pendidikan provinsi dibantu oleh tim penjaminan mutu pendidikan provinsi dan berkoordinasi serta kerja sama dengan Ditjen Dikdasmen, Kemendikbud. Pemerintah kabupaten/kota melakukan fasilitasi yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dibantu oleh tim penjaminan mutu pendidikan kabupaten/kota dan berkoordinasi serta kerja sama dengan Ditjen Dikdasmen, Kemendikbud.

- b. Siklus pengembangan standar mutu pendidikan dasar dan menengah. Dikembangkan secara berkelanjutan oleh BSNP melalui evaluasi pemenuhan SNP oleh satuan pendidikan, penetapan SNP dan penyusunan strategi peningkatan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan.
- c. Siklus akreditasi satuan pendidikan. Secara berkelanjutan dikembangkan oleh BAN-S/M melalui evaluasi mutu satuan pendidikan, audit mutu eksternal, dan penetapan akreditasi. Dalam menjalankan kewenangannya BSNP dan BAN-S/M memanfaatkan data dan informasi hasil pemetaan mutu pendidikan yang tersedia dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan.

4. Pihak-pihak yang berperan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah:

Pihak-pihak yang berperan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah:

- a. Pemerintah Pusat dthi. Kementerian yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota); dan
- c. Satuan pendidikan.

D. Penjaminan Mutu di Lembaga Pendidikan Sekolah Islam Terpadu

1. Makna Penjaminan Mutu di Lembaga Pendidikan

Penjaminan mutu atau *quality assurance* dalam bahasa inggris. Istilah *assurance* biasanya digunakan dalam transaksi antara produsen dan konsumen (pelanggan). Istilah *assurance secara* populer diterjemahkan dengan arti jaminan. Arti tersebut mengandung makna perlindungan (terhadap pelanggan) akibat kemungkinan dari keadaan yang tidak diharapkan". Mengutip pendapat Ishikawa, mengatakan

bahwa "*quality assurance* dimaksudkan untuk menjamin mutu, dimana konsumen dapat membeli dan menggunakan dengan penuh kepercayaan dan kepuasan serta masih dapat digunakan dalam jangka panjang".⁹

Secara terminologis penjaminan mutu/*quality assurance* sebagai suatu proses pengukuran mutu, menganalisis kekurangan yang ditemukan dan membuat kegiatan untuk meningkatkan performa yang diikuti dengan pengukuran mutu kembali untuk meninjau apakah peningkatan telah dicapai. *Quality assurance* adalah sesuatu kegiatan yang terprogram, suatu siklus kegiatan yang menggunakan standar. Kemudian Lori De Prete Brown, mengemukakan bahwa susunan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan standar-standar dan untuk memonitor juga meningkatkan kinerja guna memastikan pelayanan yang diberikan berjalan dengan selamat. Dan dari organisasi akreditasi eksternal ISO 8402 menyatakan "*quality assurance* adalah kegiatan sistematis dan direncanakan yang dibutuhkan guna menyediakan kepercayaan yang optimal sehingga produk dan pelayanannya memuaskan sesuai dengan syarat mutu"¹⁰.

2. Penjaminan Mutu di Lembaga Pendidikan

Penjaminan mutu merupakan hal penting yang sudah diatur dalam undang-undang, seperti pada Peraturan pemerintah No 19 tahun 2005 tentang SNP menjelaskan bahwa tujuan SNP adalah menjamin mutu pendidikan secara nasional. Sebagai tindak lanjut dari tujuan di atas maka pada sekolah menengah dikenal dengan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Kedua sistem penjaminan mutu ini berfungsi sebagai "quality control" mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah Sistem Penjaminan Mutu pada pendidikan Dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan (Kemdikbud: 2016). Sistem Penjaminan Mutu pada sekolah dasar dan menengah sangat diperlukan karena berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mencapai mutu. Berdasarkan Permendikbut nomer 28 tahun 2016 tentang sistem jaminan mutu pendidikan dasar (SD) dan menengah (SMP) pasal 1 ayat 4 menyatakan, bahwa; "sistem jaminan mutu internal pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disingkat SPMI –Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan proses penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan

⁹ Siti Roskina Mas, *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017), 11

¹⁰ Muhammad Faturrahman, *Quality Assurance di Lembaga Pendidikan*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 61

pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang bermutu untuk memenuhi atau melampaui standar pendidikan Nasional". (didalamnya terkait Sekolah Islam terpadu).

3. Komponen Pendukung Penjaminan Mutu di Lembaga Pendidikan

Dalam lembaga pendidikan hendaknya memiliki dua jaminan mutu baik secara internal maupun eksternal. Karena jaminan mutu eksternal itu berkala dan mengandalkan perintah dari pusat, sementara mutu harus terus terjamin sepanjang pendidikan itu berlangsung. Jaminan mutu internal lebih banyak potensi untuk mewujudkan mutu yang akan dicapai, karena semua yang ada di satuan pendidikan tersebut lebih banyak memahami permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Ada tiga komponen model penjaminan mutu di lembaga pendidikan, yaitu pangkalan data, penjaminan mutu eksternal dan internal: ¹¹

a. Pangkalan Data (data base)

Berbicara mengenai penjaminan mutu maka pangkalan data (data base) merupakan sebuah keharusan dalam organisasi apapun tidak terkecuali organisasi kependidikan seperti sekolah. Sebabnya, semua kebijakan terkait dengan mutu harus didasarkan kepada data. Penerapan penjaminan mutu pendidikan di sekolah akan memastikan bahwa pengelolaan sekolah, proses pembelajaran dan program-program lainnya dijalankan sesuai mutu. Nurmaini (2019) menyatakan Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan. Jelas mutu diartikan dengan pemenuhan kepuasan pelanggan, sebuah sekolah dikatakan bermutu bila mampu memberikan layanan sesuai kebutuhan dan kepuasan pelanggan, dalam hal ini sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagai sebuah proses penetapan dan pemenuhan standar, penjaminan mutu dilaksanakan dengan tiga macam kegiatan data. Adapun data dan informasi dalam sistem penjaminan mutu digunakan untuk: ¹²

- 1) Memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan dan / atau program keahlian;
- 2) Memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Acuan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan.

¹¹ Nurilah Aliyah, *Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan Al-Qur'an Di Sdit Buahati Islamic School 2 Jakarta Timur* (Tesis-S2) Prodi MPI PPs.Institut PTIQ Jakarta 2021), 40.

¹² Nurmaini, M. Meraih Mutu Sekolah Melalui Data Mutu: Suatu Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19: 2 (Juni, 2019) :23

b. Penjaminan Mutu Eksternal

Penjaminan Mutu Eksternal (PME) PME dilaksanakan oleh lembaga eksternal seperti BAS atau lembaga lain yang diakui pemerintah. Dengan demikian, standar yang harus dicapai oleh Satuan Pendidikan ditetapkan oleh lembaga eksternal tersebut. Kegiatan PME adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi bahkan melampaui SNP dalam rangka memberikepuasan kepada 'external stakeholders' seperti orangtua, masyarakat, pemerintah dan lembaga lain yang berkepentingan. Dengan demikian PME disebut juga pertanggungjawaban horisontaleksternal atau *'external-hoizontal accountability'*.

1) Akreditasi

Akreditasi; adalah upaya peningkatan mutu pada lembaga pendidikan salah satunya dengan adanya akreditasi. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 087/U/2002. Keputusan tersebut di perkuat oleh Undang-undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional. Kemudian dijelaskan dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidkan nasional. Akreditasi sekolah/madrasah adalah merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk menjadikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah.¹³ Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, hasil penilaian diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan. Pengakuan dan peringkat tersebut diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan professional.

Tujuan akreditasi sekolah/madrasah adalah (a). Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kelayakan sekolah atau program yang dilaksanakannya melalui SNP (standar nasional pendidikan). (b), Memberikan pengakuan peringkat kelayakan. (c), Memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP, dan (4), Memberikan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik.¹⁴

¹³Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Peranturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal.*

¹⁴ Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, *"Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah tahun 2020,"* (Jakarta: Diknas, 2020), 4

2) ISO 9000 (Internasional Standar Organization 9000)

ISO adalah badan standarisasi Internasional yang mengurus standarisasi barang dan jasa. Badan ini merupakan perkumpulan badan standarisasi Internasional yang beranggotakan negara-negara seluruh dunia. Indonesia dalam ISO diwakili oleh Dewan Standarisasi Nasional (DSN).¹⁵ Tujuan ISO adalah menjamin kesesuaian dari suatu pelaksanaan produksi dan produk (barang dan/jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan atau dirinci oleh pelanggan atau organisasi.¹⁶

c. Penjaminan Mutu Internal

Penjaminan Mutu Internal (PMI) Penjaminan Mutu Internal merupakan komponen penting dalam sistem penjaminan mutu. Karena dengan adanya PMI, organisasi akan terbantu dalam melaksanakan PME. Terbentuknya budaya mutu di sebuah satuan pendidikan adalah juga karena adanya motivasi internal untuk meningkatkan mutu lembaga tersebut. Dengan kata lain, lembaga tersebut harus 'internally driven' dalam melaksanakan penjaminan mutu. Sebuah intitusi dapat menentukan sistem mutunya sendiri tanpa campur tangan lembaga lain seperti penjaminan mutu eksternal yaitu akreditasi, ISO dan lain-lain. Kegiatan PMI pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi bahkan melampaui SNP dalam rangka memberi kepuasan kepada internal stakeholder seperti peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Jaminan mutu internal merupakan proses jaminan secara mandiri oleh lembaga pendidikan. penjaminan mutu internal membantu persiapan lembaga pendidikan untuk menjalani proses penjaminan mutu secara eksternal. Oleh karena itu penjaminan mutu internal harus mampu membuat program-program yang sesuai dengan program pencapaian mutu yang baik.¹⁷ Adapun upaya mewujudkan SPMI tersebut ada delapan kunci utama yang perlu dilakukan:¹⁸

- 1) Sosialisasi SPMI kepada warga sekolah hal ini dapat dilakukan oleh lembaga jaminan mutu, pengawas atau tim penjaminan mutu sekolah.
- 2) Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. bukan otoriter akan tetapi kuat dari sisi visi, misi, kompetensi dalam menerapkan SPMI.

¹⁵ Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara 2014), 438

¹⁶ Vincent Gaspersz, *ISO 9001 : 2000, And Continual Cuality Improvement*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2006), 10

¹⁷ Muhammad Fadhli, "Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* . 04: 02 (September 2020),. 174-175

¹⁸ Nurilah Aliyah, *Manajemen Penjaminan*, 46

- 3) Perubahan paradigm warga sekolah, perlu perubahan pandangan dari kepala sekolah sampai staff bahwa tantangan pendidikan semakin komplek jadi harus bekerja keras agar tidak tertinggal.
- 4) Adanya komitmen antara tim penjaminan mutu dan warga sekolah.
- 5) Berjiwa pemelajar, warga sekolah harus berjiwa pemelajar dan literat.
- 6) Memahami setiap tahapan SPMI. Ketujuh, konsisten dalam melaksanakan SPMI. Kedelapan, pembinaan yang optimal dari tim penjaminan mutu.⁸⁵

Kegiatan PMI merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisonal atau '*internal-hirizaontal accountability*). Sebuah intitusi dapat menentukan sistem mutunya sendiri tanpa campur tangan lembaga lain seperti penjaminan mutu eksternal yaitu akreditasi, ISO dan lain-lain. Penjaminan mutu internal dapat dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Berikut lankah-langkah penjaminan mutu internal menurut Wiyono sebagai mana dikutip oleh Faturrahman adalah sebagai berikut:¹⁹⁸³

- 1) Merencanakan *quality assurance (Planing for QA)*. Yaitu membuat organisasi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan QA, panitia QA mengkaji ulang prioritas mutu yang akan dicapai atau *mereview* visi dan misi sekolah sehingga menghasilkan visi dan misi sekolah yang jelas. Prioritas QA dapat ditentukan melalui visi dan misi sekolah.
- 2) Menyusun standar-standar dan spesifikasi (*setting standards and specifications*) adalah sekolah menyusun standar yang berisi penjelasan mutu yang diharapkan. Sekolah juga menetapkan administrasi prosedur pelaksanaan untuk mencapai standar yang dimaksud.
- 3) Mengkomunikasikan pedoman-pedoman dan standar-standar. Sekolah mengkomukasikan standar mutu dan prosedur operasinya yang telah ditetapkan kepada wali murid dan stakeholder lain. Agar semua memahami, yakin dan mendukung semua proses standar mutu dan prosesnya.
- 4) Monitoring mutu. Pengumpulan data dan *mereview* untuk menilai standar mutu yang ditetapkan telah tercapai atau belum. Disusunnya indikator-indikator pengukuran standar mutu, pengumpulan dan *review* data. Selain sebagai pengukur mutu, indikator juga digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang sedang terjadi dan yang akan terjadi.

¹⁹ Muhammad Faturrahman, *Quality Assurance Di Lembaga Pendidikan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 162

- 5) Mengidentifikasi masalah dan menyeleksi peluang untuk peningkatan mutu. Mutu bukan tujuan akhir namun mutu memerlukan perbaikan terus-menerus yang harus dikembangkan. Cara mengidentifikasi masalah dapat dilakukan dengan observasi, *review*, *interview* dan *brainstorming*.
- 6) Menetapkan masalah-operasionalisasinya. Masalah yang telah diidentifikasi secara jelas maka diupayakan penyelesaiannya dengan langkah-langkah pasti. Masalah dapat diuraikan dan diukur untuk menemukan pemecah masalah tersebut. Seperti menggunakan beberapa pertanyaan 4 W + 1 H.
- 7) Memilih tim identifikasi siapa yang seharusnya bekerja. Setelah langkah keenam telah menetapkan statman masalah maka selanjutnya adalah menentukan tim kecil untuk memecahkan masalah tersebut. Tim ini bertugas menganalisis masalah, membuat perbaikan, melaksanakan, dan melakukan penilaian terhadap peningkatan mutu.
- 8) Analisis masalah dan mengidentifikasi penyebab masalah. Dengan menganalisis masalah dan mengidentifikasi penyebabnya, tim akan memahami masalah dengan jelas. Hal ini akan menghindarkan dari proses pengambilan kesimpulan dengan cepat. Bagian yang perlu dianalisis dan diidentifikasi penyebabnya meliputi: a) pernyataan masalah dan penjelasan masalah. b) mempelajari proses permasalahan. c) membuat dugaan tentang penyebab masalah. d) tes dugaan dan menentukan penyebabnya.
- 9) Membuat solusi dan rencana kegiatan peningkatan mutu. Solusi yang telah ditentukan terkadang gagal dalam prakteknya. Oleh karena itu perlu memperhatikan langkah-langkah berikut: a) menentukan dan menggambarkan semua solusi. b) semua solusi potensial di daftar. 3) seleksi solusi terbaik berdasarkan kriteria. 4) pilih solusi penyelesaian masalah untuk peningkatan mutu. c) sampaikan solusi secara praktis dan mudah dilaksanakan.
- 10) Melaksanakan dan mengevaluasi upaya peningkatan mutu. Untuk melaksanakan solusi maka diperlukan sebuah pendekatan, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah siklus yang dikenal dengan singkatan PDCA (*plan, do, check, action*) yaitu perencanaan pelaksanaan, melaksanakan solusi, mengikuti pelaksanaan dan hasilnya, sertamembuat keputusan terhadap solusi tersebut.

TUGAS MAHASISWA:

- Mengidentifikasi, mengabstrasikan 4 poin penting dari kajian Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pendidikan yaitu:
 - Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 - Kebijakan Pengembangan Sistem penjaminan mutu Pendidikan
 - Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pendidikan Tinggi
- Temukan Esensi/Nilai dari 4 poin penting dari kajian di atas. Tulis pada kolom summary maksimal 10 kalimat
- Batasi Penulisan maksimal 500 kata berdasar word count.

LEMBAR CATATAN KULIAH (CK)

Hari/Tanggal :
Mata Kuliah :
Metode :
Oleh : NIM :
JURUSAN :

Resensi Rangkuman:

A Esensi/isi /Sub Materi

B Esensi/isi /Sub Materi

C Esensi/isi /Sub Materi

D Esensi/isi /Sub Materi

summary:
Temukan Nilai/Natijah/Korokasi dari empat sub materi

Ket:
Penulisan maksimal 500Kata

Isi /Aplod Foto Resmi Mu

Isi Identitas MK & Individu

Isi /aplod Foto Individu

Metode yang digunakan dalam penulisan CK dan Assigment ini, menggunakan metode Inkuiri:

Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru/dosen. Metode inkuiri memungkinkan para peserta didik menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya, karena metode inkuiri melibatkan peserta didik dalam proses-proses mental untuk penemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diberikan guru. (Sumantri dan Johar Permana 2000:142).@

- Buatkan POSTER untuk Prosentasi

PROFIL PENULIS



Prof. Dr. H. A. Rusdiana, Drs., MM. Lahir di Puhun Ciamis, tanggal 21 April 1961, merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara pasangan Bapak Sukarta (Alm), dengan Ibu Junirah. Sejak kecil mengikuti orang tua di Dusun Puhun Desa Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis. Tamat Sekolah Dasar di SD Cinyasag I, tahun 1975. Madrasah Tsanawiyah di Panawangan Ciamis lulus tahun 1979, Madrasah Aliyah Bandung lulus 1982, S-1, Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1987, S-2 Magister Manajemen Institut Manajemen Indonesia Jakarta lulus tahun 2002, dan menyelesaikan S-3 Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Universitas Islam Nusantara Bandung, lulus tahun 2012, dengan Disertasi “Implentasi Kebijakan WASDALBIN Menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi. Sesuai dengan moto hidupnya “belajar dan mengabdikan”, Ia mengabdikan sebagai Dosen Manajemen Pendidikan pada Fak. Tarbiyah dan Keguruan dan Pascasarjana UIN Bandung. Pangkat Lektor Kepala Golongan IV/c. TMT April 2019.

Mengampu Mata Kuliah: Kebijakan Pendidikan, Manajemen Kantor, Manajemen SDM Pendidikan, Manajemen Pembiayaan Pendidikan; Manajemen Sistem Informasi Pendidikan; Manajemen Kewirausahaan pendidikan. Organisasi Lembaga Pendidikan; Etika Komunikasi Organisasi.

Sampai saat ini, telah menulis buku ajar, Pengantar Manajemen (Tresna Bhakti, 2002), Manajemen SDM (Tresna Bhakti, 2007), Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Tresna Bhakti, 2008), Pendidikan Kewarganegaraan (Tresna Bhakti, 2009), Sosiologi Pendidikan (BatiC 2010), Antropologi Pendidikan (BatiC 2011); Kebijakan Pendidikan (Lemlit UIN SGD, 20014); Organisasi Lembaga Pendidikan (PPs. UIN SGD, 2015); Manajemen Kantor (Lemlit UIN SGD, 2016). Manajemen Kewirausahaan (UHS, 2017). Filsafat Ilmu (Lemlit UIN SGD, 2018).

Buku teks: Dasar-Dasar Manajemen (Pustaka Tresna Bhakti Bandung, 2002); Manajemen Sumber Daya Manusia (Pustaka Tresna Bhakti, 2008); Manajemen Sumber Daya Manusia (Arsad Bandung, 2012); Manajemen Kewirausahaan Kontemporer (Arsad, 2012); Pendidikan Kewirausahaan (Insan Komunika Bandung, 2012); Membangun Desa Peradaban Berbasis Pendidikan (Insan Komunika Bandung, 2012); Manajemen Kurikulum (Arsad Bandung, 2013); Manajemen Keuangan Sekolah (Arsad Bandung, 2013); Konsep Inovasi Pendidikan (Bandung, 2014); Kewirausahaan (Pustaka Setia, 2014); Manajemen Perkantoran Modern (Insan Komunika, 2014); Asas-asas Manajemen berwawasan Global (Pustaka Setia, 2014); Sistem Informasi Manajemen (Pustaka Setia, 2014); Manajemen Operasi (Pustaka Setia, 2014); Pendidikan Nilai (Pustaka Setia, 2014); Kebijakan Pendidikan (Pustaka Setia, 2015); Pendidikan Multikultural (Pustaka Setia, 2015); Evaluasi Pembelajaran (Pustaka Setia, 2015); Manajemen Konflik (Pustaka Setia, 2015); Pengelolaan Pendidikan (Pustaka Setia, 2015); Pendidikan Profesi Keguruan (Pustaka Setia, 2015); Manajemen Pendidikan dan Pelatihan (Pustaka Setia, 2015). Manajemen Perubahan (Pustaka Setia,

2016); Pengembangan Organisasi Lembaga Pendidikan (Pustaka Setia, 2016); Sistem Pemikiran Manajemen Pendidikan (Pustaka Setia, 2017); Komunikasi Informasi Teknologi Pendidikan (Pustaka Setia, 2017); Manajemen Evaluasi Program Pendidikan (Pustaka Setia, 2017); Auditing Syari'ah (Pustaka Setia, 2018). Pengembangan Perencanaan Program Pendidikan (Pustaka Setia, 2019). Manajemen Pendidikan Karakter (Pustaka Setia, 2019). Manajemen Pengembangan Human Capital (Yarama Widya, 2020); Manajemen Mutu terpadu (Yarama Widya, 2021).

Penelitian: Strategi Pengembangan IAIN Bandung (Tesis) (2002); Profil Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung. (Studi Analisis tentang Latar belakang Fotensi, Model Motivasi Pengembangan Diri Mahasiswa). (2009); Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) (Penelitian di MTs Al-Mishbah Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung) (2010); Strategi Akselerasi peningkatan Mutu Jurusan/Program Studi di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung. (2011); Implementasi Kebijakan WASDALBIN menuju akuntabilitas PT. (Disertasi) (2012); Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Keterampilan Wirausaha Produk Beras Ketan (di Desa Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis). (2012); Studi Evaluatif Pembelajaran MK Ke-Islaman di Fak. Sains dan Teknologi UIN SGD.(2013); Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Belajar Usaha (KBU) Di Pusat Kediatan Belajar Masyarakat Tresna Bhakti Ds. Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis (2013); Penerapan Pendidikan Karakter melalui pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan (PAKEM) di MTs. Al-Mishbah Cipadung Bandung. (2014); Perubahan Perilaku Sosial Keagamaan di Desa Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis, (2015); Implementasi Kebijakan EMIS, menuju Akuntabilitas PTKIS Jabar-Banten (2016); Peran Pimpinan PTKIS dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum KKNi, menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi (2017).; Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI (2018). Kesiapan Manajemen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten (2019). Manajemen Pembelajaran Daring Dalam Upaya Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19. (Studi pada Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah IAILM Suryalaya KOPERTAIS Wilayah II Jawa Barat) (2020). Manajemen Pengembangan Human Capital Tenaga Kependidikan Menuju Perguruan Tinggi Unggul, 2021); Serta telah menulis Jurnal tidak kurang dari 35 Jurnal; 21 jurnal Nasional dan 14 Jurnal internasional. Sejumlah karya Ilmiah di atas dapat diakses melalui: <http://digilib.uinsgd.ac.id/>.

Pengabdian kepada masyarakat. Ia, membina dan mengembangkan Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Misbah Cipadung-Bandung yang menyelenggarakan pendidikan Diniyah, RA, MI, dan MTs, sejak tahun 1984-Sekarang, serta garapan khusus "Bina Desa" melalui Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat Tresna Bhakti, yang didirikannya sejak tahun 1994 dan sekaligus sebagai Pembina Yayasan, kegiatannya pembinaan dan pengembangan asrama mahasiswa pada setiap tahunnya tidak kurang dari 50 mahasiswa di Asrama Tresna Bhakti Cibiru Bandung. Membina dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tresna Bhakti sejak tahun 2007 di Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan Kab. Ciamis.